



REKONSTRUKSI PEMIKIRAN

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

UNTUK MENGEMBANGKAN SOFT SKILLS DAN KARAKTER
SUMBER DAYA MANUSIA

INDUSTRI KREATIF



DR. PURNOMO ANANTO, MM.

JAKARTA, 2021



REKONSTRUKSI PEMIKIRAN

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

UNTUK MENGEMBANGKAN SOFT SKILLS DAN KARAKTER
SUMBER DAYA MANUSIA

INDUSTRI KREATIF

DR. PURNOMO ANANTO, MM.



**POLIMEDIA
PUBLISHING**

C1/10/2021

Judul Buku:

Rekonstruksi Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mengembangkan Soft Skills dan Karakter Sumber Daya Manusia Industri Kreatif

Penulis:

Dr. Purnomo Ananto, M.M.

Editor:

Ingrid Veronica Kusumawardani, S.S., M.Pd.

Desain Sampul:

Sandy Karina, S.Ds.

Penata Isi:

Rizky Yusuf Ariestyanto

Jumlah Halaman:

vi + 290 halaman; 15 x 23 cm

Oktober 2021

Diterbitkan oleh:

Polimedia Publishing

Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640

Telepon : 0812 1814 4224

Email : polimediapublishing@gmail.com

ISBN: 978-602-6372-81-9

©2021, HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Polimedia Publishing.

❖ Kata Pengantar ❖

Buku ini menyajikan bagaimana penulis ingin merekonstruksi pemikiran pendidikan kewarganegaraan guna mengembangkan kecakapan hidup dan karakter sumber daya manusia industri kreatif melalui sebuah penelitian. Melalui penerapan teori pendidikan sebagai alat integrasi sosial yang berperan sebagai agen penanaman nilai, antara lain melalui teori pendidikan adalah kekuatan, pendidikan merupakan investasi bagi pengembangan sumber daya manusia (*Human Capital*), serta teori tindakan sosial atau *Action Theory* dengan skema AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*). Melalui pendekatan kualitatif. Untuk mengeksplorasi dan menemukan rekonstruksi pemikiran yang tepat peneliti mengandalkan subyek yang diteliti secara mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui: Kajian Pustaka, wawancara, dan observasi. Data tersebut oleh penulis diolah melalui proses reduksi, analisis dan triangulasi. Pada buku ini juga disajikan tentang peran pendidikan dalam mendorong pengembangan SDM Industri Kreatif yang telah menjadi bagian penting dari perkembangan dan peluang dalam globalisasi untuk membuka lapangan kerja baru, selain itu juga disajikan tentang Pendidikan Kewarganegaraan sebagai medium pendidikan karakter dengan mengimplementasikan pendekatan Pendidikan Kecakapan hidup untuk meningkatkan soft skills pada berbagai materi yang terdapat dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan.

❖ DAFTAR ISI ❖

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	v
Bab I : Pendahuluan	1
Bab II : Rekonstruksi Pemikiran dalam Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan	27
Bab III : Konteks dan Konsep Pendidikan Kewarganegaraan	55
Bab IV : Pengembangan Sumber Daya Manusia	91
Bab V : Cara Melakukan Rekonstruksi Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan	113
Bab VI : Lemahnya Penerapan Merit System Serta Peran Pendidikan dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Industri kreatif	135
Bab VII : Rekonstruksi Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mengembangkan Kecakapan Hidup dan Karakter Sumber Daya Manusia Industri Kreatif	183
Bab VIII : Hasil Rekonstruksi Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan.....	261
Bab IX : Penutup	267
Daftar Pustaka	270

BAB I

Pendahuluan

Dampak Pandemi Covid-19 ternyata sangat luas dalam mempengaruhi kehidupan. Dampak ini bahkan belum pernah dirasakan umat manusia baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, segi sosial lainnya pada masyarakat. Dampak tersebut kemungkinan akan membayangi pikiran manusia secara buruk dan baik pada tahun-tahun mendatang. Hal ini, tentu saja, berdampak juga pada bagaimana kita bekerja, di mana kita tinggal, dan seperti apa perkembangan industri di masa depan. Agar dapat beradaptasi dengan dampak tersebut, kita perlu memiliki kerangka pikiran yang futuristik untuk menghadapi perubahan jangka panjang, tantangan, dan peluang yang akan terjadi setelah pandemic Covid-19 ini, terutama krisis ekonomi, persaingan pekerjaan, pendidikan, perawatan kesehatan, rpasokan dan kebiasaan konsumsi, serta dinamika lainnya.

Kerisauan utama yang dirasakan oleh penulis saat ini adalah adanya kesenjangan yang cukup lebar antara kerangka konseptual yang ada mengenai pendidikan dan kenyataan setelah Pandemi Covid-19 yang berlangsung dalam praktik dunia pendidikan saat ini dan masa yang akan datang. “Pendidikan adalah kegelisahan sepanjang zaman. Tidak terkecuali para pelaku pendidikan dibuat gelisah oleh fenomena dan realitas atau wujud dan perwujudan pendidikan nasional” (Malik Fajar, A. 2012:4). Permasalahan tersebut muncul sebagai dampak masa transisi yang dihadapi bangsa Indonesia bahkan mungkin secara global. Transisi internal berasal dari proses demokratisasi yang masih rentan konflik dan kepentingan politik. “Sebagai bagian tak terpisahkan dari pergerakan kebangsaan, maka dinamika perjalanan pembangunan maupun pelaksanaan pendidikan nasional tidak pernah bebas dan dibebaskan dari tarik-menarik kekuatan dan kepentingan politik (dalam arti luas)”. (Malik Fajar A. 2012:3).

“Masalah yang sebenarnya menjadi perdebatan akademik itu kemudian dipecahkan melalui kekuasaan birokrasi dengan mengakali perbedaan semantik yang diciptakan untuk membedakan pengertian evaluasi dan penilaian, seperti halnya mengganti kenaikan harga dengan penyesuaian harga”. (Sutjipto. 2012:228)

Sedangkan transisi eksternal berasal dari derasnya arus globalisasi yang menyediakan peluang sekaligus ancaman baru. Selain itu, sistem pendidikan nasional yang ada masih mengutamakan kemampuan akademik, bahkan cenderung pengetahuan semata. Sebagai contoh, Ujian Nasional (UN) masih terlalu dominan digunakan untuk menentukan seorang peserta didik lulus atau tidak lulus. Terjadi distorsi dalam koordinasi antara Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005, dalam UU No.20 tahun 2003 pasal 57 menyebutkan bahwa *Evaluasi dilaksanakan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan*. Namun, dalam PP 19 Tahun 2005 Pemerintah mengadakan UN untuk melakukan evaluasi yang digunakan sebagai penentu kelulusan peserta didik dari suatu program dan/ atau satuan pendidikan.

“UN juga mengabaikan muatan kurikulum yang menganut prinsip kemajemukan potensi daerah dan peserta didik. Sebab menurut pasal 36 ayat 2 UU Sisdiknas, kurikulum harus dikembangkan dengan menggunakan prinsip kemajemukan (*diversifikasi*) potensi daerah dan potensi peserta didik. UN juga telah merampas kewenangan guru dan sekolah untuk melakukan evaluasi hasil belajar dan menentukan kelulusan peserta didik. Pasal 58 ayat 1 dan pasal 62 ayat 2 UU Sisdiknas menyatakan evaluasi hasil belajar dan penentuan kelulusan peserta didik dilakukan oleh guru dan satuan pendidikan (sekolah)”. (Lutfi, M. dan Halim F.A. 2013:35)

Sebenarnya, pendidikan, khususnya melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, seharusnya mampu berperan sebagai katalisator pembentuk jatidiri bangsa yang diharapkan tidak hanya mampu mencetak warganegara yang siap bersaing di era globalisasi namun juga mampu membangun dan memperkuat identitas kebangsaannya. “Sebuah Pendidikan dalam artian yang lebih luas, bukan sekadar untuk memperoleh titel kesarjanaaan, tetapi untuk mendorong munculnya kebudayaan

dan peradaban unggul yang dikembangkan oleh warganya”, (Hidayat, Komaruddin, 2012:110)

Kondisi transisional yang berasal dari dinamika internal bangsa dan eksternal dinamika global akan dapat mempengaruhi kebutuhan sumber daya manusia, terutama pada lemahnya penerapan merit sistem untuk melindungi karir aparatur birokrasi (ASN) khususnya di daerah-daerah dari kekuasaan politik, sehingga mempunyai dampak terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kondisi transisional tersebut kurang dapat direspon oleh sistem pendidikan kita dalam menyiapkan para calon penerus bangsa.

Selain itu, *life skills education* atau pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan karakter, belum dapat dijadikan bagian penting dari kurikulum pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan maupun mata pelajaran/ kuliah lainnya. *Life skills are the abilities for adaptive and Positive behaviour that enables the individual to deal effectively with the demands and challenges of everyday life* (Singh, D. and Kaur, J. 2013:168). Memperhatikan hal tersebut, penulis berkeyakinan mampu mengambil peran penting dalam menghadapi perubahan bahkan tuntutan dan tantangan hidup yang diperlukan oleh generasi muda dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang industri kreatif yang tengah didorong oleh pemerintah sebagai kekuatan baru untuk menunjang perekonomian bangsa Indonesia. Industri kreatif dapat dijadikan sebagai alternatif pemecahan permasalahan dalam minimnya ketersediaan lapangan kerja.

Namun, ironisnya saat ini pendidikan kewarganegaraan dalam konsep *citizenship education* masih menempatkan pengalaman sebagai basis pendidikan akademik saja. Padahal seharusnya konsep ini mampu menempatkan pendidikan kecakapan hidup sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan yang mampu berperan sebagai katalisator pendidikan karakter. sehingga nampaknya upaya merekonstruksi pemikiran pendidikan kecakapan hidup dalam pendidikan karakter pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk mengembangkan sumber daya manusia di bidang industri kreatif, harus dilakukan, agar bangsa Indonesia di masa yang akan datang dapat tumbuh dan berkembang sebagai bangsa yang maju dan mampu mengatasi tantangan dalam perkembangan zaman..

Indonesia Bangsa Majemuk

Indonesia adalah bangsa yang lahir dari kemajemukan etnis, ras, agama, bahasa, dan kebudayaan. Indonesia juga memiliki tanah air yang sangat luas, Diapit oleh dua benua besar, yaitu Benua Asia di sebelah Barat Laut dan Benua Australia di sebelah Tenggara. Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia di sebelah Barat dan Selatan dan Samudra Pasifik di sebelah Timur Laut. (Sutarto, dkk 2008:4) dengan jumlah pulau yang lebih dari 17.000 pulau dan berdasarkan hasil sensus penduduk yang ada di Indonesia, data terakhir tercatat pada tahun 2015 sebesar 238.518.000 jiwa dan diproyeksikan pada 2020 akan meningkat sebanyak 271.066.000 jiwa. Selanjutnya BPS juga memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 mencapai 319 juta jiwa. (sumber : <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/060000069/jumlah-penduduk-indonesia-2020?page=all.>), 5 Januari 2021.

Kekayaan alam Indonesia di masa lalu telah menghasilkan kejayaan bagi kerajaan-kerajaan yang berdiri di bentang kepulauannya. Kekayaan ini juga yang terdengar hingga seluruh penjuru dunia dan mengundang para pendatang bersaing untuk menemukan wilayah kepulauan ini. Berbagai mitos mengenai pulau emas dan pulau perak yang eksotis bermunculan dari berbagai fable (Dongeng/kisah legenda) di seluruh dunia untuk menjelaskan betapa kayanya kepulauan nusantara. Pala, tanaman khas pulau Maluku di Timur Indonesia juga pernah menjadi komoditas termahal di dunia. Daya tarik ini akhirnya tidak hanya menarik perhatian untuk berdagang namun juga ambisi untuk menjajah. Gambaran tersebut dibuktikan dalam sejarah Indonesia yang sempat jatuh ke tangan para penjajah Eropa dan Asia. Akibatnya, rakyat Indonesia memerlukan perjuangan besar untuk memerdekakan diri dari penjajahan asing.

Setelah perang kemerdekaan, Indonesia jatuh dalam krisis politik yang tidak panjang. Hingga akhirnya, rezim militer menguasai Indonesia, segala krisis dapat diredam, masyarakat dapat dikendalikan, kemudian

pembangunan ekonomi pun terwujud. Namun, pada akhir kejayaannya, rezim militer yang menyebut diri sebagai orde baru, sebagai antitesa orde lama, mulai melemah dan runtuh oleh krisis ekonomi yang melanda Asia.

“Pada masa Orde Baru ini terjadi Perubahan Signifikan terhadap regulasi Investasi di Indonesia, pada masa ini Pemerintah gencar menarik investasi asing dalam bentuk Prnanaman Modal Asing (PMA), Pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan yang berorientasi pada ekonomi pasar. Pemerintah Orde Baru melihat bahwa PMA merupakan media penting bagi transformasi sumber daya melimpah di Indonesia untuk meningkatkan pembangunan ekonomi” (Hadi, Syamsul. dkk, 2012:17)

Pada tahun 1998, Asia dilanda krisis moneter dunia yang juga dialami oleh negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia tidak luput dari krisis ekonomi tersebut hingga terjadi krisis besar yang menghasilkan runtuhnya kekuasaan Orde Baru. Namun, krisis berkelanjutan menyerang ke segala aspek melampaui batas-batas ekonomi dan politik lalu menimbulkan hysteria massa dan kepanikan yang membutuhkan waktu panjang untuk mencapai stabilitas. Sejak saat itu, masuklah Indonesia pada era baru yang diiringi dengan berbagai perubahan, salah satunya adalah liberalisasi di bidang keuangan yang berdampak pada seluruh sektor pembangunan.

“Saat ini, Indonesia sedang berhadapan dengan liberalisasi keuangan global. Dampak yang dirasakan antara lain pesatnya pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan serta dinamisnya pasar modal yang tercermin dari meningkatnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Derasnya arus dana masuk ke dalam sistem keuangan Indonesia memberikan beberapa konsekwensi. Dinamisnya pasar financial dan pasar modal justru menimbulkan tekanan bagi produktivitas perekonomian, seperti meningkatnya beban anggaran pemerintah karena meningkatnya kewajiban suku bunga. Aliran modal masuk ini sifatnya juga sebagai dana panas karena penempatannya bukan pada direct investment, tetapi lebih kepada penempatan pada instrumen investasi yang sifatnya mudah untuk ditarik keluar kembali”. (Hadi, Syamsul, 2012:51)

Perubahan yang terjadi pada masa pasca Orde Baru yang lebih dikenal sebagai masa reformasi ini adalah perubahan transisional yang melibatkan seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara. Perubahan yang terutama adalah lepasnya Indonesia dari pusaran krisis ekonomi global dan terciptanya kesejahteraan. Pemerintahan Orde Baru yang serba monolitik dirasakan menghambat perubahan dan memperlambat jalan Indonesia ke luar dari krisis. Oleh karena itu, keran-keran kebebasan mulai dibuka kembali melalui agenda reformasi. Berbagai perubahan yang dilakukan di masa reformasi merupakan bagian dari satu agenda besar yaitu demokratisasi. Demokratisasi yang berupaya mengembalikan kekuasaan politik dan ekonomi ke tangan rakyat sesuai dengan prinsipnya yang dikumandangkan oleh Abraham Lincoln “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Demokrasi yang menjadi harapan baru di tengah krisis juga diyakini oleh sebagian masyarakat dapat membawa perbaikan politik dan ekonomi, tepatnya, membawa kesejahteraan.

Namun dunia dikejutkan dengan terpilihnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membuka mata dunia bahwa demokrasi AS tidak seluar biasa seperti lazimnya kita percaya. Tidak ada isi Konstitusi atau budaya AS yang membuat Amerika Serikat kebal terhadap kerusakan demokrasi. Demokrasi bias mati karena kudeta atau mati pelan-pelan. Kematian itu bias tak disadari selangkah demi selangkah, dengan terpilihnya pemimpin otoriter, disalahgunakannya kekuasaan pemerintah, dan penindasan total atas oposisi. Ketiga langkah itu sedang terjadi di seluruh dunia dan kita semua mesti mengerti bagaimana cara menghentikannya. (Steven Levitsky & Daniel Ziblitz : 2019)

Demokratisasi membuka celah kebebasan yang sebelumnya tidak diperoleh semasa orde dan menjadi kejutan bagi masyarakat yang selama puluhan tahun hidup dalam sistem yang dianggap sebagai bentuk kediktatoran. Setelahnya, berbagai peluang muncul, baik dalam hal politik maupun ekonomi. Kemunculan peluang tersebut tentu dibarengi dengan berbagai risiko yang harus dihadapi.

“Reformasi tahun 1998 telah melahirkan komitmen untuk menempatkan demokrasi sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara mendasar, sistem demokrasi kita adalah nilai-nilai yang berasaskan musyawarah untuk mufakat, yang berakar pada *demokrasi desa*, yang telah tertanam berabad-abad di Kepulauan Nusantara. Kemudian sifat dasar demokrasi ini berinteraksi dengan nilai-nilai demokrasi liberal Barat, terlebih lagi sejak jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998”. (Dault, A., 2012:104)

Setelah 15 tahun berselang, keruntuhan Orde Baru yang disebut sebagai gerbang demokratisasi Indonesia (Era Reformasi) ternyata tidak juga berhasil memulihkan krisis ekonomi di Indonesia. Krisis ekonomi yang berkepanjangan, ketimpangan pembangunan antardaerah yang terus melebar, konflik antarkelompok yang merebak di hampir seluruh gugusan kepulauan Indonesia, dan rangkaian kejadian beruntun lainnya telah menurunkan rasa percaya diri sebagian rakyat tentang kemampuan bangsa ini untuk melanjutkan cita-cita proklamasi sebagai sebuah negara kesatuan.

Menurunnya rasa percaya diri sebagai bangsa yang besar ini kemudian dilanjutkan dengan pencarian kembali nilai-nilai komunal, etnis dan religi. Berbagai sentimen lokalitas yang muncul dan mengarah pada sentimen primordialisme. Kelompok-kelompok adat berubah menjadi kelompok politikberbed yan tidak terlalu berbeda dengan kelompok-kelompok agama. Ancaman disintegrasipun bermunculan meski secara perlahan dimoderasi menjadi tuntutan pemekaran daerah, yang pada akhirnya dapat dijadikan indikator dari “rasa haus kekuasaan”. Di sisi lain tingkat pengangguran yang tinggi mengakibatkan merebaknya kekerasan dan tingkat kriminalitas di hampir seluruh pelosok negeri.

Keadaan ini diperparah dengan lemahnya penegakan hukum yang melahirkan ketidakpercayaan publik terhadap hukum dan muncul melalui tindakan “main hakim sendiri” atau vigilantisme yang sering terjadi di masyarakat. Dalam kondisi ini proses disintegrasi tidak hanya terjadi pada konteks disintegrasi bangsa namun meluas hingga potensi disintegrasi sosial yang dapat dilihat lewat kemunculan vigilantisme atau bahkan ketidakpatuhan sipil (*civil disobedience*). Masa krisis adalah masa yang penuh paradox, begitupun dengan masa transisi, segala sesuatu yang

terpendam selama puluhan tahun di Indonesia tiba-tiba terkuak. Berbagai potensi konflik yang sebelumnya ditekan muncul ke permukaan. Perilaku-perilaku tidak terduga muncul menjadi kejutan tragis.

Pada saat pesimisme dan gejolak semacam ini tumbuh, di tingkat global juga terjadi perubahan konstelasi kekuatan politik-ideologi yang berdampak pada penataan ulang komposisi kehidupan bangsa-bangsa yang tidak jarang berlanjut pada gugatan eksistensi suatu bangsa. Semua bangsa mulai beradaptasi dan mengadopsi satu sitem dunia yaitu demokrasi dan semua elemen-elemen yang tidak demokratis mulai digantikan secara bertahap. Di Indonesia, tahapan ini masuk dalam agenda reformasi yang bertujuan membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik, demokratis, dan sejahtera.

Periode transisi ini dialami hampir seluruh negara berkembang di dunia yang ditandai dengan jatuhnya rezim-rezim militer. Dengan runtuhnya negara-negara diktator yang membatasi pasar bebas dan negara komunis yang anti pasar bebas, runtuh pula batas-batas negara dalam ekonomi dunia. Kini, era perang dingin telah berganti dengan era globalisasi.

Globalisasi pada dasarnya memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa/negara dan antarmanusia di seluruh dunia melalui ekonomi dan perdagangan, penanaman modal dan investasi, perjalanan dan wisata atau bisnis, budaya populer, politik, serta bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi. Istilah ini sering dipertukarkan. Era globalisasi ditandai oleh pasar bebas yang melepas batas-batas negara dan mengintegrasikannya dalam aturan pasar internasional. Globalisasi membuka peluang bagi negara-negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan dengan membangun kesejahteraannya melalui distribusi modal dari negara maju dalam bentuk investasi. Sebaliknya, bagi negara maju, investasi perlu dilakukan untuk mengakumulasi modal domestik dan melanggengkannya. Peluang inilah yang menjadi kompetisi besar dalam percaturan ekonomi politik dunia.

Pada masa persaingan global saat ini, batas antarnegara semakin kabur, dan informasi mengalir dengan derasnya antarnegara/bangsa tanpa adanya saringan yang ketat. Dalam keadaan yang demikian, tidak ada pilihan yang paling tepat bagi setiap negara kecuali meningkatkan kemampuan untuk bersaing dengan negara lain secara sehat di berbagai bidang kehidupan, yaitu bidang ekonomi, penguasaan teknologi, sosial-budaya, dan diplomasi internasional. Setiap warga negara semakin berpeluang untuk menghasilkan produk barang dan atau jasa serta memasarkannya ke belahan dunia lain. Namun demikian, hanya negara yang memiliki manusia-manusia yang kreatiflah yang akan berhasil dalam memenangkan persaingan.

Tatanan politik dunia mengalami perubahan secara struktural menuju era persaingan global, di mana bangsa-bangsa yang memiliki kekuatan daya saing akan menjadi salah satu kekuatan dunia. Dalam persaingan antarbangsa, stabilitas kehidupan suatu bangsa serta hubungan antarbangsa akan semakin memainkan peran yang menentukan. Walaupun persaingan antarbangsa terus meningkat, semua negara di dunia akan semakin bergantung satu sama lain, bahkan terjadi intervensi antarnegara yang sering melampaui batas-batas ideologi dan kedaulatan masing-masing. Oleh karena itu, di era globalisasi tumbuh keinginan yang semakin dalam untuk memperkuat identitas dan kepribadian bangsa masing-masing.

“Transnational processes such as economic, political, and culture globalization confront the social sciences with a series of theoretical and methodological challenges. Such challenges arise out of the fact that the global – whether an institution, a process, a discursive practice, or an imaginary – simultaneously transcends the exclusive framing of national states yet partly inhabits national territories and institutions. Seen this way, globalization is more than the common notion of the growing interdependence of the world generally and the formation of global institutions. But if the global, as I argue, partly inhabits the national, it becomes evident that globalization in its many forms directly engages two key assumptions in the social sciences”. (Sassen, 2007 : 3)

Globalisasi sebagai aktifitas ekonomi juga tak hanya berbicara soal investasi dan modal namun juga masalah pasar tenaga kerja. Globalisasi membuka peluang bagi semua orang untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja melalui kualitas yang dimiliki oleh masing-masing. Pasar tenaga kerja menempatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah negara menjadi aspek yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi negara tersebut karena melalui sumber daya manusia yang berkualitas, kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi negara dapat tercapai.

Pertumbuhan ekonomi cenderung berkorelasi searah dengan penguasaan IPTEK yang dapat memacu produktivitas industri nasional di semua sektor ekonomi. Hubungan ini semakin kuat dalam era persaingan bebas dalam kerangka ACFTA (*The Asean-China Free Trade Association*) dan APEC (*The Asia-Pacific Economy Cooperation*). Hal ini terjadi karena Indonesia memiliki kekuatan yang cukup besar dan terbukti dengan pertumbuhan ekonomi yang masih positif setelah China, pada saat negara-negara lain di dunia mengalami pertumbuhan negatif sebagai akibat krisis global pada tahun 2009.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2012 berada pada peringkat kedua dunia dengan capaian angka pertumbuhan sebesar 6,4 persen. Pertumbuhan Indonesia terbaik kedua di dunia setelah China di urutan pertama yang mencapai 8,7 persen, pencapaian angka pertumbuhan tersebut patut dibanggakan karena Indonesia berhasil mencapai angka pertumbuhan yang tinggi dalam kondisi perekonomian global yang masih dalam ketidakpastian. Dengan hasil tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat harus tetap konsisten menjaga dan menjalankan pembangunan sejalan adanya tantangan global yang cukup berat.

“Ekonomi Indonesia terus tumbuh di tengah gelombang panjang resesi dunia. Ekspektasi publik terhadap kesejahteraan membesar hati. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2012 menembus US\$845 miliar, peringkat 16 dunia. PDB Indonesia naik enam kali lipat dibanding 1999 sebesar US\$140 miliar. PDB per kapita juga naik delapan kali lipat, dari US\$481,9 pada 1998 menjadi US\$3.850 pada 2012 atau sekitar Rp37 juta per tahun/Rp3 juta per bulan”. (Masykur, Ali. M. 2013:xii)

Seperti diketahui, Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,55 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 10,62 persen. Pada triwulan IV-2019 dibanding triwulan IV-2018 tumbuh 4,97 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,78 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,97 persen. Jika dibandingkan antara triwulan IV-2019 dengan triwulan III-2019, terlihat kontraksi sebesar 1,74 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami penurunan 20,52 persen. Dari sisi pengeluaran, disebabkan oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mengalami kontraksi sebesar 2,55 persen. Secara keseluruhan, struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 59,00 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32 persen, dan Pulau Kalimantan 8,05 persen.

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 137,91 juta orang, naik 1,73 juta orang dibanding Februari 2019. Berbeda dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 0,15 persen poin. Dalam setahun terakhir, pengangguran bertambah 60 ribu orang, berbeda dengan TPT yang turun menjadi 4,99 persen pada Februari 2020. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih yang paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 8,49 persen. Penduduk yang bekerja sebanyak 131,03 juta orang, bertambah 1,67 juta orang dari Februari 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terutama Jasa Pendidikan (0,24 persen poin), Konstruksi (0,19 persen poin), dan Jasa Kesehatan (0,13 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terutama pada Pertanian (0,42 persen poin), Perdagangan (0,29 persen poin), dan

Jasa Lainnya (0,21 persen poin). Sebanyak 74,04 juta orang (56,50 persen) bekerja pada kegiatan informal. Selama setahun terakhir (Februari 2019–Februari 2020), persentase pekerja formal meningkat sebesar 0,77 persen poin. Persentase tertinggi pekerja pada Februari 2020 adalah pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu) sebesar 69,90 persen. Sementara itu, pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua, yaitu pekerja paruh waktu (23,74 persen) dan pekerja setengah penganggur (6,36 persen). Dalam setahun terakhir, persentase pekerja setengah penganggur turun sebesar 1,01 persen poin, sedangkan persentase pekerja paruh waktu meningkat sebesar 1,07 persen poin. (Sumber : http://bps.go.id/pressrelease_2020/05/05/1672/februari-2020. 7 Januari 2021.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi ekonomi pada masa mendatang, pendekatan pembangunan yang lebih menyandarkan pada peranan Sumber Daya Alam (SDA) secara sepenuhnya semakin tidak tepat dan perlu dihentikan karena ketersediaan SDA yang semakin terbatas, terutama sumberdaya yang tidak terbarukan (*unrenewable*) (www.esdm.go.id/berita). 7 Januari 2021. Pembangunan harus lebih mengandalkan pada kekuatan manusia yang mampu menguasai, mengembangkan, dan memanfaatkan kecakapan hidup (*Soft Skills*) serta keterampilan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk mengolah berbagai sumber daya alam, sumber daya budaya, dan sumber daya kreatif dengan nilai tambah (*value added*) yang semakin besar.

Pendidikan kecakapan hidup yang dilaksanakan untuk peningkatan kegiatan pembelajaran dengan melaksanakan pendidikan, kecakapan, dan kemampuan psikososial, diharapkan mampu mengatasi berbagai tuntutan dan tantangan hidup sehari-hari khususnya yang berkaitan dengan *general life skills*.

General life skills pada dasarnya menekankan pengembangan kemampuan Psikososial, antara lain untuk (a) mengakrabkan peserta didik dengan kehidupan nyata di lingkungannya, (b) menumbuhkan kesadaran tentang makna/nilai kehidupan, termasuk kesadaran akan pentingnya hidup sehat dan memiliki daya proteksi terhadap perilaku menyimpang (c) penanaman penguasaan keterampilan vokasional, (d) memacu kreativitas, (e) mengembangkan peran sosial, (f) mengembangkan rasa percaya diri, tanggung jawab, dan disiplin.

Indonesia di era reformasi ini adalah bagian aktif dari globalisasi dunia. Sebagai pasar raksasa di Asia Tenggara, Indonesia tidak hanya terlibat dalam dinamika pasar komoditas namun juga pasar tenaga kerja. Masuknya Indonesia dalam pergaulan dunia mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri untuk membangun kebaikan bersama bagi masyarakat dengan konsep politik dan ekonomi yang lebih terbuka. Proses ini tentunya sangat rumit mengingat kondisi transisional yang masih dihadapi oleh Indonesia hingga saat ini. Proses demokratisasi yang diwarnai oleh kebebasan politik seringkali menyebabkan bersinggungannya kepentingan politik antar kelompok-kelompok yang bersaing merebut kekuasaan. Selain itu, kebebasan ekonomi juga sering menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi di antara masyarakat. Kondisi inilah yang perlu diwaspadai oleh segenap warga negara untuk menjaga kohesi/kemajemukan bangsa.

Indonesia Di Era Globalisasi

Kebebasan dan persaingan di era globalisasi membawa semua yang sebelumnya tertutup menjadi terbuka melalui kebebasan teknologi informasi. Kasus-kasus korupsi, ketimpangan ekonomi, ketidakmerataan pembangunan dan kasus sosial lainnya mulai muncul ke permukaan melalui pemberitaan media massa di era kebebasan informasi. Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu kasus yang paling jelas dilihat di masyarakat Indonesia. Ketimpangan ekonomi jelas berpotensi memicu terjadinya ketegangan antar kelompok. Keadaan menjadi semakin rentan manakala garis batas antarkelompok sosial ini menjadi menebal akibat sekat-sekat sosial seperti etnis, ras, agama, atau pun asal daerah terintegrasi menjadi satu identitas pembeda. Perpecahan identitas kebangsaan yang terjadi secara laten tersebut perlu ditanggapi dengan serius melalui pendekatan preventif.

Menghadapi globalisasi yang penuh persaingan, Indonesia membutuhkan kesadaran kebangsaan yang kuat dan sesegera mungkin menyudahi masa transisi dan bersiap menghadapi persaingan global. Kebangkitan negara-negara dunia ketiga di era globalisasi harus menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia untuk memotivasinya agar terus maju. Sementara Indonesia yang masih belum pulih sepenuhnya dari krisis,

persaingan regional terus meningkat dan jika tidak direspon maka Indonesia tidak akan mampu mengembangkan potensinya. Padahal sejak tahun 2011 Indonesia sudah dimasukkan dalam kelompok negara dengan kekuatan baru ekonomi (*Goldman Sach N-11 Equity Fund*).

Menjadi bagian dari MIST (Meksiko-Indonesia-South Korea-Turkey) maka Indonesia telah menjadi salah satu dari 4 negara yang merupakan bagian dari 11 negara yang tergabung dalam *Goldman Sach N-11 equity fund* yang diperhitungkan akan menjadi kekuatan baru ekonomi dunia pada dekade mendatang, yang mirip perkembangan Brazil, Russia, India and China (BRIC) di awal 2000-an. Acuan yang dipakai adalah negara-negara yang diasumsikan sebagai “*growth market*”, dan ukuran ekonomi (GDP) di atas 1% output dunia (Gross World Product), memiliki populasi yang tumbuh dan memiliki daya beli yang meningkat, ekonominya relatif stabil, pasar lokal yang besar dan berkembang, dan inflasi relatif rendah.

Dimasukkannya Indonesia dalam kelompok MIST atau MIKT (Mexico, Indonesia, Korea Selatan dan Turkey), karena pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini bergerak tumbuh secara positif di luar dugaan banyak kalangan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2013 tercatat 5,78 persen dibandingkan dengan tahun 2012. Pertumbuhan terjadi pada semua sektor ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi di Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 10,19 persen dan terendah di Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,34 persen. Sementara Produk Domestik Bruto (PDB) tanpa Migas tahun 2013 tumbuh 6,25 persen, besaran PDB Indonesia tahun 2013 atas dasar harga berlaku mencapai Rp9.084,0 triliun, nilai PDB Indonesia atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2013 mencapai Rp2.770,3 triliun, naik Rp151,4 triliun dibandingkan tahun 2012 (Rp2.618,9 triliun). Bila dilihat berdasarkan harga berlaku, PDB tahun 2013 naik sebesar Rp854,6 triliun, yaitu dari Rp8.229,4 triliun pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp9.084,0 triliun pada tahun 2013. Sedangkan atas dasar harga konstan (tahun 2000) mencapai Rp2.770,3 triliun, sedangkan tahun 2012 hanya mencapai Rp 2.050,1 triliun dan PDB per kapita 2013 mencapai Rp 36,5 juta ada laju peningkatan sebesar 8,88 persen dibanding PDB per kapita tahun 2012

yang sebesar Rp 33,5 juta. (http://www.bps.go.id/brs_file/pdb_05feb14.Pdf) 15 Maret 2014. Untuk itu Indonesia dikelompokkan sebagai negara berpenghasilan menengah (*middle income countries*).

Industri kreatif di Indonesia pada kurun waktu 2002 – 2006 telah mampu memberikan sumbangan kepada PDB nasional secara signifikan yaitu dengan rata-rata kontribusi sebesar 104,637 triliun rupiah atau dengan rata-rata persentase kontribusi periode 2002-2006 sebesar 6,28% yaitu di atas kontribusi sektor (1) pengangkutan dan komunikasi; (2) Bangunan; dan (3) listrik, gas, dan air bersih. Pada tahun 2006, kontribusi PDB industri kreatif mengalami penurunan yang disebabkan oleh melesunya bisnis di subsektor industri kerajinan, desain, fesyen, film, video dan fotografi yang merupakan bagian dari industri kreatif. “Pada tahun 2006, kontribusi PDB industri kreatif berdasarkan harga konstan 2000 adalah sebesar 104,787 triliun rupiah yaitu 5,67% dari total PDB nasional. Jika dihitung dengan nilai nominal senilai 189,4 triliun rupiah”. (Departemen Perdagangan RI, 2008:9).

Menurut Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf); pada tahun 2018, kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB Indonesia sudah mencapai 7% atau mencapai angka Rp 1.000 triliun selain itu industri kreatif juga diperkirakan akan tumbuh dan memberikan kontribusi sebesar 7,55% terhadap PDB Indonesia dengan estimasi angka mencapai Rp 1.100 triliun. (sumber : [https:// investor.id/ business/kontribusi-industri-kreatif-terhadap-pdb-2019-diproeksikan-755 %](https://investor.id/business/kontribusi-industri-kreatif-terhadap-pdb-2019-diproeksikan-755-%20)) 5 Januari 2021

Ketatnya persaingan regional tidak hanya membuka pasar komoditas namun juga pasar tenaga kerja. Banjirnya produk komoditas negara tetangga dan kehadiran tenaga kerja profesional dapat diterjemahkan sebagai dampak positif globalisasi sekaligus dampak negatifnya jika tidak mampu dikelola dengan baik oleh negara yang bersangkutan. Oleh karenanya, Indonesia tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang mampu bersaing namun juga memiliki integritas tinggi terhadap bangsa dan negara.

Integritas terhadap bangsa dan negara tidak cukup hanya dibangun melalui jargon namun juga perlu dilembagakan. Pelembagaan yang mampu memupuk integritas bangsa dan menangkal terjadinya disintegrasi sekaligus membangun sumber daya manusia salah satunya adalah institusi pendidikan. Institusi pendidikan yang merupakan alat integrasi sosial diharapkan mampu membangun semangat kebangsaan sekaligus mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia menghadapi persaingan globalisasi.

Dalam dunia pendidikan, upaya mengelola rasa kebangsaan tersebut muncul pada pendidikan kewarganegaraan yang berperan sebagai unsur penunjang formal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun begitu, pendidikan kewarganegaraan harus terus berkembang mengikuti perubahan masyarakat dan membentuk karakter masyarakat. Pembentukan karakter masyarakat suatu bangsa merupakan aspek yang penting dalam membangun sumber daya manusia. Karakter bangsa menurut Budimansyah merupakan karakter unik baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa dan perilaku berbangsa dan bernegara dari hasil olah pikir, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok bangsa Indonesia (Budimansyah,2010;45).

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek yang penting dalam upaya menyelamatkan negara dari krisis berkelanjutan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan warga negara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang secara aktual mereka hadapi. Pengolahan kekayaan alam dan peluang ekonomi serta teknologi hanya dapat diolah oleh sumber daya manusia yang cakap.

Persaingan ekonomi dan terbatasnya lapangan kerja dapat memunculkan permasalahan pengangguran. Tingginya jumlah pengangguran secara simultan mendorong peluang terjadinya kriminalitas dan permasalahan-permasalahan sosial lainnya. Hal ini disebabkan oleh ketimpangan ekonomi yang tajam di mana orang-orang yang menganggur memiliki kemampuan yang rendah dalam pemenuhan kebutuhannya. Prof. Suryadi (2012) dalam bukunya Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan juga menerangkan dua isu penting dalam perubahan tersebut yaitu persaingan internasional dan terjadinya perubahan mendasar. Kedua isu tersebut merupakan isu yang juga dihadapi oleh seluruh

negara berkembang dalam era globalisasi. Kedua isu tersebut menuntut pengembangan SDM sebagai solusi jika negara berkembang ingin bertahan dan bersaing dalam kancah globalisasi.

Sumber daya manusia tidak lagi dipandang sebagai bagian yang terpisah dari pembangunan melainkan syarat bagi pembangunan dan harus dijadikan sebagai salah satu variable yang terukur bagi pembangunan. Pengembangan SDM merupakan istilah lain dari investasi SDM (Suryadi, 2002;28). Pengembangan kualitas SDM telah menjadi agenda kebijaksanaan pemerintah yang dianggap penting dalam sektor pembangunan. Dalam agenda tersebut, investasi SDM bukan hanya tanggung jawab salah satu sektor pembangunan, tetapi merupakan tanggungjawab multisektor di dalam suatu kesatuan secara integral. Di antara sektor-sektor terpenting yang secara langsung memiliki kontribusi terhadap pengembangan kualitas SDM adalah pendidikan, peningkatan gizi dan kesehatan, program kependudukan dan olahraga.

Namun di antara berbagai bentuk investasi SDM tersebut, pendidikan dapat dikatakan sebagai katalisator utama pengembangan SDM, dengan anggapan bahwa semakin terdidik seseorang, semakin tinggi kesadarannya terhadap kesehatan, partisipasi politik, dan program kependudukan. Kesadaran yang dilandasi oleh kecerdasan juga yang mampu menjamin kohesi kebangsaan dengan mewujudkan kesejahteraan dan kapasitas yang baik dalam pergaulan internasional (Suryadi, 2012)

Ekspektasi yang tinggi terhadap dunia pendidikan ini melahirkan tanggung jawab yang besar bagi para praktisi pendidikan dan para pembuat kebijakan di bidang pendidikan. Oleh karenanya, pemerintah mengeluarkan satu kebijakan yang dipersiapkan untuk menghadapi persaingan globalisasi dengan Undang undang sistem pendidikan nasional yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan sumber daya manusia di era globalisasi. Namun, pada praktiknya niat baik ini terhalang oleh paradigma pendidikan yang berorientasi pada hasil pembelajaran daripada memperhatikan proses pembelajaran yang jauh lebih penting.

Kebijakan pendidikan malah menghasilkan kontroversi yang tidak berkesudahan dengan masih digelarnya tes sumatif, ujian nasional, dan tes pengetahuan lainnya serta tes keterampilan yang dianggap sebagai upaya standarisasi nasional. Meskipun telah banyak protes disampaikan kepada

pemerintah, kenyataannya kebijakan ini terus berlanjut bahkan standar kelulusan terus dinaikkan. Menurut peneliti, pilihan kebijakan ini sangat merisaukan karena bukan memperbaiki kemampuan sumber daya manusia, tetapi malah membuat pelajar merasa tertekan dan frustrasi. Beberapa kasus memperlihatkan bahwa banyak pelajar yang frustrasi karena tidak lulus. Frustrasi tersebut bahkan mendorong tindakan bunuh diri, pengrusakan fasilitas sekolah, hingga yang paling laten adalah keputusan yang mengendap. Kondisi ini bukannya memperkuat daya saing malah makin melemahkan daya saing SDM bangsa Indonesia.

Berbeda hal dengan yang terjadi di perguruan tinggi, meski tidak terdapat ujian yang menekan kondisi psikis mahasiswa namun keterbatasan lapangan kerja menjadi kendala tersendiri. Jumlah lulusan perguruan tinggi di Indonesia jika dibandingkan dengan jumlah penduduk memang masih tergolong rendah, menurut data BPS jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia; dari total angkatan kerja sebanyak 136,18 juta orang, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat pada Februari 2019, sebanyak 129,36 juta orang adalah penduduk bekerja dan sebanyak 6,82 juta orang menganggur.

Melihat data BPS tersebut tidak berarti bahwa lulusan perguruan tinggi dapat terserap seluruhnya oleh lapangan pekerjaan yang tersedia. Tidak terserapnya lulusan perguruan tinggi secara optimal berakibat hilangnya fungsi sosial yang seharusnya dapat dimaksimalkan. Lulusan perguruan tinggi pada dasarnya dipersiapkan untuk memiliki kemampuan dan keterampilan yang lebih maju untuk berkontribusi dalam sistem sosialnya. Ekspektasi ini rupanya juga berbanding terbalik dengan kenyataan hasil lulusan perguruan tinggi yang masih menganggur dan tidak dapat mempraktikkan ilmu yang ia pelajari dalam sistem sosialnya karena tidak terserap oleh dunia kerja. Selanjutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per Agustus 2019 tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan universitas dengan rentang pendidikan S1 hingga S3 mencapai 737.000 orang, sedangkan jumlah pengangguran lulusan universitas mencapai 5,67 persen dari total angkatan kerja sekitar 13 juta orang.

Keadaan yang lebih sulit dihadapi oleh lulusan perguruan tinggi yang berasal dari bidang non eksak atau non teknik seperti bidang ilmu sosial. Berbeda dengan bidang teknik atau eksakta, lulusan bidang ilmu sosial dan

ilmu politik memiliki peluang yang terbatas dalam dunia kerja. Sementara, jumlah lulusan di bidang ini terus bertambah. Keahlian keilmuan mengenai kehidupan sosial dan politik seharusnya dapat dimanfaatkan oleh negara dengan menempatkan mereka sebagai aparatur negara. Sayangnya, negara melalui penerimaan pegawai negeri sipil tidak dapat menyerap mereka secara maksimal karena terbatasnya kebutuhan kepegawaian yang telah dipenuhi oleh sekolah-sekolah kedinasan.

Penulis menganggap bahwa lulusan bidang sosial dan politik sangat penting untuk ditanggapi secara serius karena pengetahuannya mengenai kehidupan sosial dan politik. Tidak terserapnya lulusan ini secara optimal dalam dunia kerja dapat mengakibatkan frustrasi para lulusan. Dalam keadaan frustratif ini keahlian di bidang ilmu sosial dan ilmu politik dapat menjadi bumerang bagi bangsa dan negara karena dapat mendorong terjadinya ketidakpatuhan sipil yang menyebar bahkan bisa menjadi bibit disintegrasi dalam kondisi tertentu. Peluang ini sebenarnya dapat muncul dari bidang keilmuan apapun dan tingkatan pendidikan apapun. Akan tetapi, peluang yang lebih besar muncul dari bidang ilmu sosial dan ilmu politik karena disiplin keilmuannya.

Permasalahan di atas pada dasarnya muncul dari tidak terserapnya para lulusan lembaga pendidikan dalam dunia kerja hingga mereka tidak dapat berkontribusi dalam sistem sosial. Tindakan preventif bagi segala potensi ini merupakan tugas yang seharusnya diemban oleh sistem pendidikan. Peneliti melihat bahwa asumsi-asumsi yang melandasi program-program pendidikan sering kali tidak sejalan dengan hakikat belajar, hakikat orang yang belajar, dan hakikat orang yang mengajar. Dunia pendidikan, lebih khusus lagi dunia belajar, didekati dengan paradigma yang tidak mampu menggambarkan hakikat belajar dan pembelajaran secara komprehensif. Praktik-praktik pendidikan dan pembelajaran sangat diwarnai oleh landasan teoritis dan konseptual yang tidak akurat. Pendidikan dan pembelajaran selama ini hanya mengagungkan pada pembentukan aspek-aspek kognitif dengan sedikit ketrampilan. Sistem pendidikan yang dianut bukan lagi suatu upaya pencerdasan kehidupan bangsa agar mampu mengenal realitas diri dan dunianya, melainkan suatu upaya pembutaan kesadaran yang disengaja dan terencana (Berybe, 2001) yang menutup proses perubahan dan perkembangan.

Pendidikan: Fondasi Pembangunan SDM

Pendidikan adalah salah satu Fondasi pengembangan sumber daya manusia dan kehidupan suatu bangsa, masa depan suatu bangsa dapat diketahui melalui komitmen masyarakat, bangsa dan negara (Pemerintah) dalam menyelenggarakan pendidikan nasionalnya. “ Pendidikan Tinggi harus dapat membuat mahsasiwanya berwawasan lebih luas, lebih mampu berkomunikasi, dan lebih gampang untuk menerima dan membawa diri dalam suasana pluralitas. Lebih kritis, kreatif, dan bebas. Lebih individual, rasional, dan bertanggung jawab”. (Magnis-Suseno F. 2012:70)

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan ”Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”. Jadi di sini sangat jelas bahwa pendidikan menjadi salah satu dari tujuan bangsa ini. Sementara pada Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 45 ditegaskan bahwa anggaran penyelenggaraan pendidikan nasional minimal sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Secara ideal, penyelenggaraan pendidikan nasional seperti dilukiskan dalam konstitusi di atas harusnya sudah memadai. Namun, dalam realitasnya justru tidak seperti yang diharapkan. Belakangan ini, pendidikan nasional justru semakin menyimpan banyak persoalan yang harus diselesaikan secara bijak. Selain masalah politik, masalah ekonomi juga banyak mempunyai pertentangan. Pemerintah Indonesia mengutamakan pembangunan ekonomi, karena selain memang ekonomi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, juga agar kita tidak kalah bersaing dalam era globalisasi ekonomi. Perkembangan ekonomi berpengaruh pula dalam bidang pendidikan, sehingga tidak heran tujuan kebanyakan orang bersekolah atau mengikuti pendidikan adalah untuk mencari uang atau meningkatkan penghasilan tanpa mempedulikan lagi tujuan pendidikan sebagaimana digambarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Di era reformasi melahirkan berbagai keterkejutan di segala bidang mulai dari demokrasi yang kebablasan sampai dengan di bidang budaya, banyak orang bagaikan katak dalam tempurung kemudian melihat

kurungan itu terbuka. Mereka semua ke luar mendapati pemandangan yang sangat berbeda, kebebasan, dan keterbukaan yang nyaris tak terbatas. Suasana psikologis euforia itu membuat masyarakat tidak bisa berpikir jernih, banyak orang dan kelompok masyarakat menuntut hak, tetapi lupa akan kewajibannya, sangat piawai dalam mengkritik dan menghujat tetapi tidak mampu menawarkan solusi yang terbaik.

Kita mulai tersadar bahwa sumber daya manusia yang ada saat ini adalah produk dari sistem pendidikan nasional kita yang tidak atau kurang mampu bersaing dalam persaingan global sehingga kita hanya mampu mengeksport tenaga kerja setara dengan pembantu rumah tangga atau pekerja kasar, sebaliknya tenaga yang memiliki keterampilan di dalam negeri pun harus bersaing dengan tenaga terampil dari luar negeri yang mulai merambah pasar tenaga kerja dalam negeri.

Di satu sisi, pada era otonomi daerah ini penerapan karir pegawai negeri sipil menjadi tidak jelas karena sering dipertaruhkan untuk “dagang sapi” oleh para penguasa di berbagai daerah, kecenderungan ini sangat jelas menunjukkan betapa lemahnya penerapan merit sistem untuk melindungi karir aparatur birokrasi (PNS) daerah dari kekuasaan politik. “Jabatan adalah amanah dan jabatan adalah hak prerogatif kepala daerah”, menjadi justifikasi ampuh bagi “tangan kapital” untuk bongkar-pasang jabatan birokrasi daerah sesuai kebutuhan pragmatis dan politiknya. Kapabilitas, kredibilitas, dan accountabilitas serta acceptabilitas menjadi sangat diabaikan dalam menentukan jabatan strategis di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 17 ayat (2) ditegaskan bahwa “Pengangkatan seorang pegawai negeri sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu, serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan”. Ketentuan merit sistem ini secara substansial sesungguhnya telah menggariskan bahwa setiap jabatan di pemerintahan memiliki kualifikasi dan pejabat yang berhak mendudukinya harus memenuhi kualifikasi itu. Namun masalahnya adalah di era otonomi daerah ini kepala daerah menjadi sangat berkuasa bagaikan “raja-raja kecil” di daerahnya

dan tatkala aturan itu dilanggar hampir tidak ada upaya yang sungguh-sungguh oleh negara dan pemerintah melalui aparat penegak hukum atau instansi berwenang untuk menegakkannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan keputusan politik dan kemauan politik (*political will*) dari para penyelenggara negara yang sungguh-sungguh untuk mengubah atau merekonstruksi sistem pendidikan di Indonesia yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif dan mampu bersaing di era globalisasi ini, berakhlak mulia, serta berkepribadian yang sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Sehingga dengan kualitas sumber daya manusia yang baik maka politik “dagang sapi” tidak akan terjadi di era reformasi ini dan penerapan merit sistem dapat dijalankan/dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh.

Pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia adalah pendidikan yang mampu membangun karakter yang baik sebagai warga negara yang disertai dengan pendidikan yang melatih kemampuan bersaing dalam persaingan internasional melalui kreativitas fisik dan mental yang mampu menanggapi perubahan yang terjadi. Kebutuhan ini hanya dapat terjawab jika sistem pendidikan mampu menciptakan saling keterkaitan antara kurikulum yang dipelajari untuk mendukung tujuan pendidikan.

Dalam pengembangan SDM di Indonesia, keterkaitan tersebut dapat terjadi dalam pendidikan karakter dan pendidikan kecakapan hidup yang melekat pada setiap mata kuliah atau mata pelajaran. Di samping itu, kebutuhan akan pemahaman kebangsaan dan keragaman juga perlu kembali diperhatikan di tengah era demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan kewarga-negaraan memiliki peran penting dalam pembangunan SDM karena Pendidikan Kewarganegaraan di manapun pada dasarnya bertujuan membentuk warga negara yang baik (*good citizen*), yakni warga negara yang gayut dengan pendidikan kewarganegaraan atau warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Pasal 3) dan warga negara yang memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003).

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan basis bagi pendidikan karakter yang membentuk karakter warga negara yang baik dan didukung oleh kemampuan untuk membangun karakter yang dibutuhkan

dalam menganggapi permasalahan sosial yang terus berkembang. Pendidikan kewarganegaraan bukan hanya transmisi didaktis dari ideologi negara sebagaimana yang dilakukan oleh Orde Lama dan Orde Baru sebelum reformasi. Pendidikan kewarganegaraann dalam arti luas merupakan wahana bagi pendidikan yang dibangun untuk membina dan mengembangkan warganegara yang cerdas dan baik dalam latar subsistem pendidikan formal, nonformal dan informal (Winataputra. 2012:2). Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan memiliki cakupan yang luas dari teori hingga praktik keseharian karena melibatkan stimulus penciptaan karakter warganegara Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks penciptaan karakter warganegara yang cerdas dan baik secara inheren merupakan bagian integral dari sistem pendidikan itu sendiri. Kemelekatan pendidikan kewarganegaraan pada sistem pendidikan nasional setidaknya dimunculkan pada lima status pendidikan kewarganegaraan.

Pertama, sebagai mata pelajaran dan kurikulum sekolah. Kedua, sebagai mata kuliah umum pendidikan tinggi negeri dan swasta. Ketiga, sebagai salah satu cabang disiplin ilmu pengetahuan sosial. Keempat, sebagai program pendidikan politik. Kelima sebagai kerangka konseptual yang dikembangkan oleh para pakar (Winataputra,2001;1-2).

Menghadapi tantangan globalisasi, pendidikan kewarganegaraan memerlukan penambahan visi secara konseptual. Masyarakat Indonesia kini tidak lagi hanya membutuhkan serangkaian nilai dan teori yang ditransmisikan oleh para ahli namun juga praktik dalam keseharian. Bukan hanya pendidikan kewarganegaraan, disiplin ilmu lainnya juga menghadapi tantangan yang hampir serupa. Ilmu pengetahuan tidak lagi hanya membutuhkan kemampuan teoritis namun juga praktis dan sosial dan memiliki kecenderungan dapat dipraktikkan secara langsung dalam keseharian.

Salah satu alternatif dalam menghadapi persaingan ekonomi global dan menjadi upaya preventif mencegah frustrasi sosial dari minimnya lapangan kerja adalah pengembangan industri kreatif. Kementerian

Perdagangan Republik Indonesia menyatakan bahwa industri kreatif adalah “Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut” (Departemen Perdagangan RI, 2008 : 4).

Industri kreatif perlu dikembangkan di Indonesia karena: Memberikan kontribusi Ekonomi yang signifikan; Menciptakan iklim bisnis yang positif; Membangun citra dan identitas bangsa; Berbasis kepada sumber daya yang terbarukan; Menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa; Memberikan dampak sosial yang positif (Hasil Konvensi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009 - 2015, Departemen Perdagangan RI 2008).

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) didirikan pada era presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2011-2014. Namun, Joko Widodo - Jusuf Kalla mengubah nomenklaturnya menjadi Kementerian Pariwisata, kemudian, pemerintahan Jokowi-Kalla mendirikan Bekraf pada 2015. Badan ini berada satu level di bawah kementerian dan berfungsi memperkuat sektor ekonomi kreatif, termasuk perlindungan bagi karya kreatif seniman Indonesia. Namun pada Pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin (Presiden dan Wakil Presiden 2019 – 2024) dirubah lagi menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hal ini jelas menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menempatkan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor utama dalam ekonomi Indonesia, karena diyakini ekonomi kreatif ini dapat menjawab tantangan permasalahan dasar jangka pendek dan menengah, yaitu: (1) masih belum optimalnya pertumbuhan ekonomi; (2) masih tingginya pengangguran; (3) tingginya tingkat kemiskinan; dan (4) masih rendahnya daya saing industri di Indonesia. Selain permasalahan tersebut, ekonomi kreatif ini juga diharapkan dapat menjawab tantangan seperti isu global warming, pemanfaatan energi yang terbarukan, deforestasi, dan pengurangan emisi karbon. Arah pengembangan industri kreatif ini akan menuju pola industri ramah lingkungan dan penciptaan nilai tambah produk dan jasa yang berasal dari intelektualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia, di mana intelektualitas sumber daya manusia merupakan sumber daya yang terbarukan.

Ekonomi kreatif yang mencakup industri kreatif, di berbagai negara di dunia saat ini, diyakini dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian bangsanya secara signifikan. Indonesia pun mulai melihat bahwa berbagai subsektor dalam industri kreatif berpotensi untuk dikembangkan, karena bangsa Indonesia memiliki sumberdaya insani kreatif dan warisan budaya yang kaya. (Pangestu, Elka, Maria. Kata Pengantar, Departemen Perdagangan, 2008:i)

Berbeda dengan produk manufaktur yang berbentuk benda fisik dan memerlukan investasi yang lebih besar, waktu produksi yang relatif lama, dan membutuhkan biaya distribusi yang mahal, produk-produk kreatif dapat dihasilkan dengan biaya investasi yang murah, lebih cepat, dan tidak memerlukan biaya distribusi atau angkutan yang sangat mahal. Oleh karena itu, Indonesia mencurahkan perhatian yang serius dalam pengembangan industri kreatif.

Beberapa negara di Asia Timur, negara yang mampu menciptakan iklim industri kreatif yang sangat pesat adalah Korea Selatan dan Jepang. Kedua negara tersebut telah menghasilkan produk-produk kreatif yang ditopang oleh inovasi dan kandungan sains dan teknologi tinggi. Survey di Korea menggambarkan bahwa jika dibandingkan dengan sektor manufaktur, sektor desain hanya membutuhkan lebih sedikit investasi dan waktu pengembangan yang lebih singkat. Rata-rata perusahaan di Korea mengeluarkan 400 juta Won (US\$ 429 ribu) dalam membangun suatu teknologi baru, sedangkan proyek-proyek yang terkait dengan desain, rata-rata hanya membutuhkan investasi 20 kali lebih murah (US\$21,5 ribu) dengan waktu produksi, dan distribusi, dan pemasaran maksimum hanya 9 bulan saja (<http://joogangdaily.joins.com/view.asp?aid=2883172>).

“Kini sudah waktunya pihak-pihak yang ‘berkepentingan’ dengan pendidikan memperjuangkan eksistensi profesionalis keguruan, profesi yang merupakan pilar utama praksis pendidikan selain infrastruktur, sarana, dan kurikulum; sebuah perjuangan tidak kenal lelah yang juga diperjuangkan oleh tokoh-tokoh pemerhati praksis ‘pendidikan nasional’ era 70 – 90-an dan siapapun yang *concern* dengan dunia pendidikan, perlu segera mengurai pelbagai problem sekaligus memberi tawaran-solusi cerdas yang dapat dicoba-terapkan demi menyelamatkan pendidikan Indonesia (tetap) memiliki watak dan kekhasan sendiri sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia”. (Soetopo, Hendayat, 2013:vii)

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis mencoba merekonstruksi pemikiran pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan kecakapan hidup (*soft skills*) dan karakter sumberdaya manusia industri kreatif. Dalam penelitian ini, penulis melihat secara langsung dan mengamati praktik pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yang juga mengembangkan kurikulum pendidikan yang mendukung industri kreatif.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu kurikulum yang memiliki fluktuasi perubahan-perubahan yang paling rutin. Setiap kali pergantian pemerintahan, pendidikan kewarganegaraan selalu menghadapi perubahan kurikulum untuk menyesuaikan tuntutan perubahan masyarakat. Di era reformasi perubahan ini semakin kental dengan terjadinya transisi global ke dalam demokrasi dan globalisasi. Masa transisi ini telah menarik perhatian beberapa peneliti seperti Winataputra (2001) dalam disertasinya yang berjudul *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi*. disertasi ini menjadi pembuka wacana demokratisasi dan globalisasi dalam pendidikan kewarganegaraan yang diuji secara ilmiah dengan mengambil fokus pada konseptualisasi pendidikan kewarganegaraan dalam demokratisasi. Ketertarikan lain pada masa transisi ini juga ditunjukkan dalam disertasi Samsuri (2010) yang berjudul *Transformasi Gagasan Masyarakat Kewargaan (Civil Society) Melalui Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia*. Disertasi ini mengambil fokus pada respon pendidikan kewarganegaraan menghadapi era reformasi dengan mengintroduksi gagasan masyarakat kewargaan atau *civil society* sebagai inti demokrasi. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penulis mengambil sudut pandang pada tujuan pendidikan kewarganegaraan secara konsep dan praktis. Penulis mendasarkan pada latar belakang yang sama yaitu kondisi transisi demokrasi di era reformasi dan bagaimana adaptasi pendidikan kewarganegaraan.

BAB II

Rekonstruksi Pemikiran dalam Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan

Rekonstruksi berasal dari kata *reconstruction* yang dalam bahasa Inggris berarti pembangunan kembali atau proses pembangunan kembali terhadap sesuatu yang telah rusak atau hancur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi memiliki pengertian sebagai penyusunan (penggambaran) kembali (<http://kamusbahasaIndonesia.org/rekonstruksi>). Dalam hal rekonstruksi pemikiran, upaya penemuan kembali terletak pada pemikiran atau gagasan. Berbeda dengan pemaknaan dalam bahasa Inggris, peneliti menggunakan pengertian rekonstruksi yang dirujuk oleh Kamus Bahasa Indonesia dalam menempatkan rekonstruksi pemikiran karena dalam konteks penelitian ini, pemikiran tentang pendidikan kewarganegaraan tidaklah hancur namun memerlukan perbaikan terus-menerus.

Perbaikan terus-menerus dalam suatu kajian ilmu pengetahuan merupakan bagian dari proses ilmiah untuk terus-menerus memperbaharui ilmu sesuai dengan perkembangan zaman. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun, sedangkan pengetahuan adalah pengamatan yang disusun secara sistematis (Budiarjo,1992:4). Dalam pengertian ini, pengetahuan merupakan variabel yang terus berkembang karena bergantung pada pengamatan terhadap realitas maupun secara teoritis. Pengamatan tersebut dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan berbagai perubahan konteks baik ruang maupun waktu sehingga ilmu pengetahuan dapat terus berkembang melalui perbaikan dan memberikan gagasan cerdas dalam upaya membongkar realitas pendidikan kontemporer yang memprihatinkan. Seperti pengekangan kebebasan, metodologi pembelajaran yang kaku, indoktrinasi dan realitas faktual lain yang sampai saat ini masih diterapkan, meski penerapan kebijakan kurikulum berbasis

kompetensi (KBK) telah dijalankan, diharapkan sistem pembelajaran berjalan secara demokratis. Namun, pada kenyataannya juga masih kurang efektif dan efisien.

Pendidikan menjadi modal dasar dan penting bagi seseorang agar berhasil meraih kesuksesan dalam kehidupannya. Visi pendidikan, sesungguhnya, diharapkan dapat mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya (Soetopo, H. 2013 : iii). Manusia yang mempunyai daya saing, penuh kreasi, mandiri, berdaya dan berpartisipasi aktif dalam peningkatan hidup sesama. Selain merupakan fungsi pembangunan bidang ekonomi, persoalan kesejahteraan merupakan aspek penting yang harus dicapai dalam proses pendidikan. Pendidikan yang mensejahterakan adalah pendidikan yang membebaskan. Membebaskan dari kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Sebenarnya, inilah tiga masalah pokok yang menjadi kewajiban sektor pendidikan untuk mengatasinya.

Filosofi Brameld tentang pendidikan disebut *reconstructionism*. Meski dia bukan yang pertama memiliki ide ini, tetapi dia adalah salah yang pertama mendukung secara terbuka. Dalam menanggapi krisis periode waktu, ia percaya *reconstructionism* di sekolah adalah solusi untuk masalah tersebut. Dalam bukunya Pendidikan sebagai Kekuatan, ia menguraikan dengan jelas dua peran utama *reconstructionism*.

Education has two major roles: to transmit culture and to modify culture. When American culture is in a state of crisis, the second of these roles—that of modifying and innovating—becomes more important. Reconstructionism, Brameld affirmed, is a crisis philosophy; the reconstructionist is very clear as to which road mankind should take, but he (or she) is not at all clear as to which road it will take. (Brameld, Theodore, 1965:75).

Pandangan Brameld tersebut cukup membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini karena memang pendidikan dapat memiliki dua peran utama: yaitu untuk menyampaikan/melestarikan budaya dan memodifikasi atau merekonstruksi budaya yang ada agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh, menurut Brameld, ketika budaya Amerika dalam keadaan krisis, kedua peran yang memodifikasi dan berinovasi menjadi lebih penting. *Reconstructionism*, Brameld

menegaskan, adalah filosofi krisis. Rekonstruksionis akan memperjelas jalan terbaik mana yang harus diambil oleh manusia dan mana yang akan ditinggalkannya.

Meski begitu, ternyata pandangan Brameld tentang *Reconstructionism* tersebut mendapat kritikan dari beberapa filsuf yang menganggap filosofi *Reconstructionism* tersebut terlalu utopis dan ideal. Sementara yang lain merasa terganggu dengan pernyataannya bahwa guru harus menjadi aktivis perubahan sosial di dalam kelas.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba membangun kembali pemikiran pendidikan kewarganegaraan untuk pengembangan pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan karakter dengan berlandaskan pada filosofi pendidikan yang ada. Pembangunan kembali pemikiran tersebut bertujuan untuk menyesuaikan pemikiran pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan karakter yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks khususnya pada tuntutan di bidang ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja, dalam hal ini adalah melalui industri kreatif.

“Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan pengembangan karakteristik-karakteristik seorang warga negara melalui pengajaran tentang peraturan-peraturan dan institusi masyarakat serta negara. Empat aspek yang lazim menjadi perhatian utama pendidikan ini adalah; hak dan kewajiban, tanggung jawab, partisipasi dan identitas dalam relasi negara – warga negara dan warga negara dengan warga negara”. (Kalidjernih, F.K. 2010:130)

Kebutuhan lapangan pekerjaan dan permasalahan pengangguran memang telah menjadi masalah yang klise dalam realitas di setiap negara. Baik negara maju maupun negara berkembang tak terkecuali di Indonesia. Untuk itu, pemerintah telah melakukan berbagai usaha nyata dengan meningkatkan kuota investasi internasional dan pembukaan lapangan kerja sehingga pencari kerja dapat terserap oleh seluruh sektor ekonomi. Namun, pada kenyataannya, upaya ini saja tidak cukup karena jumlah ketersediaan lapangan kerja belum sepadan dengan jumlah pencari kerja. Oleh karena itu, pemerintah memberikan stimulus alternatif melalui motivasi penciptaan lapangan kerja sendiri, yaitu dengan mendorong

perkembangan ekonomi kreatif yang memang mengutamakan kreativitas berpikir guna menciptakan sesuatu yang berbeda dan memiliki nilai dan bersifat komersial (Suryana, 2013:35).

“Ekonomi kreatif berperan dalam perekonomian suatu bangsa terutama dalam menghasilkan pendapatan (*income generation*), menciptakan lapangan kerja (*job creation*), dan meningkatkan penerimaan hasil ekspor (*export earning*), meningkatkan teknologi (*technonolgy development*), menambah kekayaan intelektual (*intelectual property*), dan peran sosial lainnya. Oleh sebab itu ekonomi kreatif dapat dipandang sebagai penggerak pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu bangsa (*engine of economic growth and development*)” (Suryana, 2013:36).

Industri kreatif memiliki kebutuhan yang cukup berbeda dengan industri manufaktur terutama di bidang sumber daya manusia. Dalam industri kreatif, kekuatan produksi yang utama terletak pada sumber daya manusia kreatif yang mampu mereproduksi gagasan baru dan bernilai ekonomi. Gagasan tersebut tidak hanya dalam produk komoditas namun juga produk gagasan seperti pemasaran, periklanan, dan pelayanan jasa lainnya.

Tentu saja, perbedaan kebutuhan sumber daya manusia ini harus diatasi dengan memperbaiki katalisator penciptaan sumber daya manusia yang unggul. Tidak hanya bagi industri kreatif namun juga bagi sektor ekonomi lainnya. Katalisator tersebut berada pada institusi pendidikan baik formal, nonformal maupun informal. Institusi pendidikan memiliki kemampuan untuk mentransmisikan nilai, keahlian dan kecakapan melalui ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang disampaikan melalui proses pembelajaran pada institusi pendidikan tersebut.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai bidang keilmuan yang wajib diajarkan di seluruh institusi pendidikan, tidak luput dari tanggung jawab tersebut. Pendidikan kewarganegaraan harus mampu mentransmisikan nilai, keahlian dan kecakapan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Oleh karena itu, dalam proses tersebut, pendidikan kewarganegaraan perlu terus menerus diperbaiki dan terus menerus beradaptasi dengan perubahan.

Proses perubahan yang dimaksud berkaitan dengan pemikiran, sikap, dan tindakan manusia baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun global yang menjadi konteks perubahan itu sendiri.

Lemahnya Penerapan Merit Sistem pada Aparatur Birokrasi

Di era reformasi, politisasi birokrasi pemerintahan di Indonesia saat ini cenderung menghasilkan oligarki, yaitu kekuasaan berada ditangan sejumlah kecil orang pada puncak partai-partai politik yang berkuasa. Berbeda pada masa Orde Baru hingga tahun 1998, birokrasi pemerintah menjadi kendaraan politik dari partai tertentu. Politisasi birokrasi yang terbentuk dalam kerangka oligarki ini jelas berbeda bentuk dan caranya dibanding periode Orde Baru yang cenderung berdasarkan pelembagaan (Pancasila sebagai asas tunggal, Golkar/Korpri, atau monoloyalitas). Secara etimologis birokrasi berasal dari kata biro atau bureau yang berarti kantor ataupun dinas, dan krasie atau cracy, krate yang berarti pemerintahan. Dengan demikian, birokrasi secara etimologis merujuk pada makna dinas pemerintahan. (“MERIT SYSTEM” DALAM BIROKRASI INDONESIA ~ Opikologi (taufiknurohman25.blogspot.com), 5 Januari 2021.

Saat ini, kita tengah menghadapi apa yang dirumuskan oleh Robert Michels sebagai *iron law of oligarchy* (hukum baja oligarki). Menurut hukum ini, demokrasi dan organisasi skala besar tidaklah serasi (incompatible). Michels berpendapat bahwa organisasi skala besar ini dihadapkan dengan masalah koordinasi yang hanya dapat dipecahkan dengan menciptakan birokrasi yang efisien. ([http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Michels/iron law of oligarchy](http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Michels/iron_law_of_oligarchy)) (15 Juni 2020)

Birokrasi mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan tercapainya visi dan misi bangsa; Sebagai perumus kebijakan negara/pemerintah (melaksanakan fungsi pengaturan/ regulasi) agar terwujud keamanan, ketertiban, keteraturan, kedamaian dan keadilan dalam masyarakat; sebagai mesin pemerintah dalam menyediakan/memproduksi barang dan jasa layanan pemerintah serta mendistribusikannya kepada masyarakat (melaksanakan fungsi pelayanan); dalam pemberdayaan warga masyarakat yang kurang mampu melalui pembangunan di berbagai bidang/

sektor (melaksanakan fungsi pemberdayaan/pembangunan), dan sebagai pengelola aset/kekayaan negara. ([http:// www.kumoro,staff.ugm.go.ac.id](http://www.kumoro.staff.ugm.go.ac.id)). (16 Juni 2019)

“Birokrasi dan anggaran adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Birokrasi menguasai keuangan negara untuk menjamin pelaksanaan pembangunan dan pelayanan di aneka sektor publik. Indikator bersih-tidaknya anggaran (perencanaan dan penggunaan) negara modern terletak pada laporan keuangan dan sistem auditnya. Namun selama lima tahun anggaran 2004 sampai 2009, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu memberikan opini *disclaimer* atau tidak menyatakan pendapat terhadap semua laporan keuangan kementerian/lembaga pusat, kecuali laporan keuangan KPK”.(Dault. Adhyaksa. 2012:228-229)

Menurut Max Weber (dalam Andreski, Stanislav, 1989), meskipun secara eksplisit tidak mendefinisikan birokrasi, Birokrasi rasional dibebankan kepada birokrasi patrimonial, yaitu sistem birokrasi yang memisahkan secara tajam antara kantor dan si pemegang jabatan, kondisi yang tepat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat seseorang pegawai, hubungan otoritas yang disusun secara sistematis antara kedudukan, serta hak dan kewajiban yang diatur dengan tugas. Sedangkan birokrasi patrimonial, kedudukan dan tingkah laku seluruh hirarki sebagian besar bergantung pada hubungan personal-kekeluargaan (*patront-client relationship*).

Pasca reformasi tahun 1998, permasalahan akut yang masih menjangkiti tubuh birokrasi di Indonesia ialah sifatnya yang aristokratis atau “selalu ingin dilayani”. Meskipun birokrasi dijadikan kekuatan utama dalam berbagai fungsi penyelenggaraan pemerintahan modern, paradigma bahkan mental seorang pemimpin harus dilayani masih melekat pada setiap jenjang pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Masalah birokrasi dikelompokkan menjadi tiga aspek, yaitu; kelembagaan atau organisasi, tata laksana atau manajemen, dan sumber daya manusia atau aparatur. (Dault. Adhyaksa. 2012:230). Untuk dapat berjalannya roda pemerintahan dengan baik maka pengembangan sumber daya manusia atau aparatur negara harus menjadi perhatian yang serius dari pemerintah mulai dari tingkat kesejahteraannya yang selaras dengan rekrutmen dan karir yang

berpijak pada prestasi dan kemampuan seseorang (meritokrasi), hingga dapat meningkatkan profesionalitas dengan mengantisipasi kemungkinan pelanggaran, dengan memberikan sanksi/hukuman secara tegas dan konsisten bagi aparatur negara yang melakukan pelanggaran.

Meritokrasi juga merupakan suatu prinsip yang diduga memungkinkan lenyapnya birokrasi dan teknokrasi dan juga untuk mengubah struktur kelas masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Tujuan pemikiran meritokrasi ialah mengurangi kontradiksi-kontradiksi kelas sosial dalam masyarakat, khususnya kontradiksi antra kaum terpelajar kreatif dan modal negara-monopoli. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Meritokrasi>) (18 Maret 2019)

Meritokrasi yang berasal dari kata merit atau manfaat pada dasarnya adalah menunjuk suatu bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada pegawai/karyawan yang berprestasi atau berkemampuan. Sering kali juga dianggap sebagai suatu bentuk sistem masyarakat yang sangat adil dengan memberikan tempat kepada mereka yang berprestasi untuk duduk sebagai pemimpin. Meritokrasi yang juga dikenal dengan Merit system adalah pembayaran gaji pegawai yang didasarkan pada kinerja pegawai. Semakin tinggi kinerja yang diraih karyawan akan semakin tinggi pula kenaikan gajinya. (Hartanto Brotoharsojo, 2004). Hal ini sejalan dengan apa yang dikembangkan di Bahama dalam menuju Meritokrasi (*Toward a Meritocracy*).

A visionary leader and statesman must always be willing to address the challenges of our nation. In the New Bahamas, I believe that we have to engender a culture of reward based on honest work and earning what one achieves. During my travels to constituencies throughout the nation, I always welcome the chance to speak to this new generation of voters. One recurring theme that always enters the conversation is achievement based on merit. (Minnis, Hubert A. 2013)

Merit System dalam Birokrasi Indonesia

Penerapan merit sistem yaitu adanya kesesuaian antara kecakapan yang dimiliki seorang pegawai dengan jabatan yang dipercayakan kepadanya, meliputi tingkat pendidikan formal, tingkat pendidikan dan

pelatihan kepemimpinan (diklatpim), pendidikan dan latihan teknis, tingkat pengalaman kerja, dan tingkat penguasaan tugas dan pekerjaan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan merit system dalam kebijakan promosi jabatan di daerah meliputi regulasi, kontrol eksternal dan komitmen pegawai yang akan diangkat pada jabatan tertentu.

Masalah ukuran kinerja yang sangat mendasar bagi sistem meritokrasi atau Merit System adalah ukuran kinerja yang komprehensif dan terpercaya. Tanpa hal tersebut, mustahil mengaitkan upah/gaji dengan kinerja. Pada sebagian organisasi/lembaga, penilaian kinerja kurang sejalan dengan baik, sehingga tidak ada ukuran yang tepat atas kinerja individu. Seringkali masalahnya adalah karena pimpinan unit kerja tidak memiliki keahlian untuk menilai kinerja. Masalah lainnya lagi dapat disebabkan oleh sistem penilaian yang cacat. Dalam situasi di mana yang menonjol adalah kinerja tim, pengukuran kinerja individu menjadi sangat sukar dan tidak produktif.

Fenomena setiap kali instansi pemerintah membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dapat dipastikan pelamarnya akan banyak sekali. Hal ini dapat dimengerti mengingat bekerja sebagai PNS ini masih menjadi profesi yang selalu diperebutkan meski dengan gaji yang kecil akan tetapi dinilai memiliki masa depan yang cukup terjamin dengan jaminan kesehatan dan penghasilan (gaji) pada masa pensiun. Akibat begitu besarnya animo masyarakat untuk melamar sebagai CPNS ini sehingga tidak jarang berbagai masalah yang muncul baik sebelum maupun setelah pengumuman hasil tes CPNS seperti mulai dari munculnya dugaan kasus suap menyuap dalam bentuk uang pelicin untuk lulus seleksi, maraknya praktik percaloan dan beredarnya surat sakti.

Timbulnya berbagai masalah dalam seleksi penerimaan CPNS tentu saja tidak lepas dari kinerja birokrasi sebagai lembaga yang dinilai memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola proses rekrutmen CPNS. Dalam masyarakat yang sifatnya heterogen dan terdiri dari berbagai kepentingan serta kebutuhan, seringkali membuat seseorang ingin memaksakan keinginannya di atas kepentingan masyarakat luas. Kondisi seperti ini yang kemudian tumbuh dan berkembang secara luas di tengah masyarakat dan menjadi pemicu berbagai bentuk penyakit dan masalah lain yang dihadapi oleh birokrasi. Seperti: *Pertama*, bertahannya birokrasi patrimonial,

dalam hal ini, promosi pegawai tidak lagi didasarkan pada keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh individu melainkan lebih diarahkan pada hubungan kekeluargaan, ikatan darah, perkawinan, keluarga, daerah, golongan dan sebagainya. Anggapan seperti ini pernah juga dikemukakan Richard Robinson (1986) bahwa fenomena korupsi yang terjadi di negeri ini awalnya berakar pada bertahannya jenis birokrasi patrimonial. Bahkan yang lebih parah lagi, apabila birokrasi yang tidak sehat itu dianggap sebagai personifikasi negara yang memiliki hak monopoli semua bentuk kekuasaan, sehingga dengan demikian birokrasi memonopoli kekuasaan baik sebagai pelaksana maupun pengontrol kegiatan pembangunan. Akibatnya, tidak menutup kemungkinan terjadi transaksi koruptif di dalamnya yang melibatkan para birokrat untuk menjual kebijakan negara demi kepentingan pribadi, keluarga ataupun kelompok. Menurut Max Weber (dalam Andreski, Stanislav, 1989), bahwa salah satu ciri birokrasi yang ideal adalah setiap pejabat sama sekali tidak diperbolehkan untuk melaksanakan tugas yang terkait dengan jabatannya dan sumber daya instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Dalam pengertian khusus meritokrasi kerap dipakai menentang birokrasi yang sarat KKN terutama pada aspek Nepotisme. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Meritokrasi>) (18 Maret 2019)

Meskipun demikian, harus pula disadari bahwa seiring dengan terjadinya perubahan sosial yang berlangsung begitu cepat, lambat laun model birokrasi seperti ini juga ikut mengalami perubahan termasuk di dalamnya tipe rekrutmen pegawai dalam birokrasi. **Kedua**, mentalitas feodal. Walaupun pada dasarnya misi utama birokrasi sebagai pelayan masyarakat (*public service*). Namun dalam kenyataannya seringkali birokrasi lebih berorientasi menjadi abdi negara (*state service*). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika muncul pula kesan dalam masyarakat yang mengidentikkan birokrasi sebagai *officialdom* (kerajaan pejabat), di mana rakyat sangat tergantung pada pejabat dan bukannya pejabat yang tergantung pada rakyat. Belum lagi adanya hirarki yang cukup ketat dalam birokrasi yang mengakibatkan pola hubungan antara atasan dengan bawahan menjadi *Patron-Client* dan kaku, sehingga tidak mengherankan jika berkembang pula sikap mental bawahan dalam membuat/menyampaikan dengan prinsip ABS (Asal Bapak Senang), oportunist

yang dinilai cenderung feodalistik. Hal tersebut ternyata masalahnya tidak hanya sampai di situ, sebab ternyata model birokrasi yang feodalistik ini tidak lagi dinilai melindungi kepentingan publik, melainkan menjadi tuan bagi masyarakat, dan konsekuensinya bukannya birokrasi yang melayani masyarakat, akan tetapi justru masyarakat yang harus melayani birokrasi.

Peran Sistem Pendidikan di Indonesia dalam Pembangunan SDM

Pendidikan mengusahakan pembentukan manusia Indonesia sebagai sumber penggerak pembangunan yang bermutu tinggi, mandiri, serta mampu memberi dorongan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. (Suryadi, 2012:11). Salah satu permasalahan besar yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masih rendahnya kualitas pendidikan. Kita akan mengalami kendala yang tidak ringan dalam percaturan global karena sumber daya manusianya (SDM) lemah. Kesiapan suatu bangsa untuk berkompetisi dalam percaturan global apabila sumber daya manusianya unggul. Generasi bangsa yang unggul dan handal dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan berakhlak mulia hanya akan lahir dari sistem pendidikan bermutu, yang dikelola secara akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, semua elemen bangsa harus berperan secara maksimal mengawal sistem pendidikan kita.

Reformasi pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan majemuk, sehingga memerlukan pengarahannya segenap potensi yang ada dalam waktu yang panjang. Disamping itu yang lebih penting reformasi pendidikan harus memberikan peluang bagi siapapun pelaku yang aktif dalam pendidikan, untuk mengembangkan langkah-langkah baru yang memungkinkan peningkatan kualitas pendidikan. Reformasi pendidikan pada dasarnya mempunyai tujuan agar pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. (Lutfi,M dan Fathani, A.H. 2013:62)

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, sampai saat ini, penuh dengan stigma yang dapat berpengaruh pada kualitas pendidikan yang dimiliki oleh individu. Sumber daya manusia Indonesia yang menyimpan banyak potensi ternyata tidak semuanya terdidik secara baik dan terarah.

Selain stigma pendidikan, ternyata banyak persepsi yang salah terkait dengan pendidikan di Indonesia. Masyarakat cenderung memiliki persepsi yang salah dalam membedakan pendidikan vokasi dengan pendidikan profesi. Ini terlihat dalam peraturan perundang-undangan yang mempersamakan antara pendidikan vokasi dengan profesi. Persepsi salah lainnya adalah bahwa pendidikan identik dengan gelar akademik yang dimiliki seseorang. Hal tersebut dianggap sebagai penentu rendah tingginya status sosial. Sebagai akibatnya, banyak masyarakat mengejar gelar, bukan ilmunya. Lembaga pendidikan yang menjual ijazah pun sangat diminati oleh masyarakat. Mereka yang mengikuti pendidikan sejak dini hingga pendidikan tinggi bukan untuk mendapatkan ilmu melainkan lebih memperhatikan formalitas, seperti kehadiran (absensi), nilai, hingga ijazah dan gelar. Persepsi yang salah tentang pendidikan ini yang mengakibatkan kualitas pendidikan tidak berkolerasi dengan kemajuan bangsa.

Pendidikan sesungguhnya bukan sekadar transfer ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) melainkan sekaligus juga transfer nilai (*transfer of value*). Untuk itu penanaman nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dalam pendidikan merupakan pilar penyangga demi tegaknya pendidikan di Indonesia. (Lutfi, M dan Fathani, A.H. 2013:171)

Pendidikan pada dasarnya adalah sebuah subsistem yang merupakan sistem yang kompleks. Sebagai sebuah subsistem pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang berjalan dengan dipengaruhi oleh berbagai aspek eksternal yang saling terkait satu sama lain, seperti aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan-keamanan, bahkan ideologi sangat erat pengaruhnya terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, begitupun sebaliknya. Sedangkan pendidikan sebagai suatu sistem yang kompleks menunjukkan bahwa pendidikan di dalamnya terdiri dari berbagai perangkat yang saling mempengaruhi secara internal, sehingga dalam rangkaian input- proses-output pendidikan, berbagai perangkat yang mempengaruhinya tersebut perlu mendapatkan jaminan kualitas yang layak oleh berbagai stakeholder yang terkait.

Sistem Pendidikan Nasional harus dapat memberikan pendidikan bagi setiap warga negara Republik Indonesia agar masing-masing memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar, yang meliputi kemampuan membaca, menulis dan berhitung,

serta mampu berkomunikasi secara modern menggunakan bahasa Indonesia, yang diperlukan oleh setiap warga negara untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.(Suryadi, 2012:118)

Kualitas pendidikan hendaknya dapat dilihat dari nilai tambah yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan itu sendiri, baik produk dan jasa maupun pelayanan yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja yang ada atau mampu mengembangkan kewirausahaan sendiri. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan. Sehingga pendidikan sesungguhnya harus terkait dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang ada, untuk itu lulusan pendidikan seharusnya memiliki kemampuan dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan dunia usaha dan industri, karena hanya dengan cara ini, pendidikan mempunyai kontribusi atau berperan terhadap ekonomi dan atau industri.

Relevansi pendidikan dalam arti adanya kesepadanan dengan dunia usaha dan dunia industri atau *link and match*, pada kenyataannya pendidikan harus disesuaikan dengan keperluan masyarakat yang sedang membangun. Pendidikan sampai saat ini dianggap sebagai unsur utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia lebih bernilai jika memiliki sikap, perilaku, wawasan, kemampuan, keahlian serta keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan berbagai bidang dan sektor. Pendidikan merupakan alat untuk mengubah diri manusia. Melalui pendidikan, manusia akan mengetahui segala sesuatu yang tidak atau belum diketahui sebelumnya. Pendidikan merupakan hak seluruh umat manusia. Hak untuk memperoleh pendidikan harus diikuti oleh kesempatan dan kemampuan serta kemauannya. Dengan demikian, dapat dilihat dengan jelas betapa pentingnya peranan pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar sejajar dengan negara-negara lain, baik secara regional (otonomi daerah), nasional, maupun internasional (global). (Djoyonegoro, 1995:5).

Pendidikan merupakan wahana ampuh untuk membawa bangsa dan negara menjadi maju dan terpadang dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia internasional. (Fajar, Malik A. 2005:103). Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan merupakan investasi masa depan untuk kemajuan dan kesejahteraan sumber daya manusia. Artinya semakin besar investasi

yang ditanamkan, semakin besar peluang memetik keberhasilan dari investasi tersebut pada masa yang akan datang. “Tepi Asia Pasifik telah memperlihatkan, negara miskin juga bangkit, tanpa sumber daya alam melimpah, asalkan negara melakukan investasinya yang cukup dalam hal sumber daya manusia”. (Naisbitt, John dan Aburdence, Patricia. 1991)

Konteks dan Konsep Pendidikan

Landasan pendidikan berakar dari pandangan tentang manusia sebagai makhluk berakal dan berbudaya, serta manusia hidup berkreasi, berinovasi, dan berekreasi. “Dengan berkreasi, manusia dapat menghasilkan karya rohaniah, berupa pemikiran dan karya bendawi, berupa benda-benda budaya yang diperlukan dalam meningkatkan dan mengembangkan perikehidupannya”. (Afifudin. 2013:7)

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Pasal 1 UU No. 20 tahun 2003). Yang menjadi eksistensi mendidik terletak pada tujuan mendidik, sedang mengajar eksistensinya terletak pada materinya. Ini berarti mendidik lebih luas dari pada mengajar, dan mengajar merupakan sarana dalam mendidik. (Indrakusuma A.D. 1973: 6).

Pendidikan adalah kekuatan (*education is a power*): (Theodore Brameld 1965), jika kita berpendapat demikian apakah pendidikan dapat menjadi alat kekuasaan jenis lain atau juga menjadi penghasil dan penentu kekuasaan?. Ide pendidikan sebagai kekuasaan bukanlah hal yang baru. Empat abad yang lalu, seorang filusuf Inggris Francis Bacon (Henry, John. 2002) mengatakan “*knowledge is a power*”. Banyak pendapat yang yakin bahwa pendidikan harus menjadi agen perubahan, agen pemelihara budaya dan ada juga yang berpendapat bahwa pendidikan harus kembali ke pola masa lalu, karena hanya pola seperti itu yang kita perlukan untuk memulihkan keseimbangan budaya. Selain itu ada juga yang percaya bahwa pendidikan bisa dan harus mendorong budaya bergerak maju secara

perlahan, bahkan ada yang yakin bahwa pendidikan harus menjadi agen, bukan hanya transmisi atau bahkan modifikasi bertahap, tetapi perubahan budaya secara sempurna.

Pandangan atau filosofi tersebut dikenal dengan: (1) *essentialism*, yang merupakan filosofi pendidikan terkait pemeliharaan budaya; (2) *perennialism*, yang memusatkan perhatian pada jenis arahan pendidikan yang diberikan pemikiran klasik Yunani Kuno dan Eropa abad pertengahan; (3) *progressivism*, yang merupakan filosofi pendidikan liberal, eksperimental; dan (4) *reconstructionism*, yang yakin bahwa krisis masa sekarang bisa diatasi secara efektif dengan kebijakan pendidikan dan program tindakan yang radikal.

Khusus filosofi *progressivism*, dicirikan dengan *adjective progressive* yaitu orang yang yakin akan perkembangan – perbaikan bertahap. Tetapi ini bukan berarti bahwa perkembangan itu bersifat otomatis. Tidak ada yang bisa yakin bahwa kehidupan akan berjalan lebih baik. *Progressivist* berpendapat bahwa setidaknya perkembangan itu bisa dilakukan. Sedangkan filosofi *Reconstructionism* sebagian besar sejalan dengan filosofi *progressivist*. Tetapi lebih empatik dalam berpendapat bahwa pendidikan mestinya menjadi agen pembentukan ulang budaya. Mereka yakin bahwa hal ini harus dipersiapkan untuk mendobrak banyak preseden karena dalam masa krisis, preseden seringkali menghambat perubahan.

Pada dasarnya perkembangan pendidikan dimanapun biasanya cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Hal tersebut masih dirasakan hingga saat ini dan sebagai muaranya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia untuk bersaing di era globalisasi. Untuk itu, peneliti menganggap perlu adanya gagasan untuk merekonstruksi pendidikan yang sesuai dengan perkembangan jaman. Menghadapi abad 21 ini pendidikan Indonesia hendaknya tetap dapat berkembang dari budaya lokal, nasional, universal, dan global. Perkembangan pendidikan tersebut diharapkan dapat menghasilkan pendidikan berkualitas baik yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia.

Peran pendidikan menghadapi abad ke-21 sepertinya akan banyak menghadapi tantangan, terutama yang berkenaan dengan tuntutan masa depan yang akan membangkitkan kepedulian masyarakat khususnya terhadap peran pendidikan tinggi agar lebih meningkatkan fungsinya secara relevan dengan pembangunan masyarakat, karena pengembangan kemampuan sumber daya manusia atau *Human Capacity Development (HCD)* adalah hasil interaksi antar individu dan masyarakat yang memiliki peluang berpartisipasi. *Human Capacity Development* menunjuk pada konstelasi keterampilan, sikap dan perilaku dalam melangsungkan hidup mencapai kemandirian, serta sekaligus memiliki daya saing tinggi dan daya tahan terhadap gejolak ekonomi dunia (Semaiwan R, 1998:9).

Pesatnya perkembangan masyarakat industri Eropa adalah hasil dari akumulasi empat gugus institusi, yakni sebagai hubungan komplementer dari (1) kapitalisme, (2) industrialisme, (3) pengawasan, dan (4) kekuatan militer (Dimiyati, 2000). Rembesan model empat gugus institusi tersebut di Indonesia menjelma dalam praktik-praktik pendidikan yang bersifat otoriter, pendidikan lebih berpusat pada guru, menjejalkan isi kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik, lemahnya komunikasi interaktif antara guru dan peserta didik, peningkatan pengetahuan peserta didik melalui menghafal secara mekanis, guru lebih banyak berceramah tentang pelajaran yang disampaikan dan peserta didik cenderung pasif hanya mendengarkan. Guru menguraikan suatu topik yang sama sekali asing bagi pengalaman eksistensial para peserta didik. Yang terjadi bukannya proses komunikasi pembelajaran, tetapi guru menyampaikan pernyataan-pernyataan dan mengisi “tabungan” yang diterima, dihafal, diulangi dengan patuh oleh para peserta didik. Inilah konsep pendidikan “gaya bank” (Freire, 1985; Kartini Kartono, 1997; Suyanto, 2001). Menurut peneliti pendidikan “gaya bank” cenderung akan menghasilkan insan-insan yang jati dirinya hanya tersimpan dan miskin daya cipta, daya ubah, kreatifitas, dan pengetahuan serta keterampilan.

Selain itu institusi-institusi pendidikan Indonesia juga masih sangat tergantung pada pendidikan negara-negara maju yang sepertinya memberikan dampak kurang menguntungkan masyarakat Indonesia. Sistem pendidikan nasional ternyata lebih mengutamakan uniformitas atas dasar kesatuan dan persatuan bangsa, untuk menjamin keamanan

negara dan stabilitas pemerintahan (Suyanto, 2001). Kelemahan sistem pendidikan nasional ini ada pada operasionalisasi konkretnya di lapangan menjadi kurang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat lokal yang beragam, dan corak sosial ekonomi serta kebudayaan yang bervariasi. “Orientasi Kependidikan dengan jelas menunjukkan bahwa tindakan kependidikan merupakan pula tindakan kebudayaan, sebab proses pendidikan terjadi di dalam konteks kebudayaan”. (Tilaar, H.A.R. 2012:263). Untuk itu sudah sepatutnya dilakukan penataan sistem pendidikan nasional yang belum menunjukkan keberhasilan, baik kualitas, kuantitas, relevansi, maupun efisiensinya.

Praksis Pendidikan Indonesia Selama ini

Praksis pendidikan Indonesia selama ini, sesungguhnya telah banyak mengalami perkembangan, baik proses, kualitas, maupun kualitasnya. Perubahan-perubahan fundamental terjadi di dalam pendidikan nasional sejak lebih dari setengah abad tahun yang lalu. Yaitu suatu sistem pendidikan nasional yang elitis yang diwarisi dari pemerintahan kolonial dan militerisme Jepang telah diubah menjadi sistem pendidikan yang populis, yang banyak membuka kesempatan untuk seluruh anak bangsa. Lebih-lebih pendidikan di awal-awal kemerdekaan, seperti yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, banyak menempatkan kepentingan humanisasi dan berusaha mengubur pendidikan yang dehumanis warisan penjajahan. Namun, hal ini belum menampakkan hasil, bahkan cenderung layu sebelum berkembang. Pendidikan pada setiap negara pasti memiliki ideologi, yaitu; keyakinan, nilai, cita-cita, visi, dan metode untuk mencapainya yang dapat memajukan bangsa dan negaranya.

“Dengan demikian, sebuah proses pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan dan mendorong siswa agar membuat persiapan untuk menjawab pertanyaan ketika musim ulangan dan ujian tiba. Ada empat domain pokok yang mesti dipahami dan menjadi acuan dalam setiap proses pendidikan di Indonesia, yaitu; *Pertama*, agar setiap siswa mengenal dan memahami potensi dirinya sehingga merasa mantap nantinya ketika memilih satu jurusan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. *Kedua*, mengenal karakter dan potensi daerahnya yang potensial untuk dipelihara dan dikembangkan.

Ketiga, memahami sejarah dan jati diri bangsanya untuk dijaga kehormatannya dan dimakmurkan rakyatnya. *Keempat*, guru dan siswa juga perlu memiliki wawasan regional global meskipun sekilas mengenai apa yang tengah dan akan terjadi pada tingkat internasional.” (Hidayat, Komaruddin, 2012:112)

Rekonstruksi budaya masyarakat Indonesia dan perbaikan sistem pendidikan Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah pasca penjajahan Belanda dan Jepang mengalami banyak hambatan, paling tidak ada 3 (tiga) faktor yang sangat potensial menjadi hambatan kegiatan rekonstruksi tersebut adalah (1) lambatnya perjuangan modernisasi sistem politik yang bermuara pada sulitnya menentukan kebijakan pendidikan yang tepat bagi Indonesia yang baru mencapai kemerdekaan, (2) sangat tidak mudahnya mengubah mental pemimpin Indonesia dari kebiasaan ketergantungan, sehingga mereka cenderung berorientasi pada saran dan sugesti para ilmuwan negara-negara barat dan mengunggulkan model pendidikan negara-negara barat yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan pendidikan Indonesia, (3) sulitnya meningkatkan kreativitas masyarakat dalam pendidikan sebagai akibat pengalaman historis yang menyebabkan kemiskinan, keterbelakangan, dan penindasan.

Popularisasi pendidikan selama Orde Baru melahirkan konsep pengembangan sumber daya manusia yang menjadi prioritas utama, di samping sumber-sumber alamiah. Paradigma ini dilandasi oleh kenyataan bahwa Indonesia telah unggul dalam bidang sumber daya alam, tetapi lemah dalam sumber informasi iptek, kelembagaan dan peraturan, sumber modal, dan sumber kebudayaan (Oetama & Widodo, 1990). Di samping itu, dengan didorong oleh gerakan *education for all*, muncul pula paradigma pemberantasan kemiskinan yang akhirnya melahirkan program-program wajib belajar yang bermula diberlakukannya wajib belajar 6 tahun, yang kemudian menjadi 9 tahun bahkan kini di beberapa daerah sudah mulai mencanangkan Wajib belajar 12 tahun. Krisis yang dirasakan sebagai akibat paradigma tersebut adalah terpuruknya sumber daya manusia Indonesia yang tercermin dari masih rendahnya tingkat keterampilan tenaga kerja Indonesia di Asia di samping masih tingginya tingkat pengangguran. Dari segi kualitas pendidikan Indonesia masih mengalami banyak tantangan.

“Dalam sebuah studi internasional yang dilakukan pada tahun 2006, dari 57 negara yang di survei, Indonesia pada urutan ke-52 untuk ilmu alam, ke-48 untuk membaca, dan ke-51 untuk matematika. Sementara studi lain yang dilakukan tahun 2007 menetapkan Indonesia pada urutan ke-57 dari 65 negara yang mengikuti ujian dalam bidang studi matematika dan ilmu alam. Keterpurukan kualitas pendidikan di Indonesia terutama disebabkan karena berbagai keterbatasan guru sebagai motor pendidikan. Baru 18 persen guru SD dan 67 persen guru SMP telah mengenyam pendidikan tinggi selama empat tahun. Walaupun rasio perbandingan guru terhadap jumlah murid di Indonesia termasuk paling rendah di seluruh dunia, namun dua pertiga dari sekolah di daerah terpencil memiliki terlalu sedikit guru. Belum lagi tingkat absensi guru di Indonesia masih tinggi, terlebih di sekolah-sekolah yang terpencil”. (Susanti, Dewi. 2012:61)

Didorong oleh keinginan untuk meningkatkan mutu dan standar pendidikan nasional, maka muncul paradigma keseragaman pendidikan nasional. Paradigma ini melahirkan undang-undang positif dan berbagai peraturan yang menjamin uniformitas suatu sistem, lahirnya norma-norma Ujian Nasional (UN), dan berbagai tes sumatif lainnya yang standar. UN hanya mengukur satu aspek kompetensi kelulusan yakni aspek kognitif (Lutfi, M dan Halim F.A 2013: 35). Paradigma ini diarahkan untuk mencapai tujuan efisiensi perencanaan dan manajemen pendidikan, memudahkan supervisi, mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, dan keyakinan bahwa etatisme pendidikan akan menjamin mutu pendidikan nasional. Di satu sisi, paradigma keseragaman pendidikan telah menghasilkan percepatan pencapaian target-target kuantitatif pendidikan. Di sisi lain, paradigma yang kaku tersebut ternyata mematikan inisiatif dan kemampuan berpikir kritis anak didik dan masyarakat (Kartini, Kartono, 1997:19).

“Dalam sepuluh tahun terakhir ini, walaupun pencapaian pendidikan di Indonesia secara kuantitatif cukup membesarkan hati, namun masih terdapat tantangan pemerataan akses pendidikan bagi sebagian masyarakat yang termarjinalkan. Selain itu, kita masih menghadapi banyak tantangan bagi pemerataan akses untuk pendidikan yang berkualitas”. (Susanti, Dewi. 2012:62)

Sarana dan prasarana untuk mengembangkan pendidikan yang bermutu adalah sesuatu keharusan guna menunjang kurikulum yang berbasis pada kompetensi peserta didik. "...kurikulum dapat kita definisikan sebagai sejumlah informasi dan pengalaman yang ingin disampaikan kepada peserta didik". (Tilaar, H.A.R. 2012:357). Saat ini kurikulum yang tersentralisasi telah diubah menjadi terdesentralisasi melalui Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau sering disingkat KTSP. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan memberikan peluang yang sangat besar kepada guru untuk mengembangkan kreativitasnya. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai kepanjangan tangan pemerintah hanya membuat standarnya saja, yaitu menentukan standar kelulusan yang kemudian dijabarkan ke dalam standar isi yang memuat bahan kajian, mata pelajaran, serta kegiatan belajar yang diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam KTSP masih sangat umum dan perlu penjabaran dari guru di masing-masing satuan pendidikan. Penjabaran ini tidak hanya sebatas penentuan indikator, tetapi juga berkenaan dengan materi, metode, media pembelajaran, dan urutan aktivitas pembelajaran.

"Dalam kenyataannya, kurikulum yang diberlakukan tidak beranjak dari kurikulum yang sangat formal, yang ditentukan dari pusat kekuasaan sampai ke pelosok-pelosok sekolah di seluruh tanah air. Melihat kepada kebutuhan anak dan kebutuhan masyarakat Indonesia, maka mekanisme pengembangan kurikulum macam itu tentunya bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan ilmiah". (Tilaar, H.A.R. 2012:357).

Meskipun Pemerintah merubah KTSP menjadi kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang bertumpu pada rekonstruksi sosial dan teknologi, artinya pembelajaran yang terjadi menekan pada interaksi individu dan lingkungan sehingga peserta didik dapat memperoleh pengetahuannya sendiri, namun pada kenyataannya institusi pendidikan dan praktik pendidikan di Indonesia masih berupa pola-pola melanjutkan pendidikan penjajahan dan budaya kolonial dari masa lampau. Sebagian institusi pendidikan Indonesia merupakan pencangkakan lembaga pendidikan negara-negara yang sudah maju, sehingga dalam praktik sehari-hari,

hasil pendidikan kurang mencerminkan aspirasi bangsa sendiri, kurang mengembangkan sifat-sifat kepribumian yang berasaskan Pancasila, kurang mengembangkan unsur-unsur budaya lokal dan nasional. Peserta didik yang menerima pendidikan semacam ini cenderung mengalami alienasi terhadap budaya sendiri, yang akhirnya merasa asing pula terhadap hakikat diri sendiri dan lingkungannya serta pada akhirnya menjauh dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita.

“Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai dan gagasan-gagasan dasar yang dapat dilihat dalam sikap, perilaku, dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bersifat khas sebagai refleksi perilaku bangsa Indonesia dan tercermin dalam setiap kehidupannya. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat dinamis. Artinya, upaya pengembangan sesuai dengan perubahan dan tuntutan masyarakat bukan sesuatu yang tabu sehingga nilai-nilai dasar itu tidak menjadi beku, kaku, dan melahirkan sifat fanatik yang tidak logis. Atas dasar tersebut, bangsa Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai ideologi terbuka”. (Soegito, A.T, dkk. 2011:123)

Pendidikan dan politik memiliki kaitan yang sangat erat. Keduanya diarahkan pada tujuan hidup manusia dan masyarakat, menginginkan kehidupan yang berbahagia, selain juga diarahkan untuk membentuk kehidupan bersama. Indonesia yang tengah berkembang merupakan pencerminan dari kekuatan sosial politik kaum elit yang berkuasa dan refleksi kekuatan penguasa pada ide-ide politiknya. Sekolah dan institusi pendidikan merupakan sarana penyuaian peserta didik dengan doktrin-doktrin politik serta propaganda nilai-nilai budaya yang dianggap paling bermanfaat oleh para penguasa. Semua perilaku ini ditujukan demi penguasaan dan pengendalian rakyat secara lebih efisien. Masyarakat dituntut kepastian politik dan ketundukan rohaniah secara total, yakni tunduk secara mutlak kepada penguasa. Semuanya ini yang kemudian melahirkan konsep politisasi pendidikan. “...Jangan pula ‘politik dijadikan panglima’ untuk melemahkan pendidikan nasional sebagai wahana memelihara dan meneruskan cita-cita kebangsaan” (Malik, Fajar. A. 2012:5)

Pendidikan dijadikan sebagai alat penguasa dan sarana indoktrinasi ideologi. Paradigma ini akhirnya melahirkan pula prinsip-prinsip bahwa (1) pendidikan diyakini dengan sendirinya dapat memecahkan masalah

sosial budaya, (2) manajemen pendidikan ditangani oleh birokrasi agar tercipta kesatuan persepsi dalam menjalankan tugas-tugas pendidikan. Krisis yang dirasakan adalah (1) sakralisasi ideologi nasional sehingga terjadi penjinakan terhadap *critical* dan *creative thinking* masyarakat, (2) terjadi keterpurukan pada profesi praktisi pendidikan.

Berdasarkan indikator paradigma pendidikan Indonesia yang dijadikan acuan pada masa lalu tersebut, dapat diduga bahwa anomali-anomali yang ditimbulkannya akan berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya krisis yang dialami oleh pendidikan Indonesia saat ini. Lebih-lebih dalam menghadapi era globalisasi yang melanda semua segi kehidupan, paradigma tersebut akan menampakkan wujud semakin hebat dan berisiko pada keterbelakangan peradaban manusia Indonesia di mata dunia. Perlu disadari bahwa, secara alamiah upaya untuk menyelamatkan diri dari krisis pendidikan tersebut memerlukan keseriusan semua komponen bangsa untuk menyadari dan meyakini bahwa krisis tersebut pasti bisa dilewati. Atas dasar keyakinan tersebut, seluruh komponen bangsa bersama pemerintah akan segera menginginkan suatu perubahan, evolusi, atau revolusi menuju suatu paradigma baru pendidikan Indonesia yang dapat dijadikan pijakan mengakhiri krisis, meningkatkan pendidikan, serta meningkatkan harkat dan martabat serta peradaban manusia ke arah yang lebih baik, dan pada akhirnya memiliki karakter bangsa yang dapat menjadi ciri khusus bangsa Indonesia dalam percaturan global yang peneliti tuangkan dalam rekonstruksi pemikiran pada buku ini.

Rekonstruksi pemikiran yang coba penulis sampaikan, di samping tetap berorientasi pada empat indikator (popularisasi; sistematisasi; proliferasi; dan politisasi pendidikan) yang dijadikan pijakan untuk mengevaluasi paradigma pendidikan yang selama ini dianut, juga berorientasi pada nilai-nilai orisinal yang bersifat lokal, nasional, pendidikan kecakapan hidup dan nilai-nilai universal bersumber dari landasan dan wawasan pendidikan Indonesia, nilai-nilai lokal, nasional, dan universal budaya Indonesia. Pertemuan antara nilai-nilai tersebut dijadikan dasar untuk merekonstruksi pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

Landasan Pendidikan di Indonesia

Landasan pendidikan merupakan landasan konseptual (Basri, Hasan. 2013:680. Landasan yang bersifat konseptual pada dasarnya identik dengan asumsi, yaitu gagasan, kepercayaan, prinsip, pendapat, atau pernyataan yang sudah dianggap benar, yang dijadikan titik tolak untuk berpikir dan bertindak.

Pendidikan sebagai usaha sadar yang sistematis-sistemik selalu bertumpu pada sejumlah landasan. Landasan tersebut sangat penting karena pendidikan merupakan pilar utama pengembangan manusia dan masyarakat suatu bangsa. Landasan pendidikan akan memberikan pijakan dan arah terhadap pembentukan watak manusia Indonesia, mendukung perkembangan masyarakat, dan polapikir bangsa. Landasan pendidikan yang sangat memegang peranan penting dalam menentukan tujuan pendidikan adalah landasan filosofis, sosiologis, dan kultural. Landasan pendidikan yang mendorong pendidikan dalam rangka menjemput masa depan adalah landasan ilmiah dan teknologi. Di samping itu, terdapat landasan psikologis, yang membekali tenaga kependidikan dengan pemahaman psikologis peserta didiknya. Kajian terhadap landasan-landasan pendidikan ini akan dapat membentuk wawasan pendidikan yang utuh.

Dalam landasan Filosofis terdapat kaitan yang sangat erat antara pendidikan dan filsafat. Filsafat mencoba merumuskan citra tentang manusia dan masyarakat, sedangkan pendidikan berusaha mewujudkan citra itu. Di satu sisi, rumusan tentang harkat dan martabat manusia dan masyarakatnya ikut menentukan tujuan dan cara penyelenggaraan pendidikan. Sementara di sisi lain, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia.

Peranan filsafat dalam bidang pendidikan berkaitan dengan kajian-kajian: (1) keberadaan dan kedudukan manusia sebagai makhluk *zon politicon, homo sapiens, animal educandum, animal symbolicum*. (2) masyarakat dan kebudayaannya, (3) keterbatasan manusia sebagai makhluk hidup, (4) perlunya landasan pemikiran dalam pekerjaan pendidikan. Peranan utama pendidikan adalah membelajarkan anak agar mengalami *growth in learning* dan *becoming process*. (Dimiyati. 2000: 16).

Melalui pendidikan, manusia tumbuh dan berkembang secara utuh. Karena itu, sekolah tidak hanya mengajar, melainkan melaksanakan pendidikan. Pendidikan adalah untuk belajar sepanjang hayat. Pendidikan bukan persiapan untuk hidup. Orang belajar dari hidupnya, bahkan kehidupan itu adalah pendidikan bagi setiap orang. Seirama dengan pandangan ini adalah pandangan paham konstruktivisme. Paham konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan dikonstruksi oleh individu berdasarkan interaksinya dengan lingkungan alamiah, teman sebaya, dan masyarakat. Pelajar sendiri yang membangun pengetahuannya, sedangkan guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan mediator yang dinamis.

Fungsi pendidikan adalah membina pribadi-pribadi yang bebas merumuskan pendapat dan menyatakan pendapatnya sendiri dalam berbagai perspektif. Individu yang diinginkan adalah individu yang kreatif. Berpikir bebas termasuk berpikir produktif.

“Multikulturalisme sebagai transformasi pendidikan abad XXI punya basis dalam pengenalan kekayaan tanah air, keunggulan-keunggulan komparatif dan pemahaman posisi Indonesia yang seba majemuk di tengah arus globalisasi dunia. Ada keharusan pengembangan dan pembangunan sistem pendidikan tidak bisa lepas dari gua garba budaya Indonesia. Hak untuk berbudaya (*right to culture*) yang diabaikan prinsip liberal-global, kita terjemahkan dalam tataran praktis dengan menggali kekayaan Indonesia”. (Oetama, Jakob. 2012:81)

Aliran kulturalisme melihat fungsi pendidikan masa kini sebagai suatu upaya untuk merekonstruksi masyarakat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Masalah-masalah tersebut ialah identitas bangsa, benturan kebudayaan, serta preservasi dan pengembangan budaya. Fungsi pendidikan adalah menata masyarakat berdasarkan fungsi-fungsi budaya yang universal berdasarkan budaya lokal yang berkembang ke arah kebudayaan nasional dan kebudayaan global. Nilai-nilai budaya seperti itu adalah Trikonsentris, kovergensi, dan kontinuitas dari Ki Hadjar Dewantara (Dimiyati, 2000).

Rekonstruksi Pemikiran Pendidikan Indonesia ke depan

Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu proses atau pengembangan dan pengoptimalisasi potensi pengetahuan dan keterampilan/kecakapan peserta didik menuju arah pencapaian kemampuan pendidikan yang diinginkan. Salah satu faktor rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah karena lemahnya para tenaga pendidik dalam menggali potensi peserta didik. Para pendidik seringkali memaksakan kehendaknya tanpa pernah memperhatikan kebutuhan, minat, dan bakat yang dimiliki peserta didiknya.

Pendidikan seharusnya memperhatikan kebutuhan peserta didik bukan memaksakan sesuatu yang membuat peserta didik merasa kurang nyaman dalam menuntut ilmu. Proses pendidikan yang baik memberikan kesempatan pada anak untuk kreatif. Hal ini harus dilakukan karena gaya berpikir peserta didik tidak selalu bisa diarahkan. Selain kurang kreatifnya para pendidik dalam membimbing peserta didik, kurikulum yang sentralistik membuat potret pendidikan kurang maksimal. Kurikulum hanya didasarkan pada pengetahuan pemerintah tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Lebih parah lagi, pendidikan relatif kurang mampu menghasilkan lulusan yang kreatif.

“...betapa tertinggalnya perkembangan ilmu pendidikan kita di Indonesia. Setidaknya apa yang kita temukan di dalam lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang menangani masalah-masalah pendidikan telah ketinggalan 30 sampai 40 tahun. Kini kita masih berkuat pada konsep-konsep yang kebanyakan telah ketinggalan zaman”. (Tilaar, H.A.R. 2012:111).

Mengacu kepada deskripsi masyarakat Indonesia di masa kini dan di masa yang akan datang, dapat diajukan rekonstruksi pemikiran bahwa untuk mencapai masyarakat yang memiliki kecakapan hidup yang diperlukan, tidak pelak lagi, sistem pendidikan Indonesia hendaknya diarahkan menuju paradigma pendidikan yang berakar pada pendekatan pendidikan kecakapan hidup yang nantinya dapat memenuhi harapan dan kebutuhan unsur-unsur kebudayaan dan karakter bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila untuk tetap *survive* dalam kehidupan global dan

mempertahankan serta mengembangkan identitas kebudayaan sendiri, kemampuan untuk menghadapi tuntutan dan tantangan hidup yang dihadapi sehari-hari.

“Mencerdaskan kehidupan bangsa lebih jauh dan lebih dalam dari pada sekedar mencerdaskan otak bangsa. Kehidupan bangsa inilah yang harus dicerdaskan, artinya tidak hanya melawan kebodohan sosial (*social foolishness*), tetapi juga melawan keterbelakangan sosial (*social backwardness*), feodalisme dan patronisasi eksploitatif”. (Hatta, Meutia. S. 2012:119)

Penerimaan nilai-nilai asing dalam pendidikan Indonesia hendaknya berdasarkan pada prinsip seleksi asimilasi dengan muatan lokal atau nilai-nilai lokal. Dalam proses seleksi tersebut, terjadi proses dialektika dengan nilai-nilai lokal. Pada tahap akhir, proses dialektika tersebut akan menghasilkan sintesis berupa konvergensi nilai asing dan nilai kepribadian dasar. Secara praktis, nilai-nilai progresif yang bersifat global dapat disandingkan dengan nilai-nilai keIndonesiaan yang menunjukkan identitas unik bangsa Indonesia. Demikian pula konsep progresif tentang fungsi pendidikan sebagai agen pembaharuan sosial seharusnya disesuaikan dengan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia.

Untuk mengantisipasi tidak terjadinya konflik global antarbudaya, maka diperlukan paradigma pendidikan antarbudaya pada tingkat internasional. Pendidikan akan menciptakan generasi-generasi baru yang tidak terkungkung oleh perspektif nasional, rasial, etnik, dan teritorial. Lewat pendidikan antarbudaya, perspektif-perspektif tersebut akan direduksi menjadi pandangan-pandangan yang lebih sesuai dengan realitas-realitas dan tuntutan internasional dan global. Pendidikan antarbudaya dapat berwujud formal, nonformal, atau informal. Pelajaran bahasa asing, studi etnik, komunikasi antarbudaya, adalah bidang-bidang studi yang cukup penting diajarkan di sekolah dan di perguruan tinggi. Di samping itu, program pertukaran siswa, mahasiswa, ilmuwan, artis, dan olahragawan juga merupakan kurikulum pendidikan antarbudaya. Media massa juga merupakan sarana untuk memasyarakatkan nilai-nilai universal ini, melalui berita, ulasan, *feature*, pandangan mata, dan sebagainya. Demikian pula, buku-buku khususnya yang memuat pengetahuan tentang

budaya negara-negara bangsa lain, meliputi adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan perilaku komunikasi mereka sangat penting dijadikan atau diintegrasikan pada kurikulum yang relevan.

“Dunia pendidikan telah melupakan tujuan utama pendidikan yaitu mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan secara simultan dan seimbang. Dunia pendidikan kita telah memberikan porsi yang sangat besar untuk pengetahuan tetapi melupakan pengembangan sikap/nilai dan perilaku dalam pembelajarannya. Dunia pendidikan sangat meremehkan mata-mata pelajaran yang berkaitan dengan pembentukan *karakter bangsa*. Di sisi lain, tidak dipungkiri bahwa pelajaran-pelajaran yang mengembangkan karakter bangsa seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Pendidikan Agama, Ilmu Pengetahuan Sosial dalam pelaksanaan pembelajarannya lebih banyak menekankan pada aspek kognitif daripada aspek afektif dan psikomotor. Disamping itu, penilaian dalam mata-mata pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan nilai belum secara total mengukur sosok utuh pribadi siswa”. (Rachman, 2001)

Pendidikan merupakan proses yang terus menerus, tidak berhenti. Di dalam proses pendidikan ini, kemuliaan dan keluhuran martabat manusia dipegang erat karena manusia adalah subjek pendidikan. Karena merupakan subjek pendidikan, maka pendidikan dituntut untuk bertanggung jawab agar tercapai suatu hasil pendidikan yang baik. Hasil dari pendidikan tersebut adalah perubahan pada subjek-subjek pendidikan itu sendiri. Namun, perubahan-perubahan yang terjadi setelah proses pendidikan itu tentu saja tidak sesempit itu, karena perubahan-perubahan itu menyangkut aspek perkembangan jasmani dan rohani. Melalui pendidikan manusia menyadari hakikat dan martabatnya di dalam relasinya yang tak terpisahkan dengan alam lingkungannya dan sesamanya. Itu berarti, pendidikan sebenarnya mengarahkan manusia menjadi insan yang sadar diri dan sadar lingkungan. Dari kesadarannya itu;ah ia mampu memperbarui diri dan lingkungannya tanpa kehilangan kepribadian dan tidak tercerabut dari akar tradisinya.

“Itulah sebabnya pendidikan menjadi sebuah paspor untuk mendapat hak-hak istimewa, maka isi pendidikan jelas bukan sesuatu untuk mengabdikan untuk rakyat, tetapi untuk mengabdikan kepada diri sendiri, kaum terpelajar” (Rahman, Arif. 2012:163).

Pendidikan merupakan satu hal yang sangat penting untuk peradaban bangsa setiap Negara di dunia ini karena pendidikan merupakan hal yang dinamis dan sangat peka terhadap perubahan perkembangan zaman. Pendidikan di Indonesia mengalami beberapa perkembangan sejak zaman perkembangan Hindu Budha sampai dengan zaman pasca reformasi sekarang. Perkembangan pendidikan di Indonesia mulai dari masa perkembangan Hindu Budha hingga paska kemerdekaan berkembang secara stimultan. Dari mulai perkembangan sastra yang dibawa oleh Hindu Budha, pesantren oleh masa perkembangan Islam, sampai sekolah yang dibawa oleh masa kolonial Belanda sampai sekarang. Pendidikan di Indonesia sebenarnya menganut sistem semi desentralisasi, yaitu setengah desentralisasi setengah sentralisasi. Dalam konsep manajemen sekolah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan sekolah diserahkan sepenuhnya oleh sekolah, akan tetapi dalam melaksanakan evaluasi masih menganut sentralisasi dimana Ujian Negara (UN) diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

Hal mendasar yang harus diperbaiki adalah melakukan rekonstruksi pemikiran di bidang pendidikan yang harus dilakukan oleh para pengambil kebijakan sampai pada para pelaksana di lapangan (tenaga kependidikan). Tenaga kependidikan merupakan ujung tombak usaha perwujudan tujuan pendidikan. Tugas pokok mereka adalah menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Mereka terdiri dari tenaga-tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan (Rektor/Direktur Politeknik/Kepala Sekolah), pengawas pendidikan, peneliti dan pengembang dalam bidang pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar. Semuanya itu harus berfungsi sebagaimana yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya agar upaya memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia dapat tercapai.

Sistem pendidikan nasional mempunyai peranan yang strategis dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang. Upaya pembangunan sistem pendidikan nasional yang dapat diandalkan dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan

mengembangkan manusia Indonesia yang seutuhnya merupakan suatu usaha besar yang cukup rumit pengaturan maupun pelaksanaannya, akan tetapi mempunyai fungsi yang sangat vital. Oleh karena itu, penanganan masalah pendidikan harus dilakukan secara sistematis, karena tidak akan tuntas jika dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan secara individual melalui cara-cara yang bersifat monolitik. Dengan perkataan lain, semua komponen sistem pendidikan (Pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta media massa) harus berperan serta. Agar semua usaha tersebut dapat mencapai tujuannya secara maksimal, usaha-usaha tersebut perlu diatur melalui strategi nasional yang memiliki landasan kuat dan kemauan politik yang kuat pula.

BAB III

Konteks dan Konsep Pendidikan Kewarganegaraan

Pembahasan mengenai pendidikan secara konteks dan teori dimulai melalui cara pandang penulis terhadap pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dapat diperhatikan melalui pertumbuhannya sebagai program kurikuler dalam sistem pendidikan. Dalam bagian ini, pembahasan penulis mengenai pendidikan kewarganegaraan dimulai dari pandangan konstitusional, perkembangan konseptual pendidikan kewarganegaraan dalam konteks kenegaraan, dan pendapat para ahli mengenai konsep pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran/mata kuliah atau program studi yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Bahkan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa Pendidikan kewarganegaraan merupakan landasan utama dalam membentuk karakter bangsa. (Pada penjelasan Pasal 37 Ayat (1)) *“Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”*.

Penjelasan pada pasal tersebut masih memiliki makna yang luas bukan hanya pada makna operasional. Rasa kebangsaan dan cinta tanah air tentu saja tidak tumbuh dengan sendirinya tanpa penggalian nilai kebangsaan dan alasan cinta pada tanah air. Selain itu kedua tujuan tersebut diekspresikan dengan cara yang berbeda-beda, untuk itu dibutuhkan kajian lain untuk menunjangnya.

Sebelumnya, secara formal mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan muncul dalam istilah “*civics*” dalam kurikulum Sekolah Menengah Atas pada tahun 1962. Mata pelajaran ini mengajarkan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Dept. P&K; 1962). Somantri (1969:7) menyebutkan bahwa mata pelajaran ini berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin sejarah, geografi, ekonomi, dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi Hak Asasi Manusia dan pengetahuan tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Secara ringkas mata pelajaran ini lebih mengarah pada pendidikan politik warganegara.

Penerapan dan metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tentu saja memiliki perbedaan di tiap tingkatan institusi pendidikan. Oleh karena itu, secara khusus, berlandaskan UU No. 20 Tahun 2003, Dirjen Dikti merumuskan tujuan pendidikan kewarganegaraan bagi perguruan tinggi. Berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/Kep/2006, tujuan pendidikan kewarganegaraan dirumuskan dalam suatu visi, misi dan kompetensi, yaitu:

Pasal 1

Visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya.

Pasal 2

Misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab.

Pasal 3

- (1) Standar kompetensi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) yang wajib dikuasai mahasiswa meliputi pengetahuan tentang nilai-nilai agama, budaya dan kewarganegaraan dan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari; memiliki kepribadian yang mantap; berpikir kritis; bersikap rasional, etis, estetis dan dinamis; berpandangan luas dan bersikap demokratis yang berkeadaban.

- (2) Kompetensi dasar untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah menjadi ilmuan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila (Tim Dosen PPKn UPI, 2008:2).

Secara rinci, apa yang dirumuskan dalam keputusan Dirjen Dikti di atas meliputi variabel operasional yang secara khusus ditujukan pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Namun variabel operasional yang dicantumkan baru menyentuh pada standarisasi umum, belum meliputi rincian yang lebih teknis. Rincian teknis pelaksanaan pembelajaran PPKn merupakan otoritas perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pendapat ahli lainnya menyatakan bahwa “tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan ialah membuka peluang seluas-luasnya bagi para warganegara, meyakinkan komitmennya, dan menjalankan perannya yang aktif” (Sanusi 1999;4). Peran aktif ini termasuk di dalamnya belajar mendewasakan diri, mengenal hubungan hukum, moral dan fungsional antara warganegara dan satuan-satuan organisasi negara serta lembaga-lembaga publik lainnya. Pernyataan Sanusi ini sejalan dengan penjelasan pasal 37 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003, bahkan dinyatakan sebelum undang-undang tersebut dikeluarkan. Namun tentunya definisi ini belum sepenuhnya menyentuh tataran teknis pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan itu sendiri.

Pakar pendidikan lain menyatakan hal yang sejalan dengan definisi yang dinyatakan oleh Sanusi dalam persepsi yang berbeda namun saling berkesesuaian. Dinyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan telah diartikan sebagai kontribusi pendidikan pada pembangunan karakter sebagai warganegara dan proses dalam mengajarkan aturan pengajaran masyarakat, institusi, dan organisasi-organisasi dan peran warganegara dalam masyarakat yang berfungsi dengan baik. Ia juga menyatakan bahwa *Civic Education* sebagai “...the foundational course work in school to prepare young citizens for an active role in their communitie in their adult

lives” (Coogan 1998:13), Intinya adalah bahwa mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warganegara muda agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakat.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Somantri (2001; 299) mengemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dan pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih siswa untuk berfikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak dan dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan sejak awal kemerdekaan dijadikan sebagai upaya membangun karakter bangsa. Bung Karno pada awal kemerdekaan menekankan upaya ini sebagai bagian dari *Nation and Character Building*. Pembangunan bangsa dan pembangunan karakter merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Inti dari karakter yang dibangun adalah membangun kebajikan (*goodness*) dalam arti berpikir baik (*thinking good*), berperasaan baik (*feeling good*), dan berperilaku baik (*behaving good*).

Secara historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia mengalami banyak perubahan baik secara konseptual maupun kontekstual. Selain itu, nama, orientasi maupun substansi dan pendekatan pembelajarannya mengikuti dinamika politik yang berkembang di Indonesia. Prof. Budimansyah menjelaskan periodisasi perubahan yang terjadi dalam pendidikan kewarganegaraan tersebut melalui perubahan kurikulum yang terjadi dan pendekatan pembelajaran yang digunakan.

“Pada tahun 1962, pendidikan kewarganegaraan dikenal sebagai civics yang isi dan tujuannya berorientasi pada substansi Manipol dan USDEK yang sepenuhnya menggunakan pendekatan indoktrinasi politik.....

... kurikulum 1975 dan 1984 pada semua jenis dan jenjang pendidikan dikenal adanya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan pada kurikulum 1994 dikenal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Namanya memang berbeda namun muatan dan orientasinya adalah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dengan pendekatan pembelajaran

yang masih didominasi pendekatan indoktrinitatif dengan modus transmisi nilai....

... pada era reformasi pasca jatuhnya Orde Baru yang diikuti dengan tumbuhnya komitmen baru kearah perwujudan cita-cita dan nilai demokrasi konstitusional yang lebih dinamis, dikenal adanya mata pelajaran PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara agar mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.” (Budimansyah,2010;4-5).

Berdasarkan pendapat Prof. Budimansyah tersebut dapat diartikan bahwa pendidikan kewarganegaraan mengalami perubahan besar di masa pasca reformasi. Perubahan besar tersebut terletak pada pendekatan pembelajarannya yang sebelumnya bersifat indoktrinitatif kini menjadi lebih demokratis. Perubahan itu termuat pada kurikulum kelima pendidikan kewarganegaraan 2004 dikembangkan untuk mengimbangi perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang semakin cepat. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebelumnya yaitu pada kurikulum 1994 mengarahkan peserta didik untuk menguasai materi pengetahuan yang diberikan pada peserta didik sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kurikulum 1994 menciptakan peserta didik yang mampu menjawab soal dan mengerjakan tugas namun minim kompetensi. Kurikulum 2004 berusaha menjawab kekurangan kurikulum sebelumnya dengan berorientasi pada kompetensi peserta didik.

Kurikulum 2004 dikenal juga sebagai kurikulum berbasis kompetensi selanjutnya disingkat menjadi (KBK). KBK diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada kemampuan melakukan tugas-tugas dengan standard performansi tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Dalam kurikulum 2004 (KBK), PPKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Tujuan ini sejalan dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

Kurikulum 2013 telah diluncurkan pemerintah pada pertengahan tahun 2013 yang lalu bisa jadi akan mengalami nasib yang sama dengan kurikulum yang sudah dan pernah ada sebelumnya jika tidak ada komitmen yang sungguh-sungguh dari para pelaku pendidikan terutama para pengambil kebijakan, dan 3 pilar pelaksana kurikulum yaitu pengawas, kepala sekolah, dan guru sebagai ujung tombak yang berhadapan langsung dengan peserta didik. Meskipun Kurikulum 2013 telah dirancang berbasis aktivitas siswa sehingga bersifat “man to man” yang fokus kepada peserta didik, berkenaan dengan hal tersebut maka setiap mata pelajaran akan mengalami perubahan pendekatan, karena tujuan kurikulum 2013 bukan hanya pengetahuan, tetapi sikap dan keterampilan (Mendikbud, 31 Maret 2013 pada <http://kalbar.antarane.ws.com/berita/311603/mendikbud-buku-kurikulum-2013-dikirim-ke-sekolah> diunduh 26 Juni 2018).

Namun demikian, seperti yang telah kita alami sebelumnya, perubahan kurikulum hanya sebatas perubahan dokumen. Perubahan kurikulum tersebut tidak mengubah secara signifikan perilaku profesional guru, kepala sekolah, maupun pengawas sekolah. Perubahan menjadi sebatas wacana yang menarik untuk dijadikan bahan pelatihan dan diskusi. Pelatihan dan pengarahan cukup menyegarkan pengetahuan dan menjadi informasi baru bagi para guru. Namun, dalam pelaksanaan tugas, dimungkinkan kembali ke kebiasaan semula, jika tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakannya kepada seluruh unsur tenaga kependidikan, dan tenaga kependidikanpun tidak ada semangat untuk memperbaiki profesionalismenya.

Meskipun begitu, menurut penulis, perubahan kurikulum ini belum menjadi kebangkitan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara keseluruhan. Kebangkitan PKn sebagai landasan pembentukan karakter bangsa memerlukan berbagai kajian yang substansial dalam pendekatan pembelajaran PKn yang lebih responsif kepada kebutuhan masyarakat, agar PKn mampu mengatasi problematika karakter bangsa yang terus berkembang.

Problematika kewarganegaraan yang muncul pada masa reformasi tentu memiliki kompleksitas yang berbeda dengan era sebelumnya. Perbedaan ini tidak dapat dipandang dari satu sisi atau dianggap benar-benar terpisah dari era sebelumnya karena perkembangan suatu

masyarakat secara sosiologis memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa lalu. Kerumitan ini muncul pada pembelajaran PKn karena PKn tidak sekadar pembelajaran namun juga penanaman nilai kebangsaan. Perubahan politik, struktur dan budaya politik yang berlaku sangat memengaruhi metode pembelajaran PKn.

Perubahan sosial juga memberikan kontribusi bagi kompleksitas penyesuaian konsep pendidikan karakter dalam PKn. Lepasnya cengkraman otokrasi orde baru membawa masyarakat Indonesia pada kebebasan. Kebebasan tersebut tidak hanya membawa dampak yang baik bagi pembangunan demokrasi namun juga memberikan implikasi buruk bagi masyarakat yang masih belum terbiasa dengan kebebasan. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta bahwa berbagai konflik sosial yang sebelumnya terpendam di masa orde baru mulai kembali mencuat ke permukaan. Kemajemukan masyarakat Indonesia tiba-tiba menjadi masalah bahkan menjadi penyulut konflik di berbagai daerah. Konflik antar etnis, agama dan kelompok sosial mencuat menjadi berita yang mengerikan yang harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Sebut saja Ambon, Poso dan Sampit. Ketiganya memberikan dampak traumatis yang besar bagi masyarakat Indonesia. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga masyarakat di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dimana pola-pola perikehidupan diantara kelompok-kelompok di dalam masyarakat. (Soemardjan, Selo, 2009).

Identitas-identitas komunal menyeruak sebagai nasionalisme baru yang lebih dikenal sebagai etno-nasionalisme (Wignjosoebroto, Soetandyo, 2001). Gerak identifikasi komunal di masyarakat ini memisahkan masyarakat satu dengan lainnya sehingga perbedaan di antaranya meruncing dan konflik pun terjadi. Letupan ini adalah bagian dari ekspresi kebebasan. Setiap orang bebas untuk mengungkapkan identitasnya dan membedakan dirinya dengan yang lain. Namun dalam masyarakat yang belum terbiasa menghadapi kebebasan, perbedaan menjadi permasalahan serius.

Etno-nasionalisme adalah nasionalisme yang lebih riil dan konkrit, dan amat nyata kalau lebih mengedepankan kembali konsep nasionalisme klasik yang mendefinisikan bangsa sebagai satuan manusia yang menurut mitosnya sedarah keturunan, dan yang dalam

ranah empiriknya lebih tersimak dalam wujud hadirnya kesamaan tradisi dan bahasa yang berlaku eksklusif. (Wignjosoebroto, Soetandyo. 2001)

Sebelumnya, di masa pemerintahan orde baru perbedaan ditekankan oleh represi militer. Identitas nasional diseragamkan dan perbedaan dihapuskan dengan mengenalkan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan). Isu ini tentunya adalah upaya politisasi perbedaan sehingga ketika kekuasaan represif runtuh masyarakat yang tertekan mengekspresikannya dengan melompati batas-batas isu tersebut. Pada kondisi ini, pemahaman kewarganegaraan dan wawasan nusantara kembali dibutuhkan. Masyarakat harus mengenal kembali dirinya sebagai warga negara yang tersusun dari kesepakatan antar etnis dan bangsa-bangsa yang menempati satu teritorial yaitu nusantara dalam satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Orde baru memobilisasi isu SARA untuk mengendalikan masyarakat melalui bahasa dan etnisitas. Sepanjang masa berkuasanya pemerintahan Orde baru, Nasionalisme berusaha menyeragamkan perbedaan-perbedaan budaya demi kepentingan ‘pembangunan nasional’ (misalnya, demi mempromosikan pariwisata). Jadi, ada ruang bagi perbedaan-perbedaan etnis asalkan tidak membahayakan ‘kepentingan nasional’. Memang, ideologi Nasionalisme Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika” secara eksplisit mengakui perbedaan budaya dan peran perbedaan budaya ini menentukan karakter bangsa Indonesia sebagai sebuah masyarakat yang plural dan toleran. Tetapi sekarang tampaknya Nasionalisme telah kehilangan kendali atas proses-proses identitas budaya yang dulu pernah dicoba untuk diseragamkan guna kepentingan-kepentingan pembangunan Nasionalisme. Sekarang sejak jatuhnya pemerintahan Suharto, tampaknya diberbagai daerah urutan prioritasnya sudah secara efektif dibalik. Sekarang, pemikiran-pemikiran tentang pembangunan nasional dan modernisasi nasional telah digantikan dengan konflik-konflik berbasis-etnis yang berkaitan dengan isu pembangunan yang tidak merata dan marginalisasi masyarakat asli. (Yekti Mauneti, 2004:2)

Keadaan ini tentu sangat mengkhawatirkan dan perlu dijadikan perhatian khusus bagi institusi pendidikan sebagai alat integrasi sosial. Keadaan yang sama sebenarnya terjadi juga di belahan dunia yang lain

seperti Yugoslavia, negara Eropa Timur yang telah mengalami disintegrasi berkali-kali. Ada juga negara lain yang berhasil melewati krisis kebangsaannya dengan mengembangkan konsep pembangunan karakter kebangsaan yang tepat. Malaysia adalah salah satu contoh negara yang menciptakan *civic culture* sebagai kesepakatan budaya untuk membangun kerukunan antarkelompok ras dan agama.

Era globalisasi yang sedang kita hadapi juga memberikan kontribusi besar bagi perubahan sosial yang terjadi di seluruh dunia. Globalisasi yang memutus batas-batas negara dengan pesatnya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memengaruhi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan masifnya informasi dan dunia seakan menjadi tanpa batas berbagai informasi baik yang penting maupun yang tidak penting, berbahaya ataupun tidak dapat diakses melalui perkembangan teknologi informasi. Fenomena ini menantang kekuatan penerapan unsur-unsur karakter bangsa untuk dapat bertahan di tengah arus informasi yang mengaburkan karakter-karakter tersebut.

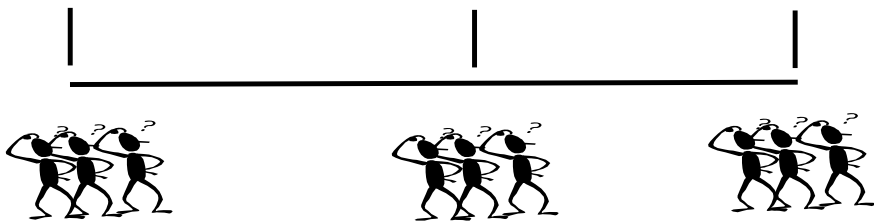
Saat ini, Indonesia dihadapkan pada beberapa agenda global maupun regional, antara lain: (1) *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), *World Trade Organization* (WTO), *Asia Pasific Economic Cooperation* (APEC), *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), dan *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA). Tidak dapat disangkal yang menjadi fokus perhatian di era globalisasi kenyataan pertama adalah bahwasanya globalisasi diusung oleh kepentingan ekonomi daripada kepentingan politik. Kenyataan kedua perubahan dunia lebih banyak ditentukan oleh kepentingan dari negara-negara maju daripada kepentingan bersama (negara maju dan kurang maju). (Nugroho, 2003)

Perubahan konseptual terhadap pendidikan kewarganegaraan juga muncul kembali setelah terjadinya perbedaan konsep antara dua konsep besar mengenai pendidikan kewarganegaraan yaitu *civics education* dan *citizenship education*. Kedua konsep ini meskipun tidak saling negasi. tetap memiliki perbedaan mendasar mengenai cara pandangya terhadap warganegara. Istilah *civics* lebih cenderung digunakan dalam makna yang memiliki tujuan untuk mengembangkan warganegara yang cerdas dan baik (Winataputra, 2001;129). Sedangkan *citizenship* atau *citizenship education* lebih cenderung pada visi yang lebih luas untuk menunjukkan “*instructional*

effect” dan “nurturant effects” dari keseluruhan proses pendidikan terhadap pembentukan karakter individu sebagai warganegara yang cerdas dan baik (Winataputra 2001;129). Perbedaan antara kedua konsep ini cakupannya. Coogan (dalam Winataputra, 2001;133) menyatakan bahwa *citizenship education* memiliki cakupan yang lebih luas dari *civic education* yang merupakan bagian dari *civic education* itu sendiri.

Untuk melihat kekurangan dari pendekatan pembelajaran kewarganegaraan, David Kerr (dalam Budimansyah, 2010; 52) memberikan ilustrasi berikut;

Continuum of Democracy Education
Education about Democracy Education in Democracy Education For Democracy



Gambar 3.1
 Realitas universal isi dan modus pendidikan demokrasi.

Thin Citizenship Education	Moderate Citizenship Education	Thick Citizenship Education
(exclusive, elitist, formal, content-led, knowledge-based, didactic transmission, easier to achieve, civic education) (South East Asia: Indonesia)	Central, South & East Europe, Australia	(inclusive, activist, participative, process-led, value-based, interactive, more difficult to achieve, citizenship education) North Europe, USA, New Zealand

(Budimansyah, 2010:52)

Jika melihat ilustrasi tersebut, terlihat bahwa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia atau Asia Tenggara pada umumnya masih masuk dalam kategori *thin* (ramping) dengan ciri eksklusif, elitis, formal, orientasi pada hasil, berbasis pengetahuan dengan asumsi mengubah peserta didik dari tidak tahu menjadi tahu, transmisi didaktis, mudah dipelajari, dan *civic education*. Ciri *exclusive* adalah salah satu ciri yang paling dominan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Ciri *exclusive* artinya program pembinaan nilai moral warganegara hanya dibebankan kepada subjek mata pelajaran tertentu/ Dalam hal ini pendidikan kewarganegaraan, sedang subjek pelajaran lain bahkan program-program sekolah lainnya tidak turut memikul tanggung jawab ini secara langsung maupun tidak langsung. Ciri lain adalah elitist dimana setting pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan menggunakan model konvensional yang memisahkan guru atau dosen dari mahasiswa atau peserta didik seolah-olah bertindak sebagai elit. (Budimansyah, 2010)

Kedua ciri pendidikan kewarganegaraan ini mewarnai model pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan semenjak awal kemerdekaan. Ciri ini dapat ditemukan di setiap institusi pendidikan semenjak tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pada umumnya, pendidikan kewarganegaraan memang dipisahkan dari subjek pendidikan lainnya, pembelajaran moral bahkan dianggap sekedar syarat formalitas yang tidak bermakna. Peserta didik seringkali menganggap PKn sebagai subjek pelajaran yang paling mudah, formal dan tidak begitu penting. Sedangkan para pengajarnya yang masih berorientasi elitis tetap menjaga jarak terhadap peserta didik.

Setting pembelajaran PKn elitis diperkenalkan secara massif melalui penataran P4 yang wajib diikuti oleh setiap pengajar dan peserta didik di setiap tingkatan. Tentu tidak mudah mengubah paradigma ini karena model pembelajaran ini telah bertahan selama 32 tahun. Paradigma PKn yang demokratis menuntut berubahnya ciri-ciri otokrasi. Adaptasi ini masih sulit dijalankan baik oleh para pengajar maupun peserta didik karena paradigma demokratis bertentangan dengan Paradigma otokrasi yang ada sebelumnya.

Kelas dalam metode pembelajaran demokratis harus menghilangkan batas-batas hirarki elit. Kewarganegaraan pun tidak luput dari perubahan paradigma ketika metode pembelajaran ini diubah. Paradigma kewarganegaraan bukan hanya berorientasi pada kepatuhan namun

juga pemberdayaan dan pemahaman mengenai negara dan operasional negara. Peserta didik dituntut untuk cerdas mengamati dan memahami perkembangan negaranya sekaligus memahami bahwa dirinya adalah bagian dari negara yang berarti terikat pada hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Pola pembelajaran (khususnya PKn) di Indonesia yang berorientasi pada kepatuhan (Indoktrinasi) ternyata bukan hanya tidak mampu mengikuti perkembangan zaman globalisasi namun juga berpotensi menghambat kreatifitas peserta didik. Untuk menanggulangi kelemahan tersebut, pendidikan kewarganegaraan harus mulai mengadopsi pendekatan lain yang dilakukan di negara-negara yang termasuk dalam kategori program pendidikan karakter yang gemuk (*“Thick Citizenship”*), seperti pada sejumlah negara maju misalnya, Amerika Serikat, Eropa Utara dan New Zealand. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan sebagai sumber penanaman nilai, juga harus merembes pada subjek-subjek mata pelajaran lainnya agar tercipta sebuah kesinambungan pemeliharaan nilai kebangsaan. Karakteristik pendidikan kewarganegaraan di negara-negara tersebut adalah sebagai berikut;

1. Inklusif, artinya program pembinaan nilai-moral warganegara dilakukan seluruh subjek pembelajaran dengan pendidikan kewarganegaraan sebagai sector yang memimpin.
2. Activis, berkenaan dengan seting ruangan yang tidak lagi menggunakan model konvensional melainkan menggunakan model kelompok-kelompok kecil, model ankere, dan lingkaran di mana meja guru berada di tengah-tengah kelompokan para siswa tidak lagi terpisah secara elitis di muka kelas.
3. Partisipatif, berkenaan dengan pengelolaan pembelajaran yang tidak hanya sekedar mencapai target menyelesaikan materi pelajaran melainkan mengoptimalkan partisipasi siswa secara aktif.
4. Orientasi pada proses, maknanya adalah bahwa pembelajaran bukan hanya mengutamakan hasil belajar melainkan mengoptimalkan proses belajar aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
5. Berbasis nilai, maknanya adalah bahwa pembelajaran lebih berbasis nilai yakni ingin membina sikap dan perilaku ke arah pengetahuan.

6. Interaktif, maknanya adalah bahwa proses belajar mengajar tidak dilakukan searah melainkan multi arah di mana guru bukan satu-satunya sumber belajar, sumber belajar lain didayagunakan secara optimal.
 7. Lebih sulit didapat hasilnya, maknanya adalah bahwa hasil belajar harus sedikit sulit untuk diraih dalam pengertian bahwa untuk memperoleh nilai seseorang harus melewati berbagai pengalaman belajar, misalnya ulangan, laporan observasi, proyek belajar untuk memecahkan masalah, perilaku harian disekolah, dsb.
 8. *Citizenship education*, merupakan istilah generic mencakup pengalaman di dalam dan di luar sekolah.
- (Budimansyah,2010;54)

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dilihat bahwa karakteristik pendidikan kewarganegaraan yang ada di Indonesia masih jauh tertinggal dan memerlukan banyak perbaikan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Indonesia yang baru saja memulai proses demokratisasi setelah sejak awal kemerdekaan berada di bawah kekuasaan *dictatorial* memerlukan banyak persiapan untuk menghadapi demokratisasi. Pendekatan pembelajaran yang indoktrinatif dan masih tergolong ramping memerlukan banyak perombakan mendasar ("*Social change*") untuk beradaptasi dengan pendekatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang lebih terbuka di era demokrasi.

Sebagaimana karakter kebangsaan, demokrasi juga merupakan nilai yang berlaku di masyarakat. Nilai demokrasi sejalan dengan sistem politik yang sekarang dianutnya. Lickona menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat, rakyat sendiri bertanggung jawab untuk membentuk masyarakat yang bebas dan adil (Lickona, 1991;6). Artinya, rakyat sendiri harus menjadi warganegara yang baik. Rakyat harus memahami dan bertanggung jawab atas fondasi moral demokrasi; menghargai hak individual, menghormati hukum, partisipasi sukarela dalam kehidupan sosial, dan mementingkan kebaikan bersama. Oleh karena itu, pembelajaran demokrasi harus menjadi roh bagi pembelajaran kewarganegaraan karena keduanya tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan perspektif kewarganegaraan, dikenal adanya tiga kompetensi yang perlu dimiliki seorang warga negara yang baik, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan

kewarganegaraan (*civil Skill*), dan watak kewarganegaraan (*Civic disposition*). Kecakapan kewarganegaraan meliputi kecakapan intelektual dan kecakapan-kecakapan lain yang dibutuhkan untuk partisipasi yang bertanggung jawab, efektif, dan ilmiah. Watak kewarganegaraan mengisyaratkan pada karakter yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. (Budimansyah, 2010: 21)

Pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan kandungan apa yang seharusnya diketahui oleh warganegara, misalnya pengetahuan tentang kehidupan politik dan pemerintahan yang mencakup dasar-dasar pembentukannya, bagaimana konstitusi mengaurnya dan tentang peran warganegara dalam kehidupan politik. Kecakapan kewarganegaraan meliputi kecakapan intelektual dan kecakapan-kecakapan lain yang dibutuhkan untuk partisipasi yang bertanggung jawab, efektif, dan ilmiah dalam proses politik dan dalam *civil society*. Watak kewarganegaraan mengisyaratkan pada karakter yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Ketiga kompetensi tersebut dapat dibentuk melalui pendidikan karakter dalam pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan pendidikan kewarganegaraan diberikan di perguruan tinggi menurut penjelasan Pasal 37 Ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2003: “Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Sedangkan visi PKn di perguruan tinggi menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor : 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi adalah sebagai sumber nilai; sebagai pedoman penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa, untuk mengembangkan kepribadiannya selaku warga negara yang berperan aktif; dan menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani.

Sebagai salah satu sumber nilai, pendidikan kewarganegaraan juga tidak terlepas dari sudut pertimbangan moral dan non moral. Nilai sendiri memiliki sifat yang abstrak dan berubah-ubah karena konvensi atau kesepakatan suatu masyarakat yang menciptakannya. Nilai juga bukanlah

sesuatu yang dapat diterima begitu saja namun membutuhkan proses resepsi atau proses penerimaan yang panjang dan sangat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya.

Values are our codes of internal conduct ; the principles upon which we run our lives and make our decisions. Values are the morals and standards of behavior we set for ourselves, and they most commonly include such universal concepts as truthfulness, honesty, fairness, justice, honour, etc. such standards of behavior are essential for both personal and social survival, without them, chaos and anarchy would erupt, and civilization will be estingnished in very short order. (Buzan 2001 : 34).

Penjelasan Buzan di atas menegaskan bahwa nilai adalah konduksi internal atau media yang mengantarkan kode-kode etis yang kita pahami atau prinsip yang kita jalani. Nilai adalah moral dan standar perilaku yang kita tetapkan untuk diri kita sendiri yang pada umumnya adalah konsep-konsep universal seperti kebenaran, kejujuran, keadilan, kehormatan dan sebagainya. Standar-standar tersebut ditetapkan di seluruh lapisan masyarakat untuk melestarikan nilai masyarakat tanpa standarisasi dan moralitas yang terangkum dalam nilai tersebut. Hal tersebut mencegah kekacauan yang dapat terjadi dan akan menghancurkan masyarakat tersebut.

Secara esensial, nilai tidak dapat dipisahkan dari pendidikan, apapun subjek atau spesifikasi pendidikan tersebut. Pendidikan nilai secara substantif melekat pada seluruh dimensi tujuan pendidikan. (Budimansyah. 2010;130) menyebutkan bahwa nilai pada dasarnya tidak semata-mata ditangkap dan diajarkan tetapi terlebih lagi nilai dicerna dalam pengertian yang lebih mendalam meliputi pembakuan, internalisasi dan pemelekatannya pada kualitas pribadi seseorang melalui proses belajar.

Secara praktis, sebenarnya proses pendidikan nilai tidak terpisah dari kehidupan yang dialami oleh setiap manusia. Nilai ditransmisikan melalui berbagai sarana seperti dongeng, nasihat, pantun dan pola tradisi lisan lainnya. Selain tradisi lisan, nilai secara tertulis juga telah didapat melalui kitab suci agama. Namun di era globalisasi ini, transmisi nilai berada di luar kemampuan kita untuk menduganya. Dengan akses informasi dan

teknologi, nilai di suatu tempat dengan nilai yang berlaku di tempat yang lain bisa saling memengaruhi, mengaburkan, menghilangkan, ataupun saling melengkapi.

Kebiasaan berbuat baik tidak selalu menjamin bahwa manusia yang telah terbiasa berbuat baik secara sadar menghargai pentingnya karakter, karena mungkin saja kebiasaan berbuat baik tersebut dikarenakan rasa takut atau tidak enak dengan orang lain, atau hukuman yang diberikan jika tidak berbuat baik, tidak tulus karena dia menginginkan berbuat baik. Maka, dalam pendidikan karakter diperlukan aspek perasaan, komponen ini dalam pendidikan karakter disebut “*desiring the good*” atau keinginan untuk berbuat kebaikan. Menurut Lickona pendidikan karakter yang baik harus melibatkan bukan saja aspek “*knowing the good*” (*moral knowing*), tetapi juga “*desiring the good*” atau “*loving the good*” (*moral feeling*) dan “*acting the good*” (*moral action*). (Lickona 1992:49).

Tanpa itu semua manusia akan sama seperti robot yang terindoktrinasi suatu paham. Pendidikan karakter ini erat kaitannya dengan kecerdasan emosi anak seperti percaya diri (*confidence*), kemampuan kontrol diri (*self-control*), kemampuan bekerjasama (*cooperation*), kemudahan bergaul dengan sesamanya (*socializaation*), kemampuan berkonsentrasi (*concentration*), rasa empati (*empathy*), dan kemampuan berkomunikasi (*comunication*). Secara elaborative dimensi ini dirinci menjadi tujuan pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yakni pengembangan pengetahuan dan pengertian, nilai dan sikap, dan keterampilan.

Berdasarkan penalaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan nilai adalah proses belajar yang berkesinambungan. Secara mendasar nilai yang ditanamkan adalah nilai cerdas dan baik. Kedua nilai universal ini memerlukan spesifikasi lanjutan yang sesuai kebutuhan dan lokasi nilai tersebut ditanamkan. Sebagai contoh adalah adopsi nilai keagamaan. Adopsi nilai ini seringkali jarang ditemukan dari referensi pendidikan nilai di negara-negara maju seperti Amerika namun menjadi kebutuhan khusus di Indonesia yang sangat kental unsur religiusnya.

Jika digambarkan keterkaitan antara pendidikan nilai dengan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan kecakapan hidup (*life skills education*) dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut ini.



Gambar 3.2
Keterkaitan PKn, Pendidikan Nilai, Karakter dan Kecakapan Hidup

Pendidikan Karakter dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan karakter berkaitan dengan aspek aksiologis dalam pendidikan, aspek ini melibatkan banyak kajian di dalamnya mulai dari kajian sosiologis hingga psikologis. Pendidikan karakter bisa dikatakan sebagai ujung tombak dari pendidikan karena melalui pendidikan inilah karakter masyarakat dibentuk dalam institusi. Dalam kajian pendidikan, pendidikan karakter seringkali disamakan dengan pendidikan moral dengan asumsi bahwa pembentukan moralitas akan melahirkan pembentukan karakter. Pendidikan karakter memiliki makna yang lebih luas dari pendidikan moral. Pendidikan karakter bukan hanya mengajarkan benar dan salah, tetapi juga menanamkan kebiasaan tentang hal yang baik.

Pendidikan karakter dalam konteks kewarganegaraan membentuk empat karakter utama yaitu karakter individual, karakter privat dan karakter public, karakter cerdas, karakter baik dan pada akhirnya membentuk

karakter bangsa. Pendidikan karakter yang dilakukan merupakan landasan bagi pembentukan karakter bangsa yang sesuai dengan ideologi negaranya. Kebutuhan pendidikan karakter di suatu negara tidak hanya muncul di Indonesia namun juga di negara lainnya. Di Amerika Serikat, Lickona menjelaskan bahwa terjadi krisis moral yang mencemaskan di awal abad 21, karena beberapa alasan mendasar sebagai berikut;

- a. Adanya kebutuhan nyata dan mendesak
- b. Proses transmisi nilai sebagai proses peradaban
- c. Peranan satuan pendidikan sebagai pendidik moral yang vital pada saat melemahnya pendidikan nilai dalam masyarakat
- d. Tetap adanya kode etik dalam masyarakat yang syarat konflik nilai
- e. Kebutuhan demokrasi dalam pendidikan moral
- f. Kenyataan sesungguhnya bahwa tidak ada pendidikan yang bebas nilai
- g. Persoalan moral sebagai salah satu persoalan dalam kehidupan
- h. Adanya landasan yang kuat dan dukungan luas terhadap pendidikan moral di satuan pendidikan (Lickona,1991; 20-21)

Alasan mendasar yang disebutkan oleh Lickona adalah garis besar dari kebutuhan pendidikan karakter dan belum mencakup pada detail perilaku dalam keseharian di masyarakat yang berbeda-beda budayanya. Dalam konteks negara-negara yang mengadopsinya, alasan-alasan tersebut perlu ditambahkan dengan kebutuhan-kebutuhan spesifik yang muncul dari dinamika negara itu sendiri di Indonesia, setidaknya perlu ditambahkan dua alasan lagi yaitu alasan rentannya kesatuan bangsa mengingat konflik-konflik komunal yang bermunculan pasca orde baru dan alasan kompetensi daya saing dalam globalisasi mengingat kebutuhan Indonesia sebagai negara berkembang dalam hal SDM berbeda dengan negara-negara maju.

Hingga sekarang, kebutuhan yang muncul dalam reformasi satuan pendidikan hanya berkuat pada persoalan akademis. Melalui penalaran Lickona di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter juga diperlukan untuk menunjang reformasi satuan pendidikan dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Jika diandaikan bahwa karakter merupakan ukuran utama dari seorang individu, maka begitu juga dengan sebuah bangsa, karakter warganegara merupakan ukuran utama dari kualitas suatu bangsa.

Lickona, mengacu pada pemikiran filosof Michael Novak, menyatakan bahwa watak atau karakter seseorang dibentuk melalui tiga komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Ketiga komponen tersebut ialah karakter yang baik (*components of good character*), yaitu *moral knowing* (konsep moral), *moral feeling* (perasaan atau sikap moral), dan *moral behavior* (perilaku bermoral). Konsep moral meliputi kesadaran moral (*moral awareness*), pengetahuan nilai moral (*knowing moral value*), pandangan ke depan (*perspective taking*), penalaran moral (*reasoning*), pengambilan keputusan (*decision making*), dan pengetahuan diri (*self knowledge*). Sikap moral mencakup kata hati (*conscience*), rasa percaya diri (*self esteem*), empati (*emphaty*), cinta kebaikan (*loving the good*), pengendalian diri (*self control*), dan kerendahan hati (*humility*). Sementara itu, yang termasuk perilaku moral adalah kemampuan (*competence*), kemauan (*will*), dan kebiasaan (*habit*). Dengan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pendidikan moral merupakan bagian dari pendidikan karakter namun memiliki cakupan yang lebih sempit yaitu pada nilai moral.

Ketiga komponen utama pendidikan karakter tersebut diperlukan agar siswa mampu memahami, merasakan, dan mengerjakan nilai-nilai kebajikan. Moral behavior merupakan hasil dari dua komponen karakter lainnya. Sebagai contoh, untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam berperilaku moral (*act morally*) harus dilihat tiga aspek seperti uraian di atas, yaitu kemampuan, keinginan, dan kebiasaan.

Seseorang tidak dapat melakukan tindakan moral bila ia tidak memiliki kompetensi sosial, berkeinginan, dan terbiasa melakukannya. Tindakan moral merupakan sesuatu yang harus dibiasakan pada diri seseorang sehingga menjadi bagian dari karakternya. Dalam hal perilaku sosial, aspek karakter juga mempunyai peran penting. Seseorang yang mempunyai kecerdasan emosi sosial tinggi adalah mereka yang dapat mengenal bagaimana perasaannya dan mengontrol perasaannya. Sehingga anak-anak ini lebih mudah mengatasi masalah-masalah yang dihadapi baik masalah pelajaran maupun masalah hubungan dengan kawan-kawannya. Mereka juga dapat terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja seperti kenakalan, tawuran, obat bius, dan minuman keras, perilaku seks bebas, dan sebagainya (Gottman, 1997).

Dalam pendidikan karakter penting sekali dikembangkan nilai-nilai etika inti, seperti kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. Selain itu juga mencakup nilai-nilai kinerja pendukungnya, seperti ketekunan, etos kerja yang tinggi, dan kegigihan sebagai basis karakter yang baik. Kesemua unsur tersebut dimasukkan dalam pendidikan kewarganegaraan dan disesuaikan dengan nilai-nilai kebangsaan sebagai bagian dari pembentukan karakter bangsa.

Penting bagi perguruan tinggi untuk tidak hanya memperhatikan kebutuhan kompetensi akademis mahasiswa, tapi juga pembinaan karakternya agar lulusan menjadi lulusan yang siap secara akademis dan berkarakter baik. (Chrisiana, Wanda, 2005). Proses pembentukan karakter, baik disadari maupun tidak, akan mempengaruhi cara individu tersebut memandang diri dan lingkungannya dan akan tercermin dalam perilakunya sehari-hari. Pendidikan karakter memiliki beberapa model pembelajaran yaitu; model pembelajaran monolitik, model pembelajaran terintegrasi dan model pembelajaran gabungan. Dalam model pendekatan monolitik, pendidikan karakter dianggap sebagai mata pelajaran tersendiri. Oleh karena itu, pendidikan karakter memiliki kedudukan yang sama dan diperlakukan sama seperti pelajaran atau bidang studi lain. Dalam hal ini, guru bidang studi pendidikan karakter harus mempersiapkan dan mengembangkan kurikulum, mengembangkan silabus, membuat Rancangan Proses Pembelajaran (RPP), metodologi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Konsekuensinya pendidikan karakter harus dirancang dalam jadwal pelajaran secara terstruktur. Kelebihan dari pendekatan ini antara lain materi yang disampaikan menjadi lebih terencana matang/terfokus, materi yang telah disampaikan lebih terukur. Sedangkan kelemahan pendekatan ini adalah sangat tergantung pada tuntutan kurikulum, kemudian penanaman nilai-nilai tersebut seolah-olah hanya menjadi tanggung jawab satu orang guru semata, demikian pula dampak yang muncul pendidikan karakter hanya menyentuh aspek kognitif, tidak menyentuh internalisasi nilai tersebut.

Pendekatan yang kedua dalam menyampaikan pendidikan karakter adalah disampaikan secara terintegrasi dalam setiap bidang pelajaran, dan oleh karena itu, menjadi tanggung jawab semua guru. Dalam konteks ini, setiap guru dapat memilih materi pendidikan karakter yang sesuai

dengan tema atau pokok bahasan bidang studi. Melalui model terintegrasi ini maka setiap guru adalah pengajar pendidikan karakter tanpa kecuali. Keunggulan model terintegrasi pada setiap bidang studi antara lain setiap guru ikut bertanggung jawab akan penanaman nilai-nilai hidup kepada semua siswa, di samping itu pemahaman nilai-nilai pendidikan karakter cenderung tidak bersifat informatif-kognitif, melainkan bersifat aplikatif sesuai dengan konteks pada setiap bidang studi. Dampaknya siswa akan lebih terbiasa dengan nilai-nilai yang sudah diterapkan dalam berbagai setting. Sisi kelemahannya adalah pemahaman dan persepsi tentang nilai yang akan ditanamkan harus jelas dan sama bagi semua guru. Namun, menjamin kesamaan bagi setiap guru adalah hal yang tidak mudah, hal ini mengingat latar belakang setiap guru yang berbeda-beda.

Model di luar pengajaran penanaman nilai-nilai pendidikan karakter dapat juga ditanamkan di luar kegiatan pembelajaran formal. Pendekatan ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan kemudian dibahas nilai-nilai kehidupannya. Model kegiatan demikian dapat dilaksanakan oleh guru sekolah yang diberi tugas tersebut atau dipercayakan kepada lembaga lain untuk melaksanakannya. Kelebihan pendekatan ini adalah siswa akan mendapatkan pengalaman secara langsung dan konkrit. Kelemahannya adalah tidak ada dalam struktur yang tetap dalam kerangka pendidikan dan pengajaran di sekolah, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih banyak.

Model pendekatan ketiga adalah menggabungkan antara model terintegrasi dan model di luar pelajaran secara bersama. Model ini dapat dilaksanakan dalam kerja sama dengan tim baik oleh guru maupun dalam kerja sama dengan pihak luar sekolah. Kelebihan model ini adalah semua guru terlibat, di samping itu guru dapat belajar dari pihak luar dan siswa untuk mengembangkan diri. Siswa menerima informasi tentang nilai-nilai sekaligus juga diperkuat dengan pengalaman melalui kegiatan-kegiatan yang terencana dengan baik. Mengingat pendidikan karakter merupakan salah satu fungsi dari pendidikan nasional, maka sepatutnya ada pada setiap materi pelajaran.

Sebagai sarana pendidikan karakter, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya bertugas sebagai sumber ilmu pengetahuan namun juga sumber penanaman nilai. Karakter tidak hanya berkaitan dengan persoalan moral, lebih dari itu karakter melingkupi aspek sosiologis dan psikologis peserta didik dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa pendidikan karakter merupakan bagian yang tidak terpisah dari pendidikan kewarganegaraan.

Luasnya cakupan pendidikan karakter memungkinkan pendidikan ini diadopsi oleh berbagai subjek ilmu pengetahuan sebagai nilai yang harus disampaikan. Dalam pembangunan SDM, pembangunan karakter kebangsaan merupakan fondasi utama bagi karakter SDM itu sendiri. Pendidikan Kewarganegaraan sendiri memang merupakan katalisator utama dalam penanaman nilai kebangsaan dan pembentukan karakter kebangsaan. Namun, pendidikan karakter harus juga termuat dalam subjek pendidikan lain yang menunjang terciptanya SDM dalam industri kreatif.

Jika diperhatikan dengan seksama, perkembangan pemikiran pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yang telah berjalan selama empat dasawarsa (1962-1998) menunjukkan adanya inkonsistensi pemikiran. Inkonsistensi ini muncul dari berubahnya epistemologi pendidikan kewarganegaraan pada setiap pergantian pemerintahan yang dapat dilihat dari perubahan istilah pendidikan. Inkonsistensi seperti ini menunjukkan terjadinya krisis konseptual dalam pemikiran pendidikan kewarganegaraan. Krisis ini harus segera diselesaikan dan menghasilkan satu acuan baru bagi pendidikan kewarganegaraan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak terganggu oleh dinamika politik yang berlangsung di negeri ini.

Internalisasi Pendidikan Karakter dan Nilai

Internalisasi menurut Poerwadarminta adalah penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin atau nilai, sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Berdasarkan pengertian tersebut, internalisasi adalah penanaman nilai-nilai normatif atau nilai-nilai dasar sebuah institusi yang menentukan tingkah laku anggotanya yang diinginkan oleh institusi

tersebut. Muhadjir mengemukakan bahwa proses internalisasi dilakukan melalui Lima tahapan, yaitu: (1) menerima, (2) menanggapi, (3) memberi nilai, (4) mengorganisasi nilai, dan (5) karakterisasi nilai. Internalisasi yang dilakukan secara integratif dan berkelanjutan, dapat membentuk karakter mahasiswa berdasarkan nilai-nilai yang dikembangkan perguruan tinggi. Kirschenbaum mengemukakan bahwa proses internalisasi meliputi "*inculcating value and morality, modeling value and morality, facilitating value, and morality, skills for value development, and moral literacy*".

10 Pendapat lainnya disampaikan oleh Prochaska & D'Clemente yang mengatakan bahwa dalam perubahan perilaku diperlukan Lima tahapan agar perilaku tersebut benar-benar terwujud, yaitu: procontemplation, contemplation, preparation, action dan maintenance. Procontemplation adalah kondisi awal seseorang dimana pada dasarnya tidak ingin mengubah perilaku. Contemplation adalah proses mempertimbangkan untuk berubah. Preparation sudah mulai ada perubahan sedikit. Action diartikan seseorang mulai terikat perilaku baru. Tahapan terakhir adalah maintenance, yaitu tahapan mempertahankan perilaku baru.

Sedangkan nilai, menurut Soekamto adalah sesuatu yang dapat dijadikan sasaran untuk mencapai tujuan yang menjadi sifat keseluruhan tatanan yang terdiri dari dua atau lebih dari komponen yang satu sama lainnya saling mempengaruhi atau bekerja dalam satu kesatuan atau keterpaduan yang bulat dan berorientasi kepada nilai dan moralitas Islami. Soemantri mengartikan nilai sebagai hal yang terkandung dalam hati nurani manusia yang lebih memberi dasar dan prinsip akhlak yang merupakan standar dari keindahan dan efisiensi atau keutuhan kata hati (potensi)". Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merumuskan lima nilai utama, yaitu:

- 1) nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan yaitu nilai religius, dimana pikiran, perkataan, tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan dan ajaran agamanya;
- 2) nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri, meliputi:
 - (a) nilai jujur, (b) bertanggung jawab, (c) bergaya hidup sehat, (d) disiplin, (e) kerja keras, (f) percaya diri, (g) berjiwa wirausaha, (h) berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, (i) mandiri, (j) ingin tahu, dan (k) cinta ilmu;

- 3) nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama, seperti (a) sadar, (b) patuh, (c) menghargai karya dan prestasi orang lain, (d) santun, dan (e) demokratis;
- 4) nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan, seperti nilai peduli sosial dan lingkungan; dan
- 5) nilai kebangsaan, yaitu (a) nasionalis, dan (b) menghargai keberagaman.

Nilai pada umumnya merupakan sesuatu yang baik dan positif. Frondizi menjelaskan bahwa: *"...they are independent of goods, goods are valuable things. This independence includes every empirical form, values are apriori qualities. Independence refers not only to objects which exist in the world, but also to our reactions towards good and values. Values as independent qualities do not vary with thing"*. Oleh karenanya nilai menjadi panduan bagi seseorang dalam melakukan sesuatu. Nilai menjadi norma moral yang menjadi landasan interaksi sosial.

Oleh karena itu, melalui penelitian, penulis berharap mampu merumuskan pemikiran baru mengenai pendidikan kewarganegaraan yang sesuai dengan kebutuhan actual masyarakat. Dalam penelitian, peneliti menggunakan konsep pendidikan kewarganegaraan berdasarkan definisi yang disebutkan oleh Sanusi da Coogan. Kemudian, dalam pendidikan karakter, penulis menggunakan konsep pendidikan karakter yang diperkenalkan oleh Thomas Lickona sebagai dasar bagi analisis pemikiran pendidikan karakter pada penelitian. Peneliti selaku penulis buku ini beranggapan bahwa keterhubungan antara penalaran para ahli tersebut dapat memudahkan penelitian untuk memudahkan dilakukannya rekonstruksi pemikiran pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan kecakapan Hidup dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kecakapan hidup merupakan bagian dari pendidikan karakter yang juga tercakup dalam pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kecakapan hidup bukanlah sekedar keterampilan kerja (vokasional), (WHO,1997) mendefinisikan bahwa kecakapan hidup sebagai keterampilan atau kemampuan untuk dapat beradaptasi dan

berperilaku positif, yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam kehidupan secara lebih efektif. Kecakapan hidup mencakup lima jenis, yaitu:

- (1) kecakapan mengenal diri,
- (2) kecakapan berpikir,
- (3) kecakapan sosial,
- (4) kecakapan akademik, dan
- (5) kecakapan kejuruan.

Kelima kecakapan hidup tersebut dalam konteks kewarganeraan tentunya harus bermuatan kebangsaan. Untuk itu pendidikan kecakapan hidup, pendidikan karakter dan pendidikan kewarganeraan tidak dapat terpisahkan satu sama lain.



Gambar 3.3

Keterkaitan pendidikan kecakapan hidup, pendidikan karakter dan PPKn.

Penjelasan mengenai kecakapan hidup atau lebih sering dikenal sebagai keterampilan atau keahlian telah banyak dipublikasikan dalam berbagai bentuk media. Di institusi pendidikan, pendidikan kecakapan hidup seringkali berbentuk muatan lokal ataupun ekstrakurikuler. Di perguruan tinggi, umumnya pendidikan kecakapan hidup tidak di institusikan secara langsung dalam mata kuliah. Akan tetapi, mahasiswa dapat mengaksesnya

melalui unit-unit kegiatan mahasiswa sesuai minat dan bakat yang mereka miliki. Pada prinsipnya, kecakapan hidup merupakan jalinan atribut personalitas baik intra-personalitas maupun inter-personalitas yang dapat membedakan seseorang dengan orang lain dalam komunitasnya dan membedakan orang dengan tingkatan atau level jabatan atau karir di satu pekerjaan.

Secara filosofis, proses belajar dapat terjadi setiap saat dan segala tempat. Setiap orang, baik anak-anak maupun orang dewasa mengalami proses belajar, baik secara langsung melalui pengalaman dan penginderaan maupun berdasarkan pengetahuan yang didapat dari orang lain. Keterampilan hidup juga bisa didapat dari apa yang dijumpai atau yang dikerjakan. Secara alamiah, setiap orang akan selalu melakukan aktifitas belajar melalui pengalaman interaksinya.

Pendidikan, pada dasarnya merupakan suatu sistem atau proses sistematisasi pengetahuan dari proses perolehan pengalaman belajar tersebut. Pengalaman belajar tersebut diasumsikan memberikan manfaat bagi peserta didik. Pendidikan membekali para peserta didik dalam menghadapi kenyataan kehidupan sehingga mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dan siap memecahkan per masalah kehidupan yang dihadapinya.

Intra-personalitas adalah keterampilan yang dimiliki seseorang dalam mengatur dirinya sendiri, seperti manajemen waktu, manajemen stress, manajemen perubahan, karakter transformasi, berpikir kreatif, memiliki acuan tujuan positif, dan teknik belajar cepat. Sedangkan interpersonalitas adalah keterampilan berhubungan atau berinteraksi dengan lingkungan kelompok masyarakatnya dan lingkungan kerjanya serta interaksi dengan individu manusia sehingga mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal, kemampuan memotivasi, kemampuan memimpin, kemampuan negosiasi, kemampuan presentasi, kemampuan komunikasi, kemampuan menjalin relasi, dan kemampuan bicara dimuka umum (Coates 2006).

Kecakapan hidup atau *life skills* juga menjadi perhatian bagi Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organisation*). WHO mengemukakan definisi *life skills* sebagai berikut;

keterampilan hidup atau *life skills* adalah berbagai keterampilan atau kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif, yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidupnya sehari-hari secara efektif. (Depdiknas dan Unicef, 2002;1).

Definisi tersebut merupakan definisi terbuka yang menyebabkan keterampilan dapat digolongkan sebagai kecakapan hidup yang sangat beragam. Keragaman bentuk keterampilan tersebut bergantung pada situasi dan kondisi sosial maupun budaya masyarakat setempat. Kecakapan hidup mencakup keterampilan untuk memperoleh penghasilan dan keterampilan dasar yang harus dimiliki secara personal seperti keterampilan berpikir dan berkomunikasi.

Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 1997 mencetuskan bahwa pendidikan kecakapan hidup (*life skills education*) yang mengembangkan kemampuan psikososial anak dan remaja merupakan “Program Dunia” yang harus dijalankan oleh semua negara. Konsep dasar pendidikan kecakapan hidup menurut Unicef meliputi demokratisasi, tanggung jawab dan perlindungan.

Demokrasi yang dimaksud adalah nilai demokratis mencakup penghargaan dan perlindungan hak asasi manusia termasuk hak perempuan dan anak. Konsekuensinya adalah pendidikan kecakapan hidup menggunakan metode pengajaran dalam situasi yang demokratis. Metode pengajaran tersebut diharapkan mengembangkan rasa percaya diri dan saling menghargai. Pemikiran lain mengenai kecakapan hidup didapat dari Sharma (2009), menyebutkan bahwa kecakapan hidup adalah seluruh aspek dari *generic skills* yang juga termasuk elemen-elemen kognitif yang berhubungan dengan *non-academic skills*. Ditambahkan pula bahwa, berdasarkan hasil penelitian, tujuh kecakapan hidup yang diidentifikasi dan penting dikembangkan pada peserta didik di lembaga pendidikan tinggi, meliputi; keterampilan berkomunikasi (*communicative skills*), keterampilan berpikir dan menyelesaikan masalah (*thinking skills and Problem solving skills*), kekuatan kerja tim (*team work force*), belajar sepanjang hayat dan pengelolaan informasi (*long life learning and Information management*), keterampilan wirausaha (*entrepreneur skill*), etika, moral dan profesionalisme (*ethics, moral and professionalism*), dan keterampilan kepemimpinan (*leadership skills*).

Para ahli mengemukakan bahwa terdapat sejumlah *kecakapan hidup* yang merupakan *kecakapan dasar* yang penting, dalam meningkatkan *kesehatan* dan *kesejahteraan* anak dan remaja. Kecakapan tersebut adalah:

- Pengambilan keputusan
- Pemecahan masalah
- Berpikir kritis
- Berpikir kreatif
- Berkomunikasi yang efektif
- Membina hubungan antar pribadi
- Kesadaran diri
- Berempati
- Mengatasi emosi
- Mengendalikan stress

Kecakapan-kecakapan hidup ini merupakan “satu set kecakapan inti” yang kadangkala disebut sebagai “*emotional intelegence*” (Depdiknas, 2007 : 16)

Sharma mentabulasikan elemen kecakapan hidup yang harus dimiliki dan baik dimiliki seperti ditunjukkan pada Tabel 3.1. Masing-masing *soft-skills* di dalamnya berisikan *sub-skills* yang dapat dikategorikan sebagai *skills* yang secara individu sangat dibutuhkan (*must have*) dan kategori sebagai *skills* yang baik untuk dimiliki (*good to have*).

Tabel 3.1
Kecakapan hidup

No	Kecakapan hidup	Sub-skills Elemen yang harus dimiliki (Must Have Elements)	Sub-skills Elemen yang baik untuk dimiliki (Good To Have Elements)
1.	Kemampuan berkomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan menyampaikan ide secara jelas, efektif dan meyakinkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan menggunakan teknologi selama presentasi

		<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan untuk mempraktikkan keterampilan mendengar dengan baik dan memberi tanggapan. • Kemampuan berpresentasi secara jelas dan meyakinkan pada audience. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan untuk berdiskusi dan mengakhiri dengan consensus. • Kemampuan menggunakan keterampilan non-oral • Keterampilan untuk menularkan kemampuan komunikasinya dengan orang lain.
2.	Keterampilan berpikir dan menyelesaikan masalah	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dalam situasi sulit dan melakukan justifikasi. • Kemampuan memperluas dan memperbaiki keterampilan berpikir seperti menjelaskan, menganalisis dan mengevaluasi diskusi. • Kemampuan mendapatkan ide dan mencari solusi alternatif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan berfikir lebih luas. • Kemampuan untuk membuat Kesimpulan berdasarkan pembuktian yang valid. • Kemampuan untuk menerima dan memberikan tanggung jawab sepenuhnya. • Kemampuan untuk memahami seseorang dan mengakomodasikan ke dalam suasana kerja yang beragam.

3.	Kerja dalam tim	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan untuk membangun hubungan, berinteraksi dan bekerja secara efektif dengan lainnya. • Kemampuan untuk memahami dan berperan sebagai pemimpin dan pengikut (anggota). • Kemampuan untuk memahami, menghargai dan menghormati perilaku, pemahaman dan keyakinan orang lain. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan untuk memberikan kontribusi terhadap perencanaan dan mengkoordinasikan kerja group. • Bertanggung jawab terhadap keputusan group
4.	Belajar sepanjang hayat dan pengelolaan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan untuk mengelola informasi yang relevan dari berbagai sumber. • Kemampuan untuk menerima ide-ide baru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan untuk mengembangkan keinginan untuk menginvestigasi dan mencari pengetahuan.
5.	Keterampilan Kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan untuk mengidentifikasi peluang kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan untuk mengajukan proposal peluang bisnis.

			<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan untuk membangun, mengeksplorasi dan mencari peluang bisnis dan kerja. • Kemampuan untuk berwirausaha sendiri
6.	Etika, Moral dan Profesionalisme	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan untuk memahami krisis ekonomi, aspek social budaya secara professional. • Kemampuan analisis untuk membuat keputusan pemecahan masalah terkait dengan etika. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan untuk mempraktikkan etika perilaku di samping mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat.
7.	Keterampilan kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> • Mempunyai pengetahuan teori dasar kepemimpinan kemampuan untuk memimpin suatu proyek. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan untuk memahami dan menjadi alternatif pemimpin dan pengikut. • Kemampuan melakukan supervisi pada anggota suatu group.

(Utama, 2009:4)

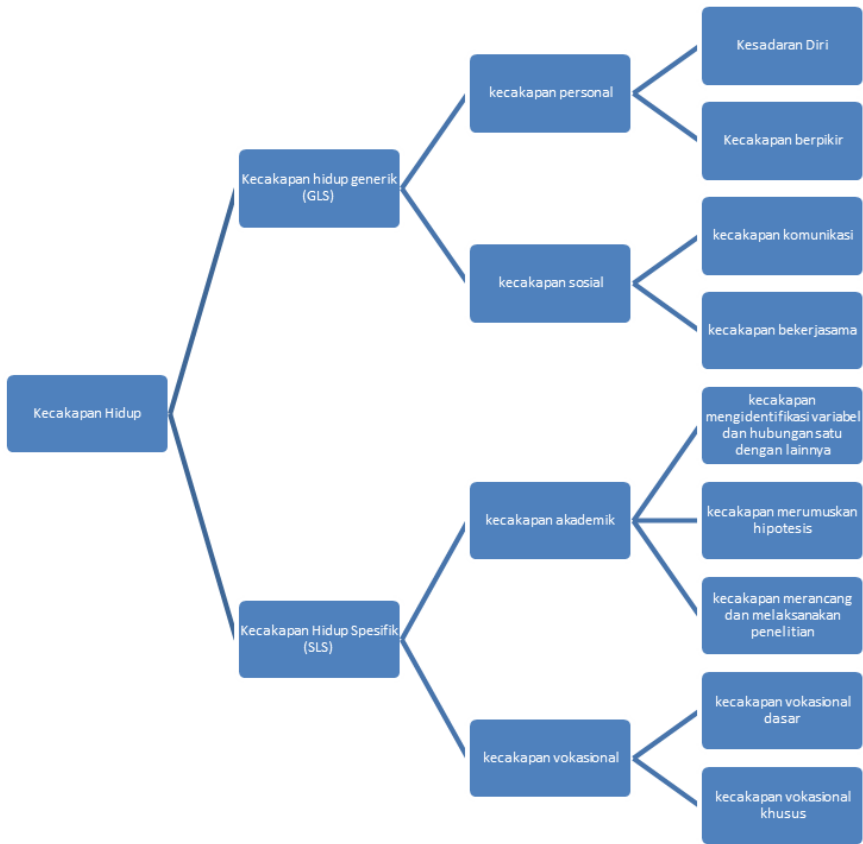
Pada tabel di atas diperlihatkan bahwa kecakapan hidup merupakan bagian intrinsik dari pembangunan SDM. Kemampuan kecakapan hidup seperti pada tabel di atas merupakan poin penting dalam integrasi sosial. Empat poin pertama merupakan keterampilan yang harus dimiliki semaksimal mungkin agar peserta didik tidak terasing dalam masyarakatnya sendiri. Kemampuan tersebut memungkinkan peserta didik bukan hanya menjadi anggota masyarakat namun juga memberikan karakter yang unggul dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga karakter berikutnya memiliki fungsi yang lebih dari kemampuan adaptasi peserta didik dalam suatu masyarakat namun juga berisi keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan usaha penghidupan seperti industri kreatif.

Pendidikan kecakapan hidup seringkali disejajarkan dengan pendidikan kewirausahaan, kenyataannya pendidikan kecakapan hidup memiliki cakupan yang lebih luas dari pendidikan kewirausahaan meskipun keduanya saling berkaitan. Jika dilihat dari paparan di atas, pendidikan kecakapan hidup tidak hanya berbicara mengenai keterampilan praktis dalam segi produksi namun juga kemampuan kreatif membentuk inovasi sehingga pendidikan kecakapan hidup tidak dapat dikategorikan lagi dengan sempit menjadi pendidikan keterampilan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pendidikan Menengah Umum memiliki perhatian khusus mengenai pendidikan kecakapan hidup. Kecakapan Hidup menurut Direktorat Pendidikan Menengah Umum dibagi menjadi dua bagian utama yaitu kecakapan hidup generic atau dasar dan kecakapan hidup spesifik. Kedua kategori besar ini kemudian dapat dipilah menjadi 4 jenis yaitu:

- (1) Kecakapan personal (*personal skill*) yang mencakup kecakapan mengenal diri (*self awareness*) dan kecakapan berpikir rasional (*thinking skill*),
- (2) Kecakapan sosial (*social skill*),
- (3) Kecakapan akademik (*academic skill*), dan
- (4) Kecakapan vokasional (*vocational skill*). (Direktorat Pendidikan Menengah Umum, 2003, hal 18).

Adapun skema lengkap dari pendidikan kecakapan hidup (*life skills education*) sebagaimana bagan berikut ini:



(Sumber : Direktorat Pendidikan Menengah Umum, 2003)

Gambar 3.4
Skema lengkap pendidikan kecakapan hidup.

Pendidikan kecakapan hidup sangat berkaitan dengan pendidikan karakter dari pembangunan kemampuan mental dan moral. Dalam segi produktif, pendidikan kecakapan hidup berkembang dalam pendidikan kewirausahaan dan secara praktis dimunculkan melalui industri kreatif. Pendidikan kecakapan hidup dapat menunjang kemampuan peserta didik menghadapi tantangan di dunia kerja yang membutuhkan kreatifitas tinggi untuk meraih prestasi dan kesejahteraan. Titik konsentrasi utama pada pendidikan kecakapan hidup bukan lagi terletak pada keterampilan

kerja namun bagaimana peserta didik dapat menemukan inovasi baru di lingkungan kerja bahkan memelopori penemuan varian produksi baru dalam industri kreatif.

Pendidikan kecakapan hidup merupakan penghubung antara konsep pendidikan karakter yang *holistic* dengan pendidikan kewirausahaan yang lebih bersifat praktis. Pendidikan karakter memberikan arah bagi pembagunan kecakapan hidup dan karakter kewirausahaan yang dihasilkannya. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan globalisasi pendidikan karakter harus terus berinovasi dengan menggabungkan kerangka konseptualnya dengan pendidikan yang lebih bersifat praktis seperti pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan agar dapat menjawab kebutuhan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai pendidikan kecakapan hidup, pendapat mengenai kecakapan hidup meskipun berasal dari berbagai sumber berbeda namun memiliki keterkaitan satu sama lain. Kategorisasi yang digunakan oleh WHO sesuai dengan definisinya terlalu longgar dan kurang spesifik namun secara filosofis dapat dipahami sebagai landasan pemahaman pendidikan kecakapan hidup. Skema yang ditunjukkan oleh Departemen Pendidikan Nasional 2003 memiliki kesamaan dengan kategori yang diberikan oleh WHO namun skema ini lebih spesifik dan teknis sehingga perbedaan kategori dapat diketahui secara langsung. Meskipun begitu, pemaparan keduanya tidak cukup relevan bagi upaya menemukan indikator penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti menggunakan kategorisasi yang diberikan oleh Sharma yang memberikan kategori serta definisi operasional dari kategori tersebut sehingga peneliti dapat menggunakannya sebagai indikator penelitian.

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti beranggapan bahwa pendidikan karakter dan pendidikan kecakapan hidup memiliki saling keterkaitan secara fungsional. Dalam kecakapan hidup umum dan spesifik tersebar nilai kewarganegaraan. Begitupun sebaliknya pada PKn, karakter yang dibentuk oleh pendidikan kewarganegaraan juga memuat kategori-kategori yang ada pada kecakapan hidup. Maka, penting dilakukan adaptasi yang mampu meng-hubungkan antara karakter yang dibangun melalui PKn dengan pendidikan kecakapan hidup agar terjadi sinergisitas antara keduanya.

Pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan karakter merupakan fondasi utama bagi pembangunan SDM Indonesia yang berkarakter. Dalam industri kreatif, pemahaman ini sangat diperlukan sebagai landasan nilai kreatifitasnya. Kemampuan kecakapan hidup sebagaimana yang telah dikategorisasikan oleh Sharma juga menunjang pola pengelolaan dalam industri kreatif. Industri kreatif memiliki cakupan yang luas, industri ini tidak hanya melibatkan produksi komoditas namun juga produksi jasa dan gagasan. Luasnya cakupan industri kreatif ini menuntut kemampuan peserta didik untuk melakukan inovasi kreatif baik dalam hal gagasan maupun produksi. Kreatifitas tentunya memerlukan kemampuan penalaran yang mapan.

Industri kreatif juga memungkinkan gagasan-gagasan kreatifitas itu untuk saling bertemu dan bersinggungan. Selain itu secara aktif, pelaku industri kreatif juga dituntut untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi termasuk dalam hal *promoting* dan *marketing*. Tuntutan ini berdampak pada kompetensi keahlian pelaku industri yang tidak hanya mencakup bidang teknis namun juga bidang non teknis seperti kemampuan bersosialisasi, kemampuan menjadi pemimpin, mengambil keputusan dan kemampuan berkomunikasi.

Tuntutan kompetensi yang semakin luas ini menuntut para pelaku dan calon pelaku industri kreatif tidak hanya matang dalam hal-hal teknis namun juga kecakapan hidup non teknis. Kebutuhan kecakapan hidup ini muncul dalam dinamika industri kreatif, sehingga pendidikan kecakapan hidup harus dijadikan bagian intrinsik dari pembangunan sumber daya manusia yang kreatif dan kompeten. Berdasarkan penalaran tersebut, peneliti beranggapan bahwa penggunaan kategori yang diungkapkan oleh Sharma mengenai pendidikan kreatif tepat untuk digunakan dalam penelitian yang mendasari buku ini.

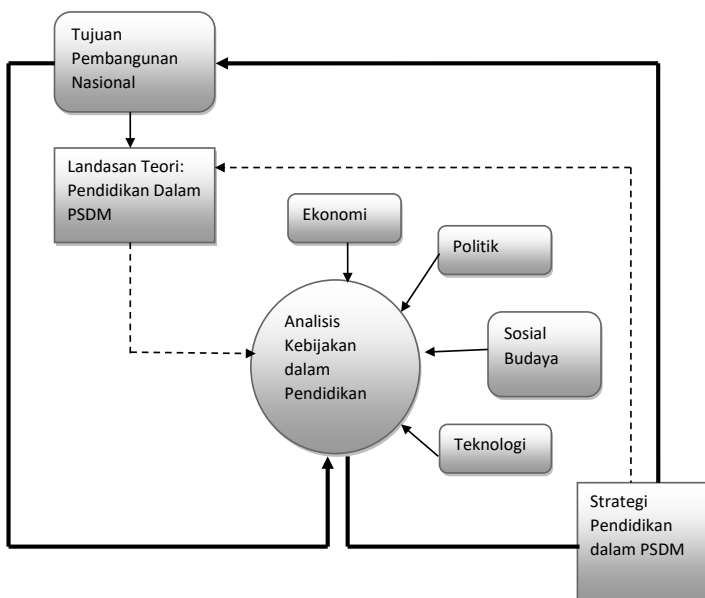
BAB IV

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Definisi konseptual Pengembangan Sumber Daya Manusia

Istilah pengembangan sumber daya manusia di Indonesia berasal dari kajian mengenai human capital yang sudah dikenal semenjak tahun 1980-an sebagai pengembangan SDM. Human capital (modal manusia) kemudian lebih dikenal dalam istilah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting selain sumber daya alam, modal, alat produksi, entrepreneurship dan lainnya. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu negara maka semakin meningkat pula efisiensi dan produktivitas negara tersebut.

Berbeda dengan definisi human capital yang lebih lugas mengintegrasikan manusia ke dalam sistem perekonomian, istilah sumber daya manusia memiliki pengertian yang longgar. Sumber daya manusia tidak hanya berada di koridor ekonomi namun juga dalam koridor lain seperti sosial, politik dan budaya. Istilah ini meminimalisir polemik moralitas yang sebelumnya muncul dalam istilah human capital yang digunakan di negara-negara Eropa dan Amerika. Meskipun begitu, tidak lepas dari kerangka konseptualnya sebagai variabel utama dalam aktivitas ekonomi, pengembangan sumber daya manusia tidak dapat dilakukan secara terpisah melainkan secara simultan melibatkan variabel-variabel lain di luar variabel ekonominya. Oleh karena itu, penggunaan istilah sumber daya manusia untuk merujuk pada konsep human capital sangatlah tepat.



Keterangan:

Pengaruh = -----

Landasan = _____

Sumber: Suryadi, 2002; 53

Gambar 4.1

Pendidikan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia.

Melalui gambar di atas dapat dilihat bahwa dalam paradigma pengembangan sumber daya manusia, pendidikan haruslah dinamis dengan mempertimbangkan faktor-faktor di luarnya seperti ekonomi, politik sosial budaya dan teknologi. Faktor-faktor tersebut merupakan input bagi analisa kebijakan pendidikan dalam pembangunan sumber daya manusia.

Pendidikan harus mampu memfasilitasi peserta didik untuk terus mengetahui perkembangan realitas di era yang semakin terbuka. Oleh karena itu, pendidikan tidak dapat menjadi sistem yang terpisah dari sistem-sistem lainnya dalam proses pembangunan bangsa. Pendidikan harus secara simultan mengadaptasi perubahan sekaligus mampu memprediksi perubahan.

Pada gambar 4.1 tersebut, dijelaskan bahwa keempat faktor yang memengaruhi analisis kebijakan dalam pendidikan yaitu ekonomi, politik, sosial budaya dan teknologi memiliki dimensi masing-masing dalam mendorong maju pendidikan. Dari dimensi politik, pendidikan harus mampu menanamkan sikap dan perilaku sumber daya manusia yang demokratis dan sejalan dengan kepribadian bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dari dimensi ekonomi dan teknologi, pendidikan harus mampu meningkatkan kemampuan belajar warga negara untuk menguasai jenis-jenis keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang sebagai syarat bagi produktifitas. Dari dimensi sosial budaya, pendidikan harus mampu menanamkan sikap dan perilaku yang rasional dan etos kerja industri dalam sistem budaya Indonesia yang kondusif.

Sejarah telah mencatat bahwa negara yang mampu menerapkan Paradigma pembangunan yang berkonsentrasi pada pembangunan sumberdaya manusia atau dalam istilah lain berdimensi manusia telah mampu berkembang meskipun tidak memiliki sumber daya alam yang mencukupi. Manusia sebagai subjek kreatif yang berhadapan dengan alam dalam memenuhi kebutuhannya akan selalu mampu mencari solusi bagi pemenuhan kebutuhannya. Kemampuan tersebut sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia itu sendiri.

Negara yang tergolong berhasil tersebut contohnya seperti Jepang, Amerika, dan kini China. Jepang merupakan negara kepulauan yang menjadi bagian dari cincin api dunia (*Ring of Fire*). Negara ini selalu dihantui bencana alam dari gunung berapi, gempa dan Tsunami. Pada awal abad 20, negara ini sempat menjadi negara yang ditakuti karena kekuatan militernya. Setelah berakhirnya perang dunia II dengan dijatuhkannya Bom Atom di Hiroshima dan Nagasaki pada bulan Agustus 1945, Jepang luluh lantah, kalah perang. Namun 30 tahun kemudian Jepang kembali menjadi negara termaju di Asia. Amerika memiliki tantangan yang berbeda, negara yang sudah berdiri sejak abad kedelapan belas ini mengalami perang saudara yang cukup lama untuk mengintegrasikan bangsanya. Beda lagi dengan China yang kini muncul sebagai salah satu negara super power dunia, negara komunis Asia ini berhasil selamat dari krisis negara-negara komunis dan mengembangkan tradisi politik dan ekonominya sendiri.

Ketiga negara tersebut merupakan contoh yang perlu dipelajari oleh Indonesia. Ketiganya berkonsentrasi pada pembangunan sumber daya manusia bukan hanya pada sumber daya alam. Kemampuan warganegaranya mengolah sumber-sumber daya tersebut menjadikan mereka mampu memperluas jangkauannya. Kenyataan ini dapat dikatakan sejalan dengan teori *human capital* yang menekankan pada pendayagunaan sumber daya manusia.

Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pendidikan merupakan investasi yang sangat berharga dan ini berarti sejumlah pengeluaran untuk mendukung pendidikan yang dilakukan orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam jangka pendek untuk mendapatkan manfaat dalam jangka panjang. Keluarga, masyarakat dan pemerintah rela melakukan pengorbanan untuk kepentingan pendidikan anak-anaknya demi manfaat dimasa depan. Pendidikan tidak ubahnya dengan proses produksi yang bergerak untuk merubah serangkaian sumber-sumber menjadi keluaran. Dengan demikian proses pendidikan adalah tindakan merubah sumber-sumber pendidikan menjadi keluaran pendidikan.

Investasi manusia modern berkembang dengan berbagai perspektif pemikiran (*school of thoughts*) yang cukup kaya dan berbeda. Perbedaan perspektif pemikiran dipandang sebagai faktor pendorong yang telah memacu perkembanganteori investasi manusiaakhir-akhir ini. Dari perkembangan pemikiran teori investasi SDM sampai saat ini dapat dilihat bahwa ilmu ekonomi pendidikan dengan berbagai penelitiannya yang telah banyak dilakukan di beberapa negara di dunia telah memperkaya khasanah landasan teoritis dari investasi manusia sampai sekarang ini (Suryadi, 2012: 44)

Secara teoritis pembangunan dibidang apapun akan mensyaratkan adanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. SDM ini dapat berperan sebagai faktor produksi tenaga kerja yang dapat menguasai teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Untuk mencapai SDM yang berkualitas dibutuhkan pembentukan modal manusia (*human capital*). Pembentukan modal manusia ini merupakan suatu untuk

memperoleh sejumlah manusia yang memiliki karakter kuat yang dapat digunakan sebagai modal penting dalam pembangunan. Karakter ini dapat berupa tingkat keahlian dan tingkat pendidikan masyarakat.

Teori *human capital* mirip dengan teori *technological functionalism* yang diperkenalkan oleh Talcott Parson (1960). Keduanya menekankan pentingnya dimensi teknis dari pendidikan dan pendayagunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan optimal. Perbedaan dari kedua teori ini adalah argumennya mengenai hambatan-hambatan yang mengakibatkan lemahnya peran pendidikan dalam pertumbuhan dan pembangunan. Teori *human capital* menjelaskan terjadinya *under investment* dalam pendidikan di mana nilai-nilai potensial tidak dikembangkan akan mengakibatkan tidak berperannya sumber daya manusia bagi pertumbuhan produktivitas nasional. Di pihak lain teori *technological functionalism* menjelaskan gejala faktor-faktor askriptif pada kenyataan lebih dominan memengaruhi kualitas sumber daya manusia ketimbang prestasi dalam memengaruhi kemampuan seseorang meraih penghasilan dalam pekerjaan dan karier. (Suryadi, 2012: 45)

Di masa awal diperkenalkannya teori ini pada akhir 1950-an, istilah *human capital* masih sangat jarang digunakan bahkan dianggap menghina kemanusiaan karena dianggap mensejajarkan manusia dengan benda mati atau properti bisnis, tidak jarang ekonom menghindari penggunaan kalimat *human capital* untuk mendeskripsikan tenaga kerja dan keahlian kerja (Schultz, 1961). Namun demikian, Schultz dalam Jurnal *Economics Review* (1961) menjelaskan bahwa penggunaan istilah *human capital* bukanlah seperti mengandaikan perbudakan, namun lebih kepada bagaimana keahlian manusia dibentuk untuk memberikan kontribusi terhadap sistem sosial.

Pandangan Schultz mengenai *human capital* dideduksi dari kritik terhadap pandangan J. S. Mill mengenai kesejahteraan. J. S. Mill dalam karyanya *Principle of Political Economy* (1909), berpendapat bahwa seseorang dalam sebuah masyarakat tidak boleh dipandang dari ukuran kesejahteraan karena kesejahteraan hanya muncul untuk kepentingan

masyarakat. Menurut Schultz, manusia dengan berinvestasi bagi dirinya sendiri dapat meluaskan kemungkinan pilihan bagi mereka dan cara tersebut merupakan salah satu cara untuk mengejar kesejahteraan mereka.

Konsep kapital pada manusia tidak serta merta merendahkan manusia dan menceraub manusia dari kebebasan dan martabatnya. Konsep ini merupakan cara untuk menjelaskan pembangunan keahlian pada diri manusia dan bagaimana manusia dapat menghitung pengeluarannya dalam upayanya untuk mendapatkan keahlian tersebut. Keahlian dalam perspektif *human capital* adalah segala kemampuan keterampilan manusia untuk ikut serta berkontribusi dalam sistem sosial dan ekonomi.

Perhitungan ekonomi tanpa mencantumkan penghitungan pembangunan kapasitas manusia dan hanya menghitung bagian yang non-human adalah cacat karena pembangunan kapasitas manusia ikut mempengaruhi input dan output dari sistem ekonomi. Pembangunan kapasitas manusia yang disebutkan oleh Schultz tersebut merupakan inti dari konsepsi human capital. (Schultz dalam *The American Economic Review*, Vol. 51 No.1, 1961.7).

Pembahasan Schultz mengenai *human capital* ini dibantu oleh analisa teoritis yang diberikan oleh rekannya Gary S. Becker. Becker menempatkan sekolah sebagai institusi yang mampu memilah hasil pelatihan keterampilan. Institusi pendidikan/sekolah berbeda dengan firma atau perusahaan meskipun dalam perusahaan dapat ditemukan pelatihan keterampilan. Pelatihan keterampilan dalam sebuah perusahaan berhubungan langsung dengan produksi komoditas barang kebutuhan. Beberapa sekolah memang mengajarkan keahlian produksi secara khusus. Namun pada umumnya, sekolah mengajarkan keahlian yang luas melalui pendidikan.

Becker melengkapi konsep Schultz melalui perhitungan ekonomis dan membangun teori ekonomi untuk menghitung investasi dalam *human capital*. Logika investasi tersebut berbeda dengan logika investasi pada *variabel capital* yang bukan manusia. Dalam logika investasi *human capital*, Becker menjelaskan bahwa peningkatan kemampuan dan keahlian manusia dapat mereproduksi ide produksi dan membantu akumulasi ekonomi. Keahlian ini tidak bersifat konstan sebagaimana pada kapital non manusia namun terus berkembang. Becker pun menjelaskan bahwa

akumulasi kapital dengan bertambahnya keuntungan produksi dalam sistem ekonomi secara langsung akan mempengaruhi tingkat penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat sehingga secara simultan dapat membangun kesejahteraan masyarakat.

Dalam dunia pendidikan, Schultz dan Barker memang tidak begitu dikenal kontribusinya namun mereka membahas secara khusus mengenai institusi pendidikan dalam kajian mereka dalam beberapa jurnal. Schultz secara khusus dalam *The Journal of Political Economy* (1960) membahas mengenai pendidikan sabagai pembentukan modal. Pembahasan bentuk kapital dalam pendidikan ini merupakan poin pembuka bagi pemahaman konsepsi *human capital* Schultz. Schultz membahas pendidikan melalui asumsi bahwa pendidikan merupakan investasi manusia sebagai konsekuensi dari formasi kapital sejak pendidikan mulai diterima oleh manusia, sejak itulah pendidikan menjadi *human capital*.

Robert M. Solow menekankan kepada peranan ilmu pengetahuan dan investasi modal sumber daya manusia dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Dari teori Solow ini kemudian dikembangkan teori baru pertumbuhan ekonomi yang dikenal sebagai *The New Growth Theory*. (H. A. R. Tilaar, 2000).

Beberapa faktor yang menyebabkan perlunya mengembangkan tingkat pendidikan di dalam usaha untuk membangun suatu perekonomian, adalah;

- 1) Pendidikan yang lebih tinggi memperluas pengetahuan masyarakat dan mempertinggi rasionalitas pemikiran mereka. Hal ini memungkinkan masyarakat mengambil langkah yang lebih rasional dalam bertindak atau mengambil keputusan.
- 2) Pendidikan memungkinkan masyarakat mempelajari pengetahuan-pengetahuan teknis yang diperlukan untuk memimpin dan menjalankan perusahaan-perusahaan modern dan kegiatan-kegiatan modern lainnya.
- 3) Pengetahuan yang lebih baik yang diperoleh dari pendidikan menjadi perangsang untuk menciptakan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang teknik, ekonomi dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya.

Asumsi dasar teori *human capital* adalah bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sekolah berarti, di satu pihak, meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang, tetapi, di pihak lain, menunda penerimaan penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti sekolah tersebut. (Atmanti.2007;31)

Lebih jauh lagi, Schultz membahas pendidikan dengan mempertanyakan kembali konsepsi pendidikan dari perspektif penerima pendidikan yang dalam konsepsi ekonominya adalah konsumen. Schultz memulai pembahasannya dengan berasumsi bahwa pendidikan dapat menjadi aktivitas konsumsi atau investasi murni, atau dapat menjadi keduanya (Schultz,1960;571). Besar investasi dalam pendidikan tersebut tidak dapat dikatakan besar atau kecilnya namun hanya dapat dilihat dari pengaruhnya atau hasil keahlian yang diterima. Pada sisi ini, pendidikan dapat diasumsikan sebagai aktivitas konsumsi.

Pemikiran Schultz dan Barker mengenai *human capital* dalam dunia pendidikan memberikan kontribusi luas terutama pada negara berkembang untuk mengejar kemajuan ekonomi. Konsepsi *human capital* sendiri dapat dirasakan melalui tujuan pendidikan keahlian yang sangat berguna bagi murid sekolah untuk masa depannya. Munculnya sekolah-sekolah kejuruan dan institut keahlian dalam dunia pendidikan merupakan bagain dari dampak pemikiran *human capital* sebagai upaya membentuk dan membangun kapasitas manusia.

Pengaruh pemikiran mengenai investasi di dunia pendidikan ini belum meresap sebagai kesadaran para murid maupun para orang tua murid sehingga konsep ini tidak dapat berjalan secara resiprokal. Dengan menyadari sekolah sebagai sebuah investasi sumber daya manusia, baik siswa maupun pendidik dapat menentukan prioritas dan memahami proses belajar mengajar sebagai proses bersama dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan begitu, pandangan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan kualitas sumber daya manusia dapat bersinergi.

Di Indonesia, pemikiran Schultz juga menunjukkan jejaknya pada sekolah kejuruan dan institut keahlian dan politeknik. Pembangunan kapasitas manusia sangat diperlukan dalam membangun perekonomian

bangsa dan mengurangi dampak krisis ekonomi yaitu melonjaknya jumlah pengangguran. Dengan persepsi *human capital*, pendidikan tidak hanya berkonsentrasi pada pengetahuan yang bersifat umum namun juga pada keahlian praktis yang dapat membantu murid atau peserta didik merencanakan masa depan dan memperoleh keahlian mendasar untuk dapat berkontribusi dalam sistem sosial. Namun begitu, pemikiran Schultz dan Barker juga harus diadaptasi dengan kepentingan bangsa Indonesia dengan memasukkan pendidikan karakter sehingga persepsi pasar bebas *liberalism* yang menjadi akar pemikiran tersebut dapat disesuaikan dengan karakter kebangsaan Indonesia.

Pendidikan sebagai Sarana Pengembangan SDM Menghadapi Globalisasi

Konsep globalisasi ini sesungguhnya baru masuk dalam kajian ilmu pengetahuan pada tahun 1980-an, kali pertama dalam sosiologi yang dicetuskan oleh Ronald Robertson dari University of Piitsburgh (Tilaar, 1997). Konsep ini kemudian terus menggelinding bagaikan bola salju dan masuk ke segenap ruang-ruang kehidupan manusia dan mempengaruhi perilaku, sikap hidup, dan nilai-nilai kehidupan. Proses globalisasi akan terus berlangsung tanpa ada kendali siapapun. Tidak ada yang mampu menghentikannya karena globalisasi adalah sebuah perubahan sosial yang sudah direncanakan oleh negara-negara industri maju agar semua negara di dunia terinkorporasi ke dalam masyarakat dunia yang tunggal, masyarakat yang penuh dengan ketergantungan, homogenisasi, keterbukaan, dan integrasi.

Dalam konteks realitas globalisasi, pendidikan yang membangun *human capital* sangatlah dibutuhkan untuk membantu pembangunan kemandirian bangsa. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan efisiensi dan produktifitas bagi negara sebagai sistem sosial. Pendidikan sebagai sarana investasi bagi kualitas sumber daya manusia memiliki peran vital yang menentukan meningkat atau menurunnya produktifitas suatu negara. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk merumuskan kembali konsep pendidikan seperti apa yang dapat memaksimalkan potensi sumber daya manusia.

Dalam persepsi ini, masyarakat Indonesia selain berkarakter kebangsaan, berpengetahuan keilmuan juga mampu mengaplikasikan pengetahuan bagi pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat. *Human capital* yang dimiliki oleh manusia Indonesia diharapkan membantu masyarakat Indonesia dari gempuran pasar bebas yang pasti memberikan dampak pada perekonomian masyarakat. *Human capital* dipersepsikan sebagai sebuah upaya membentuk sumber daya manusia Indonesia yang berkarakter kebangsaan dan mampu bersaing dalam arena dunia.

Salah satu karakter yang diharapkan dapat dibangun melalui pendidikan adalah karakter kreatif. Karakter ini perlu dilengkapi dengan karakter lainnya sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang mengenai sistem pendidikan nasional. Karakter kreatif termuat dalam pendidikan kecakapan hidup. Karakter kreatif bukan hanya pada kreatifitas fisik namun juga kreatifitas mental dan kemampuan mereproduksi ide-ide atau gagasan baru. Karakter tersebut sangatlah dibutuhkan dalam industri kreatif dan kemampuan menyelesaikan masalah dalam kehidupan keseharian.

Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Howkins sebagaimana dikutip dalam Husodo menjelaskan bahwa ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi dimana *input* dan *output*-nya adalah gagasan (Husodo,2004;17). Artinya, dalam industri kreatif, para pelaku industri tidak lagi hanya berbicara mengenai harga jual dan efisiensi produksi namun juga berbicara tentang bagaimana menciptakan varian komoditas baik barang dan jasa, bagaimana pemasaran yang efektif hingga merumuskan peluang dari keterbatasan. Oleh karena itu, industri kreatif tidak hanya berfokus pada produksi komoditas namun juga merambah bahkan didominasi oleh produksi jasa atau pelayanan dan keahlian.

Tentu saja industri kreatif menjadi warna baru bagi gerak ekonomi di Indonesia. Namun, sesuai dengan bentuk dan spesifikasi model industrinya, industri kreatif membutuhkan sumber daya manusia yang menekankan pada kemampuan kreasi. Hal inilah yang menjadi fokus pada penelitian disertasi ini yaitu bagaimana setiap instrumen pendidikan mampu menyediakan

kemampuan dan keahlian sumber daya manusia Indonesia di masa depan yang mampu berkreasi dan bersaing dalam pasar global namun memegang teguh prinsip kebangsaannya sebagai bangsa Indonesia.

Departemen perdagangan mengklasifikasikan industri kreatif atas 14 (empat belas) sektor meliputi periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, film-video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbit dan percetakan, layanan komputer, radio dan televisi (Simatupang, 2008). Dalam industri kreatif, nilai ekonomi dari suatu komoditas dan jasa tidak lagi bergantung pada bahan baku dan sistem produksinya akan tetapi mulai merambah pada pemanfaatan teknologi, gagasan kreatif dan inovasi dari komoditas dan jasa.

Industri kreatif atau ekonomi kreatif bukanlah hal baru dalam aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi kreatif bahkan lebih dulu muncul daripada industri. Mengambil pemahaman di atas mengenai industri kreatif sebagai industri berbasis pengetahuan dan gagasan kreatif, produksi barang ataupun jasa yang berbasis pengetahuan dan gagasan kreatif muncul pada saat masyarakat sudah sejahtera atau sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga permintaan akan barang dan jasa yang memiliki nilai lebih menjadi meningkat. Di Indonesia, kita dapat melihat komoditas seperti kuliner, batik, ulos, wayang dan kerajinan logam sebagai contoh produk gagasan kreatif. Namun, di masa lalu seringkali produksi komoditas tersebut hanya dianggap sebagai produk budaya. Sekarang, produk-produk tersebut kembali bersaing di pasar melalui beberapa modifikasi dan penyesuaian dengan permintaan pasar.

Kreatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai daya cipta atau memiliki daya cipta yang juga berarti kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru baik dalam bentuk barang maupun jasa. Daya cipta tersebut adalah ide atau gagasan kreatif. Kreatifitas sebagai kata sifat memiliki asosiasi yang lebih luas. Kreatifitas sering diartikan sebagai keahlian, imajinatif, keaslian, dan tepat sasaran. Kualitas inilah yang menjadi modal intelektual atau gagasan.

Oleh karena itu, untuk beradaptasi dengan industri kreatif, pendidikan harus mampu membentuk karakter dan kecakapan hidup baik dalam bentuk keterampilan maupun mentalitas peserta didik yang mampu beradaptasi dengan persaingan. Industri kreatif pada kenyataannya harus bersaing ketat

dengan industri-industri konvensional yang massal di pasar. Persaingan ini tentunya tidak mudah terutama bagi para pengusaha muda ataupun yang baru memulai usaha dengan modal yang tidak terlalu besar. Untuk itu dibutuhkan mental yang kuat dan tidak mudah menyerah sekaligus mampu menyerap perkembangan kebutuhan pasar. Industri kreatif tidak hanya membutuhkan keterampilan fisik namun juga membutuhkan keterampilan mental.

Sumber Daya Manusia dalam Industri Kreatif

Tidak seimbangnya jumlah angkatan kerja dengan lapangan kerja yang ada merupakan masalah klasik yang sangat sulit untuk dipecahkan hampir setiap negara di dunia, bahkan dalam kajian ilmu ekonomi, masalah ini masuk dalam kajian ekonomi murni atau ekonomi makro yang menjadi tugas negara untuk menyelesaikannya. Pada umumnya masalah pengangguran selalu dikaitkan dengan angkatan kerja yang baru saja masuk pada usia angkatan kerja. Sehingga pengangguran selalu tidak bisa lepas dari problematika bagi usia produktif yang merupakan potensi sumber daya manusia yang kreatif. “Kreativitas muncul apabila seseorang berkata, mengerjakan, dan membuat sesuatu yang baru, baik dalam pengertian menciptakan sesuatu dari tang tadinya tidak ada maupun dalam pengertian memberikan karakterbaru pada sesuatu”. (Suryana, 2013:21). *It occurs whenever a person says, does or makes something that is new, either in the sense of “something or nothing” or in the sense of “goving an new character to something”* (Howkins 2001 : ix)

Pendidikan sudah seharusnya diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia yang tepat. Pengembangan sumber daya manusia secara teoritis dapat disejajarkan dengan *human capital* karena memiliki makna yang sama. Dalam perspektif *human capital*, pendidikan merupakan salah satu bagian dari pengembangan kualitas sumber daya manusia. Konsep *human capital* juga mengadopsi konsep ekonomi yaitu investasi. Sebagai salah satu alat bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia, pendidikan juga harus dilihat melalui cara pandang yang sama yaitu sebagai investasi bagi pengembangan sumber daya manusia.

Ketika masyarakat mulai memandang pendidikan sebagai investasi, permasalahan tidak lagi terletak pada berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pendidikan tertentu. Masyarakat mulai memandang institusi pendidikan sebagai sebuah lembaga jasa yang menyediakan varian pendidikan dan keahlian sebagai komoditas jasa yang ditawarkan. Besarnya dana pendidikan dapat dihitung melalui besaran investasi keahlian yang ditawarkan oleh institusi pendidikan tersebut sehingga institusi pendidikan dituntut untuk terus menerus meregenerasi dirinya dengan menyesuaikan pada permintaan masyarakat.

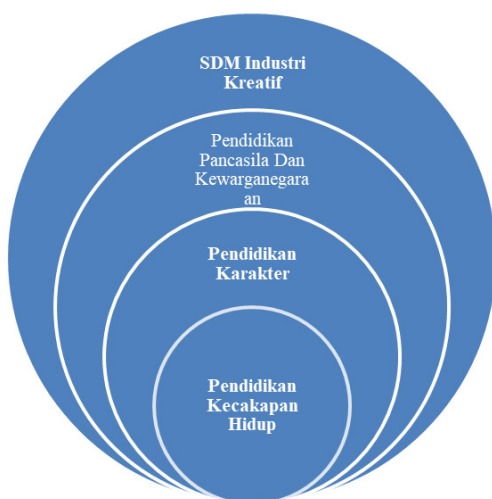
Melalui industri kreatif sebagai solusi alternatif bagi permasalahan keterbatasan lapangan kerja dan dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi globalisasi, pengembangan SDM perlu dibentuk secara terpadu. Oleh karena itu, mata pelajaran harus memiliki nilai aplikatif dan terus berkembang. Tidak terkecuali pada pendidikan kewarganegaraan, pendidikan ini juga dituntut untuk mentransmisikan nilai dan keterampilan sebagai warganegara dan mempersiapkan mereka di masa depan baik sebagai warga negara maupun sebagai makhluk ekonomi yang menjadi pekerja ataupun pelaku bisnis.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki tugas penting dalam mempersiapkan karakter kebangsaan yang kuat dan etos persaingan yang baik dari para peserta didik di masa depan. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga harus bersinergi dengan pendidikan lainnya untuk mendukung kreatifitas peserta didik. Dalam industri kreatif SDM yang diharapkan adalah SDM yang tidak hanya mampu menguasai keterampilan tertentu namun juga memiliki keterampilan berupa kreatifitas. Berkaitan dengan karakter kebangsaan, kreatifitas ini perlu diarahkan pada integritas kebangsaan.

Keterampilan yang perlu dimiliki oleh warganegara menghadapi persaingan global tidak hanya melalui keterampilan produksi dan gagasan ekonomi namun juga keterampilan yang mendasar yaitu pengetahuan mengenai nilai kebangsaan, politik negaranya mekanisme demokrasi yang dijalankan di negaranya, fungsi-fungsi institusi pemerintahan, regulasi yang diatur oleh pemerintah dan wacana-wacana mengenai negara dan bangsanya. Karena di masa depan sebagai warganegara Indonesia dan penduduk dunia, para peserta didik akan bersinggungan dengan berbagai

kalangan baik di luar maupun di dalam negeri langsung maupun tidak langsung. Kemampuan dan pemahaman akan negara dan bangsanya sangat dibutuhkan dalam kondisi ini.

Berdasarkan tinjauan teoritis di atas, maka sangat jelas bahwa rangkaian peran pendidikan kecakapan hidup, pendidikan karakter dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang industri kreatif satu sama lain saling mempengaruhi karena merupakan satu kesatuan yang holistik, di mana selengkapnya dapat digambarkan oleh peneliti sebagai berikut:



Gambar 4.2

Posisi pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan karakter dalam PPKn untuk pengembangan SDM industri kreatif.

Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pengembangan Karakter

Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pengembangan Karakter dapat dibuktikan dari beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan oleh penulis sebagai referensi dan pendorong atau untuk memperkuat penelitian yang penulis lakukan. Branson (1998) mengatakan bahwa peran PKN dalam pembangunan karakter bangsa begitu dirasakan

penting karena memiliki nilai yang strategis dan dapat mempengaruhi nasib bangsa di masa depan. (Rachman, 2001). Ciri-ciri karakter pribadi meliputi tanggung jawab moral, disiplin pribadi, dan hormat kepada orang lain dan martabat manusia.

Menurut Nurul Zuriah (2008), Pengetahuan, sikap dan perilaku dosen, mahasiswa dan ketua prodi dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Malang cenderung menunjukkan fenomena yang beragam. Mahasiswa umumnya kurang menyenangi pelajaran/ perkuliahan pendidikan kewarganegaraan karena harus banyak menghafal dan banyak membaca. Dosen pendidikan kewarganegaraan cenderung belum siap mengajar secara kontekstual, kurang *enjoyfull learning* (belajar dengan menyenangkan) dan masih berpola "*textbookish*". Penyebab perkuliahan pendidikan kewarganegaraan yang terjadi selama ini berlangsung monolitik, kurang demokratis, membosankan dan tidak optimal, antara lain dikarenakan pembelajaran PKn pada umumnya kurang memperhatikan perubahan-perubahan dalam tujuan, fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan di masyarakat. Menurut Nurul Zuriah (2008) Perlu dilakukan upaya inovasi dan reorientasi model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis *Deep dialogue* dan *Critical Thinking* (DDCT) yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis-dialogis mahasiswa. Karakteristik khusus model pengembangan kemampuan berpikir kritis-kreatif-dialogis mahasiswa berbasis *Deep dialogue* dan *Critical Thinking* (DDCT) antara lain dosen harus memperlakukan mahasiswa sebagai kokreator dalam proses pembelajaran karena mereka kaya akan ide, gagasan dan isu serta inspirasi yang perlu diperhatikan.

Selain itu ada dua penelitian lain yang dijadikan rujukan oleh peneliti, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Winataputra (2001) dalam disertasinya yang berjudul *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi*. kemudian Disertasi Sapriya (2007) yang berjudul *Perspektif Pemikiran Pakar tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Karakter Bangsa*. Selain itu juga Disertasi Samsuri (2010) yang berjudul *Transformasi Gagasan Masyarakat Kewargaan (Civil Society) Melalui Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia*. Kedua disertasi ini mengambil satu

sudut pandang yang sama dengan penelitian ini yaitu dengan mengangkat permasalahan yang muncul dari proses demokratisasi di era reformasi dan bagaimana pendidikan kewarganegaraan meresponnya.

Dalam Winataputra (2001), dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan tubuh/sistem pengetahuan yang masih bersifat pre paradigmatik yang memusatkan pada multi dimensionalitas perilaku kewarganegaraan pada tataran abstrak. Selain itu ia juga menemukan bahwa pendidikan kewarganegaraan di era demokrasi dapat dimanfaatkan secara maksimal menjadi wahana sistemik pendidikan demokrasi. Winataputra memiliki kerisauan yang sama dengan peneliti melihat kenyataan bahwa perubahan paradigma dalam pendidikan kewarganegaraan seringkali menghasilkan ketidakmenentuan capaian dari pendidikan kewarganegaraan. Selain itu latar yang sama juga menjadi kerisauan peneliti seperti munculnya bibit disintegrasi sosial dan ketidaksiapan menghadapi globalisasi.

Penulis mengambil cara yang berbeda dalam menghadapi persoalan yang muncul. Winataputra (2001) menawarkan proses abstraksi lebih lanjut dengan melakukan pemetaan kompetensi dan pembahasan mendalam oleh kelompok ilmiah. Sementara, peneliti memandang bahwa abstraksi ini perlu segera dibumikan dalam suatu landasan manfaat sehingga dapat diaplikasikan. Namun secara prinsip, peneliti bersepakat bahwa pendidikan kewarganegaraan sangatlah penting untuk dilekatkan pada berbagai mata pelajaran agar menjadi wahana sistemik bersama dalam penguatan jatidiri bangsa.

Agak berbeda dengan Winataputra, Sapriya (2007) menegaskan dalam penelitiannya bahwa perkembangan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan disiplin ilmu dengan identitas bidang kajian elektik yang dinamakan “*an integrated system of knowledge*”, “*synthetic dicipline*”, “*interdiciplinary*”, “*multidimensional*”, “*scinetific boundary line*”, atau “kajian konseptual sistemik” memiliki ontologi “**perilaku warga negara**” dan landasan pokok, filosofis, normatif, psikologis dan material, serta memiliki dua tugas, yaitu tugas dalam bidang telaah dan tugas dalam bidang pengembangan.

Selain itu, Sapriya juga menegaskan bahwa peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun karakter bangsa memiliki kedudukan yang sangat strategis, karena bidang ini memfokuskan proses pembelajaran pada perilaku individu warga negara dan proses pendidikan yang melibatkan tanggung jawab bersama secara sinergi antara keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah.

Penulis beranggapan bahwa apa yang disampaikan Sapriya masih harus dilengkapi dengan penegasan bahwa pembelajaran PPKn harus dilakukan dengan pendekatan pendidikan kecakapan hidup yang konsep dasarnya adalah meliputi:

- a. *Demokratisasi* yaitu mencakup penghargaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia termasuk hak-hak anak dan perempuan;
- b. *Tanggung jawab* yaitu baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain dan lingkungan; serta Tuhan yang Maha Kuasa;
- c. *Perlindungan* yaitu baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain dan lingkungan. (Wijayanti, W dan Ananto, P. 2002).

Sebagai konsekuensi logis dari konsep dasar di atas, maka pendidikan kecakapan hidup (*life skills education*) mempunyai dampak terhadap metode pengajaran di mana para peserta didik akan belajar dalam situasi yang demokratis (pengembangan rasa percaya diri dan saling menghargai) dibandingkan dengan cara instruktif atau pendekatan komunikasi satu arah.

Berbeda dengan Winataputra dan Sapriya, Samsuri menawarkan bahwa abstraksi pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokrasi dapat dibumikan melalui transformasi pendidikan kewarganegaraan dengan mengintroduksi pemahaman tentang masyarakat kewargaan. Pemahaman ini mengulang konsep *project citizenship* untuk menciptakan warganegara yang peka, responsif, dan mampu menemukan solusi permasalahan sosial. Akan tetapi, dalam hal melihat persoalan yang berkembang peneliti memiliki anggapan berbeda dengan Samsuri. Meskipun peneliti bersepakat bahwa *project citizenship* dan *civil society* merupakan simpul yang baik bagi demokrasi permasalahan ini belum menjawab kebutuhan mendesak globalisasi ekonomi.

Perbedaan pandangan penulis dengan kedua penelitian di atas adalah bahwa penulis melihat dari sudut pandang sinergi pendidikan kewarganegaraan dengan aktivitas ekonomi yang dibutuhkan dalam menghadapi globalisasi. Penulis tidak menegaskan hasil dari kedua penelitian sebelumnya yang juga sangat baik. Namun dalam penelitian penulis melihat bahwa permasalahan yang krusial muncul dari terbatasnya lapangan pekerjaan sehingga menghasilkan kebutuhan baru untuk menciptakan lapangan pekerjaan tersebut.

Permasalahan SDM sangat menentukan daya serap tenaga kerja ataupun pembangunan alternatif dari keterbatasan tenaga kerja. Permasalahan SDM tersebut memerlukan upaya pengembangan SDM yang sesuai dengan kebutuhan tantangan masa kini. Berdasarkan pemaparan pada bab ini, tugas ini dikembangkan oleh institusi pendidikan. Secara khusus dapat dilihat dari pengembangan metode pembelajaran dan pemikiran pendidikan di dalamnya. Snada dengan pandangan Winataputra (2001) dan Samsuri (2010), selain pendidikan keterampilan produktif peserta didik juga memerlukan pendidikan kewarganegaraan yang menjadi basis baginya untuk menjadi warganegara yang baik.

Posisi Teoritis Pendidikan Kewarganegaraan

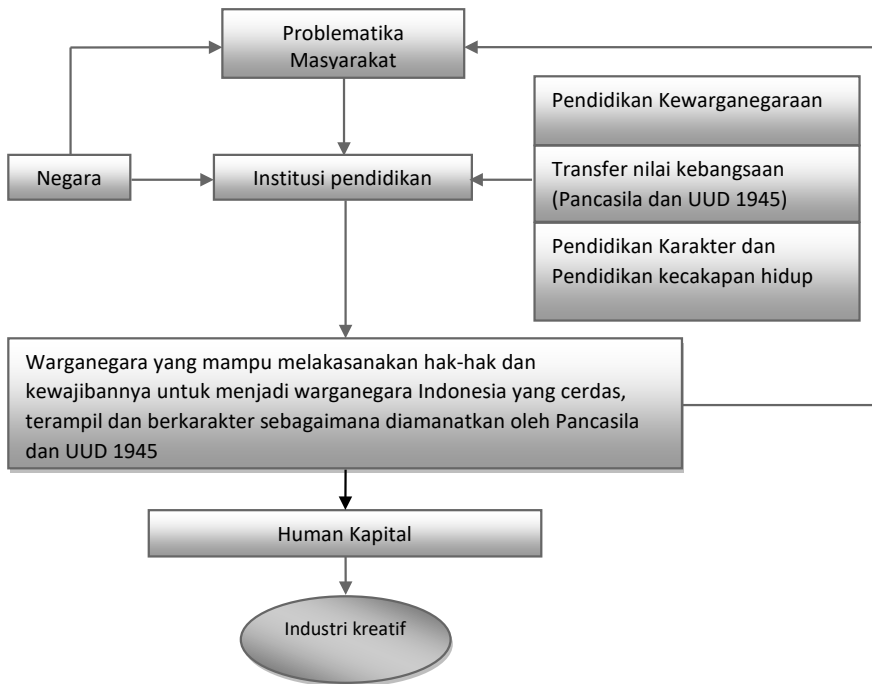
Secara teoritis, penulis menggunakan pendidikan kewarganegaraan sebagai landasan untuk memandang permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini. Pendidikan kewarganegaraan sebagai sentral dari upaya pembangunan SDM yang sesuai dengan tantangan globalisasi menghadapi kemunculan industri kreatif sebagai fenomena alternatif yang juga perlu dilekatkan pada nilai kewarganegaraan agar seluruh aspek dalam sistem pendidikan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

Secara teoritis, pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana transfer nilai kebangsaan yang juga memberikan pendidikan karakter dan pendidikan kecakapan hidup bagi warganegara untuk menjadi warganegara yang baik. Pandangan teoritis ini dilengkapi dengan paradigma fungsionalis dalam memandang latar permasalahan. Pandangan ini digunakan dalam menganalisa warganegara sebagai bagian dari sistem sosial dan bahwa transisi yang terjadi baik yang bersal dari dorongan internal maupun

eksternal didorong oleh sistem sosial yang berlaku. Berdasarkan pandangan ini juga, permasalahan pengangguran oleh peneliti diterjemahkan sebagai hilangnya upaya individu untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat atau sistem sosialnya. Oleh karena itu, peneliti mengajukan industri kreatif sebagai solusi bagi permasalahan ini.

Kerangka Pikir Rekonstruksi Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam hal merekonstruksi pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mengembangkan Soft Skills dan Karakter Sumber Daya Manusia Industri Kreatif , maka dikembangkan kerangka berpikir sebagaimana di bawah ini.



Gambar 4.3
Kerangka pemikiran.

Pada gambar di atas terlihat jelas bahwa pendidikan ditempatkan sebagai alat integrasi sosial yang berperan sebagai agen penanaman nilai. Pendidikan sebagai alat integrasi sosial tidak muncul dari kekosongan atau meritokrasi ala Durkheim yang tidak menjelaskan fungsi dan konteks masyarakat modern. Pendidikan muncul sebagai interpretasi dari sistem sosial sebagai medium integrasi masyarakat menuju perubahan sosial.

Penanaman nilai dilakukan melalui pendidikan karakter yang mencakup pendidikan kecakapan hidup dalam pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan diperlukan sebagai arah sekaligus jalur bagi peserta didik untuk berkontribusi aktif dalam sistem sosial. Nilai yang ditanamkan adalah nilai kebangsaan yang dijadikan acuan bagi pendidikan. Nilai kebangsaan adalah nilai integrasi sosial dalam sistem sosial yang dalam penelitian ini adalah negara.

Penulis juga memandang bahwa pendidikan merupakan investasi yang penting bagi pengembangan sumber daya manusia. Dengan menggunakan teori *human capital*, melalui sudut pandang investasi penulis berkesimpulan bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab orang per orang namun juga menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah/negara. Melalui sudut pandang investasi, pendidikan juga harus mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat sekaligus kecakapan hidup yang diperlukan dalam menghadapi realitas. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat mendorong tumbuh kembangnya suatu negara.

Dengan menggunakan paradigma ini, penulis mencoba untuk mengaitkan konteks masyarakat Indonesia bersama problem sosial masyarakat yang sedang terjadi dan dihadapi oleh masyarakat Indonesia yaitu permasalahan ekonomi dan bagaimana masyarakat Indonesia dapat bertahan dari gempuran globalisasi dengan membangun kapasitas yang bermanfaat bagi sistem sosial. Konteks problem sosial masyarakat ini membutuhkan pemerintah sebagai institusi kekuasaan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kepada perubahan sosial yang bermanfaat bagi bangsa. Negara melalui institusi pendidikan memberikan masyarakat ruang bagi transfer pengetahuan dan transfer nilai kebangsaan. Pendidikan kewarganegaraan berperan dalam membentuk karakter dan memberikan

pendidikan kecakapan hidup bagi masyarakat melalui institusi pendidikan. Pembentukan karakter dan kecakapan hidup ini menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter kebangsaan.

Institusi pendidikan dijadikan sebagai medium penanaman nilai dan integrasi sosial bangsa Indonesia. Institusi pendidikan dalam pemahaman peneliti bertugas sebagai medium transfer nilai dan transfer pengetahuan. Dalam pemahaman sebagai medium penanaman nilai, pendidikan harus mampu menanamkan nilai yang sesuai dengan ideologi negara dan menumbuhkan rasa kebangsaan Indonesia. Penanaman nilai dilakukan sebagai *standpoint* dari cara berpikir sehingga transfer pengetahuan selalu disesuaikan dengan nilai-nilai yang ditanamkan yaitu nilai kebangsaan. Transfer pengetahuan yang dicantumkan oleh peneliti adalah pengetahuan yang membangun *hard skill* dan *soft skill*. Kedua pengetahuan ini harus berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berhadapan dengan konteks problem sosial yang dihadapinya sehingga masyarakat mampu menyelesaikan permasalahannya secara mandiri.

Dengan medium institusi pendidikan, penulis mengkhususkan objeknya pada pendidikan kewarganegaraan sebagai agen yang mampu menanamkan karakter, kecakapan hidup dan nilai yang akan membangun manusia Indonesia yang bukan hanya berwawasan kebangsaan namun juga kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapi. Pendidikan kewarganegaraan dianggap penting bagi peneliti karena dengan melalui pendidikan kewarganegaraanlah negara dapat menumbuhkan paham kebangsaan yang mencerminkan karakter bangsa.

Pendidikan kewarganegaraan tersebut haruslah mengadopsi beberapa instrument lain agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan kontemporer di masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan juga harus mampu menjadi jiwa dari system pendidikan sehingga mata kuliah/ pelajaran lain tetap mengacu pada nilai kebangsaan. Untuk itu, pendidikan kewarganegaraan harus mampu mengadopsi dan meramunya dalam pendidikan kecakapan hidup yang aktual. Penulis beranggapan bahwa permasalahan kontemporer di masyarakat berpusat pada permasalahan ekonomi yaitu keterbatasan lapangan kerja. Oleh karena itu, peneliti beranggapan bahwa pendidikan kecakapan hidup seperti kepemimpinan, organisasi, kreatifitas, *entrepreneurship*, kemampuan berpikir kritis dan

keterampilan kerja merupakan tambahan yang baik untuk dimasukkan dalam pendidikan kewarganegaraan sehingga perubahan sosial yang direncanakan menghasilkan masyarakat Indonesia yang kreatif dan berwawasan kebangsaan sebagai sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas yang mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang aktual.

BAB U

Cara Melakukan Rekonstruksi Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam tujuan merekonstruksi pemikiran pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan kecakapan hidup dan karakter sumberdaya manusia industri kreatif, dengan pendekatan fenomenologis. “Peneliti fenomenologis berusaha memahami makna dari sebuah pengalaman dari perspektif partisipan” (Emzir, 2010:22). Dalam konteks penelitian ini penulis mengandalkan sebanyak mungkin pandangan responden/informan penelitian yang digali secara mendalam dengan didukung temuan bibliografis hasil kajian dari studi literatur dalam rangka mengeksplorasi dan menemukan rekonstruksi pemikiran pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan pendidikan kecakapan hidup (*soft skills*) dan karakter sumberdaya manusia industri kreatif yang tepat.

Dalam penelitian kualitatif yang penulis lakukan, pada dasarnya bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, untuk itu penelitian kualitatif dalam melihat objek yang diteliti lebih bersifat interaktif yaitu saling mempengaruhi (*reciprocal/interaktif*), sehingga tidak diketahui mana variabel independen dan dependennya. (Mukhtar 2013:11)

Penelitian kualitatif juga dilaksanakan untuk membangun pengetahuan dan penemuan. Dalam konteks Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini merupakan upaya menemukan dan merekonstruksi pemikiran pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan pendidikan kecakapan hidup dan karakter sumberdaya manusia industri kreatif. Upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan Konstruktivisme, yaitu suatu pendekatan yang menekankan bahwa pengetahuan selalu merupakan akibat dari konstruksi kognitif dari kenyataan yang terjadi melalui serangkaian aktivitas peserta didik, kemudian peserta didik

membentuk skema, kategori, konsep dan struktur pengetahuan yang diperlukan untuk pengetahuan. (Rumate, F.A. 2005). Menurut Cresswell (2010:11), Paradigma konstruktivis ini berasal dari gagasan Mannheim, Berger dan Luckmann, juga Lincoln dan Guba. Konstruktivisme sosial meneguhkan asumsi bahwa individu-individu selalu berusaha memahami dunia tempat mereka hidup dan bekerja. Proses memahami dunia ini dilakukan dengan mengembangkan makna-makna yang diarahkan pada objek-objek tertentu. Makna-makna inipun banyak dan beragam sehingga peneliti harus mencari kompleksitas pandangan-pandangan ketimbang mempersempit makna-makna menjadi sejumlah kategori dan gagasan.

Dalam penelitian konstruktivisme digunakan juga pendekatan atau strategi penelitian fenomenologis. Dalam buku ini, penulis mengandalkan sebanyak mungkin pandangan informan/responden yang tengah diteliti. Untuk mengeksplorasi pandangan-pandangan ini, pertanyaan perlu diajukan secara general dan mengikuti perkembangan pendapat dari informan. Pertanyaan umum diajukan agar partisipan/responden penelitian atau informan dapat mengkonstruksi makna atas situasi tersebut. Semakin terbuka pertanyaan semakin baik sehingga penulis dapat mencermati konstruksi pemikiran informan.

Dalam pemilihan responden/informan, penulis menyadari bahwa latar belakang informan dapat memengaruhi penafsiran mereka terhadap pertanyaan dan hasil penelitian. Penelitian dengan paradigma konstruktivisme memiliki kecenderungan induktif, yaitu ketimbang dilandasi teori, penelitian konstruktivis cenderung membuat atau mengembangkan suatu teori atau pola makna tertentu. Oleh karena itu, Paradigma ini dianggap memiliki kesesuaian dengan tema penelitian ini. Terkait dengan konstruktivisme ini, Crotty dalam Cresswell memperkenalkan sejumlah asumsi sebagai berikut:

Makna-makna dikonstruksi oleh manusia agar mereka bisa terlibat dengan dunia yang tengah mereka tafsirkan. Para peneliti kualitatif cenderung menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka agar partisipan dapat mengungkapkan pandangan-pandangannya. Manusia selalu terlibat dengan dunia mereka dan berusaha memahaminya berdasarkan perspektif historis dan sosial mereka sendiri. Kita semua dilahirkan di dunia makna (*world of meaning*) yang diwariskan oleh kebudayaan di sekeliling kita. Untuk itulah

peneliti kualitatif harus memahami konteks atau latar belakang partisipan dengan cara mengunjungi konteks tersebut dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Mereka juga harus menafsirkan apa yang mereka cari: sebuah penafsiran dibentuk oleh pengalaman dan latar belakang mereka sendiri. Makna diciptakan oleh lingkungan sosial, yang muncul di dalam dan di luar interaksi dengan komunitas manusia. Proses penelitian kualitatif bersifat induktif di mana di dalamnya peneliti menciptakan makna dari data-data lapangan yang dikumpulkan. (Cresswell, 2010; 12-13)

Paradigma yang digunakan dalam buku ini adalah paradigma konstruktivisme, yaitu paradigma yang merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/ mengelola dunia sosial mereka. (Hidayat, N. Dedy 2003:3).

The researchers studied a variety of constructivist reality constructed by individuals and the implications of these constructions for their lives with others. In constructivist each individual had a unique experience. Thus this study suggested a strategy such that each individual is taken way of looking at the world is valid, and the need for the respect that view. (Patton, M. Quin 2002:96).

Menurut Patton, para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut dalam kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruktivis setiap individu mengalami pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian yang menggunakan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu rasa menghargai atas pandangan tersebut

Paradigma konstruktivis juga dikenal dalam tradisi penelitian fenomenologis-psikologis yang berfokus pada upaya memahami dan menemukan “konstruksi makna dari perspektif subyek atau partisipan penelitian”. Konstruksi makna yang diungkap dalam penelitian ini berasal dari esensi struktur pengalaman-pengalaman subyek tentang fenomena-

fenomena (Cresswel, 1998:37, 51-55). Dalam buku ini fenomena yang diteliti adalah Pendidikan Kewarganegaraan dan mata kuliah lain mendukung atau berhubungan dengan industri kreatif. Untuk melakukan rekonstruksi, penulis perlu mengetahui konstruksi logika-logika internal dan makna-makna esensial atau paling layak dari pendapat subjek penelitian terhadap objek penelitian yaitu pemikiran tentang Pendidikan Kewarganegaraan.

Metode Penelitian yang digunakan

Penelitian dalam buku ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengeksplorasi dan menemukan (Cresswell, 2010:4). Menurut Nasution (2005:5), pendekatan kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Penelitian kualitatif tidak harus menjadi *problem solving* pada suatu kasus ataupun melakukan generalisasi terhadap suatu fenomena. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berupaya untuk menemukan hukum-hukum yang dapat digeneralisasi, penelitian kualitatif lebih berupaya menemukan pola dan makna dari fenomena tersebut. Perbedaan ini berakar pada perbedaan paradigma atau cara pandang terhadap realitas.

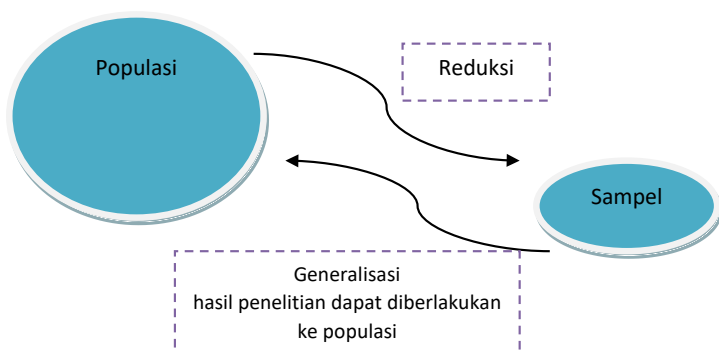
Dalam memandang realitas, gejala, atau objek yang diteliti, penulis tidak melihat secara parsial dan terpecah dalam variable-variabel. Penulis memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis, hasil konstruksi pemikiran, dan utuh (*holistic*) karena setiap aspek dari objek penelitian ini mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Sugiyono, 2008: 4). Kesatuan antar objek dalam penelitian tidak selalu dapat diamati secara langsung atau tidak dapat diindera, dengan kata lain tidak selalu tampak. Ketersalinghubungan antara objek-objek tersebut dapat diketahui melalui kesamaan gejala yang dimiliki oleh objek. Oleh karena itu, realitas dalam penelitian kualitatif yang penulis lakukan tidak hanya berbicara mengenai realitas yang tampak namun juga mampu mengungkap makna dibalik realitas tersebut.

Konsekuensi dari pandangan terhadap realitas tersebut, penelitian kualitatif ini harus menjadi instrument penelitian itu sendiri untuk melakukan teknik pengumpulan data yang partisipatif. Penelitian kualitatif mensyaratkan interaksi antara peneliti dengan objek yang diteliti. Hubungan peneliti dengan objek penelitian dalam penelitian kualitatif berbeda dengan hubungan dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti bersifat independen, terpisah dari objek penelitian. Peneliti menggunakan instrument kuesioner sebagai teknik pengumpulan data maka peneliti hampir tidak mengenal responden penelitian.

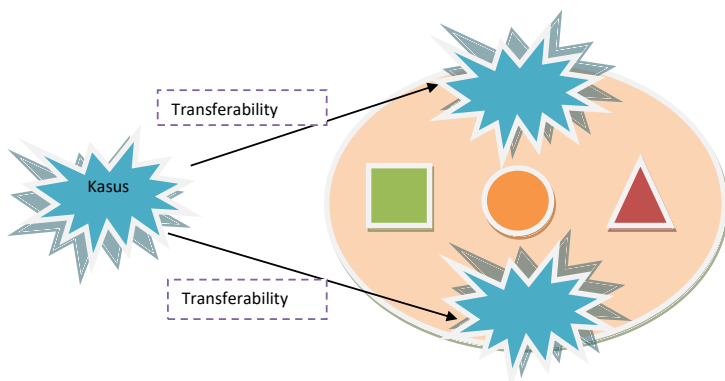
Penelitian dengan metode kualitatif yang dilakukan oleh penulis menggunakan paradigma konstruktivis. Dalam paradigma ini, penulis berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari para partisipan. Selain melalui pandangan para partisipan, penulis juga melakukan analisis dan interpretasi terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

Variable operasional dari penelitian ini adalah rekonstruksi pemikiran pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan kecakapan hidup dan karakter sumberdaya manusia (*human capital*) di bidang industri kreatif. Untuk melakukan rekonstruksi pemikiran, penulis harus terlebih dahulu mengetahui konstruksi pemikiran sebelumnya dan mengetahui persepsi pelaksana dan penerima pemikiran sebelumnya. Kemudian, untuk mengetahui dampak pemikiran pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan kecakapan hidup dan pendidikan karakter sumber daya manusia (*human capital*), penulis melakukan observasi langsung di lokasi penelitian dan melakukan wawancara mendalam dengan para partisipan/responden atau subjek penelitian.

Hubungan antar variable penelitian dalam penelitian kualitatif dengan objek yang diteliti lebih bersifat interaktif atau saling memengaruhi sehingga tidak diketahui mana variable dependen dan independennya. Penelitian kualitatif juga tidak melakukan generalisasi seperti pada penelitian kuantitatif tetapi lebih menekankan kedalaman informasi sehingga sampai pada tingkatan makna. Namun tidak berarti tidak dapat dilakukan generalisasi. Generalisasi dalam penelitian kualitatif disebut dengan *transferability* atau keteralihan. Hal ini berarti hasil penelitian kualitatif dapat ditransferkan atau diterapkan di tempat lain ketika kondisinya tidak jauh berbeda dengan tempat penelitian itu dilaksanakan.



Gambar 5.1
Generalisasi model penelitian kuantitatif



(Sugiyono, 2008:8)

Gambar 5.2
Generalisasi Penelitian Kualitatif

Gambar 5.1 memperlihatkan proses generalisasi yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Penelitian harus berkaitan dengan suatu fakta dan data, objek penelitian tertentu yang dapat dikalkulasikan. Generalisasi dilakukan dengan melakukan penarikan sampel pada populasi yang akan diteliti. Populasi tersebut direduksi ke dalam sampel atau perwakilan populasi yang dianggap dapat mewakili populasi tersebut. Kemudian, setelah hipotesis penelitian diuji melalui sampel penelitian, hasilnya dianggap dapat diberlakukan pada populasi keseluruhan.

Sedangkan gambar 5.2 menunjukkan proses transferability pada penelitian kualitatif. Transferability dilakukan dengan menganalisa sekumpulan kasus atau fenomena yang serupa dan menemukan pola yang terdapat pada kasus-kasus tersebut. Hasil penelitian kualitatif yang berdasarkan pada pengamatan mendalam terhadap suatu kasus dapat menemukan pola yang berlaku pada kasus tersebut. Pola tersebut kemudian dapat ditransfer pada kasus-kasus yang serupa.

Pada penelitian ini, fenomena pemikiran pendidikan kewarganegaraan dapat ditemukan dari penggunaan istilah yang berbeda secara historis. Selain itu model pembelajaran dari pendidikan kewarganegaraan yang ada saat ini pun memiliki perbedaan dengan model pembelajaran sebelumnya. Pola pembelajaran baru yang mengadopsi konsep demokratis tentunya masih dalam tahapan adaptasi mengingat lekatnya model dan konsep pendidikan kewarganegaraan dengan perubahan politik di negara ini. Selain itu, fenomena lain adalah berkembangnya pemikiran mengenai industri kreatif di era globalisasi. Orientasi dan cakupannya yang luas menghasilkan konsekuensi meningkatnya kebutuhan pendidikan kecakapan hidup. Di perguruan tinggi terutama universitas, tidak ditemukan kurikulum khusus industri kreatif. Industri kreatif dijadikan sebagai tujuan atau sebagai salah satu prospek lulusan dari universitas tersebut.

Dalam konteks pendidikan kecakapan hidup dan industri kreatif peneliti mengkaitkan dengan pendekatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan kewirausahaan, karena melalui mata kuliah tersebut memungkinkan para peserta didik untuk mendapatkan kecakapan hidup (*life Skills*) baik yang *general skills* (*personal* dan *social skills*) maupun *Specific skills* (*vocasional skills*) yang memang sangat dibutuhkan pada dunia kerja (dunia usaha dan dunia industri) atau dunia profesional.

Teknik Pengumpulan Data

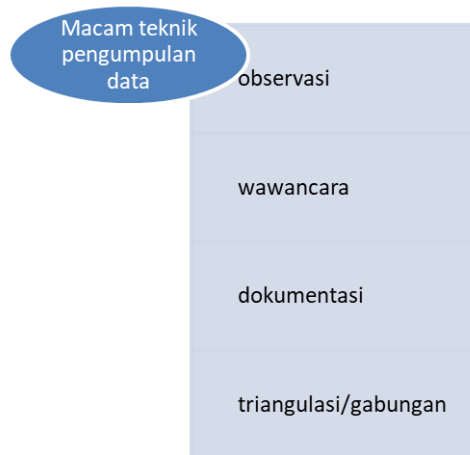
Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Sebagai *human instrument*, peneliti kualitatif berfungsi menetapkan fokus penelitian,

memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat simpulan atas temuannya.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa pengetahuan mengenai teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai. Validasi peneliti dilakukan dengan menilai kemampuan peneliti untuk melaksanakan metode dan teknik pengumpulan data. Kesulitannya adalah menilai dari kemampuan peneliti tersebut adalah peneliti itu sendiri.

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, seting dan berbagai sumber. Maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber data ke pengumpul data sedangkan sumber sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung oleh pengumpul data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2008:63) dapat berbentuk observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Seperti yang digambarkan dalam bagan berikut:



(Sugiyono,2008: 63)

Bagan 3.2
Macam teknik pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tahapan pengumpulan data seperti penjabaran mengenai teknik pengumpulan data yang diberikan oleh Sugiyono. Untuk mendapatkan data kontekstual dan konseptual mengenai rekonstruksi pemikiran pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan kecakapan hidup dan karakter sumberdaya manusia di bidang industri kreatif, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data penelitian sebagai berikut:

Observasi dan Wawancara

Pada pelaksanaan observasi di lapangan penulis menyelami pemahaman pelaku pendidikan, pakar dan penerima pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yang dijadikan objek penelitian baik secara konseptual maupun kontekstual dalam rangka memahami konteks penelitian itu sendiri, yaitu rekonstruksi pemikiran pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan kecakapan hidup dan karakter sumberdaya manusia di bidang industri kreatif.

Teknik observasi dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung. Observasi dilakukan oleh peneliti untuk memahami perilaku dalam hal ini adalah peran pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan kecakapan hidup dan pendidikan karakter yang sangat diperlukan dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang industri kreatif. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*Overt Observation*) yang berarti dalam penelitian ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan secara terus terang kepada sumber data bahwa peneliti sedang dalam melakukan penelitian. Menurut Patton (dalam Poerwandari 1998) salah satu hal yang penting, namun sering dilupakan dalam observasi adalah mengamati hal yang tidak terjadi. Dengan demikian Patton menyatakan bahwa hasil observasi menjadi data penting karena:

- a. Peneliti akan mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks dalam hal yang diteliti akan atau terjadi.

- b. Observasi memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan dari pada pembuktiaan dan mempertahankan pilihan untuk mendekati masalah secara induktif.
- c. Observasi memungkinkan peneliti melihat hal-hal yang oleh subjek penelitian sendiri kurang disadari.
- d. Observasi memungkinkan peneliti memperoleh data tentang hal-hal yang karena berbagai sebab tidak diungkapkan oleh subjek penelitian secara terbuka dalam wawancara.

Observasi memungkinkan peneliti merefleksikan dan bersikap introspektif terhadap penelitian yang dilakukan. Impresi dan perasaan pengamatan akan menjadi bagian dari data yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk memahami fenomena yang diteliti. Impresi tersebut dituangkan dalam catatan observasi.

Catatan observasi dalam penelitian ini berisi mengenai deskripsi lokasi penelitian, lingkungan penelitian dan perilaku informan. Deskripsi lokasi penelitian merupakan bagian dari lingkungan penelitian hanya tidak membahas interaksi antara objek penelitian dengan subjek penelitian. Keterhubungan antara objek penelitian dengan subjek penelitian dicatat pada klasifikasi lingkungan penelitian. Sedangkan perilaku informan merupakan hasil pengamatan peneliti berdasarkan informasi tentang informan maupun selama peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan penelitian.

Selain observasi wawancara dilakukan dalam rangka mengecek ulang atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya dan juga merupakan teknik komunikasi langsung antara peneliti dan sampel/informan. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Menurut Patton (dalam Poerwandari 1998) dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit.

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah: pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Pewawancara diharapkan menyampaikan pertanyaan kepada responden, merangsang responden untuk menjawabnya, menggali jawaban lebih jauh bila dikehendaki dan mencatat atau merekamnya. Apabila semua tugas ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, hasil wawancara menjadi kurang bermutu. Syarat menjadi pewawancara yang baik ialah keterampilan mewawancarai, motivasi yang tinggi dan rasa aman serta santun, artinya tidak ragu dan takut menyampaikan pertanyaan. Demikian pula responden/informan dapat mempengaruhi hasil wawancara karena mutu jawaban yang diberikan tergantung pada apakah dia dapat menangkap isi pertanyaan dengan tepat serta bersedia menjawabnya dengan baik.

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan *interviewer* / pewawancara mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan, dengan menggunakan pedoman wawancara tersebut maka *interviewer* harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara konkrit dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara berlangsung (Patton dalam poerwandari, 1998). Metode wawancara sangat bergantung pada efisiensi pertanyaan yang ringkas namun mendalam agar proses wawancara tidak keluar dari jalur atau tujuan penelitian. Oleh karena itu, posisi peneliti sebagai instrumen penelitian sangat penting dalam melakukan wawancara. Kemampuan peneliti dalam mengkonduksi pertanyaan, mengontrol pertanyaan dan membatasi penjelasan dari informan akan menentukan pemahaman informan terhadap pertanyaan yang diajukan sekaligus menentukan kualitas jawaban.

Metode wawancara merupakan salah satu bagian terpenting dalam penelitian konstruktivisme ini. Wawancara memuat argumen-argumen yang berisi pemikiran dan konstruksi logika informan. Dalam penelitian konstruktivisme, peneliti mengumpulkan sebanyak-banyaknya

pernyataan informan untuk mengetahui konstruksi logika atau pemikiran mengenai fenomena yang diteliti. Metode wawancara memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri seperti yang dijelaskan oleh Kerlinger (2000) menyebutkan 3 hal yang menjadi kekuatan metode wawancara :

- (1) Mampu mendeteksi kadar pengertian subjek terhadap pertanyaan yang diajukan. Jika mereka tidak mengerti bisa diantisipasi oleh interviewer dengan memberikan penjelasan.
- (2) Fleksibel, pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan masing-masing individu.
- (3) Menjadi satu-satunya hal yang dapat dilakukan di saat teknik lain sudah tidak dapat dilakukan.

Ada dua jenis wawancara jika dilihat dari sifat pertanyaannya yaitu wawancara tertutup dan terbuka. Pada penelitian ini peneliti menggunakan model pertanyaan terbuka hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat melakukan observasi jawaban jauh lebih dalam dan leluasa karena tidak terikat pada satu struktur susunan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada semua subjek penelitian yaitu pakar pendidikan, ketua jurusan, dosen sebagai pendidik dan mahasiswa sebagai penerima pendidikan. Untuk memudahkan penelitian, peneliti melakukan klasifikasi terhadap subjek penelitian pada klasifikasi pakar, dosen dan mahasiswa. “Teknik wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang mungkin tidak diperoleh melalui observasi”. (Alwasilah, 2002:154). Peneliti melakukan wawancara hanya kepada beberapa informan yang dipandang mengetahui secara pasti tentang permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Pengumpulan data dengan jalan wawancara ini adalah dalam rangka mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden/informan. Pedoman wawancara yang disusun peneliti juga telah dibatasi pada masalah wawancara tatap muka dengan menggunakan daftar pertanyaan singkat karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi, yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden/informan, karena data semacam ini merupakan syarat suatu penelitian survai di samping kemampuan pengamatan atau observasi. (Pedoman wawancara selengkapnya terlampir).

Melalui teknik ini juga diharapkan peneliti mendapatkan data sebanyak-banyaknya, serta untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai pendidikan kecakapan hidup, pendidikan karakter dan industri kreatif serta keterkaitan antarvariabel tersebut. Wawancara dilakukan pada responden pelaku baik secara individu maupun kelompok di lokasi penelitian.

Instrumen Penelitian Yang digunakan

Peneliti sangat berperan dalam seluruh proses penelitian kualitatif, mulai dari memilih topik, mendeteksi topik tersebut, mengumpulkan data, hingga analisis, menginterpretasikan dan menyimpulkan hasil penelitian (Poerwandari 1998). Dalam mengumpulkan data-data penulis berperan sebagai sentral instrumen penelitian namun juga membutuhkan alat bantu lain sesuai dengan prosedur pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 alat bantu, yaitu:

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman wawancara ini disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Pedoman Observasi

Pedoman observasi digunakan agar peneliti dapat melakukan pengamatan sesuai dengan tujuan penelitian. Pedoman observasi disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan atau setting wawancara, serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan informasi yang muncul pada saat berlangsungnya wawancara.

3. Alat Perekam

Alat perekam berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara, agar peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari subjek.

Dalam pengumpulan data, alat perekam baru dapat dipergunakan setelah mendapat ijin dari subjek untuk mempergunakan alat tersebut pada saat wawancara berlangsung.

Teknik Analisa Data Hasil Penelitian

Setelah data penelitian terkumpul, data tersebut masih dalam bentuk sebaran dan klasifikasi sederhana (*raw data*). Rekonstruksi pemikiran membutuhkan klasifikasi, kategorisasi, pengujian data dan alternatif penjelasan data. Melalui tahapan tersebut peneliti dapat menentukan konstruksi pemikiran sebelumnya dan menentukan bagian yang perlu direkonstruksi. Dalam menganalisis data pada penelitian ini dilakukan sejak sebelum peneliti tersebut terjun ke lapangan, selama pengambilan data di lapangan, dan setelah selesai pengumpulan data di lapangan. Dalam penelitian ini analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data. (Sugiyono, 2009 : 245).

1. Analisis Sebelum di Lapangan

Pada penelitian kualitatif ini peneliti telah melakukan analisis data sebelum peneliti melakukannya di lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

2. Analisis Data di Lapangan

Analisis data dalam penelitian ini, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban responden. Apabila jawaban responden setelah dianalisis ternyata belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data kualitatif, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *data conclusion: drawing/verification*. (Sugiyono, 2009:246). Dalam menganalisa penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan (Sugiyono, 2009), diantaranya:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan begitu banyak dan beragam sehingga perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data, dan ini berarti peneliti harus merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang peneliti anggap penting, dicari tema dan polanya. Setelah melakukan reduksi data peneliti mendapatkan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Pada reduksi data ini peneliti hanya memfokuskan pada pendidikan kewarganegaraan, kecakapan hidup, pendidikan karakter, sumber daya manusia dan industri kreatif. Panduan yang peneliti gunakan dalam mereduksi data ini adalah perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah peneliti tetapkan, baik tujuan umum maupun tujuan khusus penelitian.

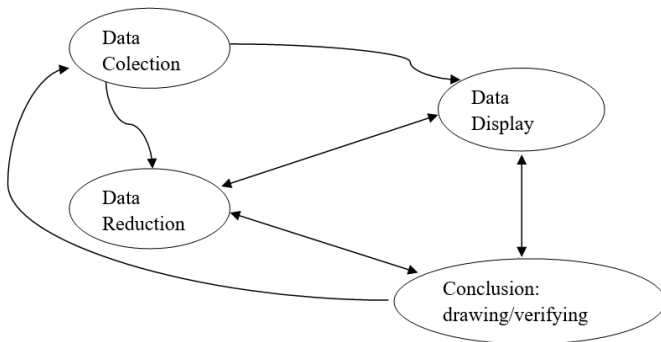
b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yang peneliti lakukan dalam penelitian kualitatif ini adalah dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori/variabel. Hal yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2009:249). Namun demikian pada penelitian ini, peneliti juga menyajikan data berupa matriks, bagan dan jejaring hubungan antar variabel.

c. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Pada langkah ketiga ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang peneliti ambil adalah untuk menjawab perumusan dan tujuan penelitian. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. (Sugiyono, 2009:253). Pada penelitian ini kesimpulan yang peneliti ambil adalah berupa rekonstruksi pemikiran baru di bidang pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan kecakapan hidup dan karakter sumberdaya manusia industri kreatif.

Ketiga tahapan tersebut berlangsung secara simultan. Selanjutnya model interaktif dalam proses analisis data sebagaimana dimaksud dapat digambarkan (Sugiyono, 2009: 247) seperti berikut:



Gambar 3.3

Komponen dalam Proses Analisis data (*Interactive model*)

Validasi Penelitian

Untuk menguji kredibilitas dalam penelitian kuantitatif disebut validitas hal ini dilakukan untuk menguji apakah data umum penelitian yang telah dikumpulkan adalah benar (valid). Sedangkan untuk menguji

kredibilitas penelitian kualitatif digunakan triangulasi. Dalam penelitian dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif, kelemahan yang selalu dipermasalahkan adalah masalah validitas dan realitas data. Selain itu seperti yang dipaparkan dalam metode penelitian yang digunakan oleh peneliti di atas, teknik wawancara seringkali menciptakan bias dalam hasil penelitian oleh karena persepsi subjektif dan perilaku subjek penelitian yang terkadang tidak natural. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan uji keterpercayaan data (validitas data) hasil penelitian. Denzin (1978) dalam (Mukhtar 2013: 138) mengemukakan ada empat model triangulasi, yaitu dengan penggunaan sumber, metode, peneliti dan teori yang ganda dan/atau berbeda. Menurut Patton (1987) dalam Mukhtar (2013) ada 4 macam triangulasi Sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan penelitian kualitatif, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Yaitu membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi atau membandingkan data dari berbagai sumber data yang berbeda, dalam konteks penelitian ini adalah hasil observasi dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda, serta membandingkannya dengan hasil kajian literatur yang berkaitan.

2. Triangulasi metode

Triangulasi metode mengimplikasikan adanya model-model pengumpulan data secara berbeda (observasi, wawancara) dengan pola yang berbeda. Pada triangulasi metode ini peneliti menggunakan dua strategi, yaitu: pengecekan derajat kepercayaan data temuan hasil penelitian melalui pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi dan wawancara, kemudian strategi pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama, yaitu metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.

3. Triangulasi Peneliti/Pengamat

Triangulasi dengan jalan menggunakan peneliti/pengamat yang berbeda adalah salah satu upaya untuk mengecek kembali derajat kepercayaan data. Penggunaan peneliti/pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data akan mengurangi penyimpangan dalam pengumpulan data, yang dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil pekerjaan seorang peneliti dengan peneliti lainnya. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus bertindak sebagai pengamat (*expert judgement*) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

4. Triangulasi Teori

Triangulasi Penggunaan berbagai teori yang berlainan dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan pada Bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut sesuai kebutuhan yang muncul pada teori tersebut.

Selain validitas penelitian, peneliti juga perlu melakukan validitas eksternal yang mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada kasus lain. Untuk itu peneliti perlu memperlihatkan atau mendeskripsikan kasus-kasus lain yang memiliki konteks yang sama dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian, permasalahan lainnya adalah keajegan atau realibilitas penelitian yang mengacu pada seberapa jauh penelitian berikutnya akan mencapai hasil yang sama apabila mengulang penelitian yang sama. Dalam penelitian ini, keajegan mengacu pada kemungkinan peneliti selanjutnya memperoleh hasil yang sama apabila penelitian dilakukan sekali lagi dengan subjek yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keajegan penelitian kualitatif selain menekankan pada desain penelitian, juga pada cara pengumpulan data dan pengolahan data.

Pada analisis data hasil penelitian ini triangulasi dilakukan dengan memeriksa validitas data tertentu dengan menggunakan sumber lain, diskusi secara mendalam hasil temuan dengan para pakar (promotor/

dosen pembimbing), dosen dan mahasiswa serta pelaku industri kreatif, penggunaan bahan referensi yang aktual dengan tetap menjaga kesesuaian dengan tujuan, dan pemaparan temuan penelitian secara rinci dan sistematis. Artinya kriteria keabsahan datanya dilakukan dengan melihat derajat kepercayaan (*credibility*) melalui teknik triangulasi data/sumber dan triangulasi metode, perpanjangan kehadiran peneliti, pengecekan teman sejawat dan ketekunan pengamatan, derajat keterampilan (*transferability*), derajat kebergantungan (*dependability*), dan derajat kepastian (*confirmability*).

Lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang bercirikan adanya tiga unsur yaitu pelaku, tempat atau kegiatan yang akan diobservasi (Nasution 2003:43). Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (salah satu Universitas di Bandung). Alasan penelitian ini dilakukan di lokasi yang dipilih adalah karena memiliki keunikan dari prospeksi lulusannya. Yakni lulusannya harus memiliki kemampuan untuk bekerja dalam administrasi pemerintahan khususnya di bidang perniagaan dan juga memiliki kemampuan bisnis di sektor swasta, selain juga harus memiliki pemahaman yang lebih lengkap mengenai politik dan kewarganegaraan. Kerja keras dalam fakultas ini adalah menyeimbangkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai kewarganegaraan untuk mencapai kedua tujuan prospeksi lulusan di atas. Sehingga, peneliti mengasumsikan bahwa model yang sama dapat diterapkan di tempat lain.

Subyek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah mahasiswa sebagai penerima pendidikan, dosen sebagai pengajar pendidikan kewarganegaraan dan mata kuliah lain yang berkaitan dengan penelitian. Mata kuliah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ditentukan memiliki persinggungan dengan pendidikan kecakapan hidup (*soft skills*), karakter dan industri kreatif. Mata kuliah tersebut salah satunya adalah pendidikan kewirausahaan yang berorientasi pada ekonomi kreatif.

Kemudian, komunitas industri kreatif yang dibentuk oleh para pemuda dan mahasiswa di Bandung untuk saling bertukar ide kreatif dalam usaha di bidang bisnis kreatif. Pelaku usaha atau bisnis kreatif dalam komunitas ini sangat bervariasi, dari produksi barang hingga produksi jasa (periklanan) terdapat pada komunitas ini. Anggota yang tergabung dalam komunitas ini pada umumnya adalah para mahasiswa yang baru memulai beraktivitas di bidang industri kreatif. Peneliti mendapatkan kontak dengan komunitas ini berdasarkan *snowball sampling* atau rekomendasi dari salah seorang peserta penelitian yaitu mahasiswa yang diwawancarai pada saat observasi. Komunitas ini aktif memberikan pelatihan, seminar usaha kreatif dan pembinaan terhadap para pengusaha-pengusaha kreatif pemula. Komunitas ini juga mengadakan pertemuan rutin di Bandung.

Keberadaan komunitas ini sangat membantu peneliti dalam mendapatkan informasi mengenai praktik industri kreatif dan kesenjangan konseptual kreatifitas di institusi pendidikan dengan praktik industri kreatif. Melalui komunitas ini, peneliti mengadakan pengujian silang atau triangulasi informan dan data untuk melakukan validasi penelitian. Melalui subyek penelitian tersebut peneliti melakukan observasi yang dijadikan upaya perbandingan antara yang seharusnya terjadi secara ideal dengan kenyataan di lapangan yang dinamis. Hasil observasi dan wawancara terhadap subyek penelitian difokuskan pada kondisi transisional yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan pengaruhnya pada kualitas sumber daya manusia. Gambaran sistem pendidikan Indonesia dalam menyikapi kondisi transisional yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan karakter pada kurikulum pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan pengajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai katalisator pendidikan karakter dan pendidikan kecakapan hidup, serta sinergi pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan kecakapan hidup untuk menopang sumber daya manusia bidang industri kreatif.

Selanjutnya mewawancarai subjek penelitian yaitu para dosen pendidikan kewarganegaraan, pendidikan kewirausahaan, dan ketua jurusan untuk memahami praktik pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan orientasi kewirausahaan juga industri kreatif yang dilakukan oleh jurusan ini. Selain itu, peneliti juga melakukan triangulasi dengan mewawancarai

para mahasiswa dan pelaku bisnis industri kreatif sebagai perbandingan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti menggunakan indikator-indikator penelitian yang dikembangkan dalam pertanyaan dan interpretasi. Selain itu juga peneliti melakukan pencatatan observasi seperti pemahaman informan, kondisi wawancara dan kemampuan informan menjawab pertanyaan. Berbagai hasil temuan penelitian oleh peneliti pada subyek penelitian ini dapat memberikan gambaran informasi dalam menjawab permasalahan dan tujuan penelitian ini, yaitu untuk menemukan dan merekonstruksi pemikiran pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan kecakapan hidup dan karakter sumber daya manusia industri kreatif.

BAB VI

Lemahnya Penerapan Merit System Serta Peran Pendidikan dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Industri kreatif

Umumnya dalam perguruan tinggi, perhatian dalam hal bidang ekonomi kreatif hanya dimunculkan melalui mata kuliah kewirausahaan. Penyampaiannya lebih pada pendekatan teoritis saja ketimbang pendidikan kecakapan hidup yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam ranah praktis. Mata kuliah ini pun memiliki ujian tertulis sebagaimana mata kuliah lain sehingga karakter kreatif tidak muncul sebagai outputnya. Tentu saja hal ini memberikan dampak yang berbeda pada peserta didik karena dapat mengarah pada pendekatan formal normatif yang tidak aplikatif, sehingga penulis beranggapan bahwa sistem pendidikan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional kita yang diimplementasikan pada perguruan tinggi ini nampaknya harus terus diperbaiki.

Meski kita juga menyadari bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia sepertinya tidak pernah ada habisnya, meski kita tahu pemerintah sendiri terus berupaya dan tidak pernah berhenti untuk terus memperbaiki dilema pendidikan ini. Hal ini tidak terlepas dari rendahnya pemahaman filosofi pendidikan yang diterapkan oleh para penentu kebijakan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia tanpa filosof adalah buah dari kebijakan yang sering tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran. Sehingga banyak menimbulkan pertanyaan apakah filosofi pendidikan ini belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia, hingga dunia pendidikan di Indonesia belum juga berkembang seperti yang kita harapkan? Bagaimana memanfaatkan filosofi pendidikan agar mendasari sistem pendidikan nasional kita? Sebuah kebijakan tanpa mengacu pada filosofi tentu tidak akan mempunyai makna yang berarti dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Apabila ditelaah lebih dalam, rendahnya mutu kebijakan pendidikan yang digulirkan oleh pemerintah karena menjadi penentu

kebijakan pendidikan. sepertinya tidak memahami kebutuhan rakyatnya, kebutuhan dunia usaha dan dunia Industri yang sudah jauh “melesat maju” dibandingkan dengan dunia pendidikan.

Kebijakan pendidikan nasional kita masih harus ditinjau ulang lebih mendalam. Menurut penulis, setidaknya ada dua acuan agar kebijakan pendidikan yang digulirkan oleh pemerintah mengacu pada kerangka filosofi. Pertama, kajian filosofi pendidikan sedemikian rupa seharusnya dibentuk berdasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila baik dari sisi agama, sosial, budaya (karakter dan kepribadian), etika dan estetika. Sedangkan acuan yang kedua adalah melihat bahwa filosofi pendidikan di negeri ini belum dijadikan acuan untuk pengembangan afeksi pada diri peserta didik. Nilai afeksi (perilaku) ini tidak terlepas dari kognitif dan psikomotorik, namun yang ada sekarang pemerintah dalam menentukan kebijakan pendidikan hanya menitikberatkan kepada nilai kognitif saja, peserta didik dipertajam keilmuannya hingga mengabaikan nilai afeksi dan psikomotoriknya, bahkan hampir tidak memiliki kecakapan hidup (life skills/soft skills) yang dibutuhkan untuk menghadapi tuntutan dan tantangan hidup yang semakin kompleks.

Kebijakan pendidikan yang ada sekarang dapat dikatakan belum membuahkan hasil yang baik masih jauh dari tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Buktinya semakin banyak tingkat pengangguran karena tidak melahirkan lulusan yang siap kerja. Tingkat kejahatan bukan sekedar kejahatan “kelas teri” bahkan kejahatan “kerah putih” dan korupsi semakin merajalela. Kedua hal tersebut, secara nyata dalam kajian filosofi pendidikan saat ini terkait dengan adanya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang dianggap telah mengingkari makna dan hakikat filosofi pendidikan itu sendiri. Peserta didik hanya “dipaku” dalam tingkat kognitif, selain itu nilai-nilai luhur Pancasila dinomorduakan tanpa melihat betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila bagi pembentukan diri peserta didik dalam mengarungi hidupnya.

Dalam hal pengembangan sumber daya manusia, khususnya di lingkungan pemerintahan, tampak sekali rangkaian yang terputus antara pegawai/pejabat karir dengan sistem politik kita misalnya dalam penempatan pejabat, nyaris tidak ada lagi yang murni seseorang diangkat

dalam jabatan tertentu karena prestasi/keahliannya, terutama di daerah jelas sekali kepentingan politik sangat menonjol, dan ini juga menjadi sorotan mahasiswa dan dosen yang peneulis temui pada saat wawancara.

Lemahnya Penerapan Merit System Pada Aparatur Birokrasi

Perbaikan kinerja aparat pelayanan publik merupakan salah satu isu penting dalam reformasi administrasi publik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tuntutan perbaikan kinerja aparat publik semakin besar jika dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing negara dalam persaingan global (Balfour, 2005). Kemajuan suatu bangsa tidak hanya tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki, namun lebih ditentukan oleh kemampuan bangsa tersebut dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimilikinya dengan baik. Untuk mengelola sumber daya secara tepat dan baik mutlak diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai sumber daya manusia yang bertugas melayani kepentingan publik sudah semestinya memiliki kualitas yang baik agar mampu menjalankan tugasnya secara tepat dan benar. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas dan prestasi kerjanya, dengan merit system diyakini merupakan salah satu alternatif sistem peningkatan karir dan penggajian yang dapat memacu prestasi dari Pegawai Negeri Sipil.

“Sumber daya manusia merupakan faktor utama yang cukup strategis dalam meningkatkan kemampuan daya saing (competitive) dan bertahan (defensive) bagi institusi/ organisasi di era globalisasi saat ini. Namun, pada prakteknya kita melihat bagaimana pemerintah pusat maupun daerah dalam memilih pejabat-pejabatnya sering kali tidak menggunakan sistem rekrutmen yang baik, tetapi lebih memilih orang yang dekat/kerabat atau masih memiliki hubungan keluarga/pertemanan/koleganya, meski tanpa kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang diembannya, akibatnya SDM tersebut akan mengambil kebijakan yang tidak tepat”. (Pendapat Responden)

Melalui penerapan merit system yang baik diharapkan mampu menciptakan *Good Corporat Governance* (GCG) (Dharyanto, Arif, 2009). Penerapan GCG ini akan memberikan harapan karena merupakan suatu

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dan *Organizaton for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan *corporate governance* yang disadur dari *Cadbury Committee of United Kingdom* sebagai “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara Pemegang Saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). (FCGI, 2006)

Kendala Merit System dan Profesionalisme antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Politisasi birokrasi;
- 2) Etnosentrisme daerah;
- 3) Hubungan kekerabatan (sistem famili);
- 4) Primordialisme dalam jabatan birokrasi pemerintah;
- 5) Belum adanya standar kompetensi jabatan publik;
- 6) Sistem rekrutmen tertutup;
- 7) Buruknya perencanaan dan pengembangan karir pegawai;
- 8) Sistem penggajian; dan
- 9) Rendahnya etos kerja pegawai.

Dalam kondisi saat ini, pada umumnya, penempatan sumber daya manusia pada jabatan publik berdasarkan informasi yang terbatas dan kekerabatan saja, dampaknya adalah penempatan karyawan kurang optimal, inefisiensi; potensi sumber daya manusia terhambat. Untuk dapat menempatkan sumber daya manusia berdasarkan informasi yang lengkap dan akurat, Menurut Ari Dwipayanadi, (2003) agar penempatan karyawan

(SDM) lebih optimal sehingga dapat segera ditindaklanjuti program pembinaan sumber daya manusia yang tepat, maka perlu dilakukan,

- 1) Penyusunan master plan pengembangan sumber daya manusia, melalui:
 - ✓ Kajian Kompetensi Inti Unit Kerja (Dinas, Badan, Biro, Direktorat/Kantor)
 - ✓ Perumusan kompetensi umum sumber daya manusia Aparatur.
- 2) Profiling sumber daya manusia aparatur; dan
- 3) Rekomendasi mekanisme penempatan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

Pada saat ini, maraknya jumlah PNS bermasalah dengan hukum yang dipromosikan menjadi pejabat, menunjukkan masalah sistemik. Hal tersebut sebenarnya dapat diantisipasi, dengan sistem rekrutmen pejabat yang lebih profesional dan jelas kriterianya. (Ari Dwipayana, 2003), menilai meratanya pengangkatan pejabat bermasalah di Indonesia, akibat proses rekrutmen birokrat untuk menduduki jabatan strategis sangat tergantung politisi. Kendati ada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), penentuan pejabat daerah berada di tangan kepala daerah. Apalagi, dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembina pegawai negeri sipil di daerah adalah kepala daerah. Sementara kepala daerah tidak memiliki sensitivitas pada persoalan etika pemerintahan. Atas nama kepentingan politik, balas jasa atau dikorbankan, proses hukum hendaknya tidak merembet kepada kepala daerah, pemberian kompensasi berupa jabatan tidak diberikan.

Untuk memotivasi, hendaknya diberikan penghargaan atau reward bagi PNS yang memiliki prestasi kerja dan dilakukan dengan transparan sehingga memiliki sikap kompetisi antar kementerian atau unit kerja dalam memberikan pelayanan, mendorong tegaknya hukum dan bersedia memberikan pertanggungjawaban terhadap publik (*public accountability*) secara teratur, serta pengawasan yang ketat dalam menerapkan *merit system* dimana pemerintah perlu membentuk tim *merit system* sehingga dapat berjalan secara efektif. Penerapan *merit system* juga akan efektif bila terdapat komitmen penuh dari segenap pihak, yaitu pimpinan dan pegawai (PNS) institusi/organisasi.

Peran Pendidikan dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menghadapi Kondisi Transisional Dan Pengaruhnya Bagi Pengembangan Sumberdaya Manusia

Pendidikan Adalah Kekuatan

Setidaknya ada lima unsur pendidikan yang harus menjadikan acuan bagi pelaksanaan sistem pendidikan nasional kita ke lima unsur tersebut adalah: (1) Peserta didik, yaitu pihak yang menjadi obyek utama pendidikan; (2) Pendidik, yaitu pihak yang menjadi subyek dari pelaksanaan pendidikan; (3) Materi, yaitu bahan atau pengalaman belajar yang disusun menjadi kurikulum; (4) Alat pendidikan, yaitu tindakan yang menjadi kelangsungan mendidik; dan (5) Lingkungan, yaitu keadaan yang berpengaruh terhadap hasil pendidikan dasar dan landasan pendidikan atau filosofi pendidikan, yaitu landasan yang menjadi fundamental dari segala kegiatan pendidikan.

Dari ke lima unsur pendidikan tersebut ada satu permasalahan utama pendidikan di Indonesia yang menurut penulis adalah rendahnya pemahaman filosofi pendidikan yang diterapkan oleh para penentu kebijakan-kebijakan pendidikan. Arogansi pendidikan tanpa filosofi, buah dari wacana kebijakan yang sering tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran. Sehingga banyak menimbulkan pertanyaan apakah filosofi pendidikan ini belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia, sehingga dunia pendidikan di Indonesia belum juga berkembang seperti yang kita harapkan.

Pendidikan adalah kekuatan (*Education is a Power*: Theodore Brameld 1965), sehingga pendidikan dapat menjadi alat kekuasaan jenis lain atau bahkan menjadi penghasil dan penentu kekuasaan. Padahal di Indonesia saat ini para penentu kebijakan cenderung instan (cepat memutuskan tanpa mengkaji lebih dalam) hingga wajar saja dunia pendidikan yang diharapkan mampu melahirkan generasi-generasi yang andal dan siap bersaing tak kunjung tercapai, mengalami kemunduran bahkan di tingkat ASEAN pun, lulusan pendidikan Indonesia ditutup sebelah mata, lalu bagaimana memanfaatkan filosofi pendidikan agar mendasari sendi-sendi pendidikan nasional? Menurut Paulo Freire (1984), seorang filosof, mengemukakan filosofi pendidikan merupakan penjabaran

pendidikan yang harus berorientasi kepada pengenalan realitas manusia dan dirinya sendiri. Hal ini benar adanya, karena dengan berpendidikan berarti memanusiakan manusia menjadi dirinya, bukan menjadi objek tertentu tapi membentuk dirinya sebagai subjek dalam segala kehidupannya. Hingga wujud dari pembentukan manusia seutuhnya (sesuai tujuan pendidikan nasional) bukan angan-angan belaka. Tetapi dengan pemanfaatan filosofi pendidikan sedikit banyak bisa mewujudkannya.

Peran Pendidikan Menghadapi Kondisi Transisional

Abad ke-21 atau era globalisasi ditandai sebagai abad keterbukaan, artinya kehidupan manusia di era globalisasi akan banyak mengalami perubahan-perubahan fundamental yang berbeda dengan tata kehidupan dalam abad sebelumnya. Era ini menuntut kualitas dalam segala usaha dan hasil kerja manusia. Untuk itu sumberdaya manusia berkualitas yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga pendidikan dengan pengelolaan profesional diharapkan membuah sumber daya manusia unggulan. Tuntutan-tuntutan yang serba baru tersebut meminta kita untuk melakukan berbagai terobosan dalam berpikir, penyusunan konsep, dan tindakan-tindakan yang tepat atau dengan kata lain diperlukan suatu paradigma baru dalam menghadapi tuntutan dan tantangan-tantangan yang baru, demikian kata filsuf Khun. Menurut filsuf Khun apabila tantangan-tantangan baru tersebut dihadapi dengan menggunakan paradig lama, maka segala usaha akan menemui kegagalan. Tantangan yang baru menuntut proses terobosan pemikiran (*breakthrough thinking process*) apabila yang diinginkan adalah output yang bermutu yang dapat bersaing dengan hasil karya dalam dunia yang serba terbuka (Tilaar, 1998:245)

Dalam menghadapi kondisi transisional di era globalisasi yang dihadapi bangsa Indonesia, peran institusi pendidikan diharapkan dapat dijadikan alat integrasi sosial. Institusi pendidikan diharapkan memiliki perhatian pada penyelesaian problematika yang dihadapi oleh peserta didik dan pengaplikasian ilmu pengetahuan serta nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan peserta didik. Sensibilitas institusi pendidikan dalam memahami problematika sosial dan upaya mencari solusi terhadapnya merupakan point penting dalam menghadapi kondisi transisional tersebut.

Saat ini, pendidikan berada di masa pengetahuan (knowledge age) dengan percepatan peningkatan pengetahuan yang luar biasa. Percepatan peningkatan pengetahuan ini didukung oleh penerapan media dan teknologi digital yang disebut dengan information super highway (Gates, 1996). Gaya kegiatan pembelajaran pada masa pengetahuan (knowledge age) harus disesuaikan dengan kebutuhan pada masa pengetahuan (knowledge age). Bahan pembelajaran harus memberikan desain yang lebih otentik untuk melalui tantangan di mana peserta didik dapat berkolaborasi menciptakan solusi memecahkan masalah pelajaran. Pemecahan masalah mengarah ke pertanyaan dan mencari jawaban oleh peserta didik yang kemudian dapat dicari pemecahan permasalahan dalam konteks pembelajaran menggunakan sumber daya informasi yang tersedia Trilling and Hood (1999 : 21).

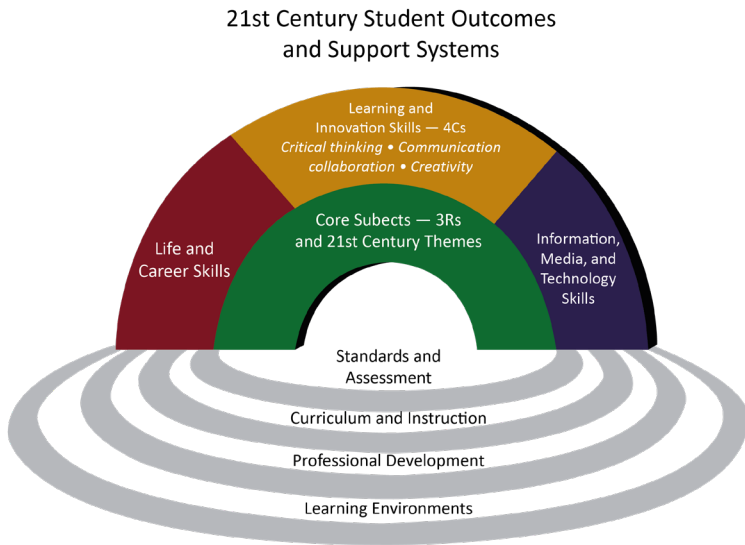
Saat ini, tidak semua institusi pendidikan memiliki perhatian yang sama mengenai problematika sosial terutama di bidang ekonomi kreatif. Hal tersebut sangat bergantung pada cara pandang pengelola pendidikan terhadap kebutuhan mendesak problematika sosial. Selain itu juga cara atau solusi yang dipilih dalam menyelesaikan problematika sosial, khususnya yang menyangkut pada penciptaan lapangan kerja baru dan kualitas sumber daya manusia.

Upaya ini rupanya masih berada di ruang ideal yang juga belum terlaksana secara efektif namun demikian sebenarnya peserta didik memiliki kemampuan membagi dan menerapkan nilai kewarganegaraan dalam seluruh aspek kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa proses habituasi belum berjalan secara efektif. Tentu saja tidak ada yang ideal dalam proses pembentukan karakter namun upaya yang dilakukan melalui proses habituasi pun tidak cukup sekedar dilakukan secara implisit sehingga peserta didik tidak memahami tujuan pendidikan karakter itu sendiri.

Pergeseran Paradigma Belajar Abad 21

Tuntutan perubahan mindset manusia abad 21 yang telah disebutkan di atas menuntut pula suatu perubahan yang sangat besar dalam pendidikan nasional, yang kita ketahui merupakan warisan dari sistem pendidikan lama yang isinya menghafal fakta tanpa makna. Mengubah sistem pendidikan Indonesia bukanlah pekerjaan yang mudah. Sistem pendidikan Indonesia

merupakan sistem pendidikan terbesar di dunia yang meliputi sekitar 30 juta peserta didik, 200 ribu lembaga pendidikan, dan 4 juta tenaga pendidik, tersebar dalam area yang hampir seluas benua Eropa. Namun perubahan ini merupakan sebuah keharusan jika kita tidak ingin terlindas oleh perubahan jaman global. P21 (Partnership for 21st Century Learning) mengembangkan framework pembelajaran di abad 21 yang menuntut peserta didik untuk memiliki keterampilan, pengetahuan dan kemampuan dibidang teknologi, media dan informasi, keterampilan pembelajaran dan inovasi serta keterampilan hidup dan karir (P21, 2015). Framework ini juga menjelaskan tentang keterampilan, pengetahuan dan keahlian yang harus dikuasai agar siswa dapat sukses dalam kehidupan dan pekerjaannya.



Gambar 6.1
Framework Pembelajaran Abad ke-21

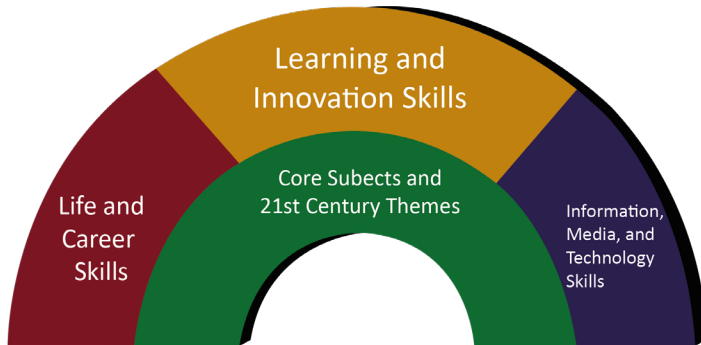
Sejalan dengan hal itu, Kemdikbud merumuskan bahwa paradigma pembelajaran abad 21 menekankan pada kemampuan peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber, merumuskan permasalahan, berpikir analitis dan kerjasama serta berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah (Litbang Kemdikbud, 2013). Adapun penjelasan mengenai framework pembelajaran abad ke-21 menurut (BSNP:2010) adalah sebagai berikut:

- 1) Kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah (*Critical-Thinking and Problem-Solving Skills*), mampu berfikir secara kritis, lateral, dan sistemik, terutama dalam konteks pemecahan masalah;
- 2) Kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama (*Communication and Collaboration Skills*), mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan berbagai pihak;
- 3) Kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah (*Critical-Thinking and Problem-Solving Skills*), mampu berfikir secara kritis, lateral, dan sistemik, terutama dalam konteks pemecahan masalah;
- 4) Kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama (*Communication and Collaboration Skills*), mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan berbagai pihak;
- 5) Kemampuan mencipta dan membaharui (*Creativity and Innovation Skills*), mampu mengembangkan kreativitas yang dimilikinya untuk menghasilkan berbagai terobosan yang inovatif;
- 6) Literasi teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communications Technology Literacy*), mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan aktivitas sehari-hari;
- 7) Kemampuan belajar kontekstual (*Contextual Learning Skills*), mampu menjalani aktivitas pembelajaran mandiri yang kontekstual sebagai bagian dari pengembangan pribadi, dan
- 8) Kemampuan informasi dan literasi media, mampu memahami dan menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan beragam gagasan dan melaksanakan aktivitas kolaborasi serta interaksi dengan beragam pihak.

Keterampilan Abad Ke-21

Setidaknya ada tiga jenis keterampilan yang diperlukan pada abad 21 ini, yaitu : (1) life and career skills, (2) learning and innovation skills, dan (3) Information media and technology skills. Ketiga keterampilan tersebut dirangkum dalam sebuah skema yang disebut dengan pelangi keterampilan pengetahuan abad 21 (*21st century knowledge-skills rainbow*) (Trilling dan Fadel, 2009). Skema tersebut diadaptasi oleh organisasi nirlaba p21

yang mengembangkan kerangka kerja (framework) pendidikan abad 21 ke seluruh dunia melalui situs www.p21.org yang berbasis di negara bagian Tuscon, Amerika. Adapun konsep keterampilan abad 21 dan core subject 3R, dideskripsikan berikut ini. Gambar 1 menunjukkan skema pelangi keterampilan pengetahuan abad 21.



Gambar 6.2
Pelangi Keterampilan Pengetahuan Abad 21

Pada skema yang dikembangkan oleh p21 diperjelas dengan tambahan core subject 3R. dalam konteks pendidikan, 3R adalah singkatan dari reading, writing dan arithmatik, diambil lafal “R” yang kuat dari setiap kata. Dari subjek reading dan writing, muncul gagasan pendidikan modern yaitu literasi yang digunakan sebagai pembelajaran untuk memahami gagasan melalui media kata-kata. Dari subjek aritmatik muncul pendidikan modern yang berkaitan dengan angka yang artinya bisa memahami angka melalui matematika. Dalam pendidikan, tidak ada istilah tunggal yang relevan dengan literasi (literacy) dan angka (numeracy) yang dapat mengekspresikan kemampuan membuat sesuatu (wrighting). 3R yang diadaptasi dari abad 18 dan 19 tersebut, ekivalen dengan keterampilan fungsional literasi, numerasi dan ICT yang ditemukan pada sistem pendidikan modern saat ini.

Selanjutnya, untuk memperjelas fungsi core subject 3R dalam konteks 21st century skills, 3R diterjemahkan menjadi life and career skills, learning and innovation skills dan information media and

technology skills Penjelasan tentang keterampilan menurut (Trilling and Fadel, 2009:47) adalah sebagai berikut: 1. Life and Career Skills Life and Career skills (keterampilan hidup dan berkarir) meliputi (a) fleksibilitas dan adaptabilitas/Flexibility and Adaptability, (b) inisiatif dan mengatur diri sendiri/Initiative and SelfDirection, (c) interaksi sosial dan budaya/Social and Cross Cultural Interaction, (d) produktivitas dan akuntabilitas/Productivity and Accountability dan (e) kepemimpinan dan tanggungjawab/Leadership and Responsibility.

1. Keterampilan Hidup dan Berkarir

Pada table dibawah ini dapat dilihat keterampilan hidup dan berkarir abad 21 dan deskripsinya

Keterampilan Abad 21	Deskripsi
Keterampilan hidup dan berkarir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fleksibilitas dan adaptabilitas Peserta didik mampu mengadaptasi perubahan dan fleksibel dalam belajar dan berkegiatan dalam kelompok 2. Memiliki inisiatif dan dapat mengatur diri sendiri: Siswa mampu mengelola tujuan dan waktu, bekerja secara independen dan menjadi peserta didik yang dapat mengatur diri sendiri. 3. Interaksi sosial dan antar-budaya: Peserta didik mampu berinteraksi dan bekerja secara efektif dengan kelompok yang beragam 4. Produktivitas dan akuntabilitas: Peserta didik mampu mengelola proyek dan menghasilkan produk. 5. Kepemimpinan dan tanggungjawab: Peserta didik mampu memimpin temantemannya dan bertanggungjawab kepada masyarakat luas

Sumber: Trilling dan Fadel (2009:48)

2. Keterampilan Belajar dan berinovasi (Learning and Innovation Skills)

Learning and innovation skills (keterampilan belajar dan berinovasi) meliputi (a) berpikir kritis dan mengatasi masalah/Critical Thinking and Problem Solving, (b) komunikasi dan kolaborasi/Communication and Collaboration, (c) kreativitas dan inovasi/Creativity and Innovation. Deskripsi dari Keterampilan Belajar dan Berinovasi sebagaimana table dibawah ini:

Keterampilan Abad 21	Deskripsi
Keterampilan Belajar dan Berinovasi	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="464 586 1005 859">1. Berpikir kritis dan mengatasi masalah: peserta didik mampu menggunakan berbagai alasan (reason) seperti induktif atau deduktif untuk berbagai situasi; menggunakan cara berpikir sistem; membuat keputusan dan mengatasi masalah.<li data-bbox="464 859 1005 1015">2. Komunikasi dan kolaborasi: peserta didik mampu berkomunikasi dengan jelas dan melakukan kolaborasi dengan anggota kelompok lainnya.<li data-bbox="464 1015 1005 1137">3. Kreativitas dan inovasi: peserta didik mampu berpikir kreatif, bekerja secara kreatif dan menciptakan inovasi baru

Sumber: Trilling dan Fadel (2009:49)

3. keterampilan teknologi dan media informasi (Information Media and Technology Skills)

Information media and technology skills (keterampilan teknologi dan media informasi) meliputi :

- literasi informasi/information literacy,
- literasi media/media literacy dan
- literasi ICT/Information and Communication Technology literacy.

Deskripsi dari Keterampilan Teknologi dan Media Informasi abad 21 seperti table dibawah ini:

Keterampilan Abad 21	Deskripsi
Keterampilan teknologi dan media informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Literasi informasi: peserta didik mampu mengakses informasi secara efektif (sumber informasi) dan efisien (waktunya); mengevaluasi informasi yang akan digunakan secara kritis dan kompeten; menggunakan dan mengelola informasi secara akurat dan efektif untuk mengatasi masalah. 2. Literasi media: peserta didik mampu memilih dan mengembangkan media yang digunakan untuk berkomunikasi. 3. Literasi ICT: peserta didik mampu menganalisis media informasi; dan menciptakan media yang sesuai untuk melakukan komunikasi.

Sumber: Trilling dan Fadel (2009:50)

Transisi Demokrasi

Meski klaim-klaim transisi demokrasi global dibesar-besarkan dan bahkan kondisi internasional semakin tidak baik bagi demokrasi pada abad 21, Negara-negara demokrasi yang ada terbukti kuat menghadapi tantangan itu, jumlah Negara demokrasi di dunia tidak menurun jumlahnya bahkan tetap sejak memuncak tahun 2005. Demokrasi barat telah diganggu krisis kepercayaan dalam negeri pada tahun-tahun belakangan ini. Dengan lemahnya ekonomi, tumbuhnya keraguan pada Uni Eropa dan bangkitnya partai-partai politik anti imigran, ada banyak yang dikhawatirkan di Eropa Barat. Keberhasilan kelompok radikal kanan baru-baru ini dalam Pemilu di Perancis, Belanda, Jerman dan Austria misalnya telah menambah kekhawatiran mengenai kestabilan negara-negara demokrasi di Eropa. (Levitsky S & Ziblatt, D. 2019 : 179)

Di Indonesia transisi demokrasi dalam agenda reformasi yang intinya adalah telah mengembalikan identitas-identitas yang dulu terkubur di masa Orde Baru. Kemajemukan masyarakat di Indonesia mencuat

menjadi kekayaan sekaligus ancaman. Kemajemukan tidak hanya terdapat pada kebudayaan, suku dan rasnya namun juga resepsinya terhadap perubahan. Perkembangan suatu masyarakat tidaklah berlangsung seragam dalam peradaban manusia. Indonesia mewakili contoh paling rumit dalam perkembangan masyarakat. Karena kemajemukan masyarakat dan luasnya rentang geografis negara ini.

Perbedaan letak geografis menunjukkan perbedaan akses terhadap interaksi masyarakat dan arus informasi. Indonesia salah satu negara yang paling unik dalam hal ini. Di Indonesia kita dapat menemukan peradaban yang sepenuhnya modern dengan akses global dan peralatan-peralatan komunikasi canggih, mesin-mesin manufaktur dan gedung-gedung pencakar langit yang mewah di satu tempat. Sedangkan di tempat lain kita akan menemukan kebun dan peternakan yang digarap secara subsistem oleh keluarga-keluarga kecil di pegunungan. Jauh dibagian timur kita bahkan dapat menemukan peradaban yang masih menggunakan alat produksi sederhana seperti kampak batu. Perbedaan konfigurasi geografis dan konfigurasi sosial tersebut melahirkan beragam permasalahan yang berbeda-beda.

Pada masyarakat majemuk yang terdiri dari ribuan suku dan beragam kepercayaan, identitas kelompok seringkali menjadi permasalahan yang krusial. Bertemunya dua atau lebih kelompok masyarakat yang berbeda identitas kulturalnya seringkali menimbulkan gesekan yang mengarah pada bentrokan, bahkan dengan kekerasan. Kejadian-kejadian kerusuhan etnis di Indonesia seperti di Sampang Madura, Sampit Kalimantan Tengah, Ambon Maluku hingga yang terbaru terjadi di Sumba dan Lampung merupakan bagian dari gesekan antar etnis yang terjadi di Indonesia.

Di pihak lain, isu perbedaan agama juga seringkali menyulut perbedaan bahkan kerusuhan baik antaragama maupun intern agama itu sendiri. Setelah runtuhnya kekuasaan orde baru kasus seperti ini semakin merebak melalui isu terorisme dan perang agama. Di beberapa daerah seperti Ambon dan Poso setelah selesainya konflik antaragama di sana, ditetapkan demarkasi teritorial yang memisahkan pemukiman penduduk Muslim dan Kristen.

Pemandangan ini sangat meresahkan berbagai kalangan, namun tidak dapat dihindari lagi. Konflik-konflik sosial yang terjadi jauh dari upaya korektif malah menjadi destruktif. Konflik yang berlatar identitas ini merupakan konflik yang bersikap laten, mengendap dari masa-kemasa dan menghantui masyarakat seperti bom waktu. Lepasnya Indonesia dari rezim otokrasi malah membuat Indonesia seperti bangsa yang sedang menghancurkan dirinya sendiri (*self destruction nation*).

Permasalahan ini ditengarai disebabkan oleh pendekatan negara yang tidak tepat selama sekitar 32 tahun di mana perbedaan-perbedaan diredam dan kesepakatan sosial yang muncul dilandasi oleh keterpaksaan. Pendekatan semacam ini menghasilkan pengendapan konflik yang menunggu celah terbukanya konflik tersebut. Momentum keruntuhan rezim Orde Baru merupakan momentum besar bagi mencuatnya kembali konflik-konflik yang mengendap karena cengkraman pusat semakin melemah dan membuka ruang para elit-elit lokal untuk muncul. Padahal, para pendiri bangsa ini pada masa lalu telah menggali mengantisipasi peluang kemunculan konflik identitas ini dengan mengangkat kembali nilai multikulturalisme. Nilai ini diangkat melalui semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda namun tetap satu tujuan. Semboyan ini diangkat tidak dari kekosongan kausal, para pendiri bangsa terdahulu memahami konfigurasi masyarakat majemuk Indonesia yang menjadi nilai lebih kekayaan budaya sekaligus potensi konflik. Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya (Wikipedia, 27 Maret 2014)

Bhineka Tunggal Ika dalam semboyan ini adalah mengangkat semua kebudayaan dan identitas komunal dalam terminologi “Bhineka” yang juga berarti pengakuan terhadap keragaman identitas di Indonesia. Pengakuan keragaman ini kemudian disatukan dalam terminologi “Tunggal Ika” yang berarti satu dalam tujuan. Secara filosofis semboyan ini berupaya menaungi perbedaan yang ada dengan kesatuan tujuan yaitu sebagai Bangsa Indonesia. Hingga saat ini, ke-Bhinneka Tunggal Ika-an tersebut, di beberapa daerah masih terwujud dengan mempertahankan etika masing-masing kedaerahan, baik budaya, bahasa, sastra, maupun seni daerahnya, yang hidup berdampingan dengan tentram dan damai. (Setyani, T.I. 2009).

Pemahaman tentang keberagaman dalam masyarakat majemuk tentu saja tidak dapat dipahami secara instan. Diperlukan sebuah medium yang memberikan pengetahuan bahwa bangsa ini memiliki keragaman dan keragaman itu sendiri diakui sekaligus dinaungi oleh bangsa dan Negara Indonesia. Inilah posisi penting dari pendidikan kewarganegaraan yaitu memberikan pengetahuan tentang nilai dan fakta-fakta mengenai bangsa dan negara kepada peserta didik sebagai warganegara. Dengan mengetahui dan memahami konfigurasi masyarakat Indonesia, diharapkan mampu menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara dan tanah air Indonesia.

Semakin tumbuhnya rasa kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara, konflik-konflik berlatar identitas dapat dikurangi karena berubahnya cara pikir dan olah rasa manusia Indonesia yang menggugurkan prasangka etnis dan prasangka religius. Perbedaan tidak lagi diterjemahkan sebagai ancaman namun bagian dari kekayaan bangsa yang perlu dilestarikan dan dijaga keberadaannya. Pemahaman ini juga akan mendorong penggalan terhadap nilai-nilai kebudayaan di seluruh Indonesia dan penghargaan terhadap jejak-jejak kebudayaan. Terlebih lagi di masa globalisasi seperti saat ini ketika keragaman budaya menjadi rebutan, pengetahuan dan pendalaman nilai-nilai budaya serta penjagaan warisan budaya menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Pada beberapa mahasiswa yang penulid wawancara pada umumnya beranggapan bahwa para pemimpin bangsa harus senantiasa mendorong perilaku individu untuk membangun negaranya dengan penuh dedikasi. Rasa cinta tanah air atau nasionalisme adalah rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara, serta rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat atau budaya dengan melestarikannya dan melestarikan alam dan lingkungan. Jika saja rasa cinta tanah air dan bangsa dapat menjadi faktor yang memotivasi bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia diyakini akan bisa bangkit kembali dengan masyarakatnya yang dapat menghasilkan karya-karya besar membanggakan kita sebagai bangsa Indonesia.

Kemajemukan bangsa Indonesia sebenarnya tidak akan menjadi hal yang problematis jika tiap-tiap individu memahami konfigurasi bangsa Indonesia. Negara-bangsa yang terdiri dari beragam identitas ini harus dipahami melalui kesepakatan bersama dan kesatuan pandangan terhadap entitas kebangsaannya. Oleh karena itu, pemahaman kemajemukan bangsa menuntut peran vital pendidikan kewarganegaraan sebagai mediumnya. Dalam konteks kewarga-negaraan, kemajemukan tersebut harus mampu menghadapi dinamika demokratisasi yang menjanjikan kebebasan sekaligus menyediakan ancaman gesekan sosial sehingga pemahaman kebangsaan menjadi hal yang vital untuk dipahami dalam berwarganegara.

Demokratisasi di Indonesia dimulai dengan dibukanya kembali sekat-sekat kontrol terpusat dari negara diharapkan menciptakan keharmonisan dan kemajuan bagi bangsa ini. Namun, ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapinya seringkali membuat demokrasi seperti ancaman bagi masyarakat itu sendiri. Kebebasan tidak selalu berdampak pada keharmonisan dan keselarasan, tapi juga berdampak pada terjadinya gesekan sosial dan kesenjangan.

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 telah menguak begitu banyak persoalan yang menyebabkan demokrasi di Indonesia sulit mencapai tingkatan konsolidasi, walaupun telah berhasil melewati tahapan transisi lebih dari 20 tahun. Bagi banyak negara muslim, apa yang telah dilakukan oleh Indonesia merupakan capaian yang luar biasa mengingat kebanyakan dari mereka gagal mengikutinya. Meskipun Samuel P. Huntington menyatakan negara-negara yang berhasil melalui transisi demokrasi, hanya memerlukan dua kali pemilu yang dilaksanakan dengan jujur dan adil untuk mencapai tingkatan konsolidasi demokrasi. Akan tetapi Min Zaw Oo mengkritik teori ini dengan menyatakan bisa jadi negara-negara yang berhasil melalui transisi demokrasi tidak akan pernah mencapai konsolidasi demokrasi, disebabkan demokrasi berjalan di tempat atau berputar-putar karena sejumlah faktor.

Untuk kondisi di Indonesia, tampaknya teori yang diungkapkan oleh Min Zaw Oo lebih mendekati kebenaran. Pemilu yang dilaksanakan tahun 2019 meskipun gukup berhasil dari sisi ketertiban dan keamanan, akan tetapi dibalik permukaan telah menyingkap begitu banyak kekurangan dan kelemahan. Kini saatnya kita mulai membuat daftar masalah

kemudian bergegas menyusun agenda bagaimana harus membenahinya. Jika disederhanakan, maka masalah demokrasi yang kita hadapi dapat dikelompokkan menjadi dua; pertama, masalah yang sifatnya teknis dan politis. Masalah ini relatif mudah dan bisa diselesaikan dengan cepat.

Kedua, masalah yang terkait dengan budaya dan kedewasaan dalam berdemokrasi. Masalah ini memerlukan waktu lama dan perlu kontinuitas untuk membangunnya. Masalah yang masuk kategori pertama dapat dipilah menjadi masalah yang termasuk kategori teknis dan administratif, mulai penyusunan daftar pemilih tetap (DPT), proses penghitungan suara, sampai pada mekanisme penyelesaian sengketa. Sedangkan yang termasuk wilayah politis, mulai *parliamentary threshold* (PT) Pilpres maupun Pileg, pengertian dan pelaksanaan pemilu serentak, daerah pemilihan, sampai pada cara penghitungan suara.

Sedangkan yang termasuk kelompok kedua; bagaimana membangun kesadaran masyarakat agar bisa melaksanakan hak-hak konstitusionalnya dalam sistem demokrasi secara benar dan baik. Sementara ini masyarakat sudah melaksanakan hak-haknya sekaligus menunaikan kewajibannya dalam bentuk antusiasme dan partisipasi yang sangat tinggi dalam pelaksanaan pemilu.

Globalisasi dan Penguatan Sumber Daya Manusia

Globalisasi juga menghasilkan permasalahan lainnya yaitu meleburnya identitas-identitas kebangsaan di seluruh dunia. Rasa cinta terhadap bangsa dan Negara tidak lagi diselaraskan dengan pengetahuan tentang nilai kebangsaan. Nasionalisme seringkali hanya berujung pada tim sepakbola dan kehilangan makna patriotisnya, bahkan yang terjadi justru bentrokan antar pendukung. Hal ini berbanding terbalik dengan upaya negara-negara lain yang memperdalam pengetahuan tentang identitas nasionalnya seperti Jepang, Korea bahkan Malaysia. Ketidakperdulian masyarakat terhadap nilai kebangsaan seringkali melemahkan kewaspadaan terhadap kekayaan nasional yang terus digerogeti oleh negara-negara lain baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Malaysia adalah sebuah contoh kontemporer yang memberikan kita pelajaran berharga. Upaya negara ini untuk mengklaim beberapa warisan budaya lokal Indonesia sempat menggemparkan Indonesia. Mulai dari wayang kulit, rendang, keris, batik, lagu hingga tarian tradisional terus menjadi target untuk diambil alih hak kekayaan intelektualnya. Permasalahan ini sebenarnya tidak hanya bersumber dari permasalahan politik. Malaysia mengklaim beberapa warisan budaya lokal Indonesia tidak dengan motif yang sederhana mempermalukan negara tetangga. Namun, lebih dari itu, Malaysia menempatkan merk pada negaranya terutama pada sektor pariwisata sebagai *“The Truly Asia”* yang memiliki makna sebagai etalase Asia di mana para turis internasional cukup datang ke Malaysia jika ingin melihat Asia termasuk Indonesia.

Pelajaran berharga dari promosi wisata Malaysia yang mengklaim sebagai *“The Truly Asia”* adalah sebuah peringatan bahwa kita belum mengeksplorasi warisan budaya kita yang sangat beragam sekaligus belum mampu melihat potensi yang ada dibalik warisan budaya tersebut. Pada bagian inilah kita memerlukan penguatan karakter bangsa yang cerdas dan baik bukan hanya mampu memelihara rasa nasionalisme dan menghargai kebudayaan lokal namun juga mampu memberi nilai lebih bagi kebudayaan.

Jika Malaysia mempunyai slogan *“Malaysia truly Asia”*. Maka bukan tidak boleh Indonesia mempunyai slogan *“Indonesia, Symphony of Tourism”*. Kata *“Tourism”* mencoba untuk menggambarkan indahnya pariwisata yang ada di Indonesia. Kata *“Symphony”* menunjukkan ada banyaknya wisata dari ujung timur hingga ujung barat, mengalir menjadi aliran wisata yang akan selalu menyuguhkan kekhasannya di tiap daerah. Sehingga dari slogan yang ada kita dapat memberi gambaran kepada dunia bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki tempat pariwisata yang tak ada habisnya. (Widodo, M. 2011)

Karakter sebuah bangsa dalam globalisasi memiliki paradoks yang sulit, Paradoks dimaknai sebagai watak kontras antara keterbatasan simbol kata sebagai ekspresi dengan kekayaan religius pengalaman yang mau diungkapkannya. (Sutrisno, M. dan Zen. B. 2004). Di satu sisi karakter kebangsaan harus mampu merepresentasikan identitas nasional dan di sisi lainnya karakter kebangsaan juga harus mampu beradaptasi dengan

kehadiran karakter bangsa lain. Adaptasi tersebut tidak berarti menegaskan salah satunya namun menguatkan keduanya dan menyelaraskannya dalam pergaulan internasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 45. Tugas terberat dalam pembentukan karakter kebangsaan adalah pada kemampuannya membentuk karakter yang mampu bertahan bahkan mewarnai globalisasi. Pendidikan kewarganegaraan merupakan katalisator bagi penguatan karakter kebangsaan tersebut.

Paradoks dalam pembangunan karakter kebangsaan tersebut muncul melalui realitas peradaban moderen yang lahir dari globalisasi. Menurut Budimansyah (2010:15) dengan menginterpretasikan studi Erich Fromm mengenai peradaban Modern memperlihatkan bahwa manusia memiliki kebutuhan kebebasan sekaligus kebutuhan ketergantungan. Paradoks ini menciptakan keinginan untuk melarikan diri dari kebebasan dalam bentuk melukai diri sendiri (*masochisme*), melukai orang lain (*sadisme*), melenyapkan objek atau saingan (*destructiveness*), dan mengekor secara serempak (*automaton*).

Tampaknya, paradoks ini sudah menggejala pada masyarakat Indonesia. Tingkat kriminalitas baik itu pembunuhan maupun bunuh diri sudah sangat sering terjadi. Kedua perilaku ini tidak jarang dilandasi oleh perasaan keputusasaan dan ketidakpercayaan terhadap negara. Salah satu kasus yang sempat menghebohkan media massa di Indonesia adalah tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh seorang aktivis mahasiswa bernama Sondang Hutagalung yang mencoba bunuh diri di depan Istana Negara dengan cara membakar diri.

Pada kesempatan lain keinginan melenyapkan objek lain atau saingan juga muncul dalam tragedi kerusuhan yang mewarnai Indonesia sejak terjungkalnya pemerintahan Orde Baru. Sementara jika diperhatikan, generasi muda Indonesia mulai menunjukkan gejala mengekor secara serempak. Hal ini terlihat dari kemampuan media massa baik elektronik dan cetak untuk mengendalikan opini publik. Sebagai contoh adalah demonstrasi yang terjadi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menentang penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap salah satu anggota kepolisian yang juga merupakan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Masyarakat tidak lagi mampu menyaring berita yang beredar melalui media elektronik dan tidak lagi mencoba untuk

menganalisa latar belakang kejadian tersebut, hanya memberikan respon serentak tanpa pemahaman yang cukup. Masih banyak kasus yang dapat dijadikan contoh keputusan masyarakat Indonesia, namun pada intinya kasus-kasus tersebut menunjukkan gejala keputusan yang sama yaitu kekecewaan terhadap peradaban modern.

Meskipun begitu peradaban modern tetap bertahan sebagai sistem sosial yang berlaku hingga saat ini. Para ahli di bidang ilmu sosial terus menerus berupaya menemukan komposisi yang tepat untuk menyelesaikan kekecewaan ini agar tidak jatuh pada keputusan yang berlarut-larut. Beberapa ahli berpendapat tentang pentingnya kebangkitan moral dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang terus terjadi saat ini (Budimansyah: 2010).

Kebangkitan moral dipercaya mampu menyelesaikan permasalahan sosial tersebut karena perbaikan nilai dan perilaku dapat menjadi awal bagi perbaikan di masyarakat. Namun, dalam hal ini peneliti mencoba untuk memasukkan paradigma baru yaitu pada permasalahan yang lebih aktual bagi pembentukan karakter. Permasalahan tersebut adalah permasalahan ekonomi, khususnya permasalahan ketersediaan lapangan tenaga kerja.

Dalam pandangan fungsionalisme struktural, menurut Talcott Parson. (2005) permasalahan bukan satu-satunya permasalahan yang harus diselesaikan. Lebih dari itu, permasalahannya adalah bagaimana seorang individu dapat masuk ke dalam sistem sosialnya dan berkontribusi di dalamnya. Sistem sosial yang terjadi sekarang adalah globalisasi di mana ekonomi merupakan faktor yang dominan di dalamnya. Ketika individu tersebut tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup atau tidak memiliki keterampilan produktif yang memadai maka individu tersebut mengalami kesulitan untuk berkontribusi dalam sistem sosialnya. Jika kesulitan ini dibiarkan, bukan tidak mungkin terjadi penyimpangan perilaku seperti kriminalitas dan keputusan yang merugikan baginya secara individual dan masyarakatnya secara umum.

Sebagai katalisator pembentukan karakter kebangsaan, pendidikan kewarganegaraan memiliki kewajiban untuk menjawab tantangan tersebut sesuai pada kapasitas keilmuannya. Melalui konsep *citizenship education*, pendidikan kewarganegaraan membutuhkan instrumen lain yang mampu

mendukungnya untuk membentuk karakter masyarakat. Konsep *citizenship education* yang luas memiliki kemampuan untuk melakukan adopsi tersebut, di antaranya dengan mengadopsi pendidikan kecakapan hidup.

Pendidikan kecakapan hidup sebagai suatu pendekatan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia terutama untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Kesejahteraan negara tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam dan kekayaan budaya tapi juga pada kualitas sumber daya manusianya. Konsep pendidikan yang tepat dalam membentuk karakter bangsa yang kuat sangat diperlukan, dan dalam hal inilah pendidikan kewarganegaraan mengambil perannya.

Dengan menggunakan paradigma ini, yaitu bahwa konsep pendidikan yang tepat akan mampu membentuk karakter bangsa yang kuat, peneliti mencoba untuk mengaitkan konteks masyarakat Indonesia bersama problem sosial masyarakat yang sedang terjadi dan dihadapi oleh masyarakat Indonesia yaitu permasalahan ekonomi dan bagaimana masyarakat Indonesia dapat bertahan dari derasnya arus globalisasi dengan membangun kapasitas yang bermanfaat bagi sistem sosial. Konteks problem sosial masyarakat ini membutuhkan pemerintah sebagai institusi kekuasaan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kepada evolusi sosial yang bermanfaat bagi bangsa. Negara melalui institusi pendidikan memberikan masyarakat ruang bagi transfer pengetahuan dan transfer nilai kebangsaan yang nantinya akan menghasilkan modal sosial dan modal manusia yang menunjang penyelesaian problem sosial dan mengarahkan evolusi sosial kearah yang lebih baik.

Penguatan karakter kebangsaan menurut penulis diarahkan pada inovasi strategi pembelajaran pada pendidikan kewarganegaraan sebagai medium pendidikan karakter yaitu dengan memasukkan pendidikan kecakapan hidup ke dalam strategi pembelajarannya. Pendidikan kecakapan hidup yang dimaksudkan pada konteks ini adalah pendidikan kecakapan hidup (*life skills/soft skills*) yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi ideal sebagai warganegara yang cerdas dan baik namun juga kreatif. Kemampuan mendasar pada kecakapan hidup merupakan fokus perhatian penulis terutama pada kemampuan komunikasi untuk menyampaikan pendapat, kemampuan berbicara di depan umum dan pengetahuan

tentang operasional negara dan insititusi-institusi kenegaraan. Dengan memasukkan unsur kreatif sebagai salah satu aspek karakter kebangsaan, penulis beranggapan bahwa unsur ini mampu menggerakkan unsur lainnya dalam perspektif penguatan karakter kebangsaan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global karena dengan karakter kreatif ini, peserta didik dapat dengan mudah mengikuti perkembangan realitas dan meniyasati permasalahan sosial yang dihadapinya terutama pada lapangan pekerjaan.

Institusi pendidikan dijadikan sebagai medium penanaman nilai dan integrasi sosial bangsa Indonesia. Institusi pendidikan bertugas sebagai medium transfer nilai dan transfer pengetahuan. Dalam pemahaman sebagai medium penanaman nilai, pendidikan harus mampu menanamkan nilai yang sesuai dengan ideologi negara dan menumbuhkan rasa kebangsaan Indonesia. Penanaman nilai digunakan sebagai "*stand point*" dari cara berpikir sehingga transfer pengetahuan selalu disesuaikan dengan nilai-nilai yang ditanamkan yaitu nilai kebangsaan. Transfer pengetahuan yang dicantumkan oleh peneliti adalah pengetahuan yang membangun "*hard skill*" dan kecakapan hidup ("*Soft Skills*"). Kedua pengetahuan ini harus berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berhadapan dengan konteks problem sosial yang dihadapinya sehingga masyarakat mampu menyelesaikan permasalahannya secara mandiri.

Soft skill sering dikaitkan dengan " EQ " seseorang (*Emotional Intelligence Quotient*) juga dikenal sebagai keterampilan interpersonal yang meliputi cluster sifat kepribadian, berintegrasi sosial, komunikasi, bahasa, kebiasaan pribadi, keramahan, dan optimisme yang menjadi ciri hubungan dengan orang lain. *Soft skill* melengkapi *hard skill* yang merupakan persyaratan pekerjaan dari dan banyak kegiatan lainnya. *Soft skill* juga merupakan atribut personal yang meningkatkan interaksi individu, kinerja dan prospek karir. Tidak seperti *hard skill*, yaitu tentang keterampilan seseorang set dan kemampuan untuk melakukan jenis tugas atau kegiatan tertentu, sedangkan *soft skill* lebih menekankan kemampuan untuk berhubungan dengan seseorang untuk berinteraksi secara efektif dengan rekan kerja atau pelanggan dan secara luas berlaku baik dalam maupun di luar tempat kerja . Kecakapan hidup atau *Soft skill* seseorang

adalah bagian penting dari kontribusi masing-masing untuk keberhasilan suatu organisasi. Terutama organisasi-organisasi berurusan dengan pelanggan tatap muka.

Melalui medium institusi pendidikan, peneliti mengkhususkan objeknya pada Pendidikan Kewarganegaraan sebagai agen yang mampu menanamkan nilai yang akan membangun manusia Indonesia yang berwawasan kebangsaan namun juga kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan sosial (kondisi transisional) yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Pendidikan karakter dianggap penting bagi peneliti karena melalui pendidikan karakter negara dapat menumbuhkan paham kebangsaan yang mencerminkan karakter bangsa yang pada gilirannya akan memiliki dampak yang positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia

Industri kreatif sebagai alternatif pemecahan masalah atas minimnya ketersediaan lapangan kerja

Tugas utama sebuah perguruan tinggi adalah melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi), dosen dan mahasiswa, telah banyak menghasilkan penelitian, belum lagi lembaga-lembaga penelitian lainnya baik milik pemerintah maupun masyarakat/swasta. Namun sejauhmana hasil-hasil penelitian tersebut dapat diadopsi oleh pasar pengguna atau masyarakat pada umumnya masih menjadi tanda tanya besar bagi kita semua. Terlepas dari hal tersebut, terlihat masih ada inovasi yang dapat diharapkan dari para insan-insan cendekiawan atau akademisi untuk dapat berbuat lebih banyak dalam mengambil peran yang strategis sehingga dapat mengangkat kesejahteraan harkat dan martabat bangsa ini. Salah satu bentuk nyata dari inovasi ini adalah sebuah kreatifitas dari sumber daya manusia Indonesia untuk mengolah sumber daya yang dimilikinya serta sumber daya alam Indonesia saat ini secara kontinyu dan bertanggung jawab antara lain dalam bentuk industri kreatif.

Badan Ekonomi Kreatif menyampaikan bahwa pada tahun 2018, kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB Indonesia sudah mencapai tujuh persen atau mencapai angka Rp 1.000 triliun kemudian pada tahun 2019,

industri kreatif juga diperkirakan akan tumbuh dan memberikan kontribusi sebesar 7,55% terhadap PDB Indonesia dengan estimasi angka mencapai Rp 1.100 triliun. Industri kreatif terus menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif dengan rata-rata pertumbuhan 5-7% per tahunnya. Bahkan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) memprediksi pendapatan domestik bruto (PDB) industri kreatif tahun 2018 mencapai 6,25%. Pertumbuhan itu diperkirakan akan mampu menyerap tenaga kerja hingga 16,70 juta orang. Sementara pada 2019 ditargetkan kontribusi ekraf terhadap PDB menjadi 12% dari 7,8% pada 2015. Jumlah penyerapan tenaga kerja diproyeksikan mencapai 17 juta orang (sumber : <https://investor.id/business/kontribusi-industri-kreatif-terhadap-pdb-2019-diprojektasikan>-) 7 Januari 2021

Peluang pengembangan industri kreatif di Indonesia akan semakin berkembang pesat jika senantiasa mengadopsi pola *Triple Helix* (Akademisi/ Cendekiawan, dunia usaha/ industri dan pemerintah). Masa depan industri kreatif cukup menjanjikan dan dapat menjadi sumber ekonomi dengan nilai tinggi. Menurut Menteri Perindustrian MS Hidayat Indonesia telah memiliki beberapa kota yang telah berkembang industri kreatifnya, yaitu: Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Solo, Pekalongan, Jember, Bali, Makassar, Mataram, dan beberapa kota lainnya. Industri kreatif memiliki target pasar nasional luas dengan potensi jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bagaimana ekonomi kreatif memiliki kontribusi terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Berdasarkan hasil survei khusus ekonomi kreatif, subsektor yang paling mendominasi di antaranya kuliner, *fashion*, dan kriya. Di sisi lain, ada beberapa subsektor yang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, yaitu desain komunikasi visual, musik, animasi, dan arsitektur. (Sumber : <https://www.sirclo.com/DominasiPerempuandalamSektorEkonomiKreatifIndonesia-SIRCLO>) 6 Januari 2021.

Industri kreatif didefinisikan sebagai industri yang berfokus pada kreasi dan eksploitasi karya kepemilikan intelektual. Menurut BEKRAF, terdapat 16 sub-sektor industri kreatif, berikut ini adalah keenam belas sub-sektor industri tersebut (1) Aplikasi dan pengembangan permainan; (2) Arsitektur; (3) Desain produk; (4) Fashion; (5) Desain interior; (6) Desain komunikasi visual; (7) Seni pertunjukan; (8) Film, animasi, dan video; (9) Fotografi; (10) Kriya; (11) Kuliner; (12) Musik; (13) Periklanan; (14)

Penerbitan; (15) Seni rupa; dan (16) Televisi dan radio. Beberapa Manfaat yang dapat dirasakan dengan semakin tumbuhnya industri kreatif di Indonesia, antara lain; Inovasi Baru Semakin Berkembang dengan Cepat; Membuka dan Menambah Lapangan Kerja; Nilai dan kualitas suatu produk semakin meningkat; Manusia akan dituntut semakin kreatif; Persaingan yang kompetitif; dan Pertumbuhan ekonomi.

Industri kreatif ini bersumber dari ide, seni dan teknologi yang dikelola untuk menciptakan kemakmuran. Sedangkan ekonomi yang bersumber pada kegiatan ekonomi dari industry kreatif dinamakan ekonomi kreatif. Dalam ekonomi kreatif, pemerintah (regulator) dan perusahaan (operator) memerlukan synergy agar masyarakat sebagai sasaran kebijakan dapat menerimanya dan melaksanakannya dengan baik, kelebihan industri kreatif, tidak terlalu terkait dengan krisis dunia. Karena industri kreatif menggunakan bahan baku yang banyak tersedia, maka dengan kreasi dan desain manusia yang kreatif dapat menghasilkan produk yang menarik, hal ini nampaknya tidak terlalu terpengaruh dengan krisis global.



Sumber: : [https://binus.ac.id/bandung/29/10.Peran Industri Kreatif di Indonesia/](https://binus.ac.id/bandung/29/10.Peran%20Industri%20Kreatif%20di%20Indonesia/) .6 Januari 2021

Gambar 6.3
16 Sub Sektor industri kreatif.

Cakupan kelompok industri kreatif sebagaimana dipetakan di atas hanyalah merupakan studi awal yang perlu dilanjutkan dengan studi pemetaan yang lebih komprehensif agar nantinya dapat memberikan gambaran umum mengenai dampak/kontribusi ekonomi dari industri kreatif ini. Tantangan industri kreatif saat ini antara lain adalah karena relatif baru sehingga aktivitas industri kreatif masih terkotak-kotak dan belum ada kajian rantai nilai yang utuh mulai dari kegiatan kreasi, produksi, dan distribusi Pengembangan sumber daya manusia di perguruan tinggi juga belum banyak didukung untuk mengembangkan dan memberdayakan industri kreatif.

Konsep dan arah pembinaan industri kreatif di Indonesia belum ada sebuah pengertian maupun model tunggal pembinaan secara khusus. pembinaan industri kreatif bisa dipahami sangat berbeda menurut cara pandang orang maupun konteks kelembagaan, politik, dan sosial-budayanya.

“Memahami pembinaan industri kreatif sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, serta memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Ada pula di pihak lain yang menegaskan bahwa pembinaan industry kreatif adalah proses memfasilitasi pemuda sebagai bagian dari masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas”. (Rizal Ramli 2009: 211)

Pengembangan sumber daya manusia untuk mengembangkan industri kreatif di kalangan peserta didik merupakan proses untuk menciptakan sumber daya manusia yang mandiri. Kemampuan negara berkompetisi dalam bidang industri sangat tergantung dari tingkat kreativitasnya. Oleh karena itu, memfasilitasi peserta didik dalam industri kreatif akan membuahkan hasil kekuatan ekonomi untuk bertarung dengan berbagai negara di dunia.

Berdasarkan uraian di atas, jelas sekali bahwa konteks pembelajaran pendidikan kewarganegaran dengan pendekatan pendidikan kecakapan hidup sangat berperan sekali untuk menunjang pengembangan sumber

daya manusia di bidang industri kreatif, hal ini dikarenakan “*Smart and Good Citizenship*” atau menjadi warga negara yang baik dan cerdas adalah tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, dan ini sejalan dengan pendidikan karakter yang dikembangkan semua institusi pendidikan di Indonesia, apalagi hal ini ditunjang dengan pendidikan kecakapan hidup sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang sangat penting guna meningkatkan kemampuan atau *soft skills* peserta didik yang dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan hidup sehari-hari, di mana hal ini sangat menunjang sekali pengembangan sumber daya manusia industri kreatif karena seperti diketahui industri kreatif adalah sebagai industri yang berfokus pada ide, kreasi dan eksploitasi karya kepemilikan intelektual. Jadi jelas sekali sinergi pendidikan kewarganegaraan dengan pendekatan pendidikan kecakapan hidup sangat berperan penting dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang industri kreatif.

Istilah *soft skill* telah ada sejak lama baik dalam pengaturan bisnis dan pendidikan, dalam pertemuan perusahaan, dan dalam pengembangan kurikulum (Evenson, 1999). *Soft Skills* atau keterampilan lunak adalah kualitas interpersonal, sering juga disebut juga dengan *people skill*, hal ini merupakan atribut pribadi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dunia usaha/industry. Soft skill melengkapi hard skill, yang merupakan persyaratan teknisnya dari suatu pekerjaan. " (Wikipedia, 2007). *Soft skills* jelas merupakan bagian dari *Life Skills Education* atau pendidikan kecakapan hidup yang pada dasarnya adalah berupa kegiatan dengan tujuan untuk melaksanakan pendidikan dalam meningkatkan Kecakapan dan kemampuan psikososial seseorang untuk mengatasi berbagai tuntutan dan tantangan hidup sehari-hari.

Pendidikan Kecakapan Hidup dan Pendidikan Karakter Pada Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Sebagian besar peserta didik pada umumnya kurang memahami apa itu pendidikan kecakapan hidup (*Soft Skills*). Mereka, pada umumnya, menganggap bahwa pendidikan kecakapan hidup (*Life skills education*) adalah merupakan *hard skills* sebagaimana yang dikembangkan pada Pendidikan vokasi. Hal ini bukanlah hal yang aneh, kebanyakan peserta

didik memang tidak mengetahui apa kaitan antara pendidikan karakter, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan kewarganegaraan dengan industri kreatif. Kekurangan pemahaman tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan memang tidak memiliki kaitan secara langsung dengan aktivitas ekonomi. Menurut penulis hal ini disebabkan peserta didik tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang pendidikan kecakapan hidup, karena masalah pendidikan kecakapan hidup ini masalah yang relatif baru dan sosialisasi dari pemerintahpun masih sangat terbatas.

Meskipun Industri kreatif sudah dianggap sebagai alternatif bagi persoalan ketenagakerjaan, ternyata masih belum secara maksimal diintegrasikan dalam dunia pendidikan. Praktik pendidikan kewirausahaan yang menunjang industri kreatif masih dalam tataran akademis tidak menghasilkan *output* kreatifitas aplikatif yang diinginkan. Nilai kebangsaan juga tidak dapat ditransmisikan dengan baik pada praktik mata kuliah kewirausahaan. Sementara, mata kuliah kewarganegaraan sendiri tidak bersinergi dengan matakuliah kewirausahaan dan karakter kreatif. Meskipun terdapat penanaman nilai kebangsaan namun nilai kreatifitas di dalamnya tidak dapat tersampaikan karena keterbatasan pendekatan pengajaran dan materi pembelajaran, apalagi menyentuh pendidikan kecakapan hidup sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang sangat penting guna meningkatkan kemampuan atau *soft skills* peserta didik yang dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan hidup sehari-hari.

Pendekatan Pendidikan Kecakapan Hidup

Sebagai suatu pendekatan dapat diartikan bahwa pendidikan kecakapan hidup bukan merupakan suatu mata pelajaran tersendiri tetapi lebih merupakan sebagai metodologi atau pendekatan dalam penyampaian suatu materi pembelajaran (pada mata pelajaran/kuliah apapun) yang antara lain bermuatan berbagai kegiatan, seperti:

- ❖ Studi kasus;
- ❖ Debat;
- ❖ Bercerita;

- ❖ Bermain peran;
- ❖ Diskusi berpasangan dan atau berkelompok; serta
- ❖ Simulasi, dan sebagainya.

Sehingga peran peserta didik dalam pendidikan kecakapan hidup cenderung lebih aktif daripada guru/dosen. Peserta didik diharapkan lebih dinamis, lebih aktif berbicara, lebih mandiri dan lebih dominan. Apabila hal tersebut dilakukan maka peneliti yakin akan mampu meningkatkan kecakapan hidup (*Soft Skills*) peserta didik. Kecakapan hidup mencakup keterampilan untuk memperoleh penghasilan dan kecakapan dasar yang harus dimiliki secara personal seperti kecakapan berpikir dan berkomunikasi. Apabila hal ini dimiliki peserta didik maka diyakini pendidikan kecakapan hidup akan dapat dijadikan penghubung antara konsep pendidikan karakter yang holistik dengan pendidikan kewirausahaan yang lebih bersifat praktis. Pendidikan karakter memberikan arah bagi pembagunan kecakapan hidup dan karakter kewirausahaan yang dihasilkannya.

Secara umum kecakapan hidup dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kecakapan hidup yang bersifat general atau umum dan kecakapan hidup yang bersifat spesifik atau khusus. Kecakapan hidup yang bersifat umum adalah kecakapan hidup yang diperlukan oleh siapapun tanpa terkecuali, baik mereka bekerja atau tidak bekerja maupun yang sedang menempuh pendidikan.

Dalam rangka merekonstruksi pemikiran para pelaku pendidikan karakter dan pendidikan kecakapan hidup, tidak perlu dipisahkan antara klasifikasi umum dan khusus dari kecakapan hidup. Penggabungan ini dilandasi oleh pertimbangan untuk melakukan rekonstruksi pemikiran. Pendidikan kecakapan hidup (*life skills education*) mencakup empat jenis, yaitu:

- (1) Kecakapan personal (*personals Skills*) yang mencakup kecakapan mengenal diri (*self awareness*) dan kecakapan berpikir rasional (*thinking skill*),
 - (2) Kecakapan sosial (*social skills*),
 - (3) Kecakapan akademik (*academic skills*), dan
 - (4) Kecakapan kejuruan/vokasional (*vocational skills*).
- (Departemen Pendidikan Nasional, 2007).

Keempat jenis kecakapan ini merupakan kecakapan atau kemampuan yang sangat mendasar bagi keberhasilan proses pendidikan, khususnya kecakapan personal dan kecakapan sosial yang merupakan kecakapan dasar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karena merupakan kecakapan yang dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan hidup sehari-hari yang dihadapi peserta didik. Kecakapan-kecakapan tersebut adalah:

- ❖ Pengambilan keputusan,
- ❖ Pemecahan masalah,
- ❖ Berpikir kritis,
- ❖ Berpikir kreatif,
- ❖ Berkomunikasi yang efektif,
- ❖ Membina hubungan antarpribadi,
- ❖ Kesadaran diri,
- ❖ Berempati,
- ❖ Mengatasi emosi, dan
- ❖ Mengatasi stress.

Kecakapan-kecakapan di atas ini, mewujudkan “kompetensi/kemampuan psikososial” dari seseorang yaitu kemampuan yang diperlukan untuk berinteraksi, dan beradaptasi dengan orang lain, di masyarakat serta lingkungan dimana ia berada.

Upaya-upaya perubahan kurikulum dan metode pembelajaran khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam rangka pengembangan Pendidikan Karakter melalui pendekatan pendidikan kecakapan hidup hendaknya mengacu pada upaya memenuhi kebutuhan kecakapan personal (*personal skills*) dan kecakapan sosial (*social skills*) tersebut. Secara terpisah memang kecakapan hidup yang diajarkan di sekolah mengarah pada kecakapan hidup yang bersifat spesifik dan seringkali meninggalkan bagian kecakapan hidup yang bersifat umum. Sebagai contoh adalah pembelajaran sains yang seringkali tidak mementingkan transmisi nilai kebangsaan. Namun dalam keadaan kekinian di tengah globalisasi para intelektual sains juga sangat membutuhkan kemampuan kecakapan hidup secara *general* dan transmisi nilai kewarganegaraan sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, sikap, dan kemampuan yang memungkinkan seseorang dapat hidup mandiri.

Pendidikan karakter dalam pendidikan kewarganegaraan dapat diklasifikasikan pada kecakapan hidup umum. Pendidikan karakter merupakan katalisator dari proses pengenalan diri yang nantinya mampu melahirkan kecakapan pengenalan diri juga kewaspadaan diri, kecakapan berpikir rasional untuk menggali dan menemukan informasi mengolah informasi dan mengambil keputusan, serta kecakapan memecahkan masalah. Lebih penting lagi pendidikan karakter juga merupakan landasan bagi kecakapan sosial atau kecakapan antar personal, kecakapan ini menentukan kemampuan komunikasi antarpersonal yang nantinya akan memengaruhi kemampuan seseorang untuk bernegosiasi dan membangun kerjasama.

Dalam persepsi pembangunan sumber daya manusia, kecakapan hidup memiliki posisi yang sangat penting. Kemampuan komunikasi antarpersonal memegang peranan yang utama, bahkan menjadi tulang punggung bagi kecakapan hidup yang dibutuhkan dalam pengembangan sumber daya manusia. Keahlian komunikasi memiliki dampak yang besar dalam kehidupan bernegara maupun dalam kehidupan ekonomi. Kemampuan tersebut dalam konteks sosial mampu mencegah terjadinya konflik dengan melakukan komunikasi intensif yang bertujuan untuk membangun kesepahaman dan kerjasama. Sedangkan dalam konteks ekonomi kemampuan komunikasi sangat dibutuhkan dalam strategi komunikasi media, manajerial sebuah institusi ekonomi, hingga ujung tombak dari sirkulasi ekonomi yaitu marketing dan penjualan produk. Bagi industri kreatif kemampuan komunikasi juga merupakan bagian terpenting dalam metode pemasaran komoditas industri tersebut terutama jika menyangkut bidang industri yang menawarkan jasa.

Secara khusus, kecakapan hidup yang spesifik sangat bergantung pada kecakapan hidup yang umum. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Sebagai ilustrasi adalah jika seorang ahli teknologi informasi menciptakan sebuah produk IT namun tidak mampu menjelaskan keistimewaan produknya maka produk tersebut hanya menjadi konsumsi khusus baginya ataupun kelompoknya yang berjumlah kecil. Produk tersebut, sebaik apapun kualitasnya tidak akan memberikan kontribusi bagi perekonomian negara. Oleh karena itu, kecakapan ini harus menjadi bagian integral dalam kurikulum pendidikan yang juga masuk ke dalam setiap mata pelajaran, termasuk pada kurikulum mata pelajaran/kuliah Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.

Pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Katalisator Pendidikan Karakter dan Pendidikan Kecakapan Hidup

Banyak yang beranggapan bahwa pendidikan kewarganegaraan umumnya dipandang hanya sebagai pendidikan normatif dan berisi abstraksi-abstraksi nilai yang tidak memiliki manfaat langsung dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ada yang menganggap bahwa pendidikan kecakapan hidup (*life skills education*) adalah merupakan “*hard skills*” sebagaimana yang dikembangkan pada pendidikan vokasional dan pendidikan non formal.

Selain itu secara aplikatif pemikiran mengenai pendidikan kewarganegaraan masih berkuat pada pembangunan karakter kewarganegaraan yang abstrak. Sementara secara aplikatif nilai kewarganegaraan tidak dapat dicapai karena hanya terbatas pada penanaman pengetahuan, bukan pada keterampilan berwarganegara. Pendekatan akademis seperti ini mengakibatkan ketidaksalinghubungan antara mata kuliah sehingga peserta didik tidak dapat mengaplikasikan apa yang ia pelajari di tempat mereka belajar. Oleh karena itu, dalam konteks pengembangan SDM menghadapi kondisi transisional setiap mata pelajaran/kuliah yang diajarkan kepada peserta didik perlu melekatkan nilai yang dibutuhkan oleh perkembangan yang dihadapi oleh kondisi transisional dalam hal ini adalah kreatifitas.

Upaya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebenarnya dapat dilakukan melalui pendekatan pendidikan kecakapan hidup, karena pendidikan kecakapan hidup adalah suatu pendekatan dalam bentuk kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan pendidikan dalam meningkatkan kecakapan/kompetensi psikososial seseorang untuk mengatasi berbagai tuntutan dan tantangan hidup sehari-hari, yang memiliki manfaat antara lain mampu meningkatkan kecakapan berpikir kritis dan kemampuan mengambil keputusan sangat menunjang proses belajar yang baik. Kegiatan pendidikan selama ini dilakukan dengan pendekatan ceramah (satu arah dan instruktif), harus diubah menjadi kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai kegiatan belajar aktif lainnya. Komunikasi dilakukan secara dua arah dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Harus

dipahami bahwa kegiatan yang menggabungkan antara aspek perilaku dan aspek perasaan akan lebih berhasil dibanding dengan yang menekankan aspek perilaku saja. Selain itu intervensi akan lebih mudah diterima dan dimengerti karena tidak adanya tekanan psikologis.

Aspek Filosofis Pendidikan Kewarganegaraan

Baik pendidik maupun peserta didik beranggapan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan saat ini dirasakan rentan terhadap pengaruh perubahan dalam kehidupan politik, tidak mantap dalam sistem kurikulum dan pembelajarannya. Pada pendidikan, guru atau dosenpun yang cenderung terlalu memihak pada tuntutan formal-kurikuler di kampus/sekolah dan kurang memperhatikan pengembangan pendidikan kewarganegaraan sebagai bidang kajian pendidikan disiplin ilmu, epistemology, pendidikan kewarganegaraan tidak berkembang dengan pesat, pembelajaran sosial nilai Pancasila yang cenderung berubah peran dan fungsi menjadi proses indoktrinasi ideologi negara, tidak kokohnya dan tidak koherennya landasan ilmiah pendidikan kewarganegaraan sebagai program pendidikan demokrasi.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai sebuah ilmu terapan memiliki aspek filosofis yang membentuknya. Aspek filosofis dari pendidikan kewarganegaraan meliputi tiga aspek utama yaitu aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. (Sapriya, 2007). Aspek ontologis menguraikan tentang hakikat keilmuan dari pendidikan kewarganegaraan, aspek epistemologis menempatkan pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu sistem pengetahuan. Aspek terakhir yaitu aspek aksiologis membahas tentang nilai-nilai praksis atau manfaat yang dihasilkan oleh pendidikan kewarganegaraan. ketiga aspek tersebut merupakan landasan pengembangan yang mendasar pada setiap penelitian dan pengembangan pendidikan kewarganegaraan. Ruang lingkup dan arah PKn menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa “Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. (Pasal 37 ayat (1) Penjelasan UU No. 20/ 2003).

1) Aspek Ontologis

Pada penelitian ini aspek Ontologis Pendidikan Kewarganegaraan yang menjadi sorotan peneliti adalah dimensi obyek telaah yakni keseluruhan aspek idiil, instrumental, dan praksis atau yang sering juga disebut sistem pendidikan kewarganegaraan, dan dimensi kedua adalah obyek pengembangan yaitu keseluruhan ranah sosio-psikologi peserta didik, yang meliputi ranah kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik yang menyangkut status, hak dan kewajibannya sebagai warganegara, yang perlu dimuliakan dan dikembangkan secara programatik guna mencapai warganegara yang cerdas dan baik, karena hakikat dari pendidikan kewarganegaraan adalah manusia, dalam hal ini adalah manusia Indonesia sebagai warganegara. (Sapriya, 2007). Secara ideal/idiil, pendidikan kewarganegaraan merupakan landasan dan kerangka filosofis yang menjadi titik tolak sekaligus muara pendidikan nasional. input dari pendidikan kewarganegaraan adalah warganegara dan begitu juga outputnya. Namun pendidikan kewarganegaraan sebagai medium untuk menjadi warga negara yang baik memberikan nilai lebih bagi setiap warga negara. Pendidikan kewarganegaraan mentransmisikan nilai yang dipahami sebagai nilai bersama bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai sumber filosofis bagi warga negara Indonesia. Selain transmisi nilai, Pendidikan kewarganegaraan juga memiliki posisi ontologis sebagai pembentuk karakter kebangsaan warga negara.

Secara ontologis, pendidikan kewarganegaraan bersumber pada Pancasila. Pancasila dalam hal ini ditempatkan sebagai dasar filsafat negara dan filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan nilai yang bersifat sistematis, fundamental dan universal. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan Negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan ke negaraan harus berdasarkan pada lima nilai utama yang tercantum pada sila Pancasila yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Nilai-nilai tersebutlah yang diterjemahkan oleh praksis pendidikan kewarganegaraan.

2) Aspek Epistemologis

Aspek Epistemologi Pendidikan Kewarganegaraan ini berkaitan erat dengan dengan aspek ontologis pendidikan kewarganegaa, karena aspek epistemologis yang pada dasarnya berwujud dalam berbagai bentuk kegiatan sistematis dalam upaya membangun pengetahuan bidang pendidikan kewarganegaraan. Aspek epistemologis pendidikan kewarganegaraan terutama terletak pada perkembangan pendidikan kewarganegaraan itu sendiri termasuk pada penelitian-penelitian yang mengkaji pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. (Sapriya, 2007).

Aspek epistemologis secara khusus dalam ilmu pengetahuan merupakan upaya perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pendidikan dan pembelajaran guna mencapai tujuan yang tersirat pada aspek ontologis pendidikan. Aspek epistemologis menunjukkan posisi keilmuan dari pendidikan kewarganegaraan sebagai ilmu terapan yang terus berkembang. Perkembangan aspek epistemologis dari pendidikan kewarganegaraan meliputi upaya penelitian, metodologi, pengembangan kurikulum dan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu objek kajian pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan kewarganegaraan. Berdasarkan sumber pengetahuan, pendidikan kewarga-negaraan bersumber pada nilai-nilai yang tercantum pada Pancasila. Selain itu realitas kontemporer kehidupan berbangsa dan bernegara juga merupakan pijakan sumber pengetahuannya yang dinamis. Berdasarkan susunan pengetahuan, pendidikan kewarganegaraan memiliki metodologi penelitian, pembelajaran dan kurikulum yang bersifat formal dan logis.

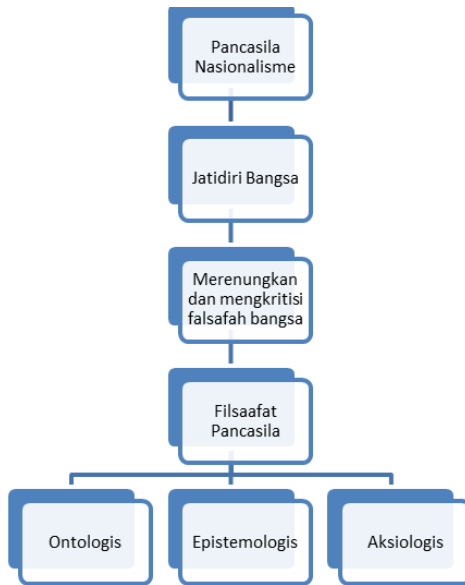
3) Aspek Aksiologis

Aspek Aksiologi pada dasarnya untuk memfasilitasi pengembangan *body of knowledge* sistem pengetahuan atau disiplin pendidikan, melandasi dan memfasilitasi pengembangan dan pelaksanaan pendidikan demokrasi di sekolah maupun di luar sekolah, dan membingkai serta memfasilitasi berkembangnya koridor proses demokrasi secara soial kultural dalam masyarakat. Aspek aksiologis ini juga merupakan aspek praksis atau manfaat pendidikan kewarganegaraan. (Sapriya, 2007). Dalam pendidikan

kewarganegaraan, aspek ini mencakup berbagai manfaat dari hasil penelitian dan pengembangan dalam bidang kajian pendidikan kewarganegaraan termasuk pada proses pembelajaran dan hasil pembelajaran. Aspek ini merupakan aspek yang paling dinamis dan terbuka terhadap berbagai kritik dan pembaharuan yang konstruktif.

Hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan kewarganegaraan dalam dunia pendidikan memberikan manfaat bagi para pendidik untuk merancang program pendidikan, meningkatkan kualitas proses pembelajaran, meningkatkan kualitas sarana dan sumber belajar dan meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Aspek aksiologis dalam penelitian disertasi ini tercantum pada tujuan dan manfaat penelitian ini.

Aspek aksiologis dalam filsafat ilmu pengetahuan merupakan aspek terakhir dari tiga aspek utama namun memiliki posisi yang tidak kalah penting. Aspek manfaat dan praktis keilmuan sangat dibutuhkan dalam pengembangan keilmuan. Aspek ini menjadi aspek yang terbuka bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada penelitian ini.



Gambar 6.4
Ilustrasi filsafat Pancasila.

Penguatan Karakter Kebangsaan

Penulis menemukan bahwa posisi utama dari pengembangan keilmuan pendidikan kewarganegaraan adalah pada penguatan karakter kebangsaan. Pembangunan bangsa dan pembangunan karakter merupakan dua sisi dari mata uang yang sama keduanya harus dilakukan secara bersamaan. Inti karakter yang dibangun dalam pendidikan kewarganegaraan menurut Prof. Dasim Budimasyah (2010:1) adalah kebajikan (*goodness*), dalam arti berpikir baik (*thinking good*), berperasaan baik (*feeling good*) dan berperilaku baik (*behaving good*). Karakter tersebut dipupuk dan dibentuk dalam pendidikan kewarganegaraan untuk menghasilkan warga negara yang memiliki pikiran, perasaan dan perilaku yang baik.

Pembangunan karakter kebangsaan merupakan landasan yang fundamental yang harus dimiliki oleh suatu bangsa. Pentingnya pembangunan karakter bangsa dikarenakan dalam globalisasi hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang kuatlah yang dapat bersaing dalam globalisasi. Dalam pendidikan kewarganegaraan, pembentukan karakter kebangsaan merupakan upaya menerjemahkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikannya sebagai filosofi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Karakter kebangsaan yang diidealkan dalam Pancasila tersebut hanya akan menjadi impian kosong tanpa dipraktikkan dalam kehidupan nyata oleh warganegaranya sendiri. Praksis dari filosofi Pancasila inilah yang menguatkan karakter kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia.

Karakter bangsa Indonesia adalah karakter yang berlandaskan Pancasila yang memuat elemen kepribadian yang diharapkan menjadi jati diri bangsa. Elemen tersebut adalah:

- 1) Bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa,
 - 2) Bangsa yang menjunjung kemanusiaan yang adil dan beradab,
 - 3) Bangsa yang mengedepankan persatuan dan kesatuan,
 - 4) Bangsa yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia, dan
 - 5) Bangsa yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan.
- (Budimasyah, 2010)

Kelima elemen ini bersumber langsung dari nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Sehingga kelima elemen ini menjadi dasar filosofis yang mapan bagi pembentukan karakter bangsa. Penguatan karakter kebangsaan ini sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia ditengah krisis multidimensional yang melanda Indonesia sejak 1998. Penguatan karakter sebuah bangsa dapat mempertahankan eksistensi bangsa itu sendiri dengan nilai yang diemban oleh setiap manusia yang terikat pada satu identitas kebangsaan dan menjadi kekhasan perilaku yang melekat pada bangsa tersebut. Memang krisis besar ekonomi telah berhasil dilewati oleh Indonesia melalui proses politik dan demokratisasi. Namun, permasalahan yang lebih fundamental muncul kembali sebagai dampak liberalisasi ekonomi yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi.

Permasalahan ini memberikan stimulus bagi permasalahan-permasalahan lainnya yang selama orde baru berhasil diendapkan namun tidak berhasil diselesaikan. Permasalahan prasangka etnis dan fundamentalisme agama yang sebenarnya bersumber dari kesenjangan ekonomi mencuat ke permukaan dalam bentuk yang tidak diduga. Selain itu massifnya teknologi informasi dan keterbatasan pengetahuan konsumennya di Indonesia juga menghasilkan penyalahgunaan teknologi. Berbagai kasus moral merebak dengan cepat melalui teknologi informasi. Bukan berarti sebelum teknologi informasi massif tidak ada permasalahan moral namun semenjak teknologi informasi diakses secara luas dengan menghilangnya batas-batas virtual, masyarakat Indonesia yang belum terbiasa menghadapi keterkejutan kebudayaan (*Shock Culture*) yang menghasilkan berbagai kasus penyimpangan. Jadi menurut peneliti memang sudah saatnya kurikulum maupun pengajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai katalisator pendidikan karakter dengan pendekatan pembelajaran atau berbasis pendidikan kecakapan hidup diterapkan di Indonesia melalui penyempurnaan kurikulum yang ada sekaligus menyesuaikan dengan Inpres nomor 6 tahun 2009 tentang ekonomi kreatif, yang menegaskan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diminta untuk “Melakukan kajian dan revisi kurikulum pendidikan dan pelatihan agar lebih berorientasi pada pembentukan kreativitas dan kewirausahaan pada anak didik sedini mungkin”.

Sinergi Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Kecakapan Hidup untuk Menunjang Pengembangan SDM bidang Industri Kreatif

Hasil yang penulis dapatkan dari penelitian ini adalah para mahasiswa dan dosen pada umumnya tidak memahami keterkaitan antara pendidikan karakter, pendidikan kecakapan hidup dengan pendidikan kewarganegaraan. Terlebih lagi dalam konteks pengembangan sumber daya manusia di bidang industri kreatif, bahkan para pelaku industri kreatif itu sendiri tidak mengetahui korelasi antara pendidikan kewarganegaraan dengan industri kreatif yang dijalankannya. Mereka menganggap pendidikan kewarganegaraan tidak ada hubungannya dengan industri kreatif, apalagi memang kaitan antara pendidikan kewarganegaraan dengan industri kreatif masih sulit ditemukan dalam literatur.

Bahkan masih banyak yang belum memahami bahwa investasi sumber daya manusia sebagai investasi bagi pengembangan industri kreatif, mereka pada umumnya beranggapan tidak ada kaitan secara khusus antara pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan kecakapan hidup dengan industri kreatif. Namun, nilai investasi pengembangan SDM dapat diterjemahkan dalam berbagai variabel pendidikan. Namun beberapa perguruan tinggi memiliki upaya tersendiri dalam pengembangan SDM. Upaya tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan seminar, pelatihan dan praktik *business trip* yang dilakukan dalam program yang direncanakan kampus/sekolah mereka. Selain peserta didik, pendidik juga menjadi target dalam pengembangan SDM dengan memberikan rekomendasi pelatihan mengenai kajian-kajian yang dibutuhkan dalam upaya pengembangan SDM peserta didik.

Namun biaya kegiatan tersebut tetap mempertimbangkan kemampuan peserta didik. Selain itu para informan pada umumnya juga telah menyadari arti penting dari industri kreatif dalam menghadapi globalisasi. Namun, hal tersebut masih menjadi ide sporadis dalam pendidikan kewarganegaraan. Meskipun pendidik tahu tentang pentingnya industri kreatif, pendidik atau dosen tidak memiliki upaya khusus untuk membawa nilai-nilai kewarganegaraan ke dalamnya.

Namun demikian para pendidik hendaknya memiliki visi dalam upaya mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan dalam industri kreatif, meskipun visi tersebut masih idealistis yang sulit diwujudkan dalam waktu singkat. Ini menunjukkan keterasingan pendidikan kewarganegaraan dari dinamika globalisasi. Ada juga di tingkat fakultas memiliki visi yang lebih mapan mengenai industri kreatif secara aplikatif. Visi tersebut misalnya diungkapkannya melalui mata kuliah kewirausahaan. “setiap matakuliah kewirausahaan ada pendidik yang mewajibkan peserta didik untuk membuat proposal kewirausahaan untuk dikompetisikan ke tingkat nasional (kemdikbud). Namun demikian, tetap saja visi tersebut memiliki jarak yang memisahkan pendidikan kewirausahaan dengan pendidikan kewarganegaraan. Keterpisahan ini mengakibatkan kedua mata kuliah tersebut tidak saling mengisi. Sementara globalisasi memiliki dimensi yang beragam dan tidak dapat hanya dijawab oleh salah satu bagian ilmu saja. Sinergi antara mata kuliah dalam pembelajaran selama ini masih dirasa sangat minim sehingga perlu dilakukan rekonstruksi yang mampu menghubungkan antara mata kuliah yang berbeda dengan suatu nilai perekat ataupun pembahasan ilmiah yang melekat pada proses pembelajaran.

Konteks Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam konteks pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, penulis secara khusus mengambil konsep *civic education* untuk membatasi penelitian yang dilakukan pada institusi pendidikan formal dan mengutamakan pada pendidikan kewarganegaraan sebagai katalisator pembentukan karakter kebangsaan. Sebagai katalisator pembentukan karakter bangsa terutama menghadapi realitas persaingan global, pendidikan kewarganegaraan tidak dapat berhenti pada fungsi transmisi pengetahuan didaktis saja namun juga meliputi pendidikan karakter dan kecakapan hidup. Pendidikan karakter dan pendidikan kecakapan hidup tidak dapat diajarkan hanya melalui proses teoritis namun juga melalui praksis-praksis pembelajaran. Karena melalui pendekatan pendidikan kecakapan hidup atau *life skills education approach* diharapkan mampu meningkatkan berbagai kecakapan atau

kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif, yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidup secara efektif.

Untuk dapat mengimplementasikan pembelajaran Pkn dengan pendekatan pendidikan kecakapan hidup, dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakannya pada semua jenis dan jenjang pendidikan yang pada gilirannya akan menghasilkan lulusan peserta didik sebagai sumber daya manusia yang siap bekerja dan memiliki karakter serta kecakapan hidup yang baik. Istilah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bahasa Indonesia sejajar dengan istilah *human capital*. Istilah ini dipahami sebagai suatu konsep yang memiliki berbagai dimensi bergantung pada cara pandang terhadap SDM tersebut (Suryadi, 2012;27). Secara substansial, SDM mengacu pada kemampuan, keahlian dan keterampilan manusia dalam aktifitas yang produktif.

Di Indonesia, kajian mengenai *human capital* dikenal semenjak tahun 1980-an sebagai pengembangan Sumber Daya Manusia. *Human capital* (modal manusia) kemudian lebih dikenal dalam istilah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor produksi yang sangat penting selain sumber daya alam, modal, alat produksi, *entrepreneurship* dan lainnya. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu negara maka semakin meningkat pula efisiensi dan produktivitas negara tersebut.

Paradigma yang digunakan dalam istilah *human capital* memiliki kecenderungan kuat pada ekonomi yaitu menempatkan manusia sebagai variabel modal dalam ekonomi. (Suryadi, 2012). Namun, pada kenyataannya memang hal tersebut terjadi. Tanpa manusia, mesin dan pabrik tak dapat memproduksi karena tidak ada yang mengoperasionalkannya dan terlebih lagi memperbaharunya. Istilah *human capital* dengan menempatkannya pada paradigma pendidikan, perbedaa utamanya adalah bahwa mengenai *human capital* dalam paradigma pendidikan adalah melalui cara pandang terhadap pendidikan. Penggunaan istilah *human capital* bukanlah seperti mengandaikannya sebagai alat seperti perbudakan, namun lebih kepada bagaimana keahlian manusia dibentuk untuk memberikan kontribusi terhadap sistem sosial. Artinya bukan pada paradigma ekonomi yang berorientasi pada keuntungan namun pada paradigma pendidikan yang berorientasi pada manfaat.

Prinsip penggunaan istilah *human capital* ini juga berlaku pada penggunaan istilah investasi. Investasi yang dimaksud bukan hanya investasi yang berorientasi pada keuntungan (profit) namun pada manfaat (benefit). Dengan mendudukan kedua istilah tersebut pada paradigma pendidikan. Konsepsi pendidikan sebagai medium integrasi sosial dan pengembangan sumber daya manusia sebagai akses bagi individu untuk berkontribusi pada masyarakatnya dapat dipertemukan dalam satu kajian yang bermanfaat. (Suryadi, 2012).

Meskipun begitu, kita tidak bias begitu saja meninggalkan konten ekonomis dalam penggunaan istilah investasi ini. Secara substansial, permasalahan ekonomi berkaitan dengan istilah investasi. Selain itu, pusat perhatian yang mendasar dari segi ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah adalah bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai berbagai tujuan yang beraneka ragam bahkan mungkin bertentangan satu sama lain. Dalam konteks SDM, perhatian khusus ditempatkan pada kualitas tenaga kerja yang dapat diidentifikasi menurut kemampuan, keterampilan, keahlian, dan kecakapan.

Pengembangan SDM secara substansial juga tidak bertentangan dengan istilah *human investment* atau pengembangan manusia. Karena fokusnya adalah pengembangan pengetahuan, keterampilan, kecakapan dan keahlian, terlebih lagi pada upaya pengembangan inovasi, kreativitas dan nilai produktivitas yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan merupakan medium yang vital pengembangan SDM. Oleh karena itu, penelitian yang penulis lakukan ini mempersepsikan bahwa dengan menjadikan pendidikan sebagai sarana investasi SDM, pendidikan harus mengembangkan keahlian dan keterampilan juga kecakapan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Peran ini pada akhirnya akan mendorong pemerataan pendapatan dan kemampuan masyarakat berkontribusi kepada sistem sosialnya.

Investasi dalam pemerataan dan perluasan kesempatan pendidikan memiliki efek berkelanjutan yang sangat luas. Efek tersebut juga kemungkinan menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks secara kualitas maupun kuantitas. Untuk memudahkan analisis permasalahan melalui analisis investasi SDM, dapat digunakan kriteria-kriteria berikut.

- 1) Tingkat balikan ekonomis langsung dari suatu investasi, yaitu pertimbangan antara biaya kesempatan (*opportunity cost*) dan manfaat masa depan yang diharapkan melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- 2) Tingkat balikan ekonomis (*economic return*) tidak langsung, yaitu manfaat eksternal yang memengaruhi pendapatan anggota-anggota masyarakat yang lain yang sering juga disebut sebagai efek samping yang bersifat positif dari pendidikan (*externality*).
- 3) Manfaat finansial (*financial benefit*), yaitu peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak yang diakibatkan oleh meningkatnya penghasilan tenaga kerja terdidik.
- 4) Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terampil dan terlatih yang semakin dibutuhkan oleh lapangan kerja baru sebagai akibat dari tumbuhnya kegiatan investasi fisik dalam berbagai lapangan kerja atau sektor ekonomi produktif.
- 5) Permintaan masyarakat secara menyeluruh terhadap pendidikan (*aggregat demand for education*) yang semakin tinggi, sehubungan dengan meningkatnya hasil balik perorangan (*private rate of return*), sumber biaya perorangan untuk pendidikan, peranan swasta, dan sebagainya, beserta faktor-faktor sosial yang memberikan efek terhadap permintaan pendidikan.
- 6) Efisiensi internal (*internal efficiency*) dari lembaga pendidikan itu sendiri, menyangkut hubungan antara input-output yang diukur dengan beberapa indikator seperti pemborosan pendidikan (*educational wastage*) yang diakibatkan oleh terjadinya pengulangan kelas, putus sekolah dan kurangnya efektivitas biaya.
- 7) Terciptanya distribusi kesempatan pendidikan yang semakin merata untuk semua penduduk usia sekolah, baik secara geografis, sosial, maupun ekonomis.
- 8) Dampak positif dari pemerataan kesempatan pendidikan terhadap distribusi pendapatan dan kontribusi pendidikan terhadap pengurangan angka kemiskinan

- 9) Kaitan antara investasi di sektor pendidikan dan investasi di sektor sektor fisi lainnya, seperti perhubungan, kesehatan dan industri manufaktur, pengolahan dan pertanian. (Suryadi, 2012;35-36).

Kriteria-kriteria yang disebutkan di atas merupakan kriteria utama dalam menganalisa investasi SDM atau pengembangan sumber daya manusia secara luas. Pada buku ini penulis hanya menggunakan beberapa bagian saja dari kriteria tersebut yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan yang berperan sebagai medium pembentukan karakter warga negara memberikan perhatian khusus pada problematika ekonomi namun tidak secara langsung berkaitan dengan problematika ekonomi. Pendidikan kewarganegaraan tidak mengajarkan keahlian-keahlian teknis produksi ataupun keterampilan kreasi sejenisnya. Pendidikan kewarganegaraan berkontribusi dalam pengembangan SDM dalam membentuk karakter dan keahlian non teknis seperti pengetahuan tentang negara dan lembaganya, filosofi negara, karakter kebangsaan dan nilai-nilai yang terdapat pada sistem sosial negara.

Pada pendidikan kewarganegaraan, istilah *civics* merupakan istilah paling awal yang digunakan pada pendidikan kewarganegaraan. Istilah ini pertamakali digunakan oleh Creshore (1886) untuk menunjukkan ilmu atau studi kewarganegaraan yang isinya antara lain mempelajari hubungan antar warganegara dan hubungan antara warga negara dengan negara (Winataputra, 2001;289). Penggunaan istilah ini juga diterapkan di Indonesia di masa Orde Lama hingga awal Orde Baru pada 1973. Namun secara konseptual pemerintah pada saat itu menggunakan konsep ini hingga terjadinya transformasi sistem pemerintahan dan demokratisasi di Indonesia.

Istilah *civics education* dan *citizenship education* merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan mulai pada awal 1900-an di Amerika Serikat yang mengacu pada pendidikan karakter, etika dan kebajikan (Best;1960, dalam Somantri, 1969). Penggunaan istilah ini seringkali digunakan secara bergantian. Perkembangannya kemudian pada akhir 1990-an, terdapat studi tentang penggunaan istilah ini (Cogan, 1999). Penggunaan istilah *civic education* cenderung digunakan pada pendidikan

formal sedangkan penggunaan istilah *citizenship education* seringkali terbatas pada wacana ilmiah kalangan akademisi maupun pendidikan yang non formal. Dalam konteks disertasi ini, peneliti tidak memisahkan istilah *civics education* dan *citizenship education* karena dalam konteks bahasa Indonesia keduanya dapat diartikan sebagai pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan sifat formal dan non formal dari pendidikan kewarganegaraan yang berlaku pada wacana akademis dan praksis pembelajaran pendidikan kewarganegaraan secara kontekstual tidak terdapat perbedaan yang berarti.

BAB VII

Rekonstruksi Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mengembangkan Kecakapan Hidup dan Karakter Sumber Daya Manusia Industri Kreatif

Berdasarkan kajian terhadap perkembangan historis Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia, rekonstruksi pemikiran dalam ilmu pengetahuan, Pendidikan Kewarganegaraan, konteks dan teorinya serta industri kreatif sebagai alternatif, penulis menyusun beberapa kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini dapat dilihat dari istilah yang digunakan dalam pemikiran pendidikan kewarganegaraan, dan teori *human capital*, landasan kedua pemikiran, dan strategi pendidikan yang dikembangkan. Upaya terbesar dalam penelitian ini adalah menghubungkan kedua pemikiran tersebut dalam sebuah kerangka konseptual. Upaya ini akan dirumuskan pada bagian pembahasan untuk mendetailing/merinci pertemuan kedua konsepnya secara fungsional.

Terdapat beberapa istilah teknis yang digunakan dalam kajian pemikiran pendidikan kewarganegaraan dan teori *human capital*. Pada Pendidikan Kewarganegaraan terdapat tiga istilah teknis utama yaitu "*civics, civic education dan citizenship education*". Dalam melakukan rekonstruksi terhadap pemikiran ini, dilakukan dengan merangkum hasil atau temuan penelitian, analisa hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian yang didukung oleh teori-teori ataupun pemikiran-pemikiran yang ada sebelumnya maupun dokumen pendukung yang relevan.

Posisi konseptual adalah kedudukan hasil penelitian ini dalam seluruh spektrum bidang kajian ilmiah kependidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan "kontribusi konseptual" adalah sumbangan hasil penelitian terhadap kajian keilmuan pendidikan kewarganegaraan. Posisi konseptual tersebut dalam penelitian ini merupakan rekonstruksi pemikiran peneliti berdasarkan pemaparan dan pembahasan hasil penelitian bibliografis dan penelitian observasional.

Secara ontologis, pendidikan kewarganegaraan merupakan ilmu terapan yang memiliki fungsi aplikatif. Mengikuti dalil Winataputra (2001), pendidikan kewarganegaraan merupakan ilmu yang pre-paradigmatik yang berarti dapat dihubungkan dengan semua ranah keilmuan sebagai landasan berwarganegara. Aplikasi pendidikan kewarganegaraan dirangkum dalam idealisasi karakter kebangsaan. Dalam hal ini pendidikan karakter merupakan fondasi dasar bagi pembentukan karakter bangsa, namun karakter saja belumlah cukup untuk mampu mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan membutuhkan adopsi pendidikan kecakapan hidup (*life skills education approach*) dalam praktik pembelajarannya.

Kaitan pendidikan kewarganegaraan dengan pendidikan karakter dan pendidikan kecakapan hidup dapat dimunculkan dalam model pembelajaran yang interaktif. Pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan melalui pendekatan pendidikan kecakapan hidup guna meningkatkan beberapa kecakapan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari seperti kepemimpinan, tanggung jawab pribadi dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dapat dimunculkan seperti dalam pembelajaran demokrasi. Secara praktis instrumen pendidikan tersebut adalah pendidikan dan peserta didik dengan membentuk forum-forum diskusi dalam kelas membahas isu-isu aktual yang dipresentasikan di kelas atau dapat juga dalam bentuk bermain peran (*role play*) dan dievaluasi bersama dalam tanya jawab antara peserta didik dalam bimbingan pendidik (guru/dosen).

Karakter sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam menghadapi realitas globalisasi sangat berbeda dengan karakter sumber daya manusia sebelum globalisasi. Terutama, kemampuan pengoperasian teknologi dan penguasaan ilmu pengetahuan dan kreatifitas inovatif. Untuk itu, pendidikan kewarganegaraan memiliki tugas penting untuk membentuk karakter yang cerdas, baik dan kreatif sebagai manifestasi karakter bangsa.

Seperti pada pembahasan sebelumnya mengenai kondisi transisi yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia terutama di era demokrasi dan globalisasi ini, masifnya pertukaran barang dan jasa juga komoditas non fisik seperti data, dan pengetahuan merupakan karakter utama dari globalisasi. Kemampuan adaptasi tidak hanya membutuhkan kemampuan

mengoperasikan teknologi dan menjadi konsumen pasif dalam pasar bebas namun juga dituntut untuk dapat menjadi pelaku pasar bebas itu sendiri. Oleh karena itu, karakter kreatif merupakan karakter yang perlu mendapatkan perhatian dalam pendidikan karakter karena karakter inilah yang mampu membentuk kemampuan bersaing bangsa di masa depan.

Karakter kreatif sendiri sebenarnya telah muncul sebagai tuntutan bagi masyarakat untuk mengadaptasi perubahan di sekelilingnya. Karakter ini muncul tanpa induksi dari pemerintah maupun sektor pendidikan. Karakter tersebut termanifestasi dalam industri kreatif yang dijalankan oleh para anak bangsa dengan berbagai bentuk dan jenisnya. Meskipun tidak diinduksi dari sistem pendidikan ataupun negara, industri kreatif sebagai jalan ke luar yang diciptakan secara mandiri oleh masyarakat perlu disambut oleh negara dan tentunya sistem pendidikan. Industri kreatif, sesuai dengan karakternya yang inovatif membutuhkan kemampuan kreasi terus-menerus yang perlu ditunjang oleh penguasaan ilmu pengetahuan. Upaya sektor pendidikan menyambut kemunculan industri kreatif ini membuka peluang besar bagi masyarakat untuk bertahan bahkan ikut serta dalam persaingan global.

Institusi pendidikan sebagai alat integrasi sosial memiliki peran utama dalam memasalkan kreatifitas dan penguasaan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam industrin kreatif. Pendidikan kewarganegaraan dalam hal ini membangun fondasi penting dengan mentransmisikan karakter kebangsaan dalam industri kreatif sebagai bekal aplikatif dalam industri kreatif. Industri kreatif yang diharapkan muncul di masa depan memiliki karakter kebangsaan dan timbal balik praktik industri kreatif dengan manifestasi karakter bangsa.

Secara konseptual, penelitian ini menyumbangkan pemikiran penting dalam pengembangan keilmuan pendidikan kewarganegaraan. Penulis melihat bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki kemampuan terbatas dalam menyambut dinamika globalisasi terutama dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang industri kreatif. Selama ini karakter kreatif yang muncul di masyarakat belum mendapatkan sambutan baik dari pendidikan kewarganegaraan. Meskipun dalam konteks pembelajaran pendidikan kewarganegaraan telah mengadopsi beberapa perubahan

terutama dengan menempatkan peserta didik sebagai elemen aktif dalam proses pembelajaran, pendidikan kewarganegaraan belum mengulas karakter kreatif dalam tataran aplikatif kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, meski dalam pendidikan karakter dan kecakapan hidup yang ada dalam pendidikan kewarganegaraan secara tidak langsung telah memfasilitasi pembentukan karakter baik, cerdas dan kreatif pendidikan kewarganegaraan perlu melampirkan contoh aplikatif pada keseharian terutama di bidang ekonomi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulumnya di perguruan tinggi yang masih mengadopsi konten ilmu politik yang padat memerlukan penambahan bidang kajian terutama dalam konteks ekonomi.

Pembahasan mengenai ekonomi dalam pendidikan kewarganegaraan hendaknya mengacu pada sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia dengan prinsip-prinsip yang berkesesuaian dengan filosofi negara. Melalui pengembangan ini diharapkan peserta didik memahami posisi penting pendidikan kewarga-negaraan yang tidak hanya meliputi transmisi ideologi negara, pendidikan demokrasi, hukum dan politik namun juga ekonomi sebagai bagian dari keterampilan warganegara.

Pada konteks Pancasila dan kewarganegaraan, pembahasan ekonomi sebenarnya bukanlah hal baru, sejak awal kemerdekaan pembahasan mengenai ekonomi sudah menjadi pembahasan yang hangat diantara para tokoh. Sistem ekonomi yang dianut pun berganti-berganti terus menyesuaikan idealisasi Pancasila. Mulai dari Moh. Hatta, Sutan Sjahrir hingga Emil Salim konsepsi ekonomi yang sesuai dengan Pancasila masih terus diperdebatkan. Meskipun begitu bukan berarti pemahaman ekonomi tidak diperlukan dalam pendidikan kewarganegaraan, justru pemahaman mengenai sistem ekonomi yang sesuai dengan falsafah bangsa merupakan fondasi yang penting dalam mengejawantahkan nilai kewarganegaraan dalam seluruh aspek kehidupan.

Selanjutnya penulis juga melihat bahwa ketidakpahaman para pendidik maupun peserta didik dalam menjelaskan kaitan pendidikan kewarganegaraan dengan bidang ekonomi terutama pada industri kreatif didasarkan oleh tidak adanya pemahaman mengenai peran Pancasila pada sistem ekonomi yang berlaku di negara dan bangsa ini. Selanjutnya penulis melakukan triangulasi pada berbagai literatur seperti buku panduan

kurikulum pendidikan ekonomi dan Pendidikan Kewarganegaraan namun sayangnya masih belum ada materi ekonomi Pancasila pada kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan.

Sebenarnya sangat penting ekonomi Pancasila yang direkomendasikan untuk mengisi kekosongan ruang pemahaman ekonomi dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Kekosongan ini nampaknya harus segera diisi dengan cermat dan bahkan menjadi perhatian serius bagi komunitas ilmiah pendidikan kewarganegaraan. Perihalannya adalah bahwa dinamika ekonomi yang berlangsung dalam globalisasi berjalan begitu cepat di tengah pertarungan berbagai sistem ekonomi yang berlaku di negara-negara lain. Tanpa dibekali pemahaman mengenai sistem ekonomi yang berlandaskan pada falsafah negara, aktifitas ekonomi warganegara beresiko bergerak ke luar jalur ideologi negara yang sudah menjadi kesepakatan bersama.

Ekonomi Pancasila merupakan konsepsi yang masih terus dalam perdebatan hingga saat ini. Sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, para tokoh belum juga menemui satu kesepakatan mengenai ekonomi Pancasila itu sendiri. Perdebatan yang dimulai sejak perumusan Undang-Undang Dasar 1945 ini terus berlangsung hangat hingga saat ini. Istilah ekonomi Pancasila disini mengacu sistem ekonomi yang sesuai dengan falsafah negara dan bangsa Indonesia.

Ekonomi dalam Falsafah Pancasila

Pancasila merupakan seperangkat nilai yang diangkat dari puncak-puncak nilai yang telah tertanam pada masing-masing diri bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari kesepakatan nilai dari berbagai etnis, ras, agama dan suku bangsa yang berada di Indonesia. Pancasila berperan sebagai fondasi utama bangsa dan negara Indonesia.

Sebagai seperangkat nilai yang ideal dan berasal dari bangsa Indonesia dengan keragaman dan kedinamisannya, Pancasila juga melingkupi seluruh aspek kehidupan warganegara tidak terkecuali di bidang ekonomi. Tujuan besar ekonomi bangsa Indonesia tidak terlepas dari tujuan demokrasi yang tercipta di Indonesia. Secara tertulis keduanya tercantum pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Keadilan sosial ini tidak hanya berdimensi sosial politik namun juga berdimensi ekonomi.

Keadilan sosial yang terpancar dari demokrasi tidak hanya memiliki cita-cita demokrasi politik namun juga demokrasi ekonomi. Hal tersebut telah menjadi visi para pendiri bangsa jauh sebelum kemerdekaan berhasil direbut oleh bangsa Indonesia. Salah satu Bapak Proklamator kita melalui pamphlet politiknya yang berjudul menuju Indonesia merdeka pada tahun 1932 menyatakan bahwa demokrasi politik dan demokrasi ekonomi merupakan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

“Di atas sendi cita-cita tolong-menolong dapat didirikan tonggak demokrasi. Tidak lagi ada seorang atau suatu golongan kecil yang mesti menguasai penghidupan orang banyak seperti sekarang, melainkan keperluan dan kemauan rakyat yang banyak harus menjadi pedoman perusahaan penghasilan.” (Latif, Yudi. 2011:492).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa sejatinya tujuan politik bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tujuan ekonominya begitupun juga sebaliknya. Pemikiran ekonomi yang dilahirkan oleh Bung Hatta berlandaskan pada kesejahteraan bersama, demokrasi ekonomi yang ia maksudkan adalah juga keadilan sosial yaitu dengan pemerataan kesempatan ekonomi. Pemerataan kesempatan tersebut dapat dicapai melalui sendi tolong-menolong antarbangsa Indonesia. Secara ringkas dapat diperhatikan bahwa tolong-menolong dan gotong royong menjadi arwah pemikiran demokrasi ekonomi Bung Hatta.

Secara historis, masyarakat Jawa tradisional pun memahami tujuan ini dalam ungkapan “*gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja*” yang dapat diartikan sebagai suatu kondisi masyarakat yang adil dan makmur. Cita-cita mengenai masyarakat yang adil dan makmur itu sendiri menjadi arwah nasionalisme Indonesia yang kini disarikan dalam kelima sila dalam Pancasila. Idealisasi ini merupakan ide turun-temurun dari generasi ke generasi dan terus menerus diwarisi sebagai tujuan bersama seluruh bangsa Indonesia. Idealisasi yang terus diturunkan ini bukanlah tanpa sebab, idealisasi ini berakar dari pengalaman pra kolonial ketika kerajaan-kerajaan yang ada di tanah air ini masih berjaya. Kejayaan ini tidak hanya berputar-putar di nusantara namun tersohor ke seluruh dunia. Indonesia sebelum masa kolonial merupakan tanah yang subur makmur, kaya akan sumber daya alam dan berada pada urat nadi perdagangan antar benua.

Namun, karena limpahan kekayaan itu pula akhirnya kerajaan-kerajaan yang berada di Indonesia pra kolonial jatuh dan dijajah oleh Belanda melalui perusahaan dagangnya *Verenigde Oost Indische Compagnie* yang berhasil menjadi perusahaan multinasional pertama di dunia. Sebelumnya, kekayaan Indonesia terkenal ke seluruh penjuru dunia. Kerjasama perdagangan terjalin antara kerajaan-kerajaan pra kolonial Indonesia dengan kerajaan-kerajaan di India, Arab, China bahkan Eropa.

Memang kerjasama tersebut tidak selalu berjalan lancar, seringkali terjadi invasi dari kerajaan-kerajaan di India ke pesisir barat Indonesia juga kekaisaran Mongol dari China pun pernah mengirim bala tentara lautnya ke Jawa untuk menancapkan pengaruhnya di nusantara. Namun upaya-upaya ini selalu berhasil ditanggulangi. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan di India dan China yang secara langsung mengirimkan bala tentara perang ke Indonesia, bangsa Eropa datang melalui jalur perdagangan dan diterima secara baik oleh kerajaan-kerajaan di nusantara. Namun seiring dengan berjalannya waktu, perluasan hegemoni terus berlangsung sehingga kekuasaan kerajaan-kerajaan nusantara pun terkikis. Kekalahan ini menjatuhkan Indonesia pada penderitaan panjang penjajahan kolonial.

Kenyataan yang paling mengejutkan adalah setelah sekian ratus tahun terjajah kekayaan alam Indonesia tidak pernah habis. Di awal abad kedupuluh bahkan raksasa dari timur yang tengah berjaya yaitu kekaisaran Nippon datang mengusir penjajah Belanda dan dengan segera menggantikan posisinya sebagai sentral kekuasaan di Indonesia. Menguasai Indonesia bagi kekaisaran Nippon merupakan upaya terpenting dalam sejarah kekuasaannya, bukan hanya karena kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia namun juga posisi strategisnya yang berada di tengah urat nadi perdagangan dunia. Posisi ini sangat menguntungkan terutama dalam kondisi perang karena konsentrasi bala tentara di lautan nusantara dapat memutus rantai komando pasukan sekutu. Pentingnya posisi Indonesia dalam percaturan politik dunia tersebut sangat disadari oleh para pendiri bangsa.

Bung Karno dalam “Indonesia Menggugat” melakukan gugatan terhadap penjajah kolonial dengan menggambarkan eksploitasi dan kemunduran yang dialami oleh rakyat Indonesia karena penjajahan kolonial Belanda. Gugatan bersejarah ini dengan cermat dapat merekam

kondisi ketimpangan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat Indonesia yang pada masa itu masih Hindia Belanda. Bung Karno memandang bahwa ketimpangan tersebut diakibatkan oleh kapitalisme dan imperialisme VOC/Belanda yang terus menghisap rakyat Indonesia, menghasilkan kekayaan bagi dirinya namun menyisakan kesengsaraan bagi rakyat.

“Imperialisme tua yang dulu terutama hanya sistem mengikuti bekal-bekal hidup saja, kini sudah bertambah jadi raksasa imperialisme modern yang memiliki empat macam kesaktian; pertama, Indonesia tetap menjadi pengambilan bekal-bekal hidup, kedua, Indonesia menjadi negeri pengambilan bekal-bekal pabrik-pabrik eropa, ketiga Indonesia menjadi pasar penjualan barang-barang hasil dari macam-macam industri asing, keempat, Indonesia menjadi lapangan usaha bagi modal uang ratusan, ribuan-ribuan rupiah jumlahnya. Bukan saja modal Belanda, tapi sejak adanya opendeur politiek juga modal Inggris, juga modal Amerika, juga modal Jepang, juga modal lain-lain sehingga imperialisme di Indonesia kini menjadi internasional karena itu” (Latif, Yudi. 2011:509).

Kesadaran akan besarnya kekayaan Indonesia, bagi para pendiri bangsa bukan menjadi keserakahan. Namun kesadaran ini menjadi beban sebuah tanggung jawab besar bagi para pendiri bangsa. Beban yang maha besar untuk melindungi kekayaan alam Indonesia berikut seluruh potensi sumber dayanya dari kooptasi asing. Kekayaan alam yang maha besar ini bukan dipandang sebagai sebuah keuntungan yang harus dihabiskan namun dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi kelangsungan bangsa dan negara Indonesia.

Dalam pandangan para pendiri bangsa, kesadaran ini bukan hanya milik mereka namun juga harus menjadi milik seluruh warganegara Indonesia yang terus diwarisi dari generasi ke generasi. Namun juga tidak berarti kekayaan ini terus disimpan dan tidak boleh dinikmati oleh warganegara Indonesia. Kekayaan ini harus dibagikan dengan merata dalam tujuan menciptakan masyarakat adil dan makmur. Konsepsi inilah yang menjadi falsafah demokrasi ekonomi yang berlaku di Indonesia, sari pati dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sila keempat dan kelima dalam Pancasila.

Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, kesadaran ini menjadi tugas bagi pendidikan kewarganegaraan untuk menanamkannya di sanubari warganegara Indonesia. Prinsip demokrasi ekonomi yang berlandaskan pada keadilan sosial menjadi prinsip dasar ekonomi yang ada di Indonesia. Prinsip ini tentunya harus mampu tantangan realitas kekinian yaitu globalisasi di mana persaingan antarnegara dan warganegara di dalamnya menjadi persaingan global yang tidak dapat dihindari lagi.

Penulis beranggapan bahwa dengan memegang teguh prinsip ini, pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk karakter warganegara Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain di dunia. Sebuah karakter yang baik yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dalam tataran falsafah dan gotong royong dalam praktik ekonominya. Karakter inilah yang perlu ditanamkan pada para peserta didik sebagai warganegara Indonesia.

a. Pemikiran Ekonomi para Pendiri Bangsa

Pemikiran ekonomi para pendiri bangsa Indonesia tidaklah seragam melainkan beragam dan terkadang saling berlainan ataupun berseberangan. Namun, melalui kesadaran mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur perbedaan ini terus diperdebatkan hingga mendekati satu titik kesepahaman pandangan. Upaya ini bukanlah upaya yang selesai dalam semalam melainkan melibatkan proses panjang.

Meskipun Bung Karno menetapkan prinsip-prinsip ekonomi yang berkeadilan yang berlaku di Indonesia, Bung Hatta lah yang pertama kali menawarkan sebuah konsepsi praktis mengenai sistem ekonomi yang seharusnya dipraktikkan di Indonesia. Konsep ini adalah konsep yang menampung prinsi keadilan sosial, saling tolong-menolong dan kegotongroyongan yaitu konsep koperasi. Konsep koperasi yang pertama kali diajukan oleh Bung Hatta inilah yang menempatkannya sebagai pemikir utama ekonomi Indonesia. Konsep ini diungkapkan oleh Hatta dalam Memoirnya pada tahun 1928.

“kelemahan ekonomi rakyat ternyata pada keadaan bahwa rakyat Indonesia mengerjakan segala hal yang kecil, sebagai pertanian kecil, dagang kecil. Segala yang besar ada di tangan kulit putih, sebagai perdagangan besar, pertanian besar, impor dan ekspor,

pelayanan besar, bank dan lain-lain. Ekonomi menengah, ekonomi perantara kira-kira 90% berada di tangan orang China dan India dan lain yang disebut *Vremde Osterlingen*. Dalam bidang itu orang Indonesia hanya terdapat 10%, itupun pada tingkat sebelah bawah pula. Mereka sanggup memperoleh tempat itu karena giat berusaha dan mempunyai modal sendiri sebagai pokoknya, modal yang diperoleh turun-temurun dari nenek mereka, yang mereka jalankan sebagai harta keluarga. Itu sudah bagus apabila mereka dapat mempertahankan kedudukannya. Dalam sistem kapitalisme dengan dasar "*free competition*" tidak dapat diharapkan bahwa orang Indonesia yang hanya pandai melaksanakan segala yang kecil akan dapat naik ke atas. Melihat contoh-contoh yang terdapat di Inggris dan beberapa negeri lain di daratan Eropa hanya koperasi yang berhasil meningkatkan selangkah demi selangkah ekonomi rakyat jelata". (Latif, Yudi. 2011:522).

Analisa yang tajam dari Bung Hatta tersebut menjadi awal dari pembacaan konfigurasi sumber daya manusia di Indonesia. Secara konsisten, Bung Hatta menempatkan analisisnya terhadap masyarakat Indonesia pada konstruksi sistem ekonomi yang sesuai dengan potensi sumber daya manusia di Indonesia. Pemikiran ini kemudian menginspirasi kebijakan ekonomi Soekarno-Hatta pada masa kemerdekaan dengan menciptakan koperasi sebagai program nasional.

Bung Hatta menempatkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan pada keadilan sosial sebagai konsep dasar sistem perekonomian di Indonesia. Pendirian ini tidak berbeda dengan Bung Karno yang beranggapan bahwa ekonomi nasional adalah sebuah perekonomian yang ditandai oleh meningkatnya peran serta rakyat banyak dalam penguasaan modal atau faktor-faktor produksi di tanah air. Di masa kemerdekaan, Bung Hatta menerapkan tiga kebijakan ekonomi yang menjadi pilar bagi pemikiran ekonomi Hatta yaitu; penguasaan aset oleh negara, kontrol terhadap swasta, dan tumbuhnya perekonomian rakyat yang mandiri.

Selain Bung Hatta, tokoh lainnya adalah Sutan Sjahrir yang menuliskan konsep negara kesejahteraan dalam artikelnya di Daulat Ra'ja (1931-1934) yang berjudul "Barisan Persatuan Baroe". Konsepsi yang ditawarkan oleh Sjahrir merupakan konsepsi general mengenai konsep ekonomi bangsa. Buah-buah pemikiran ini antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Standar penghidupan minimum.
- 2) Upah atau pendapatan elementer guna memenuhi keperluan hidup secara sederhana (ditetapkan batas upahnya dengan peraturan yang bijaksana).
- 3) Pesangon bagi para orang tua.
- 4) Dibebaskan dari kewajiban membayar pajak bagi orang-orang yang penghasilannya minim karena hanya cukup untuk dipakai untuk memenuhi kehidupan sederhana bagi keluarganya.
- 5) Kerja 8 jam per hari bagi pekerja.
- 6) Anak-anak di bawah 15 tahun tidak boleh menjadi buruh.
- 7) Perempuan hamil tidak boleh bekerja.
- 8) Ada uang pengganti ongkos berobat.
- 9) Ekstra gaji bagi buruh yang mendapat kecelakaan.

Berkaitan dengan jaminan-jaminan sosial tersebut, Sjahrir juga menyebut tugas-tugas yang harus dilakukan oleh negara.

- 1) Membuat aturan pajak progresif.
- 2) Membuat undang-undang sosial tentang keselamatan kerja.
- 3) Menetapkan batas upah minimum.
- 4) Menghapus bentuk hukuman sanksi rodi dan segala bentuk kerja paksa.
- 5) Mengeluarkan undang-undang anti riba.
- 6) Peraturan yang mewajibkan semua orang untuk menyekolahkan anaknya dan bebas uang sekolah kepada anak-anak miskin hingga umur 15 tahun.
- 7) Memerangi buta huruf melalui pengurusan rakyat dan pendidikan umum. (Latif, Yudi. 2011:527).

Sjahrir melangkah lebih maju dari Hatta jika dilihat dari konsepsi umum negara, namun secara praktis Hatta berhasil menetapkan sistem ekonomi yang memiliki masa depan. Baik Sjahrir, Bung Hatta dan Bung Karno ketiganya meskipun berbeda pandangan namun memiliki irisan yang sama yaitu keadilan sosial dan demokrasi ekonomi. perjuangan

keadilan ekonomi dan cita-cita kesederajatan bagi seluruh rakyat Indonesia memerlukan pandangan yang lebih luas dari sekedar ekonomi ataupun demokrasi politik namun juga demokrasi ekonomi.

b. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Pasca Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan dapat dicapai oleh bangsa Indonesia melalui perjuangan tanpa henti dari para pendiri bangsa, pemikiran ekonomi tidaklah berhenti. Perumusan-perumusan ekonomi terus terjadi hingga saat ini dalam prinsip yang dijiwai oleh falsafah Pancasila. Pasca kemerdekaan nama-nama tokoh dan pakar yang merencanakan perekonomian Indonesia terus bermunculan. Orang-orang tersebut adalah Widjojo Nitisastro, Sumitro Djojohadikusumo, Mubyarto dan Sri Edi Swasono.

Di antara para tokoh tersebut, Sumitro Djojohadikusumo memiliki pemikiran yang paling gemilang. Ia dikenal sebagai Begawan ekonomi Indonesia yang telah mendedikasikan tenaga dan pikiran untuk membangkitkan Indonesia dari keruntuhan inflasi hingga 600% di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Ia juga merencanakan untuk mengejar ketertinggalan ekonomi Indonesia dari bangsa lain di dunia. Ia pernah menjabat lima kali sebagai menteri di Orde Lama dan Orde Baru. Ini menunjukkan kredibilitasnya yang luar biasa.

Pemikir lainnya adalah Widjojo Nitisastro, sumbangan terbesar dari tokoh ini adalah analisa ekonomi dan perencanaan pembangunan hingga pelaksanaan pembangunan Indonesia. Menurutnya, kemunduran ekonomi di Indonesia pada awal 1960-an dilatari oleh pandangan politik sebagai panglima dan ekonomi tidak dianggap penting. Pada tahun 1963 di pidato pengukuhan guru besar FEUI, ia menekankan bahwa ekonomi sangatlah penting untuk kesejahteraan masyarakat dan perlu dibangun secara berencana.

Bersama dengan Prof. Dr. Moh Sadli, Prof. Dr. Subroto, Prof. Dr. Ali Wardhana, Prof. Dr. Emil Salim, ia merumuskan pembaharuan kebijakan ekonomi Indonesia pada tahun 1966. Pembaharuan ekonomi ini ditetapkan melalui ketetapan MPRS No. XXIII/1966 tentang pembaharuan kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Ketetapan ini membuka lembaran baru pemikiran ekonomi di Indonesia dengan diadopsinya model ekonomi pembangunan.

Pemikir berikutnya yang tidak kalah penting adalah Mubyarto dan Sri Edi Swasono. Kedua pemikir inilah yang mempopulerkan istilah ekonomi Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Meskipun sebenarnya istilah Ekonomi Pancasila sendiri telah dikenal sejak dipopulerkan oleh Emil Salim pada 1967, namun Mubyarto lah yang dengan gigih mempopulerkannya ke seluruh kalangan sejak 1980-an. Mubyarto memiliki keresahan yang sama dengan kenyataan yang terjadi saat ini yaitu keterputusan antara kehidupan ekonomi dengan fungsi warganegara sebagai warga negara Indonesia.

Ekonomi Pancasila memiliki lima ciri utama yaitu;

- 1) Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral.
- 2) Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial (*egalitarianisme*), sesuai dengan asas-asas kemanusiaan.
- 3) Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi.
- 4) Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama.
- 5) Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial. (Mubyarto dalam Nugroho, 2011;9).

Pemikiran ini disambut baik oleh pemikir ekonomi lain yaitu Sri Edi Swasono. Ia melakukan kritik terhadap pengajaran ekonomi di Indonesia yang hanya menggunakan satu paradigma yaitu paradigma ekonomi liberal atau paradigma neoklasikal. Menurutnya, paradigma ini bertentangan dengan cita-cita perekonomian yang dirumuskan oleh pendiri bangsa terutama pada asas kegotongroyogan dan asas keadilan sosial. Paradigma neoklasik bertitik tolak dari paham individualisme yang dikecam oleh Bung Karno.

Tanpa mengembalikan pandangan pada ekoomi Pancasila, menurut Sri Edi Swasono, kita akan terjebak pada praktik ekonomi neoklasik yaitu kompetivisme atau persaingan bebas tanpa memperhatikan apakah asumsi tersebut tepat atau tidak. Secara tidak langsung pembelajaran ekonomi klasisk tersebut akan menciptakan budaya ekonominya sendiri. Budaya kompetisi dan individualisme jelas bertentangan dengan falsafah Pancasila.

Bukan hanya pada permasalahan bertentangan atau tidak dengan falsafah Pancasila, praktik kompetisi bebas dan individualisme dapat mengarahkan bangsa pada kesenjangan ekonomi dan sosial yang tentunya memiliki dampak yang negatif bagi masa depan bangsa.

Paling tidak sedikitnya ada sembilan kekeliruan pengajaran ekonomi di Indonesia khususnya di perguruan tinggi, yaitu;

- 1) Pengajaran ilmu ekonomi saat ini belum mampu melepaskan diri dari pemikiran neoklasikal.
- 2) Pengajaran ilmu ekonomi menyandarkan diri pada paham kompetitivisme dengan kuatnya.
- 3) Pengajaran ekonomi di kampus-kampus sejak semula telah kita awali dengan paham market fundamentalism.
- 4) Telah diakui adanya apa yang disebut *micro-macro ills* atau *micro-macro rifts*.
- 5) Pengajaran ilmu ekonomi kurang memberikan perhatian cukup tentang sistem ekonomi komparatif di luar ortodoksi kapitalisme vs sosialisme.
- 6) Pengajaran ilmu ekonomi sejak awal telah diberikan kepada mahasiswa tanpa membedakan antara prinsip-prinsip ekonomi dan hukum-hukum ekonomi.
- 7) Pelajaran ilmu ekonomi di sekolah-sekolah menengah kita, yang tidak saja sepenuhnya menjiplak kekeliruan yang terjadi di kampus-kampus.
- 8) Pengajaran ilmu ekonomi banyak mengabaikan metode induktif dan lebih menekankan pada metode deduktif.
- 9) Di ruang-ruang kelas globalisasi ekonomi banyak diungkapkan sebagai suatu cita-cita untuk mencapai efisiensi ekonomi dunia. (Rino, 2010).

Pemikiran kedua tokoh ekonomi Pancasila kontemporer ini patut dijadikan landasan kritik yang membangun pada upaya perancangan kembali kurikulum yang tepat bagi ekonomi Pancasila. Kritik ini tentu saja tidak hanya dialamatkan pada ilmu ekonomi atau pendidikan ekonomi semata namun juga ke seluruh aspek sistem pendidikan di Indonesia. Dalam hal ini, Pendidikan Kewarganegaraan harus menginternalisasi kritik tersebut dan kembali mengarahkan kekeliruan yang sudah terjadi agar perkembangan sistem ekonomi Indonesia dapat kembali ke jalur yang di cita-citakan oleh para pendiri bangsa.

c. Titik Temu Antar Perdebatan

Perdebatan konstruktif antara para pendiri bangsa tersebut menjadi panduan bagi kita untuk memahami pentingnya ekonomi Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan. Sejak di masa kemerdekaan, perdebatan yang terjadi antara para pendiri bangsa seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir dan Soepomo mengenai ekonomi memiliki irisan yang jelas yaitu pada demokrasi ekonomi dan keadilan sosial. Kedua prinsip tersebut merupakan acuan perdebatan konstruktif bagi para pendiri bangsa dan tetap menjadi jiwa bagi sistem ekonomi yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Cita-cita tersebut sudah terpatri dalam sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Interupsi yang terjadi dimasa Orde Baru terhadap sistem ekonomi yang direncanakan oleh para pendiri bangsa bukanlah juga diartikan sebagai interupsi yang negatif. Seperti pada penjelasan di atas, di masa Sumitro Djojohadikusumo menjabat sebagai menteri keuangan, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi karena tingkat inflasi yang mencapai 600%. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan pembaruan ekonomi dengan mengadopsi perencanaan pembangunan sembari mengejar ketertinggalan ekonomi dari negara lain.

Praktik perencanaan ala Orde Baru tersebut mendapatkan tantangan justru ketika praktik tersebut mencapai keberhasilannya di tahun 1980-an. Tantangan inipun merupakan sumbangan pemikiran yang konstruktif bagi pemikiran ekonomi Indonesia. Sejak saat ini pula istilah ekonomi Pancasila kembali populer dan menjadi pertimbangan kebijakan yang sangat berpengaruh.

Jika kita memandang kembali perdebatan mengenai ekonomi Pancasila sejak tahun 1980-an dan perumusan Pancasila, dapat kita temukan irisan yang jelas dari seluruh perdebatan mengenai ekonomi yang sesuai dengan falsafah Pancasila. Irisan tersebut dengan jelas terletak pada sila keadilan sosial sebagai prinsip kesejahteraan. Seperti yang dinyatakan oleh Bung Karno “jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip *sociale rechvaardigheid* ini, yaitu bukan hanya persamaan politik, saudara-saudara, tetapi di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.”

Harapan ini merupakan upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pencapaian tugas ini tidak dipercayakan pada sistem ekonomi apapun kecuali sistem ekonomi yang berdasarkan pada falsafah Pancasila. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa ekonomi Pancasila menekankan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang berorientasi kerakyatan (publik secara keseluruhan), dengan bersendikan nilai etis ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi dalam ekonomi Pancasila pun harus menganut prinsip gotong royong.

Prinsip keadilan adalah inti dari sistem ekonomi Pancasila. Prinsip ini juga merupakan pusat dari kelima sila dalam Pancasila. Prinsip ini menjadi inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan dan penanda kedaulatan rakyat. Prinsip inilah yang perlu ditanamkan di dalam jiwa para peserta didik, pendidik ataupun seluruh warga negara Indonesia.

Tabel 7.1
Rekonstruksi pemikiran sebelum dan sesudah penelitian.

Kondisi Saat Ini	Rekonstruksi Pemikiran Menurut Penulis
<p>1. Pendidikan belum dijadikan media integrasi sosial, sehingga tidak mengherankan implementasi sistem pendidikan nasional saat ini sama sekali kurang mendorong agar peserta didik mampu menyesuaikan diri dengan sistem sosial di lingkungannya apalagi menjadikan SDM yang siap di pasaran tenaga kerja, serta mengembangkan karakter peserta didiknya, sistem pendidikan kita masih terlalu</p>	<p>1. Melalui pendidikan, setiap individu disosialisasikan untuk menyesuaikan diri dengan sistem sosial. Di samping setiap individu harus memberikan kontribusi terhadap sistem sosial. Sebagai tindakan yang bersifat laten, Pendidikan juga dapat mendukung “bagian penting” dari sistem sosial yaitu ekonomi masyarakat dengan;</p> <p>a. Menanamkan keterampilan teknis tertentu dan persyaratan.</p>

<p>mengedepankan faktor akademik saja dan sama sekali mengabaikan upaya meningkatkan kecakapan hidup baik kecakapan personal maupun kecakapan sosial (Soft Skills) yang justru diperlukan dalam sistem sosial serta untuk menyiapkan peserta didik agar mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan hidup sehari-hari yang semakin kompleks, di mana hal tersebut sangat diperlukan dalam pengembangan sumber daya manusia.</p>	<p>b. Memisahkan pekerja potensial untuk tempat yang berbeda dalam pasar tenaga kerja.</p> <p>Kedua poin di atas merupakan sebagian dari peran penting pendidikan sebagai medium integrasi sosial. Pendidikan harus ditempatkan sebagai peran vital bagi masyarakat untuk mendapatkan fungsi dalam sistem sosial. Melalui pendidikan, orang dapat mengenali kemampuannya dan meningkatkan kemampuannya agar ia dapat berkontribusi pada sistem sosial. Integrasi imperative ini diciptakan melalui sekolah/institusi pendidikan. Pemikiran tersebut juga sangat sesuai dengan teori <i>human capital</i> ataupun pandangan mengenai pengembangan sumber daya manusia.</p>
<p>2. Pendidikan Kewarganegaraan pada kurikulum di perguruan tinggi saat ini masih terlalu banyak mengadopsi konten ilmu politik dan hukum yang padat.</p>	<p>2. Pendidikan Kewarganegaraan sudah saatnya diberikan penambahan bidang kajian terutama dalam konteks ekonomi. Pembahasan mengenai ekonomi dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan hendaknya mengacu pada sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia</p>

	<p>dengan prinsip-prinsip yang berkesesuaian dengan filosofi negara. Melalui pengembangan ini diharapkan peserta didik memahami posisi penting pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang tidak hanya meliputi transmisi ideologi negara, pendidikan demokrasi, hukum dan politik namun juga ekonomi sebagai bagian dari keterampilan warganegara yang berasaskan Pancasila.</p>
<p>3. Pendidikan kecakapan hidup belum dijadikan sebagai suatu pendekatan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan maupun untuk mengembangkan pendidikan karakter, sehingga pembelajaran PKn lebih sekedar meningkatkan pengetahuan dan sedikit keterampilan akademik saja, karena memang pembelajaran PKn hanya mengutamakan out put atau hasil akhir saja, dan kurang memperhatikan proses. Selain itu formalisasi matakuliah dalam pembelajaran di kelas seringkali membuat mahasiswa tidak dapat memahaminya sebagai proses penanaman nilai dan kecakapan hidup melainkan hanya pengajaran normatif saja.</p>	<p>3. Pendidikan kecakapan hidup (<i>soft skills</i>) harus dijadikan sebagai suatu pendekatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan lebih mengedepankan proses dari pada hasil, karena dengan proses yang baik akan mampu meningkatkan kecakapan hidup yang dibutuhkan oleh peserta didik selain konten PKn itu sendiri (hasil), yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi pengembangan karakter peserta didik.</p>

Penerapan Merit System di Indonesia dan Dampak Kondisi Transisional Terhadap Kualitas Sumberdaya Manusia di Bidang Industri Kreatif

a. Lemahnya penerapan merit system pada aparatur Birokrasi

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan faktor utama yang strategis dalam meningkatkan kemampuan bersaing (*competitive*) dan bertahan (*defensive*) bagi institusi/organisasi di era globalisasi saat ini. Pfeffer (1996) mengemukakan bahwa pada kompetisi global hanya ada satu landasan untuk mencapai keunggulan bersaing bagi institusi/organisasi, yaitu bagaimana mengelola faktor SDM tersebut. Oleh karena itu, pengembangan kualitas SDM diperlukan dalam dinamika persaingan, dinamika pasar serta dinamika teknologi yang terus berkembang.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu jenis SDM yang memerlukan penerapan sistem penilaian kinerja (prestasi kerja) melalui *merit system*. Mengingat, keberadaan PNS sangat dibutuhkan dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. PNS sebagai aparatur negara (ASN) masih memiliki kinerja yang rendah. Hal ini didasarkan pada kompetensi dan produktivitas PNS yang masih rendah dan perilaku yang *rule driven*, paternalistik dan kurang profesional. Menurut laporan *World Bank* (2006), pegawai negeri sering mencari alasan atas kinerja yang buruk, absensi dan praktek-praktek korupsi dengan menyatakan bahwa mereka tidak dibayar dengan cukup. Hal ini pun diperkuat dengan kajian yang dilakukan oleh Bappenas (2004), sistem gaji PNS hingga saat ini tidak mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dan prestasi kerja. Disamping itu, sistem penggajian belum tegas mempertimbangkan pegawai dengan tingkat pendidikan, prestasi, produktivitas tinggi dan disiplin yang tinggi. Saat ini PNS dengan kedudukan struktural yang sama, produktif atau tidak produktif dipastikan memiliki gaji yang sama apabila mempunyai golongan, masa kerja dan ruangan pangkat yang sama. Kondisi ini akan menurunkan semangat kerja dan prestasi kerja pegawai baik saat ini maupun di masa mendatang.

Dalam menerapkan *merit system* pada manajemen PNS beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain **pertama**, langkah awal dalam penerapan penggajian *merit system*, pihak manajemen perlu memperhatikan bahwa dalam pemberian gaji tidak terlepas dari pada penilaian terhadap tugas dan tanggung jawab seluruh karyawan disemua unit kerja, sehingga penilaiannya adalah orang-orang yang mengetahui dengan benar apa yang dikerjakan karyawan yaitu atasan langsung dan sebagai bahan pertimbangan penilai dapat melakukan konfirmasi kepada bagian lain yang terkait dengan pekerjaan dan karyawan yang dinilai. **Kedua**, untuk mensejahterakan PNS pemerintah seyogyanya juga memperhatikan pemerataan penghasilan. Sudah sepantasnya pemerintah meningkatkan standar gaji PNS dengan standar yang layak, dengan demikian kesenjangan akan lebih dapat diminimalisir dan kesejahteraan pun dapat diperoleh. **Ketiga**, dalam perhitungan penentuan formula penggajian PNS, perlu diperhatikan juga tingkat inflasi/kemahalan antara lain dengan membuat indeks untuk dijadikan dasar bagi penyesuaian gaji dan tunjangan.

Keempat, meskipun saat ini sistem penggajian PNS dibuat dengan standar tertentu, artinya meski dalam golongan yang sama tetapi memiliki grade yang berbeda maka gaji yang diterimapun akan berbeda disesuaikan dengan beban kerjanya sehari-hari. Jika ada PNS yang tidak bekerja sungguh-sungguh, maka gajinya akan lebih kecil daripada yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar, walaupun golongannya rendah, karena besaran pendapatannya akan disesuaikan dengan tunjangan kerjanya (Tukin). Namun demikian, produktifitas PNS belum seperti yang diharapkan khususnya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Di Indonesia saat ini, tidak seluruh gaji PNS didasarkan atas kinerja melainkan tanggung jawab, sedangkan tanggung jawab tidak selalu terkait dengan kinerja. Di samping itu, setiap instansi diberikan kewenangan penuh untuk memberikan *reward* dan *punishment* terhadap pegawai di bawahnya sesuai ketentuan yang berlaku. *Reward* dan *punishment* tersebut tidak hanya berlaku untuk bawahan saja melainkan juga untuk pimpinan. **Kelima**, *reward* kepada PNS yang memiliki prestasi kerja seharusnya dilakukan dengan transparan sehingga memiliki sikap kompetisi antar departemen dalam memberikan pelayanan, mendorong tegaknya hukum dan kesediaan memberi pertanggungjawaban terhadap publik (*public*

accountability) secara teratur. **Keenam**, diperlukan pengawasan yang ketat dalam menerapkan *merit system* dimana pemerintah perlu membentuk tim *merit system* sehingga dapat berjalan secara efektif. Penerapan *merit system* juga akan efektif bila terdapat komitmen penuh dari segenap pihak, yaitu pimpinan dan pegawai (PNS) institusi/organisasi.

Ada beberapa hal lain yang perlu juga diperhatikan dalam mencapai keefektifan penerapan *merit system* di Indonesia, di antaranya adalah :

- 1) menetapkan pagu atau target prestasi kerja;
- 2) mengembangkan sistem penilaian karya pegawai yang berfokus pada kekhasan jabatan, berorientasi pada hasil kerja serta penilaian oleh lebih dari satu penilaian atau *multi raters*;
- 3) memberikan pelatihan penilaian prestasi kerja kepada para pimpinan unit kerja serta pegawai umumnya terampil menilai prestasi kerja pegawai serta menguasai seni penyampaian umpan balik tentang kondisi nyata prestasi kerja yang berhasil dicapai sehingga pada masa mendatang memungkinkan untuk dicapainya prestasi kerja pegawai yang lebih baik.
- 4) membakukan pemberian penghargaan berdasarkan prestasi kerja yang berhasil dicapai oleh setiap pegawai.
- 5) menggunakan skala kenaikan penghasilan yang besar dan bernilai signifikan.

b. Sistem Pendidikan Nasional dan Pandangan Fungsionalisme dalam Pendidikan

Pendidikan sebagai proses kebudayaan menghendaki agar proses belajar mengajar tidak hanya berorientasi pada pengembangan kemampuan kognitif, melainkan juga kemampuan afektif dan konatif (psikomotorik). Kurikulum pendidikan harus mampu membantu peserta didik untuk belajar “mengeluarkan dan mengembangkan” (Latin, *educare*) daya pikir, daya rasa, daya karya dan daya raga yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan tingkat perkembangan peserta didik. (Yudi Latif, 2020 : 146). Berikut ini diuraikan Sistem Pendidikan Nasional dan pandangan fungsionalisme dalam pendidikan.

1) Sistem Pendidikan Nasional Pada Abad 21

Tujuan pendidikan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab II pasal 3 yang menegaskan bahwa: “Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”, dengan demikian mencerdaskan bangsa merupakan salah satu tugas pemerintah

Pada abad 21 ini banyak tantangan yang berkenaan dengan tuntutan masa depan yang menggugah kepedulian masyarakat terhadap peran pendidikan tinggi khususnya agar meningkatkan fungsinya secara relevan dengan pembangunan masyarakat. Pengembangan kemampuan manusia atau *Human Capacity Development (HCD)* adalah hasil interaksi antarindividu dan masyarakat yang memiliki peluang berpartisipasi. *Human Capacity Development* menunjuk pada konstelasi ketrampilan, sikap dan perilaku dalam melangsungkan hidup mencapai kemandirian, serta sekaligus memiliki daya saing tinggi dan daya tahan terhadap gejolak ekonomi dunia (Semiawan, 1998:9).

Pemilihan strategi pembelajaran dalam proses perkuliahan menjadi amat penting, mengingat karakteristik mahasiswa yang mengikuti perkuliahan sangat beragam, dan alokasi waktu perkuliahan sangat terbatas. Idealnya strategi pembelajaran yang dipilih mampu mengakomodasi karakteristik mahasiswa yang beragam dan mampu menghasilkan kompetensi yang diinginkan dalam waktu yang singkat. Pendidikan kita sekarang ini setidaknya-tidaknya sedang dihadapkan pada empat masalah, yaitu mutu, pemerataan, motivasi, dan keterbatasan sumber daya dan sumber dana pendidikan.

- a) Secara umum pendidikan kita sekarang ini tampaknya lebih menekankan pada akumulasi pengetahuan yang bersifat verbal dari pada penguasaan keterampilan, internalisasi nilai-nilai dan sikap, serta pembentukan kepribadian. Di samping itu kuantitas tampaknya lebih diutamakan dari pada kualitas. Persentase atau banyaknya lulusan lebih diutamakan daripada apa yang dikuasai atau bisa dilakukan oleh lulusan tersebut.

- b) Pola motivasi sebagian besar peserta didik lebih bersifat *maladaptif* daripada *adaptif*. Pola motivasi maladaptif lebih berorientasi pada penampilan (*performance*) dari pada pencapaian suatu prestasi (*achievement*) (Dweck, 1986), suatu bentuk motivasi yang lebih mengutamakan kulit luar daripada isi. Ijazah atau gelar lebih dipentingkan daripada substansi dalam bentuk sesuatu yang benar-benar dikuasai dan mampu dikerjakan.
- c) Kualitas proses dan hasil pendidikan belum merata di seluruh tanah air. Masih ada kesenjangan yang cukup besar dalam proses dan hasil pendidikan di kota dan di luar kota, di Jawa dan di luar Jawa. Pendidikan kita sekarang ini masih belum berhasil meningkatkan kualitas hasil belajar sebagian besar peserta didik yang pada umumnya berkemampuan sedang atau kurang. Pendidikan kita mungkin baru berhasil meningkatkan kemampuan peserta didik yang merupakan bibit unggul.
- d) Pendidikan kita sekarang, juga masih dihadapkan pada berbagai kendala, khususnya kendala yang berkaitan dengan sarana/prasarana, sumber dana dan sumber daya, di samping kendala administrasi dan pengelolaan. Administrasi serta sistem pengelolaan pendidikan kita pada hakikatnya masih bersifat sentralistis yang syarat dengan beban birokrasi . Oleh karena itu, persoalan-persoalan pendidikan masih sulit untuk ditangani secara cepat, efektif, dan efisien.

Apabila kondisi pendidikan seperti tersebut berlangsung terus dan tidak bisa diubah, dapat disangsikan apakah bangsa kita dapat bersaing dengan bangsa lain pada abad 21 ini? Dalam menghadapi persaingan global untuk mengejar keunggulan, khususnya keunggulan dalam bidang ekonomi, sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan kualitasnya. Sumber daya manusia yang berkualitas jangan hanya diartikan sebagai manusia yang sekedar berpengetahuan luas, melainkan juga manusia yang terampil, ulet, kreatif, efisien dan efektif serta kreatif, sanggup bekerja keras, jujur, terbuka, bertanggung jawab, punya kesadaran nilai dan berkarakter, di samping tentu saja beriman dan taqwa serta berakhlak mulia.

Selain itu, harus terus diupayakan agar sebagian besar manusia Indonesia dapat memiliki sifat-sifat tersebut. Sebagai suatu perbandingan, keberhasilan pendidikan Jepang terletak pada kesanggupannya meningkatkan kemampuan sebagian besar anak didik mereka dengan cara mendorong dan mengajar mereka bekerja keras sejak dini, untuk mencapai prestasi yang maksimal dan tidak semata-mata mengandalkan pada bakat dan kemampuan alamiah. Sebaliknya, pendidikan Amerika lebih mengandalkan hasil pendidikannya dari anak-anak yang memiliki kemampuan tinggi (Gordon, 1987; Sidabalok, 1989).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 telah meletakkan landasan bagi pembangunan sistem pendidikan nasional yang dapat dijadikan sebagai titik acuan dalam pengembangan pendidikan lebih lanjut. Apabila kita percaya bahwa kemampuan survival bangsa kita di masa-masa yang akan datang ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya, begitu juga apabila kita percaya bahwa pendidikan merupakan cara terbaik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sistem pendidikan nasional harus diupayakan agar dapat memecahkan masalah serta mengatasi kendala-kendala yang ada.

2) Pandangan fungsionalisme dalam Pendidikan

Dalam penelitian disertasi ini, peneliti menggunakan paradigma fungsionalisme untuk menemukan konstruksi realitas yang memunculkan kebutuhan adaptasi tujuan pendidikan kewarganegaraan yang ideal dengan teori *Human Capital*. Paradigma fungsionalisme sendiri merupakan akar konseptual teori *Human Capital* dalam dunia pendidikan. Paradigma yang mempertimbangkan fungsi atau kegunaan dari sebuah fenomena terhadap sistem sosial ini sendiri berasal dari kajian ilmu sosial.

Paradigma fungsionalisme merupakan salah satu dari banyak paradigma dalam ilmu sosial. Pengertian paradigma yang diambil oleh peneliti menggunakan pengertian paradigma yang dirumuskan oleh Thomas Kuhn (1962) yaitu sebagai kerangka teoritis, atau suatu cara yang digunakan oleh para ilmuwan untuk pandangan dunianya. Paradigma berfungsi sebagai lensa bagi para ilmuwan untuk mengamati dan memahami masalah-masalah ilmiah dalam bidang keilmuannya.

Thomas Kuhn sendiri dalam bukunya *The Scientific Revolutions* (1962) tidak secara jelas menyatakan pengertian dari paradigma yang dimaksud olehnya. Margaret Masterman, sebagaimana dikutip oleh Winahyu dalam Jurnal Ilmu Hukum volume 10 no.1 (2007) menjelaskan bahwa kandungan dapat disimpulkan bahwa istilah “paradigma” yang dimaksud oleh Kuhn, mencakup berbagai hal:

- ❖ Model yang berdasarkannya muncul sejumlah tradisi penelitian ilmiah tertentu yang terpadu (koheren);
- ❖ Pencapaian hasil-hasil ilmiah yang diakui secara universal yang untuk masa-masa tertentu menawarkan model masalah dan solusi kepada komunitas pemraktik;
- ❖ Hampir merupakan pandangan dunia yakni cara memandang dunia melalui kacamata yang disediakan oleh cabang ilmu tertentu;
- ❖ Terdiri atas sejumlah teori dan teknik khusus yang sesuai bagi pemecahan masalah-masalah penelitian dalam wilayah penelitian tertentu;
- ❖ Perpaduan teori dan metode yang bersama-sama mewujudkan sesuatu yang mendekati suatu pandangan dunia;
- ❖ Matrik disipliner yakni keseluruhan konstelasi sejumlah keyakinan, generalisasi simbolik, model, nilai, komitmen, teknik dan eksemplar yang dianut dan mempersatukan para anggota komunitas ilmiah tertentu;
- ❖ Eksemplar, yakni penyelesaian (solusi) teka-teki atau masalah ilmiah yang digunakan sebagai model atau contoh dan yang dapat menggantikan aturan eksplisit sebagai landasan untuk solusi teka-teki lainnya dari ilmu normal; eksemplar ini dihasilkan oleh penelitian yang sukses yang kemudian digunakan oleh para pemraktik sebagai model. (Winahyu.2007).

Dalam sosiologi paradigma fungsionalisme dikenal juga sebagai paradigma struktural fungsional. Paradigma ini dipelopori oleh seorang sosiolog klasik bernama Emile Durkheim (1858-1917). Pandangan fungsionalis klasik yang dipelopori Durkheim mengambil tendensi pada

analogi biologi pada gerak evolusi sosial. Pandangan struktural fungsional merupakan perspektif luas sosiologi dan antropologi yang dibuat untuk mengintegrasikan masyarakat sebagai struktur dengan bagian yang saling terhubung. Fungsionalisme memaknai masyarakat sebagai bagian keseluruhan dari fungsi yang terdiri dari banyak elemen seperti norma, adat tradisi, dan institusi.

Dalam pemikiran pendidikan, terutama pada pendidikan karakter analogi yang sama digunakan dalam pilar pendidikan yaitu keluarga, masyarakat dan satuan pendidikan. Analogi tersebut menempatkan keluarga sebagai satuan terkecil masyarakat di mana nilai secara efektif dapat ditransmisikan melalui satuan tersebut. Keluarga merupakan unsur pembentuk masyarakat dan pada akhirnya menjadi unsur pembentuk negara dan bangsa. Berdasarkan pemikiran Durkheim tersebut, sosiolog lain, Herbert Spencer menganalogikan bagian-bagian dari masyarakat tersebut sebagai organ yang bekerja untuk memberikan fungsi pada tubuh secara keseluruhan (Urry, 2000; 23 *Sociology beyond societies: mobilities for the twenty-first century*. Routledge.).

Berbeda dengan Spencer, Talcott Parsons seorang sosiolog dari Universitas Chicago menganggap struktural fungsionalisme lebih merupakan bagian dari metode pembangunan ilmu sosial daripada ajaran atau ilmu tersendiri. Talcott Parsons mengembangkan teori tindakan sosial yang dominan dalam aliran fungsionalisme struktural. Pandangan teoritik dari teori tindakan sosial dideduksi melalui pemahaman Parson mengenai tindakan. Parson menyatakan dalam bukunya *The Social Systems* (1951) bahwa tindakan merupakan proses berkesinambungan antara aktor dan kondisi lingkungan dalam sistem sosial yang dapat memotivasi actor. Seperti dijelaskan pada kutipan berikut:

"Tindakan" adalah proses dalam sistem aktor situasi yang memiliki kecocokan motivasi pada aktor individu, atau, dalam kasus kolektivitas, komponen individual. Ini berarti bahwa orientasi proses tindakan yang sesuai memiliki pengaruh pada pencapaian kepuasan atau menghindari kekurangan dari aktor yang relevan, bagaimanapun secara konkret mungkin dapat terlihat dengan mudah dalam struktur kepribadian yang relevan. (Parsons, 1991; 2).

Talcott Parsons sangat dipengaruhi oleh Durkheim dan Max Weber yang menyintesis teori aksinya berdasarkan pada konsep sistem teori dan prinsip aksi sukarela (*voluntary*). Parsons menyatakan bahwa sistem sosial dibangun atau diciptakan oleh aksi-aksi individual yang pada gilirannya menjadi masif dan diakui sebagai nilai bersama baik dalam bentuk kebiasaan ataupun kebudayaan. Seperti yang dijelaskan oleh Parsons pada bukunya *The Social Systems* (1951) pada kutipan berikut:

Titik awal yang mendasar adalah konsep tindakan sistem sosial. Interaksi para aktor-aktor individual, yang terjadi dalam kondisi tertentu yang memungkinkan untuk memperlakukan suatu proses interaksi sebagai suatu sistem dalam pengertian ilmiah dan dijadikan sebagai subjek untuk kepentingan yang sama sebagai analisis teoritis yang telah berhasil diterapkan untuk jenis lain dari sistem dalam keilmuan lainnya (Parsons,1951;1).

Berdasarkan kutipan tersebut dapat dipahami bahwa titik pandang awal Parsons adalah interaksi antara dua individu yang menghadapi berbagai macam pilihan bertindak, dan pilihan tersebut dipengaruhi juga ditentukan oleh banyak factor baik factor fisik maupun factor sosial. Parsons mengenalkan skema yang sangat terkenal untuk melihat masyarakat secara sistemik. Skema ini dikenal sebagai skema AGIL, skema AGIL diperkenalkan oleh Parsons pada tahun 1950-an di Amerika. Skema ini ingin menunjukkan bahwa setiap masyarakat harus bertemu untuk menjaga stabilitas kehidupan sosial.

Skema AGIL merupakan skema dari teori tindakan sosial atau *Action Theory* yang dibangun oleh Parsons yang diperkenalkan melalui bukunya *The Structure of Social Action*. Skema ini dimaksudkan untuk memetakan semua sistem tindakan sebagai sistem yang hidup atau bisa juga disebut sebagai sebuah organisme. Skema AGIL sendiri tidak diciptakan oleh Parsons namun merupakan ringkasan dari pemikiran Parsons mengenai pemetaan sistem sosial yang disampaikan melalui beberapa buku karangannya termasuk yang disebutkan di atas. Skema AGIL berkembang dan dipopulerkan oleh para penerus pemikiran Parsons. Kini, skema AGIL tidak hanya digunakan dalam ilmu sosiologi namun beberapa ilmu sosial

lainnya termasuk ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kekeuatan teori yang diciptakan oleh Parsons dapat dijadikan sebagai teori besar atau teori utama yang mampu melingkupi pendekatan-pendekatan lainnya.

AGIL merupakan akronim dari *Adaptation* (adaptasi), *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan), *Integration* (Integrasi), dan *Latency* (penjagaan pola). Adaptasi merupakan kapasitas interaksi masyarakat dengan lingkungannya, termasuk didalamnya mengumpulkan sumber daya dan memproduksi barang kebutuhan untuk kesejahteraan sosial. Pencapaian tujuan merupakan kemampuan untuk menyiapkan tujuan masa depan dan membuat keputusan. Integrasi merupakan harmonisasi dari keseluruhan masyarakat yang sesuai pada nilai dan norma yang sudah ada dan dapat bertahan. Sedangkan penjagaan pola adalah tantangan bagi masyarakat untuk menjaga elemen *integrative* atau elemen yang dibutuhkan oleh integrasi sosial. Penjagaan pola dapat dicontohkan melalui keluarga, sekolah dan lembaga sosial lainnya yang memediasi sistem kepercayaan dan nilai generasi sebelumnya dengan generasi penerusnya.

	Fungsi Instrumental	Fungsi kebutuhan
Masalah External	Adaptasi	Goal
Masalah Internal	Latensi atau penjagaan pola	Integrasi

Gambar 7.2
Skema AGIL.

Fase-fase yang disebutkan dalam skema AGIL tidak memiliki batasan yang jelas secara dikotomis oleh karena interaksi sosial sangat bergantung pada aktifitas subjek yang juga terjadi dalam proses yang berkesinambungan. Kekaburan batasan dikotomis tersebut bukanlah merupakan kekurangan dari skema ini melainkan cara meluaskan skema ini untuk menangkap aktifitas sosial yang dinamis. Fungsionalisme modern yang dipelopori oleh Talcott Parson dan dilanjutkan oleh Robert K Merton telah menyumbangkan ide besar dalam dunia pendidikan.

Bagi kaum fungsionalis, pendidikan merupakan bagian yang sangat vital dari keseluruhan sistem sosial yaitu sebagai alat yang dapat menjaga pola integrasi masyarakat. Pendidikan mampu membuat orang yang tidak tahu menjadi tahu dan yang tidak peduli menjadi peduli bahkan yang tidak mampu menjadi mampu. Posisi ini sangat penting bagi kelangsungan system sosial sebagai wahana bagi terjadinya evolusi sosial kearah yang lebih baik. Selain itu secara prinsipil, posisi ini sejalan dengan tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai medium pembentukan karakter warganegara juga menggunakan pandangan ini. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian yang sangat vital dari keseluruhan proses pendidikan karena perannya dalam pembangunan karakter peserta didik sebagai warganegara yang cerdas, baik dan kreatif. Proses pembentukan karakter tersebut berlaku untuk merubah karakter warga negara menjadi lebih baik dan mampu mengaplikasikan nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat berkontribusi aktif dalam sistem sosial di Indonesia.

Kaum fungsionalis mengambil pandangan bahwa masyarakat terbagi dalam kelompok-kelompok yang terpisah, masing-masing melakukan tugas yang diperlukan untuk kelangsungan hidup masyarakat secara keseluruhan. Pandangan ini menganalogikan sistem sosial sebagai satu kesatuan organik. Masyarakat dapat berfungsi dengan baik ketika orang menerima secara internal, baik sadar atau tidak sadar, kebutuhan untuk berkontribusi pada fungsi organik dari sistem sosial.

Sebuah sistem sosial terdiri dari sejumlah aktor individu berinteraksi satu sama lain dalam situasi yang memiliki setidaknya aspek fisik atau lingkungan, aktor yang termotivasi dalam hal kecenderungan untuk "optimasi kepuasan" dan yang berkaitan dengan situasi mereka, termasuk kebersamaan, didefinisikan dan dimediasi dalam hal sistem simbol budaya yang terstruktur dan terbagi (Parsons,1991;5-6).

Titik tolak pandangan ini adalah kesukarelaan individu untuk mengambil bagian dalam fungsi sistem sosial untuk meregenerasi masyarakat. Individu secara sukarela masuk menjadi ke bagian sistem sosial dan menenggelamkan identitasnya dalam mendukung kelangsungan

hidup masyarakat banyak. Mereka melakukan ini karena mereka mengakui bahwa ada alternatif sederhana untuk masyarakat untuk bertahan dan berkembang yaitu jika fungsi-fungsi dalam struktur sosial terpenuhi dan bekerja secara efektif bagi kelangsungan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat secara individu harus memiliki fungsi sosial yang berguna bagi sistem sosialnya. Dalam hal ini, pendidikan menjadi medium utama bagi masyarakat untuk menjadikan dirinya sebagai bagian dari sistem sosial dengan memberikan fungsi sosialnya bagi masyarakat.

Pandangan ini lahir dari pertentangan panas teori sosiologi di masa perang dingin yaitu antara pendekatan liberal yang menggunakan Weber dan Durkheim dan pendekatan Komunis yang menggunakan teori konflik sosial dari Karl Marx. Parsons mengkritik pandangan Marx mengenai struktur sosial yang mendasarkan perkembangan masyarakat melalui konflik sosial dan mengandaikan bahwa sejarah adalah sejarah pertentangan kelas di masyarakat sehingga mengharuskan terjadinya revolusi sosial untuk menggantikan dominasi kelas penindas. Kritik Parsons terhadap teori konflik Marxis mengambil asumsi utama bahwa sistem sosial meskipun tidak mungkin berada dalam situasi equilibrium, namun bukan berarti terjadi atau tersusun dari konflik berkelanjutan namun system sosial bergerak karena evolusi sosial.

Menurut Parsons, sistem sosial memang dengan sendirinya menempatkan masyarakat pada strata yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh tingkat atau kualitas kontribusi masyarakat terhadap sistem sosial yang menaunginya. Parsons berpendapat bahwa ketika orang menerima peran mereka dalam masyarakat mereka mengembangkan bentuk kesadaran sosial, yang Durkheim label "kesadaran kolektif".

Kaum fungsionalis cenderung berpijak pada pandangan seorang sosiolog yaitu Emile Durkheim sebagai pelopor sudut pandang fungsionalisme. Namun sebenarnya pandangan Durkheim dan Parsons memiliki perbedaan yang dipisahkan oleh waktu atau pengalaman empiris mereka. Fungsionalis modern, seperti Talcott Parsons, berusaha untuk membela sistem di masa modern, tetapi visi Durkheim tentang masyarakat organik masa depan adalah satu di mana tidak akan ada warisan dari modal, sehingga orang akan ditugaskan peran fungsional mereka atas dasar merit saja.

Masyarakat modern tidak menggunakan sistem *meritocracies* yang dipahami oleh Durkheim yaitu orang hanya terpilih dan maju sesuai dengan prestasinya. Dalam pengertian ini, individu yang berbeda menemukan peran yang berbeda dalam masyarakat, tetapi peluang individu yang jauh dipengaruhi oleh situasi kelas sosial mereka. Pemahaman ini diperbaharui oleh Parsons dengan menambahkan sudut pandang modern bahwa setiap kelompok sosial merupakan bagian fungsional dari seluruh masyarakat, cenderung mendukung pertahanan sistem yang berlaku. Dalam pemahaman sistem yang berlaku atau sistem modern kita tidak bisa lepas dari kenyataan globalisasi yang telah menggantikan nilai-nilai lama dalam masyarakat atau bahkan bercampur dalam tata nilai masyarakat sehingga tidak lagi terlihat perbedaan dengan tradisi.

Masyarakat modern, bukan hanya membutuhkan prestasi namun juga modal dan jaringan sosial yang memudahkan orang untuk mendapatkan prestasi. Meritokrasi Durkheim tidak mampu menjelaskan kenyataan empiris yang dihadapi oleh masyarakat modern. Untuk melengkapinya Parsons menambahkan elemen integrasi sosial yaitu bagaimana orang dapat disatukan dalam sebuah sistem sosial dengan memahami dan menerima pengetahuan maupun nilai dari sistem sosial tersebut. Integrasi sosial ini cenderung direpresentasikan melalui pelembagaan atau lembaga yang mampu menjadi medium integrasi sosial.

Salah satu lembaga sosial yang mampu melakukan integrasi sosial dan memiliki kekuatan yang nyata dalam proses integrasi sosial adalah negara. Negara dalam pemahaman ini dianggap sebagai elemen integrasi sosial yang mampu mengintegrasikan masyarakat melalui norma, nilai, hukum dan karakter kebangsaan. Oleh karena itu, peran negara menjadi peran vital bagi integrasi sosial. Sebagai satuan politik tertinggi, negara berhak untuk mengatur dan memaksa dalam terminologi hukum untuk membawa masyarakat ke dalam evolusi sosial yang lebih baik. Kekuasaan negara tersebut muncul melalui berbagai lembaga negara yang mengatur masyarakat baik secara langsung yaitu penegakan hukum maupun secara tidak langsung melalui penanaman nilai kebangsaan.

Penanaman nilai kebangsaan dapat dilakukan oleh negara melalui berbagai institusi namun yang paling vital adalah institusi pendidikan. Institusi pendidikan memiliki fungsi yang sangat penting sebagai medium

bagi transfer pengetahuan dan nilai. Untuk itu, sangatlah penting bagi negara untuk menentukan dan merencanakan pengetahuan dan nilai yang akan ditransfer kepada masyarakatnya agar evolusi sosial membawa manfaat bagi seluruh masyarakat.

Pendidikan kewarganegaraan di sekolah merupakan salah satu instrument ideologis bagi integrasi sosial. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang membentuk karakter kebangsaan bagi masyarakat. Dalam kasus Indonesia, pendidikan kewarganegaraan telah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan Indonesia namun seringkali hanya menjadi ritual ideologis yang tidak memiliki fungsi sosial. Karakter yang diciptakan oleh pendidikan kewarganegaraan seharusnya berdasarkan pada kebutuhan dari system sosial agar pendidikan ini dapat member manfaat langsung dalam kehidupan bernegara. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian secara berkelanjutan dalam pendidikan kewarganegaraan agar pendidikan kewarganegaraan mampu membangun karakter kebangsaan yang dapat bersaing dan beradaptasi dengan perubahan sosial.

Paradigma fungsionalis yang digunakan oleh peneliti, sesuai dengan paradigma fungsionalis yang dijelaskan oleh Parsons, dimaksudkan untuk membantu peneliti untuk dapat memandang permasalahan penelitian secara menyeluruh. Dalam paradigma ini, peneliti dapat melihat keseluruhan problem sosial melalui teori tindakan sosial. Teori tindakan sosial digunakan oleh peneliti untuk melihat struktur sosial dan sitem sosial secara menyeluruh dan secara khusus memfokuskan perhatian pada pendidikan sebagai salah satu bagian dari sistem sosial.

Paradigma fungsionalis melihat sistem pendidikan sebagai sistem yang adil, dan sebagai alat untuk mempersiapkan individu berperan dalam masyarakat sesuai dengan kemampuan mereka. Talcott Parsons melihat ruang kelas sekolah sebagai mikrokosmos atau gambaran kecil dari masyarakat. Sekolah adalah jembatan antara keluarga dan masyarakat yang lebih luas. Pendidikan berguna untuk mengenalkan anak untuk peran sosial dalam kehidupan orang dewasa.

Menurut paradigma Fungsionalisme Talcott Parsons, individu berinteraksi satu sama lain melalui media struktur sosial. Mereka menerima standar umum evaluasi, yang standar-standar moral atau 'norma' yang mereka peroleh dari sistem sosial. Proses sosiologis ini berguna untuk

menjaga struktur, dan memastikan stabilitas melalui kepatuhan terhadap norma-norma. Hal ini disebut 'Strukturalis-fungsionalis' pendekatan untuk analisis sistem sosial.

Oleh karena itu, Parsons melihat pendidikan sebagai bagian dalam fungsi penjagaan pola atau *latency* yang nantinya akan mendorong motif integrasi sosial. Peneliti menyimpulkan bahwa melalui pendidikan, individu disosialisasikan untuk menyesuaikan diri dengan sistem sosial. Dan bukan hanya itu, setiap individu juga harus memberikan kontribusi terhadap sistem sosial. Sebagai tindakan yang bersifat laten, pendidikan juga dapat mendukung "bagian penting" dari sistem sosial yaitu ekonomi masyarakat dengan:

- ❖ Menanamkan keterampilan teknis tertentu dan persyaratan.
- ❖ Memisahkan pekerja potensial untuk tempat yang berbeda dalam pasar tenaga kerja.

Kedua poin di atas merupakan sebagian dari peran penting pendidikan sebagai medium integrasi sosial. Pendidikan memiliki peran vital bagi masyarakat untuk mendapatkan fungsi dalam sistem sosial. Melalui pendidikan, orang dapat mengenali kemampuannya dan meningkatkan kemampuannya agar ia dapat berkontribusi pada sistem sosial. Integrasi *imperative* ini diciptakan melalui sekolah. Kedua poin tersebut juga terdapat pada teori *human capital* ataupun pandangan mengenai pengembangan sumber daya manusia.

Mengenai integrasi "imperatif" sekolah, integrasi *imperative* ini muncul melalui internalisasi nilai-nilai sosial dan norma pada tingkat tidak dapat dicapai oleh keluarga. Sebagai contoh, dalam pendidikan sekolah dasar Amerika mengajarkan kaum muda Amerika nilai wajar persaingan. "Ini mencakup, pengakuan bahwa adil jika kita memberikan penghargaan yang berbeda untuk berbagai tingkat pencapaian, asalkan ada akses yang sama untuk mendapatkan kesempatan. Kaum fungsionalis mempertahankan pendapat bahwa selalu ada kesetaraan kesempatan dalam sistem pendidikan. Pendapat kaum fungsionalis tersebut disarikan dalam kutipan berikut:

Selama anak dapat menerima tujuan Sistem sekolah dengan mendapatkan nilai yang baik, yang merupakan salah satu bentuk keberhasilan situasional umum. Ini adalah titik di mana banyak sekali faktor motivasi mungkin saling bertemu. Satu anak mungkin menjadi sangat tertarik pada subjek-materi tertentu yang ia pelajari sendiri, yang lain lebih tertarik untuk menyenangkan guru, anak yang ketiga melebihi teman-teman sekelasnya. Tapi perbedaan motivasi ini merupakan gambaran umum dari perilaku aktual, yaitu perjuangan menentukan tanda atau identitas. Ini meng-gambarkan bagaimana sistem sosial beroperasi untuk mensosialisasikan orientasi kepribadian yang berbeda sehingga meskipun kepribadian dasar mereka berbeda, mereka mungkin tetap memenuhi set yang sama dari tujuan yang sama... (Parsons,1991;163).

Fungsionalisme dapat menjelaskan hubungan antara pendidikan dan ekonomi sebagai kesatuan dalam sistem sosial. Ekonomi merupakan motif sekaligus bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial yang dapat mempertahankan dan memajukan sistem sosial. Sebuah sistem pendidikan yang rusak akan menjadi salah penyebab bagi individu yang tak mampu mendapatkan peran yang tepat dalam sistem sosial. Hilangnya individu dalam suatu fungsi menyebabkan inefisiensi dalam sistem sosial. Inefisiensi ini kemudian muncul dalam berbagai problem sosial yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah pengangguran di suatu negara.

Argumentasi ini merupakan dasar untuk melawan elitisme dalam pendidikan demi mencapai sebuah sistem komprehensif. Dalam hubungannya dengan sistem pendidikan nasional kita, argumen ini memberikan beban tanggung jawab terhadap negara sebagai organisasi sosial politik untuk dapat memberikan pendidikan bagi masyarakatnya. Parsons mengklaim bahwa "Pendidikan adalah dasar untuk membuktikan kemampuan dan karenanya agen selektif untuk menempatkan orang dalam status yang berbeda sesuai dengan kapasitas mereka".

Dengan demikian, sistem pendidikan nasional kita yang sebenarnya sudah cukup baik tersebut diimplementasikan dengan baik, memperhatikan pandangan- pandangan fungsionalisme dalam pendidikan, serta mengikuti kaidah-kaidah dan filosofi pendidikan itu sendiri, maka upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam arti sesungguhnya dapat benar-benar terwujud, termasuk didalamnya dalam mengembangkan kualitas

sumber daya manusia di bidang industri kreatif melalui upaya rekonstruksi pemikiran pendidikan kecakapan hidup dalam pendidikan karakter melalui medium pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.

3) Dampak Kondisi Transisional terhadap Kualitas SDM

Sebagaimana yang telah diasumsikan pada pendahuluan penelitian disertasi ini, Indonesia menghadapi kondisi transisional yang terjadi dari dalam melalui demokratisasi reformasi dan dari luar melalui globalisasi. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kekinian sangat beragam namun memiliki ketersalinghubungan. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan peserta didik saat ini merupakan permasalahan khas peradaban modern yang terjadi di masyarakat yang majemuk meliputi ekonomi, politik, sosial identitas, budaya hingga sosio-psikologis. Berdasarkan temuan penelitian yang didapat dari penyelidikan bibliografis dan observasi lapangan melalui wawancara terhadap informan, peneliti mengklasifikasikan kondisi transisional yang dihadapi masyarakat di Indonesia dalam klasifikasi berikut.

Konsep demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warganegara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih; pemerintahan ini mendorong dan menjamin kemerdekaan berpendapat, berserikat, menegakkan “Rule of Law”, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak minoritas dan masyarakat yang warganegaranya saling memberi perlakuan yang sama. Pemahaman konseptual terhadap demokrasi ini merujuk pada pendapat Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam konsep tersebut rakyat merupakan sentral yang memiliki kedaulatan. Sedangkan pemerintah merupakan perwakilan dari kedaulatan rakyat yang dipilih oleh rakyat.

Namun pada kenyataannya konsep ini secara praksis sering dimanipulasi oleh para penguasa totalitarian dengan hanya mencantumkan kata demokrasi pada alat politiknya. Di Indonesia, demokrasi secara konseptual telah berevolusi berkali-kali sejak awal berdirinya negara ini hingga saat ini. Pada masa Orde Lama di pemerintahan Presiden Soekarno, konsepsi demokrasi berganti-ganti setiap kali kepala pemerintahannya

mengalami pergantian. Indonesia pernah menjalani sistem demokrasi liberal, demokrasi terpimpin yang berkarakter semi diktatorial dan demokrasi Pancasila ala Orde Baru yang menggunakan pendekatan normatif dan koersif. Kini setelah berakhirnya masa Orde Baru, Indonesia ingin menyelenggarakan demokrasi yang substansial dan menjalankan filosofi Pancasila secara konsisten.

Pada praktiknya, proses demokratisasi di Indonesia mengalami banyak kendala. Demokratisasi malah melahirkan antitesanya sendiri yaitu Oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok elit sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan (Budimansyah, 2010; 6). Keadaan ini semakin jelas jika kita melihat konfigurasi pemerintahan di luar pulau Jawa. Dinamika demokrasi di tingkat lokal menghasilkan kontestasi elit-elit lokal, dinasti politik dan kerusuhan politik.

Hasilnya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Fenomena ini menandai sebuah krisis yang laten yaitu krisis legitimasi. Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tersebut menandai hilangnya panutan (*role model*) dan rontoknya nilai-nilai kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air. Salah satu fakta yang paling mencolok adalah meningkatnya jumlah golput pada setiap pemilihan umum baik di tingkat lokal maupun nasional.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat mengambil sikap sebagai mayoritas yang diam (*silent majority*) yang berpandangan apatis terhadap dinamika politik. Dampak dari gejala apatisisme yang ditunjukkan oleh fenomena ini sangat beragam. Dalam berbagai kasus apatisisme dapat muncul dari sikap yang pasif namun juga di pihak lain muncul dalam sikap yang aktif seperti tuntutan pemekaran daerah, separatisme, upaya mengganti konsep negara kesatuan dengan konsep lain seperti federalisme. Dalam konteks Indonesia, upaya-upaya ini telah terjadi pada kasus Gerakan Aceh Merdeka di Provinsi Aceh, Republik Maluku Selatan di Maluku, dan tuntutan-tuntutan politik lokal seperti pemekaran daerah.

Problematika politik dan demokratisasi di Indonesia menunjukkan fenomena terdusurnya nilai persatuan dan kesatuan yang selama ini dijaga oleh bangsa ini. Fenomena ini berbanding lurus dengan problematika masyarakat majemuk yang dijelaskan sebelumnya. Meskipun dalam skala

yang sangat beragam, problematika ini tetap menjadi tanggung jawab negara secara umum dan masyarakat secara khusus untuk menanggulangnya. Oleh karena itu, pendidikan sebagai medium integrasi sosial harus bekerja secara efektif untuk kembali mentransmisikan nilai-nilai kebangsaan.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang vital dalam mentransmisikan nilai-nilai kebangsaan. Penggalan terhadap nilai-nilai Pancasila terutama pada sila ke-3 yaitu “Persatuan Indonesia”. Pendalaman dan pemahaman terhadap sila ini merupakan sentral dari upaya menanggulangi problematika politik dan demokratisasi di Indonesia. Sedangkan sila keempat dari Pancasila yang mengisyaratkan sistem demokrasi perwakilan yang berlandaskan pada musyawarah dan mufakat menjadi landasan bagi pemahaman tentang proses demokratisasi yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.

4) Transisi Globalisasi

Sebagai fenomena yang mendunia, globalisasi menyimpan problematika sendiri di dalamnya. Globalisasi sebagai aktifitas ekonomi juga tak hanya berbicara soal investasi, teknologi dan modal secara parsial atau terpisah namun juga secara keseluruhan menyangkut masalah pasar tenaga kerja, angkatan kerja dan kebutuhan lapangan kerja. Globalisasi membuka peluang bagi semua orang untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja melalui kualitas yang dimiliki oleh masing-masing individu. Hal ini menempatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah negara menjadi aspek yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi negara tersebut karena melalui sumber daya manusia yang berkualitas, kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi negara dapat tercapai.

Pasar tenaga kerja, meskipun menyediakan peluang namun jelas membutuhkan perhatian yang khusus karena secara spesifik mengandalkan kualitas dari sumber daya manusia tersebut. Perlu diperhatikan bahwa kualitas sumber daya manusia di setiap negara terdapat perbedaan tingkat dan jumlah. Perbedaan tersebut juga ditentukan oleh kemampuan ekonomi dari negara-negara tersebut selain sejarah peradabannya dan dinamika masyarakat yang membentuknya.

Negara maju yang telah lebih dahulu membangun kapasitas sumber daya manusia tentu tidak mengalami kesulitan untuk mengintegrasikan sumber daya manusianya ke dalam pasar tenaga kerja dunia. Berbeda halnya dengan negara berkembang yang masih baru memulai untuk mengintegrasikan sumber daya manusianya. Hal ini, menyebabkan ketimpangan dan menghasilkan dominasi berdasar sumber daya manusia. Sebagai contoh adalah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia sebagai pekerja profesional berbanding terbalik dengan jumlah tenaga kerja Indonesia yang dikirimkan ke luar negeri dengan spesifikasi rendah dan umumnya hanya menjadi pembantu rumah tangga (*helper*) atau buruh kasar (*labour*).

Persaingan ekonomi dan terbatasnya lapangan kerja dapat memunculkan permasalahan lain yaitu meningkatnya jumlah pengangguran karena kuantitas angkatan kerja tidak dapat terserap oleh sektor-sektor ekonomi produktif yang masih terbatas atau memiliki perbedaan spesifikasi kebutuhan tenaga kerja. Tingginya jumlah pengangguran secara simultan mendorong peluang terjadinya berbagai problematika sosial dalam perilaku-perilaku menyimpang seperti kriminalitas dan permasalahan-permasalahan sosial lainnya yang mengancam kelangsungan sebuah sistem sosial. Hal ini disebabkan oleh ketimpangan ekonomi yang tajam di mana orang-orang yang menganggur memiliki kemampuan yang rendah dalam pemenuhan kebutuhannya.

Problematika ini secara umum merupakan tanggung jawab unit sosial terbesar dalam sistem sosial tersebut yaitu negara. Negara melalui berbagai instrumenya harus berupaya untuk menempatkan kembali individu-individu yang hilang dari sistem sosial tersebut ke dalam sistem sosialnya. Upaya tersebut membutuhkan evaluasi mendalam terhadap kebutuhan sistem sosial dan potensi sumber daya yang dimiliki hingga medium apa yang dapat meningkatkan potensi sumber daya manusia yang ada.

Peningkatan potensi sumber daya manusia tersebut dapat disejajarkan dengan pengembangan sumber daya manusia. Dalam konteks ini paradigma fungsionalis memandang bahwa institusi pendidikan merupakan media yang sangat vital dalam pengembangan sumber daya manusia dan integrasi sosial. Menurut paradigma ini integrasi sosial

dimungkinkan jika individu tersebut dapat berkontribusi dalam sistem sosialnya. Hal ini tidak dimungkinkan jika individu tersebut tidak mampu berkontribusi dalam sistem sosialnya.

Fenomena ini terjadi ketika individu tersebut tidak terserap oleh sektor ekonomi dan menjadi penganggur. Keadaan ini menjadi permasalahan ketika individu tersebut tidak dilengkapi dengan keahlian yang membuatnya tidak mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Hasilnya seringkali muncul dalam tindakan destruktif dan keputusan.

Oleh karena itu, penulis menganggap bahwa sebagai medium institusi pendidikan harus mampu mengembangkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam percaturan globalisasi. Pengembangan sumber daya yang mampu bersaing tidak hanya memerlukan kecakapan teknis namun juga memerlukan karakter yang mampu menaungi kecakapan teknis dan non teknis. Karakter tersebut haruslah sesuai dengan sistem sosial masyarakat Indonesia dan mewakili nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia karena tanpa karakter yang merepresentasikan identitas kebangsaan individu-individu tersebut akan kalah dalam percaturan globalisasi. Seperti yang dinyatakan oleh Prof Dasim Budimansyah mengenai pentingnya membangun karakter bangsa pada kutipan berikut;

“Pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah kebutuhan asasi dalam proses pembangunan karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang akan dapat bersaing dalam percaturan global dan oleh karenanya akan eksis di muka bumi ini” (Budimansyah, 2010;2).

Pernyataan tersebut mampu mensintesisasikan penjabaran mengenai problematika sosial yang dihadapi oleh masyarakat sekaligus memberikan arah bagi tindakan yang dibutuhkan untuk menghadapi globalisasi. Hal ini juga telah diisyaratkan oleh semangat para pendahulu bangsa di masa perjuangan kemerdekaan. Melalui semangat, keyakinan dan pengorbanan mereka kemerdekaan dapat diwujudkan di Indonesia.

Sejarah telah membuktikan bahwa perjuangan mereka tidaklah sia-sia, bukan hanya berhasil memerdekakan bangsa ini namun juga mampu membentuk sebuah negara modern. Warisan terbesar dari generasi ini bukan lain adalah pengangkatan tertinggi nilai-nilai yang telah ada di masyarakat

Indonesia yang disintesakan dalam filosofi negara yaitu Pancasila. Filosofi inilah yang menjadi arwah pendidikan kewarganegaraan. oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan memiliki posisi yang sangat vital dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia dengan mentransmisikan nilai-nilai dan filosofi bangsa yang majemuk ini.

Kondisi Transisional Indonesia Saat ini

Sumber daya alam dan industri Indonesia saat ini termasuk negara yang sangat kaya oleh sumber daya alamnya, terutama tambang dan migas. Namun dibalik kekayaan tersebut, justru belum memberikan dampak kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Bukan dikarenakan kaya akan sumber daya alam, tetapi belum dioptimalisasikan untuk rakyat Indonesia, justru kekayaan tersebut disalah-gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Eksploitasi sumber daya alam yang dimulai bersamaan dengan berdirinya republik ini ternyata tak pernah bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik. Pemerintah sepertinya cukup puas dengan perolehan keuntungan yang sangat kecil bahkan amat sangat tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan asing. Pemasukan sektor tambang ke kas negara pun setiap tahunnya hanya berkisar 3-4 persen. Sebuah angka yang lebih kecil dibandingkan dengan biaya sosial dan biaya lingkungan yang harus ditanggung rakyat.

Dilihat dari segi militer pun saat ini kondisi Indonesia masih lemah. Kenyataannya ketika muncul banyak kasus tentang pengklaiman wilayah Indonesia, menunjukkan bahwa kekuatan militer Indonesia tidak di takuti oleh negara lain. Pengamanan wilayah Indonesia juga masih sangat minim. Ini dapat dikarenakan peralatan militer Indonesia yang tertinggal jauh oleh negara-negara lainnya.

Dilihat dari aspek penduduk dan karakter nasional, kondisi Indonesia saat ini mestinya berkembang pesat. Seperti halnya negara-negara yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak di dunia, contohnya China, India, dan Amerika Serikat. Indonesia tertinggal jauh oleh negara-negara tersebut. Ini dapat di karenakan oleh penyebaran penduduk yang tidak merata serta rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Jumlah total penduduk Indonesia per 30 Juni 2020 sebanyak

adalah 268.583.016 jiwa, menempatkan Indonesia sebagai negara keempat terbesar setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Sekitar 60 persen di antaranya tinggal di pulau Jawa, pulau yang paling padat penduduknya dengan tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2015 adalah 134 jiwa per kilometer per-segi. Dengan kepadatan yang tidak merata seperti itu, maka tidak heran kemajuan Indonesia makin terhambat. Ditambah lagi dengan sumber daya manusia yang terbatas. Dapat dilihat dari sektor pendidikan, di mana minimnya penduduk yang mengenyam pendidikan. Entah dari mahalnnya sekolah itu sendiri sehingga hanya masyarakat tertentu yang dapat menikmatinya, khususnya sampai tingkat pendidikan tinggi, atau karena rendahnya kemauan penduduk untuk meneruskan pendidikan. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 berbunyi “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Bahkan Prof. Dr. Deliar Noer, seorang pakar ilmu politik dan pendidikan mengatakan bahwa “pendidikan bukan hanya amanat UUD’ 45, tapi amanat kemanusiaan...”. Maka dapat dikatakan bahwa pengaruh pendidikan dalam memajukan kualitas bangsa sangatlah besar.

Jika kondisi transisional tersebut tetap kita biarkan seperti ini bukan tidak mustahil kita hanya akan menjadi “bangsa penonton” saja yang menyaksikan kehebatan dan kemajuan bangsa-bangsa lain di dunia tanpa dapat berbuat banyak, kita semua tentunya tidak ingin hal tersebut terjadi, sehingga sebagai bangsa yang besar kita tidak boleh terjerumus dalam kondisi transisional yang berkepanjangan, karena hal ini sangat berdampak buruk bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Upaya rekonstruksi pemikiran pendidikan kecakapan hidup dalam pendidikan karakter untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia di bidang industri kreatif adalah salah satu jalan ke luar yang dapat dijadikan pilihan.

Industri kreatif sebagai alternatif pemecahan masalah atas minimnya ketersediaan lapangan kerja

Tidak seimbangnnya jumlah angkatan kerja dengan lapangan kerja yang ada merupakan masalah klasik yang sangat sulit untuk dipecahkan hampir setiap negara di dunia, bahkan dalam kajian ilmu ekonomi,

masalah ini masuk dalam kajian ekonomi murni atau ekonomi makro yang menjadi tugas negara untuk menyelesaikannya. Pada umumnya masalah pengangguran selalu dikaitkan dengan angkatan kerja yang baru saja masuk pada usia angkatan kerja. Sehingga pengangguran selalu tidak bisa lepas dari problematika bagi usia produktif yang merupakan potensi sumber daya manusia yang kreatif. “Kreativitas muncul apabila seseorang berkata, mengerjakan, dan membuat sesuatu yang baru, baik dalam pengertian menciptakan sesuatu dari tang tadinya tidak ada maupun dalam pengertian memberikan karakterbaru pada sesuatu”. (Suryana, 2013:21). *It occurs whenever a person says, does or makes something that is new, either in the sense of “something or nothing” or in the sense of “goving an new character to something”* (Howkins 2001 : ix)

Alvin Toffler dalam teorinya menyatakan bahwa gelombang peradaban manusia itu dibagi menjadi tiga gelombang. Gelombang pertama adalah abad pertanian. Gelombang kedua adalah abad industri dan gelombang ketiga adalah abad informasi. Sementara ini Toffler baru berhenti disini. Namun teori-teori terus berkembang, saat ini peradaban manusia dengan kompetisi yang ganas dan globalisasi, masuklah manusia pada era peradaban baru yaitu Gelombang ke-4. Ada yang menyebutnya sebagai *Knowledge-based Economy* ada pula yang menyebutnya sebagai ekonomi berorientasi pada Kreativitas (Nenny, 2008) Definisi industri kratif sendiri menurut Departemen Perdagangan pada studi pemetaan industri kreatif tahun 2007 dalam buku Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025 (2008) adalah: “Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.”

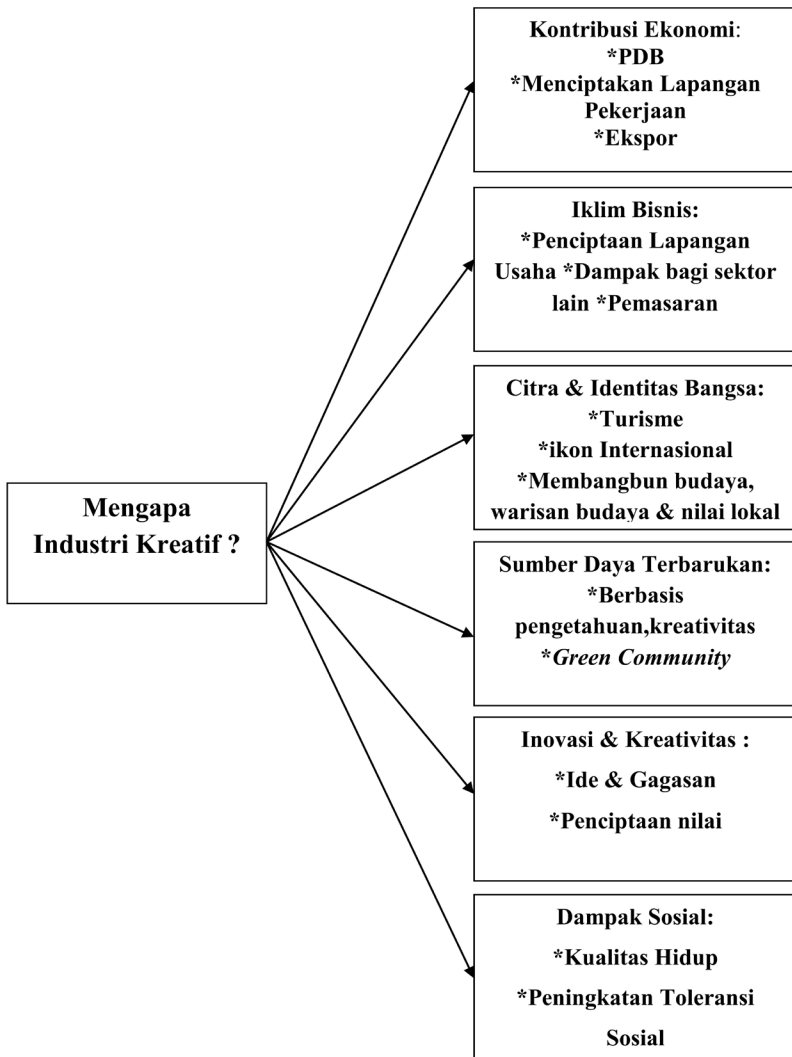
Saat ini kita dan dunia tengah memasuki era industri gelombang keempat, yaitu industri kreatif (*creative industry*), usaha dibidang industri kreatif diprediksi akan menjadi industri masa depan sebagai *fourth wave industry* (industri gelombang keempat), yang menekankan pada gagasan dan ide kreatif, hal ini bukan tanpa alasan, mengingat industri kreatif telah mampu mengikat pasar dunia dengan jutaan kreativitas dan persepsi yang dapat dijual secara global. Studi pemetaan industri kreatif yang telah dilakukan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia

tahun 2007 juga menggunakan acuan definisi industri kreatif yang sama, sehingga industri kreatif di Indonesia dapat didefinisikan sebagai berikut : “Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk penciptaan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut”. Industri kreatif adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ekonomi kreatif. Indonesia menyadari bahwa ekonomi kreatif, yang berfokus pada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual adalah harapan bagi ekonomi Indonesia untuk bangkit, bersaing dan meraih keunggulan dalam ekonomi global.

Pertumbuhan laju industri merupakan andalan pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian di Indonesia. Perekonomian di Indonesia tidak akan berkembang tanpa dukungan dari peningkatan perindustrian sebagai salah satu sektor perekonomian yang sangat dominan di jaman sekarang. Menurut Departemen Perdagangan (2008) Industri kreatif di berbagai negara di dunia saat ini diyakini dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian bangsanya secara signifikan. Banyak studi telah dilakukan untuk melihat perkembangan serta kiprah sektor industri kreatif dalam perekonomian di dunia. Indonesia pun mulai melihat bahwa sektor industri kreatif ini merupakan sektor industri yang potensial untuk dikembangkan, karena jika dilihat dari sumber daya yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia, kreativitas masyarakat Indonesia dapat disejajarkan dengan bangsabangsa lainnya di dunia.

“Sumbangsih sektor industri kreatif bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan citra bangsa. Tradisi dan kearifan lokal yang diangkat menjadi karya kreatif merupakan modal peningkatan kualitas hidup. Banyaknya orang-orang kreatif berprestasi hebat di tingkat nasional dan internasional menjadi modal peningkatan citra bangsa. Pemerintah akan terus mendorong terciptanya lebih banyak tempat dan ruang untuk berkreasi dan berekspresi, serta melakukan penguatan kelembagaan dan harmonisasi kebijakan,” (Laksono, Agung, 2012)

Menyadari posisi strategis industri kreatif pada era ekonomi kreatif, Presiden RI menyambutnya dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Salah satu bidang industri kreatif di Indonesia yang menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar adalah kerajinan. Kelompok industri kerajinan menyumbang sebesar 27,72% dari total PDB, atau terbesar kedua setelah kelompok industri fesyen sebesar 44,18% (Ellya, 2008). Di atas kertas, inilah era bagi industri kerajinan tanah air yang sebagian besar tersebar di berbagai daerah. Seharusnya era ini menjadi momentum peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun juga harus diingat pula bahwa tingginya persaingan para pelaku industri kreatif hendaknya jangan hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan utilitas semata. Sebagai contoh, pada bidang arsitektur yang dijual bukan sekedar pemenuhan kebutuhan akan hunian, tetapi lebih pada upaya menghadirkan sensasi terhadap artistik ruang, kenyamanan, gengsi dan cerita di balik suatu bangunan. Pada bidang fesyen yang dijual adalah gengsi, citra dan gaya hidup. Hal-hal seperti kepuasan batin, edukasi, kelucuan, ketakutan, romantisme, semangat, gengsi, kenikmatan visual, rasa petualangan dan cerita adalah hal-hal yang ditawarkan oleh industri kreatif di samping pemenuhan fungsi utilitas suatu produk barang / jasa. Pada bidang kerajinan, konsumen mencari keunikan. Baik dari segi bahan, teknik pengerjaan, atau filosofi cerita di balik produk. Dengan demikian “pengrajin tidak hanya perlu mengeksplorasi desain, tapi juga perlu mengemas proses produksi sedemikian rupa agar cerita di balik pembuatan produk dapat pula dipasarkan”. (Ellya, 2008).



Sumber : Kementerian Perdagangan RI, 2008

Gambar 7.4
Dampak Positif Industri Kreatif

Gambar diatas menggambarkan dampak positif yang dapat dihasilkan dengan terbentuknya ekonomi kreatif, hal ini sangat jelas menunjukan bahwa Industri kreatif adalah merupakan pilar utama dalam

pembentukan ekonomi kreatif dan ini sangat penting bagi Indonesia karena diyakini ekonomi kreatif akan memberikan dampak positif bagi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ekonomi Kreatif dimana industri kreatif merupakan salah satu bagian terpentingnya merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan *stock of knowledge* dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Howkins (2001) dalam bukunya *The Creative Economy* menemukan kehadiran gelombang Ekonomi Kreatif setelah menyadari pertama kali pada tahun 1996, ekspor karya hak cipta Amerika Serikat mempunyai nilai penjualan sebesar 60,18 miliar dollar AS jauh melampaui ekspor sektor lainnya seperti otomotif, pertanian, dan pesawat.

“Sumbangsih sektor industri kreatif di Indonesia terhadap PDB nominal tahun 2010 adalah Rp468 triliun dengan pertumbuhan 6,03%. Untuk tenaga kerja, industri kreatif menyerap 8,6 juta orang atau 7,9% dari tenaga kerja Indonesia, dan merupakan sektor kelima terbesar setelah pertanian, kehutanan, perikanan dan peternakan; perdagangan, hotel, dan restoran; jasa kemasyarakatan; dan industri pengolahan. Pada 2010, sumbangan terhadap ekspor barang dan jasa sebesar Rp. 131,3 triliun. Sumbangsih terbesar berasal dari kriya/kerajinan dan fesyen.” (Pangestu, Maria, 2012)

Dapat juga dikatakan, industri kreatif adalah manifestasi dari semangat bertahan hidup yang sangat penting bagi negara-negara maju dan juga menawarkan peluang yang sama untuk negara-negara berkembang. Pesan besar yang ditawarkan industri kreatif adalah pemanfaatan cadangan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tak terbatas, yaitu ide, talenta dan kreativitas. Negara-negara membangun kompetensi industri kreatif dengan caranya masing-masing sesuai dengan kemampuan yang ada pada negara tersebut. Ada beberapa arah dari pengembangan industri kreatif ini, seperti pengembangan yang lebih menitikberatkan pada industri berbasis: (1) lapangan usaha kreatif dan budaya (*creative cultural industry*); (2) lapangan usaha kreatif (*creative industry*), atau (3) Hak Kekayaan Intelektual seperti hak cipta (*copyright industry*). (Kementerian Perdagangan RI, 2008 :1)

Dengan melihat 16 subsektor ekonomi kreatif yang ada di Indonesia, peserta didik dan atau lulusan-lulusan perguruan tinggi bahkan dalam sektor tertentu lulusan sekolah menengah kejuruan yang dapat dikatakan bahwa mereka sebagai representasi manusia kreatif seharusnya mampu menangkap peluang ini menjadi usaha yang sustain di masa depan. Perguruan tinggi sebagai *Center of Excelent* harus mampu menjadi pusat-pusat pengembangan industri kreatif. Misalnya tentang pengembangan subsektor layanan komputer dan piranti lunak dapat dipastikan bahwa SDM yang akan terlibat dalam industri ini adalah para peserta didik yang ada di kampus. Selain itu peserta didik atau lulusan perguruan tinggi seharusnya juga dapat berperan dan mengambil bagian terhadap berkembangnya tiga kontributor terbesar PDB ekonomi kreatif Indonesia, yaitu subsektor kuliner sebanyak 41 persen, fashion 17 persen, dan kriya sekitar 14,9 persen. Ketiga sektor ini juga merupakan penyumbang ekspor teratas. Fashion sekitar 60 persen, kriya 32 persen, dan kuliner sebesar 6 persen, selain itu ada tiga subsektor prioritas yang memiliki potensi ke depan, yaitu subsektor film, musik, serta aplikasi dan game, (sumber : <https://beritasatu.com/ekonomi/670957/> sumbangan 17 Subsektor Ekonomi Kreatif pada PDB), 7 Januari 2021. Dengan bergerak aktifnya komponen peserta didik atau lulusan perguruan tinggi dalam berkreatifitas (mengembangkan sektor industri kreatif) setidaknya dapat menjamin berkurangnya masalah pengangguran di Indonesia.

Pendidikan Kecakapan Hidup dan Pendidikan Karakter Pada Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaran

a. Pendidikan Kecakapan Hidup dalam Pengembangan SDM

Upaya peningkatan mutu pendidikan yang selama ini dilakukan nampaknya belum mampu memecahkan masalah dasar pendidikan di Indonesia. Padahal pendidikan yang bermutu merupakan prasyarat untuk memasuki era globalisasi yang membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas secara fisik dan mental sebagai modal dasar yang kokoh bagi pembangunan suatu bangsa. Untuk maksud-maksud tersebut, maka pendidikan perlu dikembalikan kepada prinsip dasarnya, yaitu untuk memanusiakan manusia (humanisasi). Pendidikan harus dapat

mengembangkan potensi dasar peserta didik agar berani menghadapi problema yang dihadapi tanpa rasa tertekan, sadar dan senang meningkatkan fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi, mencintai Tuhan Yang Maha Esa, dirinya sendiri terpelihara secara fisik dan mental, senantiasa meningkatkan hubungannya dengan masyarakat dan lingkungannya.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya sekedar hanya meningkatkan pengetahuan yang tidak bermakna, tetapi harus fungsional dan jelas memberikan manfaat bagi peserta didik, dalam rangka menghadapi dan merasakan kehidupan di masa akan datang. Berdasarkan fakta dan kenyataan serta tantangan di era ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini maka pendidikan harus dikembalikan pada fitrahnya sehingga melalui pembelajaran dengan pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) diharapkan mampu mempercepat terjadinya reformasi pendidikan, dari pendidikan yang verbalistik berorientasi *subject matter* semata, menuju pada pendidikan yang lebih bermakna dan terbuka berorientasi *life skills*, sehingga *life skills* merupakan “Roh” atau “Spirit” untuk pengembangan infrastruktur pendidikan lainnya. Kebijakan ini sejalan dengan kesepakatan Dakar.

Kesepakatan Dakar yang terkait langsung dengan pembentukan kecakapan hidup (*life skills*) adalah, pertama, menjamin bahwa kebutuhan belajar semua anak muda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil pada program-program belajar dan keterampilan hidup yang sesuai. Kedua, memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulannya, sehingga hasil-hasil belajar yang diakui dan terukur dapat diraih oleh semua, terutama dalam keaksaraan, angka dan keterampilan hidup yang penting.

Pendidikan yang berorientasi *life skills* atau pendidikan kecakapan hidup, semua tuntutan tersebut terintegrasi dalam **kecakapan Generik** (*Psychosocial*) meliputi kecakapan sosial dan personal, antara lain berperilaku hidup sehat, kecakapan bekerja sama, kecakapan berkomunikasi, kecakapan berpikir secara kritis. **Kecakapan Spesifik** antara lain terdiri dari kecakapan akademik dan Vokasional, dan **Nilai-nilai Sikap** (*Value and Attitude*) antara lain terdiri dari disiplin, bertanggung jawab, respek terhadap orang lain yang targetnya adalah usia anak sekolah dan pemuda, sehingga pendidikan kecakapan hidup diharapkan mampu

membentuk peserta didik dengan berbagai keterampilan dan sikap dasar yang erat hubungannya dengan pengembangan pribadi yang peduli pada kesehatan baik fisik, mental maupun sosial serta *entrepreneurship*. Untuk itu pendekatan pendidikan kecakapan hidup perlu diberikan sedini mungkin, sehingga sikap dan tindakan ataupun perilaku yang berkarakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, maka pendidikan berorientasi pendidikan kecakapan hidup harus diberikan secara bertahap dan sistematis, yaitu dimulai dari peserta didik pada jenjang pendidikan terendah sampai dengan yang tertinggi, baik pada jalur pendidikan formal maupun non formal.

Dalam konteks pembelajaran dengan pendekatan pendidikan kecakapan hidup maka hal utama yang harus diperhatikan adalah menyangkut metode penyampaian materi pembelajaran.

Sebelum menerapkan suatu metode penyampaian materi pembelajaran, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut.

- ❖ Upayakan sebuah suasana yang aman dan nyaman - teknik *ice breaking*/ memecahkan suasana atau *mental blocked*.
- ❖ Jelaskan maksud dari sesi yang segera akan dimulai.
- ❖ Lakukan aktivitas yang telah direncanakan.
- ❖ Diskusikan atau lakukan ulasan/kajian ringkas mengenai proses yang telah terjadi dan pengalaman apa yang diperoleh.
- ❖ Minta umpan balik.
- ❖ Berikan penegasan pesan pada akhir sesi.

Metode pembelajaran/penyampaian suatu materi pada dasarnya menggunakan berbagai metode yang mungkin dapat digunakan (*multi method*), tetapi metode yang sebagian besar digunakan pada umumnya adalah sebagai berikut.

1) Ceramah (sekitar 15%)

Kegiatan ceramah pada dasarnya disampaikan kepada seluruh peserta didik, yang tujuannya adalah untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dalam bidang/materi tertentu. Ceramah terutama dimaksudkan untuk meluruskan pemahaman (*persepsi*) mengenai pengetahuan atau informasi tersebut. Pada kegiatan ceramah ini juga memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk mengajukan

tanggapan atau pertanyaan. Dalam memberikan ceramah guru tidak selalu berdiri di depan kelas, tetapi dapat dilakukan dengan berjalan menghampiri peserta didik dari yang terdekat ataupun yang terjauh dari tempat guru berdiri, serta mempunyai kontak mata dengan semua peserta didik.

- 2) Diskusi/Tanya Jawab (sekitar 20%)
Metode diskusi dan tanya jawab ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan luas bagi peserta didik untuk mengembangkan gagasannya secara lisan di samping untuk memecahkan masalah guna menambah wawasan dan memperluas pengetahuan serta pemahamannya atas suatu topik/pokok bahasan. Kegiatan diskusi terdiri atas diskusi kelas dan diskusi kelompok.
- 3) Bermain peran dan simulasi atau debat (sekitar 50%)
Metode ini berfungsi sebagai penumbuh spontanitas dan ekspresi serta mengembangkan daya analisa dan pengamatan peserta.
- 4) Penugasan (sekitar 15%)
Metode ini berfungsi sebagai upaya untuk memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memperdalam pemahaman dan kecakapan tentang hal-hal yang sedang maupun akan dibahas terutama yang menyangkut kebudayaan pola hidup sehat. Penugasan ini terkait erat dengan kegiatan/metode yang telah digunakan sebelumnya, yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab serta bermain peran dan simulasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pendidikan berorientasi kecakapan hidup (*life skills*). Penyampaian pembelajaran dengan pendidikan kecakapan hidup tersebut didasarkan pada konsep pembelajaran "*learning to know, learning to do, learning to be dan learning to live together with others with others.*" Pengembangan pendidikan kecakapan hidup yang dilandasi keempat konsep pembelajaran tersebut akan memberi dampak positif terhadap penanggulangan pengangguran dan kemiskinan serta pengembangan sumber daya manusia.

b. Pendidikan Karakter dalam Pengembangan SDM

Pendidikan karakter merupakan ujung tombak dari pendidikan karena pendidikan karakter memiliki kemampuan dan kewajiban untuk membentuk karakter masyarakat. Pada pembahasan sebelumnya di bab kedua, telah disebutkan bahwa pendidikan karakter memiliki cakupan yang lebih luas dari pendidikan moral meskipun seringkali disamakan dengan pendidikan moral. Lausnya cakupan tersebut disebabkan oleh jangkauan pendidikan karakter yang tidak hanya berkuat pada transmisi nilai secara didaktis namun juga menanamkan kebiasaan perilaku.

Pendidikan karakter juga berlaku pada dua konteks sekaligus yaitu konteks makro dan konteks mikro. Konteks tersebut dibagi melalui perbedaan cakupan dan konsentrasi pembelajaran. Pendidikan karakter sendiri merupakan unsur intrinsik yang cukup kompleks dalam sistem pendidikan karena harus menjadi bagian dari seluruh proses pendidikan.

Pada konteks kewarganegaraan, pendidikan karakter diharapkan membentuk lima karakter utama yaitu karakter individual, karakter privat karakter publik, karakter cerdas dan karakter baik. Karakter kelima berkaitan dengan perilaku ideal yang diharapkan tercakup dalam keempat karakter sebelumnya. Pendidikan moral merupakan bagian dari pendidikan karakter.

Jika dilihat pada konteks makro dan mikro yang dijelaskan oleh Prof. Dasim Budimansyah mengenai penguatan karakter, pengembangan pendidikan karakter bergantung pada dua proses yaitu intervensi dan habituasi. Kedua proses tersebut diharapkan menciptakan dampak instruksional dan dampak pengiring (*nuturant*). Permasalahan utama dalam kedua proses tersebut berada pada proses habituasi. Proses habituasi atau pembiasaan merupakan proses penciptaan aneka situasi dan kondisi yang berisi aneka penguatan yang memungkinkan peserta didik pada satuan pendidikannya, di rumahnya dan di lingkungan masyarakatnya membiasakan diri berperilaku sesuai nilai dan menjadikan perangkat nilai yang telah diinternalisasikan dan dipersonalisasikan melalui olah hati, olah pikir, olah raga, dan olah rasa dan karsa itu sebagai karakter atau watak. Karakter ini diharapkan muncul dalam keseharian tidak sebagai kaidah normatif namun sebagai karakter perilaku keseharian.

Proses habituasi bukanlah proses yang mudah untuk direncanakan, kenyataannya beberapa universitas atau institusi pendidikan lainnya masih terjebak dalam pola lama model pembelajaran konservatif. Dalam model pembelajaran konservatif, tidak ditemukan kerangka habituasi karena pendidikan karakter tidak dilakukan melalui proses ini melainkan hanya pada pendekatan normatif saja. Akhirnya pendidikan karakter tidak mampu mentransmisikan nilai dengan baik melainkan hanya menjadi wacana di kalangan akademisi saja.

Pada umumnya pola pendidikan karakter di perguruan tinggi masih menggunakan cara yang konservatif. Sekalipun terjadi pembaruan cara dengan ditambahkan media belajar, secara faktual proses yang terjadi masih berlangsung sama dengan setting yang berpusat pada dosen. Pada praktik pembelajaran model diskusi yang menempatkan peserta didik sebagai pemakalah yang mempresentasikan makalahnya secara substansial masih memiliki kecenderungan yang konservatif.

Meskipun dengan bantuan media pembelajaran seperti komputer, proyektor dan power point sebagai medium penyampaian presentasi makalah situasi di kelas jauh dari kesan interaktif. Peserta didik cenderung hanya membacakan power poin yang ia buat dari makalahnya tanpa improvisasi. Pertanyaan yang ke luar sesuai giliran pun sangat jarang. Sayangnya, kondisi ini tidak dicermati oleh dosen sebagai kesalahan praksis pembelajaran namun dibiarkan.

Kendala ini merupakan kendala umum dari seluruh proses belajar-mengajar yang terjadi di perguruan tinggi. Beberapa dosen memang telah mampu menerapkan pembelajaran yang interaktif namun jarak sosial yang cukup jauh antara dosen dan mahasiswa seringkali menghalangi peran pendidik sebagai role model bagi peserta didiknya. Selain itu, beberapa pengajar yang diwawancarai juga menjelaskan bahwa permasalahan eksternal ikut memengaruhi kesulitan dalam melakukan pendidikan karakter. Permasalahan eksternal tersebut telah dibahas dalam bagian sebelumnya yaitu pelbagai problematika yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia yang juga dihadapi oleh peserta didik sebagai warganegara Indonesia. Pengaruh eksternal dalam pendidikan karakter tidak dapat

diremehkan, terutama pada proses habituasi karena seberapapun luhur nilai yang diajarkan oleh pendidik melalui kurikulum yang tersedia akan melenyap jika nilai tersebut tidak dapat diaplikasikan pada keseharian.

Hal ini disebabkan oleh pentingnya pilar-pilar di luar proses belajar mengajar yang ikut membangun karakter peserta didik. Pada pengembangan strategi pendidikan karakter dalam konteks mikro telah disebutkan bahwa pilar pendidikan karakter adalah satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat. Ketiga pilar tersebut harus saling berhubungan dalam menciptakan karakter peserta didik.

Dalam proses intervensi, terutama pada pilar satuan pendidikan dapat dilakukan tanpa hambatan. Intervensi yang dilakukan oleh pilar satuan pendidikan memiliki batasan dan rancangan konseptual yang mapan dalam pendidikan karakter. Strategi tersebut dapat digunakan melalui perumusan tujuan pendidikan karakter melalui berbagai kegiatan sekolah baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Perancangan proses intervensi ini dapat dilakukan tanpa kendala namun kendala tetap muncul pada proses habituasi.

Proses habituasi dalam satuan pendidikan bertujuan untuk menciptakan terbiasanya perilaku yang berkarakter di sekolah. Namun proses ini memiliki rangkaian strategi yang cukup sulit untuk diimplementasikan. Strategi seperti keteladanan pendidik, budaya bersih, dan tradisi yang membangun karakter memerlukan peran seluruh komponen yang berada di satuan pendidikan tersebut.

Kurang efektifnya habituasi pada pilar satuan pendidikan menyebabkan kesulitan tambahan ketika pendidikan karakter diharapkan memasuki pilar keluarga. Pilar ini secara mikro sangat berpengaruh pada pendidikan karakter individu. Keluarga merupakan unit sosial utama dalam transmisi nilai dilihat dari daya jangkau dan relasinya dengan individu. Nilai-nilai yang ditransmisikan dalam keluarga kemudian dibawa oleh individu ke dalam lingkungannya di satuan pendidikan dan dalam lingkungan masyarakat. Pilar ini bisa menjadi penghubung habituasi yang dilakukan dalam satuan pendidikan dengan habituasi yang ada di masyarakat.

Proses habituasi dalam pilar keluarga tidak dapat dijangkau oleh proses habituasi di satuan pendidikan secara langsung. Peserta didik seringkali mengadopsi dua nilai dari keluarga dan satuan pendidikan secara bersamaan. Adopsi nilai tersebut perlu dimasukkan dalam proses pembelajaran dan menjadi tugas pendidik untuk menyesuainya. Nilai dalam pilar keluarga seorang individu dapat berbeda dengan individu lainnya bergantung pada status sosial keluarga, keyakinan yang dianut hingga budaya tradisional yang dimiliki oleh keluarga tersebut.

Pilar terakhir yang memiliki peran besar adalah pilar masyarakat. Pengembangan karakter pada pilar ini merupakan proses yang saling berkesinambungan yang saling terhubung antara masyarakat, satuan pendidikan, dan keluarga. Kemajemukan konfigurasi masyarakat Indonesia baik secara etnis, religi dan status sosial dapat menjadi kendala sekaligus potensi dalam pengembangan karakter di pilar masyarakat. Dalam konteks ini pengembangan pendidikan karakter di pilar masyarakat memerlukan nilai-nilai universal yang mampu diadopsi oleh berbagai identitas di masyarakat. Pengembangan karakter pada pilar masyarakat karena cakupannya yang luas dan melibatkan berbagai sektor harus melibatkan perencanaan yang lebih holistik di tingkat nasional.

Pada prinsipnya, karakter tidak dapat dikembangkan secara cepat dan segera terutama dalam konteks demokrasi nilai ataupun karakter harus dibentuk melalui afirmasi individu dan masyarakat. Karakter dibentuk melalui proses yang panjang dan sistemik agar meresap pada kebiasaan setiap individu yang akhirnya menjadi bagian dari karakter masyarakat. Pendidikan karakter tidak dapat berjalan efektif jika hanya diajarkan pada satuan pendidikan tingkat tinggi seperti universitas karena karakter individual peserta didik sudah terbentuk jauh sebelum ia memasuki perguruan tinggi.

Pembentukan karakter harus berkesinambungan dengan pendidikan yang didapatkan oleh peserta didik sejak usia dini. Pengembangan karakter harus melalui empat proses utama yaitu; proses pembiasaan, proses pemahaman dan penalaran nilai, proses penerapan dalam perilaku, dan proses pemaknaan. Berdasarkan kondisi tersebut, pendidikan karakter dikembangkan berdasarkan pada prinsip berikut; berkelanjutan, melalui

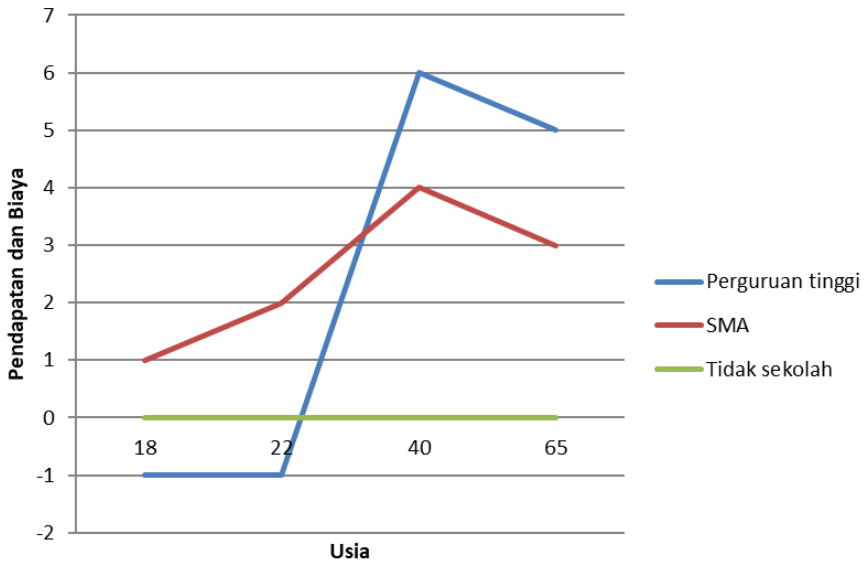
semua mata pelajaran, nilai tidak diajarkan tetapi dikembangkan, proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan (Budimansyah, 2010; 68).

Secara formal, keempat prinsip tersebut telah dilakukan. Namun, dalam pelaksanaannya proses habituasi merupakan proses yang paling sulit dengan berbagai kendala teknis dan non teknis pada proses pembelajaran. Proses intervensi secara formal dalam satuan pendidikan memang sudah dilakukan namun hanya sebatas di atas kertas. Pada praktiknya para pendidik mengalami kesulitan ketika menghadapi proses pembelajaran yang interaktif atau menempatkan peserta didik sebagai sentral aktifitas proses belajar mengajar. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh perilaku peserta didik dan faktor eksternal lainnya namun juga secara internal penerapan proses pembelajaran memerlukan proses habituasi dari pendidik itu sendiri.

Dalam konteks pengembangan SDM, kendala ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen pendidikan. Kelas harus dipahami memiliki fungsi yang lebih luas dari tempat proses belajar mengajar secara formal namun juga sebagai aktifitas dan medium proses habituasi. Pembentukan karakter dalam satuan pendidikan dimulai dari kelas-kelas tersebut. Pengembangan SDM dalam terminologi investasi human capital memiliki pengertian operasional adalah sejumlah dana yang dikeluarkan dan kesempatan memperoleh penghasilan selama proses investasi. Asumsinya adalah bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Investasi human capital pada dasarnya adalah investasi non fisik, biaya yang dikeluarkan tidak dapat dihitung melalui keuntungan langsung melainkan kesempatan yang diperoleh dan kesempatan yang ditinggalkan.

Pengembangan SDM dalam terminologi ini menuntut perhitungan nilai ekonomi secara ketat sehingga pendidikan dituntut untuk dapat beradaptasi dan ikut memperhitungkan resiko yang diterima oleh peserta didik. Misalnya dalam kalkulasi masa produktif dan masa non produktif di umur manusia. Jika pendidikan diasumsikan sebagai investasi maka, pendidikan memiliki kewajiban untuk memberikan tingkat balikan ekonomi yang seimbang. Keuntungan dalam bentuk kesempatan

peningkatan pendapatan dan biaya pendidikan dapat dijadikan sebagai variabel perhitungan pada investasi sumber daya manusia. Seperti digambarkan pada gambar berikut;



Sumber: Atmanti, 2005; 33.

Gambar 7.5

Keuntungan dan biaya jika melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

Dalam gambar di atas, diterangkan perbandingan investasi pengembangan SDM pada tingkatan SMA dan perguruan tinggi berdasarkan usia produktif hingga usia non produktif. Biaya investasi pendidikan jika tidak melanjutkan ke perguruan tinggi tidak ada sehingga di awal usia produktif 18 tahun orang dapat langsung mencari pekerjaan dan mendapatkan penghasilan. Sedangkan jika melanjutkan pendidikan tinggi perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar setidaknya dalam waktu 4 tahun dan kehilangan kesempatan mendapatkan pekerjaan juga pendapatan. Namun setelah lulus perguruan tinggi kesempatan bertambah hingga mampu mendapatkan pekerjaan yang layak dan melampaui penghasilan lulusan SMA dan yang sederajat. Di usia non produktif, lulusan SMA dan yang sederajat mengalami penurunan pendapatan yang

tajam, sementara lulusan perguruan tinggi tidak. Berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam pengembangan SDM.

Perhitungan ekonomi dilakukan dalam pendidikan secara general ketika orang tua menyekolahkan anaknya. Dalam konteks pendidikan karakter yang diwadahi oleh pendidikan kewarganegaraan, pendidikan karakter merupakan bagian dari investasi non fisik pengembangan SDM dengan menciptakan karakter yang mampu mengoperasionalkan dan membimbing keahlian yang nantinya dimiliki melalui penguasaan keilmuan di bidang sains dan teknologi. Karakter dalam hal ini merupakan bagian non fisik yang menjadi fondasi pengembangan SDM.

Pembelajaran dalam pendidikan pancasila dan kewarganegaraan secara teoritis perlu dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dimensi-dimensi tersebut bersifat *konfluen* atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep dan moral. Pembelajaran tersebut diharapkan memiliki dampak instruksional dan dampak *nurturant*.

Strategi pembelajaran diberlakukan sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM yang diperlukan untuk menanggulangi problematika masyarakat yang terjadi saat ini. Pendidikan kewarganegaraan sebagai medium pendidikan karakter perlu mengadaptasi berbagai strategi yang lebih dinamis dan dibutuhkan oleh masyarakat. Pendidikan dengan metode konservatif harus ditinggalkan agar pendidikan karakter tidak lagi dianggap sebagai pendidikan normatif yang tidak memiliki dampak langsung bagi pengembangan sumber daya manusia.

Pada pembahasan sebelumnya dalam temuan bibliografis penelitian diketahui bahwa dalam konteks pengembangan SDM pendidikan karakter merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keahlian non teknis. Karakter yang dibutuhkan adalah karakter yang mampu bersaing dalam percaturan globalisasi oleh karenanya individu harus memiliki wawasan yang luas, kreatifitas dan kewaspadaan terhadap fenomena-fenomena yang berkembang saat ini.

Dalam pendidikan kewarganegaraan, peserta didik diajarkan mengenai nilai-nilai kebangsaan, filosofi Pancasila, ketatanegaraan dan demokrasi. Subjek-subjek pelajaran tersebut harus dapat ditransformasikan

dalam bentuk pembelajaran yang lebih interaktif. Dalam proses pembelajarannya, peserta didik perlu mengembangkan kemampuan analitis dan identifikasi terhadap subjek-subjek pelajaran tersebut melalui isu-isu yang berkembang di masyarakat.

Pembelajaran ini harus mengembangkan simulasi-simulasi praksis seperti simulasi parlemen dalam merumuskan kebijakan, simulasi survey dalam evaluasi kebijakan dan analisa isu kontemporer dan simulasi lainnya. Simulasi yang dilakukan harus menyentuh ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Simulasi pada ranah kognitif dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema dan membedakan praktik isu tersebut, ranah afektif dilaklkan dengan proses pemahaman dan meyakini nilai-nilai yang terkandung dalam subjek, sedangkan ranah psikomotorik dilakukan dengan penerapan pola hidup dan praktik keseharian. Apabila hal tersebut dapat diimplementasikan dengan baik maka peneliti yakin bahwa upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia dapat terwujud.

c. Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengembangan SDM

Kajian pada pendidikan kewarganegaraan sebagai medium bagi pendidikan karakter dan pendidikan kecakapan hidup, di mana pendidikan kecakapan hidup harus mampu diintegrasikan ke dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. integrasi tersebut dapat dilakuka dengan memodifikasi model pembelajaran dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Secara khusus, pendidikan kecakapan hidup dalam pendidikan kewarganegaraan dapat diarahkan pada pengembangan kecakapan hidup dalam praktik sebagai warganegara.

Pendidikan kewarganegaraan dapat mengadopsi model pendidikan demokratis di mana setiap peserta didik dapat menjadi peserta aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi dan tanya jawab. Kemampuan yang dapat dikembangkan dalam hal ini mencakup beberapa nilai spesifik yang perlu ditransmisikan. Nilai tersebut adalah falsafah negara yaitu Pancasila yang mampu membangun kecakapan mengenal diri dan kewaspadaan diri. Kecakapan ini kemudian diterjemahkan dalam kemampuan komunikasi melalui sikap yang saling menghargai dan menunjukkan empati dalam perdebatan, diskusi maupun pembahasan isu-isu kontemporer. Kemampuan

berpikir rasional juga dapat ditransmisikan melalui pembahasan isu kewarganegaraan kontemporer yang mengharuskan para peserta didik menggali dan memilih informasi yang dibutuhkan dalam pembahasan.

Proses pembelajaran merupakan medium utama dalam pendidikan karakter dan pendidikan kecakapan hidup. Proses pembelajaran merupakan proses dari habituasi karakter sekaligus intervensi dengan membentuk model dan tujuan pendidikan. Penyesuaian dalam proses tersebut mungkin hanya dapat dilihat secara parsial pada dampak instruktifnya saja namun jika kita meluaskan pandangan kita pada dampak berkelanjutannya (*nurturant effects*), penyesuaian tersebut dapat memberikan manfaat yang terus-menerus.

Keterhubungan antara pengembangan sumber daya manusia dengan pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian yang paling sulit untuk ditemukan dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan oleh literatur yang seringkali terpisah atau secara tegas memisahkan teori pengembangan SDM dengan kewarganegaraan dalam dua bidang studi yang berbeda. Pengembangan SDM cenderung diterjemahkan dalam sisi ekonomi bukan pada sisi sosialnya.

Dalam konteks ekonomi, pengembangan SDM dipandang dari tingkat profit yang dihasilkan. Sedangkan dalam konteks sosial, pengembangan SDM dipandang dari manfaat berkelanjutan yang dihasilkan. Dalam konteks sosial tersebutlah pendidikan secara umum ataupun pendidikan kewarganegaraan secara khusus berperan penting.

Dapat diakui bahwa pernyataan Smith tentang pengembangan SDM yang secara ringkas merupakan pengorbanan yang layak untuk mendapatkan pendapatan yang layak melibatkan kemampuan untuk mengeluarkan biaya dalam memerolehnya merupakan pernyataan yang tepat. Namun, jika dipertanyakan kembali mengenai fungsi dari pendapatan yang layak tentu akan kembali pada konteks sosial. Tingkat pendapat menentukan posisi sosial seseorang, ini merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Baik dalam penciptaan *profit* maupun penciptaan manfaat, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menempatkan seseorang dalam posisi sosial tertentu agar dapat berkontribusi pada sistem sosialnya.

Dalam konteks kewarganegaraan, kontribusi individu dalam sistem sosial menyangkut kontribusinya terhadap bangsa dan negara secara keseluruhan. Sebaik apapun SDM yang dimiliki oleh seorang individu

haruslah memberikan kontribusi pada sistem sosialnya yang dalam konteks ini adalah bangsa dan negara. Untuk memberikan kontribusi yang tepat, diperlukan perancangan tujuan pendidikan yang tepat yang mampu mengakomodasi realitas dan idealisasi tujuan pendidikan.

Pendidikan saat ini tidak hanya memiliki tujuan moral membebaskan seseorang dari ketidaktahuan namun juga memiliki tujuan ekonomi yaitu investasi keahlian untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang layak. Kedua tujuan ini menjadi bagian dari fungsi sosial pendidikan bagi individu dan masyarakat. Baik tujuan moral maupun tujuan ekonomi harus mampu dicapai oleh sistem pendidikan agar menjadi manfaat yang terus diterima oleh para peserta didik dan pada akhirnya mampu memberikan kontribusi bagi sistem sosial.

Dalam konteks ini, setiap mata pelajaran ataupun bidang keilmuan diharapkan mampu berkontribusi dan berfungsi saling melengkapi dalam pencapaian tujuan pendidikan, tidak terkecuali pendidikan kewarganegaraan. Pengembangan SDM merupakan proses kontributif yang berasal dari sistem sosial untuk pembangunan sistem sosial, yang dalam konteks ini adalah bangsa dan negara, sedangkan pendidikan adalah mediumnya.

Penulis menemukan beberapa argumnetasi baik dari literatur maupun temuan observasi mengenai peran pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan SDM. Manfaat pengetahuan kewarganegaraan pada pengembangan SDM. Secara konseptual, jelas bahwa pendidikan kewarganegaraan memberikan kontri-busi bagi pengembangan SDM, namun secara praktis berdasarkan temuan di lapangan pendapat yang bermunculan berlainan dengann idealisasi konseptualnya. Umumnya para peserta didik tidak merasakan dampak langsung dari pendidikan kewarganegaraan dan merasa bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak berkaitan dengan kecakapan hidup yang dibutuhkan dalam konteks ekonomi yang dibutuhkan oleh peserta didik.

Pendidikan kewarganegaraan dipandang sebagai pendidikan formal yang mengajarkan nilai-nilai normatif dan tidak berkaitan dengan kehidupan ekonomi. Bahkan dalam korelasinya dengan satu mata kuliah yang mengajarkan kecakapan hidup dalam bidang ekonomi kreatif yaitu mata kuliah kewirausahaan, pendidikan kewarganegaraan seringkali

dianggap tidak terhubung dengan mata kuliah ini. Padahal, dalam konteks pendidikan karakter terutama dalam hal pembentukan karakter bangsa semestinya terdapat ketersalinghubungan antara kedua pendidikan tersebut.

Stereotip seperti ini di kalangan mahasiswa ataupun peserta didik tentu saja tidak lahir tiba-tiba melainkan bagian dari dampak metode pembelajaran pada pendidikan kewarganegaraan sebelumnya. Perubahan paradigma dalam pendidikan kewarganegaraan seharusnya tidak hanya muncul dalam wacana namun juga pada praktik pembelajaran. Hal ini juga tidak mudah terutama bagi para pengajar yang terbiasa dengan metode pembelajaran lama yang menempatkan dirinya sebagai sentral pembelajaran.

Namun, untuk menguji peran pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan SDM, dapat dilihat dalam beberapa kriteria yang ada dalam teori *human capital* antara lain kriteria kesempatan yang dihasilkan dan kesempatan yang hilang. Pada kriteria ini, diperhitungkan kesempatan yang ditawarkan bagi para peserta didik dan untuk mendapatkan kesempatan tersebut diperlukan biaya tambahan. Kriteria ini biasanya muncul melalui perbaikan sistem pembelajaran ataupun pendidikan non formal di luar jam pelajaran seperti workshop, seminar, kuliah umum dan lainnya. Kegiatan-kegiatan pengembangan tersebut merupakan kegiatan yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian peserta didik. Perhitungan dalam kriteria ini melibatkan perhitungan ekonomi secara ketat seperti yang dicontohkan pada gambar 7.5.

Namun, hubungan tersebut akan segera terlihat jika kita menempatkan aktifitas ekonomi sebagai bagian dari aktifitas warganegara dan memahami sistem ekonomi yang dijalankan oleh negara. Sebagai pendidikan karakter yang membentuk karakter bangsa, pendidikan kewarganegaraan dalam hal ini berperan dalam mentransmisikan nilai kebangsaan dalam aktifitas ekonomi dan pendidikan. Pembahasan mengenai nilai ini dapat dilakukan melalui kelas dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan maupun secara tidak langsung melalui proses pelaksanaan kegiatan yang dimulai dengan mengangkat tema kebangsaan.

Selain itu, tema-tema dalam pembelajaran kewarganegaraan dapat dikaitkan dengan aktifitas ekonomi dan pendidikan secara khusus. Misalnya, pembelajaran mengenai sistem ekonomi yang dianut oleh negara dan pemahaman mengenai fungsi lembaga-lembaga negara. Sebagai calon

pelaku bisnis, pengetahuan mengenai negara, perundangan dan lembaga negara sangat dibutuhkan terutama ketika pelaku bisnis tersebut bekerja sama dengan pemerintah. Selain pengetahuan tersebut, pengetahuan mengenai wawasan nusantara atau geopolitik juga sangat penting untuk memahami teritorial negara.

Kriteria tingkat balikan ekonomi memperhitungkan berapa jumlah biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik dengan jumlah keuntungan balikan dari investasi biaya pendidikan. Berbeda dengan pendidikan lain yang bersifat teknis, pendidikan nilai dan pendidikan karakter dalam Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tingkat balikan ekonomi yang tergolong rendah. Tentu saja ini bukan masalah, karena pendidikan karakter mampu menunjang pendidikan lain dengan membentuk karakter aplikasi pengetahuannya. Pendidikan karakter tidak diorientasikan pada tingkat balikan ekonomi atau profit langsung melainkan pada benefit atau manfaat. Oleh karena itu, pendidikan karakter diharapkan menjadi pendidikan yang meresap dalam setiap nilai yang ada dalam pendidikan sebagai kontrol moral dan ideologis bagi aplikasi pendidikan secara teknis.

Pengembangan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

a. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

Nampaknya proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi masih terdapat satu keterbatasan yaitu pada kajian mengenai ekonomi Pancasila atau ekonomi yang sesuai dengan falsafah Pancasila. Keterbatasan tersebutlah yang membuat kebanyakan narasumber tidak memahami hubungan antara pendidikan kewarganegaraan dengan pengembangan sumber daya manusia..

Menyadari kelemahan dan berbagai kritikan tajam terhadap ilmu ekonomi dan globalisasi, penulis menganggap kajian ekonomi Pancasila sangat penting untuk dimasukkan sebagai bagian dari kajian dalam pendidikan kewarganegaraan. Bagian ini diharapkan mampu menghubungkan kasus-kasus ekonomi kontemporer dengan kasus-kasus kewarganegaraan kontemporer. Semakin eratnya dunia ekonomi dengan dunia politik pun dapat dijembatani oleh sub kajian ini.

Kajian ekonomi Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan tentu saja tidak ditempatkan dalam kerangka indoktrinasi. Kajian ini diarahkan pada pembentukan karakter ekonomi bangsa Indonesia. Dinamika globalisasi juga menunjukkan bahwa, sebuah sistem ekonomi bukanlah sistem yang universal. Keberhasilan China misalnya dalam melakukan proteksi pasar dan industrialisasi nasionalnya, menunjukkan bahwa tidak ada sistem ekonomi yang berlaku tunggal.

China menunjukkan keberhasilannya dengan menjadi salah satu negara ekonomi terkuat di dunia bahkan negara ini memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi di atas Amerika Serikat. Selain itu, kehidupan warganegaranyapun relatif tidak terjadi ketimpangan yang terlalu tajam. Sementara Amerika Serikat dan Uni Eropa mengalami krisis akibat ekonomi kompetisi dan spekulasinya. Bukan berarti peneliti mengusulkan kecondongan ke arah China namun keberhasilan negara ini patut dijadikan contoh.

China mampu menggali nilai yang sesuai dengan negaranya dan menerapkannya dalam kehidupan berwarganegara dan muncul dalam karakter ekonominya. Nasionalisme China pun mewarnai aktivitas ekonominya. Begitupun juga seharusnya Indonesia. Tentu terdapat perbedaan nilai namun yang dapat dijadikan pelajaran penting adalah bahwa para pendiri bangsa kita juga telah merumuskan falsafah bangsa yang dijadikan landasan prinsip ekonomi bangsa Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai ilmu terapan yang memiliki dimensi holistik sebagai katalisator penanaman nilai-nilai filosofi bangsa dan membentuk karakter kewarganegaraan merupakan sebuah disiplin ilmu yang ditanamkan di berbagai tingkat, jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia. Pemahaman Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan yang peneliti amati selama ini hanya terbatas pada memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara dalam tingkat pengetahuan saja. Sedangkan dalam tingkat aplikasi Pancasila tidak muncul sebagai nilai, inilah yang menurut peneliti menghalangi proses habituasi karakter warganegara yang sesuai dengan falsafah Pancasila.

Jika diamati lebih jauh dalam penyusunan kurikulum pendidikan kewarganegaraan juga terjadi berbagai perubahan sejak Orde Lama hingga masa reformasi. Perubahan politik seringkali mengakibatkan juga perubahan kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Padahal, seharusnya jika berbicara tentang kurikulum terutama kurikulum pendidikan

kewarganegaraan yang menciptakan karakter bangsa. Perubahan politik tidak boleh mengintervensi kurikulum. Memang pada kenyataannya kepentingan pendidikan dalam pencapaian tujuan politis berkaitan erat namun kepentingan bangsa dan negara tetap menjadi prioritas.

Masuknya kajian ekonomi Pancasila dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan seharusnya tidak lagi menjadi perdebatan politis dan kepentingan sesaat namun lebih kepada kepentingan nasional. Kepentingan ini berada pada penerapan dan penghayatan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dan keadilan sosial yang terpatri pada sila kelima Pancasila sebagai dasar negara. Dengan mengangkat kajian ekonomi Pancasila dan memasukkannya sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan memiliki kemampuan yang cukup dalam pembentukan karakter kebangsaan di bidang ekonomi dan mempersiapkan para penerus bangsa menghadapi dinamika globalisasi.

Untuk memasukkan kajian ekonomi Pancasila pada pendidikan kewarganegaraan, dibutuhkan pengembangan terhadap komponen-komponen kurikulum ekonomi Pancasila tersebut yang terdiri atas tujuan, isi, aktifitas dan evaluasi. Secara fungsional ekonomi Pancasila mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengenal berbagai kenyataan dan peristiwa ekonomi, memahami konsep dan memecahkan masalah ekonomi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dalam proses pembelajaran fungsi tersebut dapat ditransmisikan melalui model pembelajaran diskusi terpusat maupun diskusi kelompok dan melakukan simulasi pembahasan permasalahan ekonomi di masyarakat.

Dalam upaya mengintegrasikannya dengan kurikulum, kajian ekonomi Pancasila sebagai bahan kajian dalam pendidikan kewarganegaraan membutuhkan beberapa standar kompetensi yang dapat ditetapkan adalah sebagai berikut;

- 1) Kemampuan memahami fakta, konsep, dan generalisasi tentang sistem sosial dan budaya dan menerapkannya untuk:
 - a) Mengembangkan sikap kritis dalam situasi sosial yang timbul sebagai akibat perbedaan yang ada di masyarakat.
 - b) Menentukan sikap terhadap proses perkembangan dan perubahan sosial budaya.
 - c) Menghargai keanekaragaman sosial budaya dalam masyarakat multikultur.

- 2) Kemampuan memahami fakta, konsep, dan generalisasi tentang manusia, tempat, dan lingkungan dan menerapkannya untuk:
 - a) Menganalisis proses kejadian, interaksi dan saling ketergantungan antara gejala alam dan kehidupan di muka bumi dalam dimensi ruang dan waktu.
 - b) Terampil dalam memperoleh, mengolah, dan menyajikan informasi geografis.
- 3) Kemampuan memahami fakta, konsep, dan generalisasi tentang perilaku ekonomi dan kesejahteraan dan menerapkannya untuk:
 - a) Berperilaku yang rasional dan manusiawi dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi.
 - b) Menumbuhkan jiwa, sikap, dan perilaku kewirausahaan dengan semangat nasionalisme.
 - c) Menganalisis sistem informasi keuangan lembaga-lembaga ekonomi.
 - d) Terampil dalam praktik usaha ekonomi sendiri.
- 4) Kemampuan memahami fakta, konsep, dan generalisasi tentang waktu, keberlanjutan dan perubahan dan menerapkannya untuk:
 - a) Menganalisis keterkaitan antara manusia, waktu, tempat, dan kejadian.
 - b) Merekonstruksi masa lalu, memaknai masa kini, dan memprediksi masa depan.
 - c) Menghargai berbagai perbedaan serta keragaman sosial, kultural, agama, etnis, dan politik dalam masyarakat dari pengalaman belajar peristiwa sejarah.
- 5) Kemampuan memahami dan menginternalisasi sistem berbangsa dan bernegara dan menerapkannya untuk:
 - a) Mewujudkan persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 - b) Membiasakan untuk mematuhi norma, menegakkan hukum, dan menjalankan peraturan.
 - c) Berpartisipasi dalam mewujudkan masyarakat dan pemerintahan yang demokratis, menjunjung tinggi, melaksanakan, dan menghargai HAM. (Risno, 2010; 54-55).

Kenyataan saat ini bahwa mata kuliah kewirausahaan telah menjadi mata kuliah yang diajarkan secara umum di hampir semua perguruan tinggi. Namun, keterkaitan antara mata kuliah kewirausahaan dengan pendidikan kewarganegaraan hampir tidak ada. Meskipun pendidikan kewirausahaan mampu mengajarkan kecakapan hidup, namun kekurangan utamanya adalah permasalahan pembentukan karakter kebangsaan. Oleh karena itu, peran pembentukan karakter kebangsaan inilah yang menjadi tanggung jawab utama pendidikan kewarganegaraan. Dengan masuknya kajian ekonomi Pancasila, peneliti berharap bahwa pendidikan kewarganegaraan mampu memberikan pendidikan karakter terutama karakter kebangsaan pada peserta didik yang menjadi bekal bagi para peserta didik menghadapi mata kuliah lainnya. Karakter kebangsaan tersebut merupakan fondasi karakter para peserta didik.

Dalam konteks pendidikan kecakapan hidup, kajian ekonomi Pancasila juga mampu menjadi katalisator penting dalam pendidikan kewarganegaraan. Kecakapan hidup tentunya perlu ditempatkan dulu pada konteks pendidikan kewarganegaraan. Kecakapan hidup dalam pendidikan kewarganegaraan meliputi kemampuan menggali informasi, berfikir rasional, berkomunikasi dan membangaun kerjasam dapat ditransmisikan melalui simulasi-simulasi pembahasan ekonomi Pancasila.

Jika dikaitkan pada industri kreatif, pemahaman ekonomi Pancasila yang diintegrasikan pada pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu memberikan karakter penting dalam model industri kreatif. Industri kreatif dapat juga muncul dalam kewirausahaan atau *entepreneurship*. Ekonomi Pancasila dapat memberikan perbedaan karakter industri kreatif yang ada di Indonesia dengan karakter industri kreatif di negara lain melalui prinsip yang menjiwainya.

Industri kreatif dalam pandangan ekonomi Pancasila tentu harus berlandaskan pada prinsi kegotongroyongan dan keadilan sosial. Dalam hal ini, industri kreatif juga memiliki jiwa kepedulian sosial yang tinggi. Industri kreatif tersebut perlu dibekali watak sosial di dalamnya agar tidak menciptakan jarak baru dalam kehidupan sosial bangsa Indonesia.

Jiwa kreatif yang dipadu dengan kepedulian sosial yang tinggi inilah yang ingin terus direproduksi oleh pendidikan kewarganegaraan. Karakter seperti ini sangat penting untuk dijadikan contoh bagi para peserta didik

yang berminat pada kewirausahaan atau industri kreatif. Sayangnya hingga saat ini pendidikan kewarganegaraan belum berperan penting dalam pembentukan karakter ini. Pembentukan karakter ini seringkali terjadi secara terpisah melalui individu-individu yang memang memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap lingkungannya.

Agak berbeda dengan penelitian Sapriya (2007) yang menegaskan bahwa peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun karakter bangsa memiliki kedudukan yang sangat strategis, karena bidang ini memfokuskan proses pembelajaran pada perilaku individu warga negara dan proses pendidikan yang melibatkan tanggung jawab bersama secara sinergi antara keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah. Sedangkan Peneliti beranggapan bahwa apa yang disampaikan Sapriya masih harus dilengkapi dengan penegasan bahwa pembelajaran PPKn harus dilakukan dengan pendekatan pendidikan kecakapan hidup yang konsep dasarnya adalah meliputi: *Demokratisasi* yaitu mencakup penghargaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia termasuk hak-hak anak dan perempuan; *Tanggung jawab* yaitu baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain dan lingkungan; serta Tuhan yang Maha Kuasa; dan *Perlindungan* yaitu baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain dan lingkungan. Di mana sebagai konsekuensi logis dari konsep dasar di atas, maka pendidikan kecakapan hidup (*life skills education*) harus menerapkan metode pengajaran di mana para peserta didik akan belajar dalam situasi yang demokratis (pengembangan rasa percaya diri dan saling menghargai) dibandingkan dengan cara instruktif atau pendekatan komunikasi satu arah.

b. Pembatasan Kajian Ekonomi Pancasila

Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, kita harus menegaskan sementara ketidak sepakatan antara para ahli mengenai definisi ekonomi Pancasila. Dalam hal teknis keterampilan analisa ekonomi, pemahaman mengenai ekonomi Pancasila secara komprehensif setidaknya dapat diperdalam pada pendidikan ekonomi. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, peneliti mengusulkan beberapa pembatasan umum untuk memberikan pemahaman mendasar mengenai prinsip ekonomi Pancasila yang berlaku di Indonesia, yaitu;

1) Sejarah perkembangan ekonomi dunia

Sejarah perkembangan ekonomi secara ringkas perlu diberikan untuk memberikan pemahaman umum terhadap peserta didik bahwa pemikiran ekonomi dan sistem ekonomi di dunia terus mengalami perkembangan dan perubahan. Sejarah perkembangan ekonomi meliputi evolusi sistem ekonomi di dunia sejak sistem ekonomi pra merkantilisme, merkantilisme, liberalisme, sosialisme demokrasi, hingga Pancasila.

2) Sejarah pemikiran ekonomi Indonesia

Sejarah pemikiran ekonomi Indonesia merupakan bagian utama dalam sub kajian ekonomi Pancasila. Bagian ini merupakan dasar untuk memahami sistem ekonomi Pancasila dan prinsip-prinsip ekonomi Pancasila. Evolusi pemikiran para tokoh, perdebatan dan aplikasinya dari masa ke masa dapat menyediakan informasi yang cukup bagi peserta didik mengenai pembentukan konsep ekonomi Pancasila.

3) Prinsip-prinsip ekonomi Pancasila

Prinsip-prinsip ekonomi Pancasila merupakan ujung tombak pemahaman akan ekonomi Pancasila. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini perlu menemukan ruang aplikatif melalui contoh-contoh praktis dalam keseharian. Penggunaan metode pembelajaran yang interaktif dan melalui diskusi-diskusi mengenai problematika yang terjadi di sekitar penerapan prinsip ekonomi Pancasila dapat mendorong pemahaman yang lebih dalam terhadap Pancasila.

Ketiga pembatasan tersebut merupakan batasan umum yang diusulkan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian disertasi ini. Namun secara khusus bagian-bagian dari kajian ini memerlukan penggarapan yang serius baik secara filosofis maupun secara praktis dalam praktik pembelajaran. Peneliti beranggapan bahwa dengan hadirnya pembahasan mengenai ekonomi Pancasila, keterputusan hubungan antara pemahaman mengenai pola kehidupan ekonomi dengan pemahaman kewarganegaraan dapat kembali tersambung.

c. Praktik Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Perubahan terpenting dalam rekonstruksi pemikiran ini juga tidak hanya terjadi pada proses rekonseptualisasi pendidikan kewarganegaraan namun juga dalam hal praktik pembelajaran. Berdasarkan wawancara yang dilakukan selama observasi di Universitas Pasundan dan Komunitas NgaduIde di Kota Bandung, ditemukan bahwa permasalahan utama selain kurikulum yang tidak memuat pengetahuan ekonomi kebangsaan seperti ekonomi Pancasila terdapat permasalahan pada proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilakukan pada institusi pendidikan cenderung belum interaktif dan aplikatif.

Formalisasi matakuliah dalam pembelajaran kelas seringkali membuat mahasiswa tidak dapat memahaminya sebagai proses penanaman nilai melainkan hanya pengajaran normatif saja. Peneliti menemukan hal ini setelah melakukan triangulasi data dengan memperbandingkan konsep pembelajaran dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan dengan praktik pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan wawancara terhadap dosen kewarganegaraan, dosen kewirausahaan, peserta didik serta praktisi industri kreatif.

Proses pembelajaran yang dikembangkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang coba dikembangkan secara interaktif saat ini, yakni dengan dilakukannya diskusi dan presentasi materi memang mampu mendorong pemahaman peserta didik terhadap tema pendidikan kewarganegaraan. Namun, menurut peneliti pemahaman ini tidak cukup tanpa transmisi nilai melalui proses habituasi dan contoh aplikatif. Oleh karena itu, dalam proses transmisi nilai, para pendidik harus menggunakan pendekatan habituasi dan pendidikan kecakapan hidup dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) agar tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai secara maksimal.

Tabel 7.2
Periodisasi pembelajaran PPKn.

Periode	Kondisi yang dihadapi Bangsa	Kurikulum PPKn	Proses Pembelajaran	Hasil Pembelajaran
1962-1968	Pembangunan Karakter kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> • Civics • Pendidikan kewargaan negara termasuk civics, ilmu bumi Indonesia, sejarah Indonesia dan mata pelajaran kewargaan Negara 	Indoktrinasi politik	Pemahaman Manifesto politik Usdek
1975-1984	Orde baru dan stabilisasi nasional	Pendidikan Moral Pancasila (PMP)	Indoktrinatif	Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)
1994-2004	Pembangunan dan stabilitas nasional	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)	Indoktrinatif	Pengamalan P4
2004 – Sekarang	Demokrasi Globalisasi	PPKn (Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan)	Ceramah dan tanya Jawab (Interaktif)	Warganegara yang mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya

Tabel 7.3
Pemikiran Pendidikan Kecakapan Hidup dalam Pendidikan
Kewarganegaraan untuk Pengembangan SDM di Bidang Industri Kreatif
di masa Depan

Periode	Kondisi yang dihadapi Bangsa	Kurikulum PPKn	Proses Pembelajaran	Hasil Pembelajaran
Masa depan	Demokrasi dan globalisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman kebangsaan dalam demokrasi • Memasukkan ekonomi Pancasila sebagai substitusi pengetahuan ekonomi yang berlandaskan nilai kebangsaan 	Interaktif dan aplikatif, melalui proses habituasi dan pendekatan Pendidikan Kecakapan Hidup	Membentuk karakter yang cerdas, baik dan kreatif sebagai manifestasi karakter bangsa.

Upaya Meningkatkan Soft Skills Peserta Didik

Istilah soft skill telah ada sejak lama baik. Dalam pengaturan bisnis dan pendidikan, dalam pertemuan perusahaan, dan dalam pengembangan kurikulum, kapan orang berpikir tentang keterampilan mereka, mereka biasanya merefleksikan praktik yang telah mereka sempurnakan, seperti keyboard dengan kecepatan dan akurasi atau kabel elektronik dalam sistem otomotif. Pada dasarnya, ketika individu menggunakan istilah hard skill, mereka biasanya mengacu pada definisi skill seperti yang didefinisikan oleh Random House Dictionary: kemampuan, yang berasal dari pengetahuan, praktik, bakat, untuk melakukan sesuatu dengan baik;

keunggulan kompeten dalam kinerja; dan kerajinan, perdagangan, atau pekerjaan yang membutuhkan manual ketangkasan atau pelatihan khusus dimana seseorang memiliki kompetensi dan pengalaman.

Langkah pertama dalam meningkatkan soft skills peserta didik adalah meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya soft skills untuk menghadapi berbagai tantangan hidup sehari-hari. Untuk itu peserta didik harus didorong untuk meningkatkan soft skills mereka dengan menerapkan metode yang sering disebut dengan *Life Skills education approach*, misalnya membaca buku khusus tentang soft skill, mengikuti kursus, dan bergabung dengan perkumpulan untuk memperluas wawasan peserta didik, seperti perkumpulan debat atau perkumpulan ilmiah yang menawarkan presentasi dan diskusi. Pendekatan formal untuk masalah ini adalah dengan memasukkan materi soft skills ke dalam kurikulum yang ada. Pada tingkat yang lebih rendah suatu mata kuliah yang menuntut peserta didik untuk melakukan sedikit penelitian dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas dan ini terbukti sebagai cara/metode yang cukup efektif. Pada tingkat pascasarjana kursus tentang keterampilan manajemen, termasuk misalnya beberapa keterampilan komunikasi bersama dengan manajemen waktu, manajemen konflik, masalah budaya, dan yang terpenting meningkatkan kemampuan diri sendiri.

Meskipun pada kenyataannya seringkali kurikulum sudah dipenuhi dengan materi-materi hard skill, sehingga hampir tidak mungkin untuk menambah atau mengganti materi yang ada. Selain itu masih ada juga dosen yang mungkin tidak peduli akan pentingnya soft skill dan karenanya, tidak mendukung pembelajaran hard skill. Cara yang sangat elegan dalam menawarkan pelatihan soft skill kepada mahasiswa adalah menanamkannya atau dimasukkannya ke dalam pengajaran keterampilan keras. Dengan cara ini, tidak ada perubahan untuk kurikulum pembelajaran yang diperlukan; sebagai gantinya, perubahan akan terlihat dalam metodologi pengajaran yang dilakukan dosen. Peningkatan dalam diskusi kelompok, membiarkan siswa melakukan presentasi, dan menggunakan metodologi khusus seperti bermain peran (*role play*) dapat diterapkan dalam pembelajaran. Pendekatan ini untuk mempraktekkan soft skill membutuhkan beberapa pemikiran ulang dan perencanaan ulang dari hard skill yang ada pada pembelajaran/praktik keterampilan keras.

Dalam implementasinya, bisa saja seorang dosen menggunakan pendekatan yang mungkin sangat menarik untuk masalah tersebut dengan mengubah tujuan yang dibalik, yakni menjadikan isi kuliah sebagai wahana mengajar soft skill. Sebagai contoh, seorang dosen bahasa Inggris yang merencanakan perkuliahan dengan terlebih dulu menentukan soft skill apa yang ingin dia tingkatkan pada hari itu. Setelah itu, mempertimbangkan bagaimana materi mata kuliah bahasa Inggris yang dibutuhkan dapat diatur untuk mendukung tujuan tersebut. Jika diterapkan dengan benar, pendekatan pengajaran seperti itu secara otomatis akan meningkat daya tarik dan keefektifan pembelajaran/pelatihan/kursus yang berkenaan dengan keduanya, hard skill dan soft skill.

Pentingnya Soft Skills Untuk Dunia Kerja

Kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja terhadap kriteria calon karyawan semakin hari semakin tinggi. Dunia usaha dan dunia industri tidak hanya memprioritaskan pada kemampuan akademik dan keterampilan keras (hard skills) yang tinggi saja, tetapi juga memperhatikan kecakapan dalam hal nilai-nilai yang melekat pada seseorang atau sering dikenal dengan aspek soft skills. Kemampuan ini disebut juga dengan kemampuan non teknis yang tentu memiliki peran penting yang mendampingi kemampuan akademik.

Soft skills merupakan keterampilan dan kecakapan hidup, baik untuk sendiri, berkelompok, atau bermasyarakat, serta dengan Sang Pencipta. Dengan mempunyai soft skills membuat keberadaan seseorang akan semakin terasa di tengah masyarakat. Keterampilan akan berkomunikasi, keterampilan emosional, keterampilan berbahasa, keterampilan berkelompok, memiliki etika dan moral, santun dan keterampilan spiritual. (Elfindri dkk., 2011: 67)

Semua sifat yang menyebabkan berfungsinya hard skills harus dimiliki. Soft skills dapat menentukan arah pemanfaatan hard skills. Jika seseorang memilikinya dengan baik, maka ilmu dan keterampilan yang dikuasainya dapat mendatangkan kesejahteraan dan kenyamanan baginya dan lingkungannya. Sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki soft skills yang baik, maka hard skills dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. (Elfindri dkk 2011: 175)

Soft skills pada dasarnya adalah bagian dari kecerdasan intelektual seseorang dan sering dijadikan syarat untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan tertentu, serta merupakan komplemen dari hard skills. (Iyo Mulyono (2011: 99),

Sedangkan menurut Aribowo, sebagaimana dikutip, menyebutkan soft skills sebagai berikut:

Soft skills adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain (termasuk dengan dirinya sendiri). Atribut soft skills, dengan demikian meliputi nilai yang dianut, motivasi, perilaku, kebiasaan, karakter dan sikap. Atribut soft skills ini dimiliki oleh setiap orang dengan kadar yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh kebiasaan berfikir, berkata, bertindak dan bersikap. Namun, atribut ini dapat berubah jika yang bersangkutan mau merubahnya dengan cara berlatih membiasakan diri dengan hal-hal yang baru. (Illah Sailah 2008: 17),

Dari berbagai definisi tersebut dapat dirumuskan bahwa pada dasarnya soft skills merupakan kemampuan yang sudah melekat pada diri seseorang, tetapi dapat dikembangkan dengan maksimal. Keterampilan ini dibutuhkan dalam dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja sebagai pelengkap dari kemampuan hard skills. Keberadaan antara hard skills dan soft skills sebaiknya seimbang, seiring, dan sejalan.

Soft Skills Dalam Pendidikan Vokasi

Pada pendidikan vokasi, baik tingkat sekolah menengah atau di perguruan tinggi, pengembangan soft skills jelas menjadi sangat penting untuk diberikan kepada siswa/mahasiswa sebagai bekal mereka terjun ke dunia kerja dan industri, agar dapat mencetak lulusan yang siap pakai di dunia kerja karena tuntutan dunia kerja lebih menekankan pada kemampuan soft skills. Berdasarkan Survey National Association of Colleges and Employee (NACE, 2002) dalam Elfindri dkk (2011: 156), terdapat 19 kemampuan yang diperlukan di pasar kerja, kemampuan yang diperlukan itu dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut ini.

Tabel 7.4
Kemampuan yang Diperlukan di Dunia Usaha, Dunia industri dan dunia kerja

NO	KEMAMPUAN	NILAI/ SKOR	KLASIFIKASI SKILL	RANKING URGENSI
1	Komunikasi	4,69	Soft skill	1
2	Kejujuran/ Integritas	4,59	Soft skill	2
3	Bekerjasama	4,54	Soft skill	3
4	Interpersonal	4,5	Soft skill	4
5	Etos Kerja yang baik	4,46	Soft skill	5
6	Motivasi/Inisiatif	4,42	Soft skill	6
7	Mampu beradaptasi	4,41	Soft skill	7
8	Analitikal	4,36	Psikomotor hard skill	8
9	Komputer	4,21	Psikomotor hard skill	9
10	Organisasi	4,05	Soft skill	10
11	Orientasi Detail	4	Soft skill	11
12	Kepemimpinan	3,97	Soft skill	12
13	Percaya Diri	3,95	Soft skill	13
14	Sopan/beretika	3,82	Soft skill	14
15	Bijaksana	3,75	Soft skill	15
16	Inedks Prestasi > 3,0	3,68	Kognitif Hard Skill	16
17	Kreatif	3,59	Soft skill	17
18	Humoris	3,25	Soft skill	18
19	Jiwa Enterprenership	3,23	Soft skill	19

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 16 dari 19 kemampuan yang diperlukan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja adalah aspek soft skills yang menempati ranking 7 teratas. Melihat kenyataan tersebut, sangat jelas mengapa soft skills sangat penting diberikan dalam proses

pendidikan. Kemampuan komunikasi dan kemampuan entrepreneurship harus diajarkan kepada siswa sehingga siswa akan menjadi lulusan yang siap pakai di dunia kerja dan tidak hanya berdasarkan pada kemampuan hard skills saja tetapi juga kemampuan soft skills.

Soft skills atau people skills terdiri atas dua bagian, yaitu intrapersonal skills dan interpersonal skills, sebagaimana dikutip oleh Illah Sailah (2008: 18), “Intrapersonal skills adalah keterampilan seseorang dalam mengatur diri sendiri. Intrapersonal skills sebaiknya dibenahi terlebih dahulu sebelum seseorang mulai berhubungan dengan orang lain”.

Pada umumnya, dalam praktik proses seleksi karyawan yang dilakukan oleh perusahaan, hampir semua perusahaan melakukan saringan berdasarkan pada aspek kemampuan berpikir logis dan analisis di tahap awal. Kemudian dilanjutkan dengan seleksi karakter dan sikap kerja, sementara pada proses seleksi akhir, baru dilakukan seleksi berdasarkan kemampuan teknis dan akademis calon pegawai tersebut. Terutama proses seleksi wawancara, proses ini sangat sarat dengan soft skills, yaitu ketrampilan berkomunikasi secara efektif, kemampuan berpikir kritis, ketrampilan menghargai orang lain, sikap serta motivasi kerja. (Bowo Widodo 2008 :18)

Dalam dunia kerja, soft skills sangat diperlukan keberadaannya dimulai dari proses perekrutan atau seleksi karyawan hingga tentunya pada saat bekerja. Keseimbangan antara kemampuan hard skills dan soft skills sangat diperlukan dalam dunia usaha, industry, dan dunia kerja. Jika kemampuan hard skills saja yang dimiliki, maka akan tersingkir oleh karyawan yang mempunyai kemampuan soft skills.

Berdasarkan uraian tersebut, sangat jelas tentang pentingnya soft skills diberikan dalam proses pembelajaran dan pentingnya soft skills dalam dunia usaha/industry dan dunia kerja. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan soft skills yang baik dan memenuhi standar dalam dunia pekerjaan tentunya dimulai dari dunia pendidikan khususnya pendidikan vokasi, karena dunia pendidikan vokasi merupakan awal dari suatu pembelajaran. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana menghasilkan keterampilan-keterampilan tersebut dan bagaimana cara agar dapat terintegrasi dalam pembelajaran, pada bab sebelumnya telah diuraikan pembelajaran atau peningkatan soft skills dilakukan dengan pendekatan pendidikan kecakapan hidup (life skills education).

Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pada pendidikan vokasi dimulai dengan segenap rencana pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya, tanpa adanya rencana yang telah disusun sebelumnya maka penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar akan berjalan tidak terstruktur. Rencana kegiatan atau skenario pembelajaran itu biasa disebut dengan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat 2 disebutkan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

Kurikulum dikatakan merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, maka cara menumbuhkan soft skills dalam proses pembelajaran adalah dengan memasukkan muatan soft skills ke dalam kurikulum pembelajaran. Karena telah dijelaskan kurikulum itu sebagai rencana pembelajaran yang berisi mengenai tujuan, isi, bahan serta cara yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu, jika muatan soft skills sudah dimasukkan ke dalam kurikulum dalam suatu mata kuliah akan memudahkan guru/dosen dalam merancang kegiatan pembelajaran.

Mengintegrasikan soft skills dalam kurikulum tentu bukan hal yang mudah untuk dilakukan, sudah saatnya proses pendidikan dari nilai-nilai universal di pendidikan vokasi melalui integrasi aspek soft skills ke dalam sebagian besar mata kuliah yang diberikan. Adapun langkah-langkah persiapan yang harus dilalui oleh dosen/guru pengampu mata kuliah/ pelajaran adalah sebagai berikut.

- 1) Susun tujuan pembelajaran dan penetapan capaian pembelajaran. Dalam kaitan ini yang menjadi kebutuhan adalah kemampuan untuk merumuskan kompetensi, yang lazim dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi

- (KBK). Guru dan dosen harus mampu merumuskan apa saja yang akan dicapai, sesuai dengan ranah pendidikan yang disampaikan sebelumnya.
- 2) Masukan pada masing-masing sesi mata kuliah/pelajaran soft skills apa yang akan dihasilkan. Setelah kompetensi masing-masing sesi dirumuskan, kemudian dapat pula memasukkan bagaimana cara pembelajaran yang menumbuhkan masingmasing soft skills yang diharapkan.
 - 3) Rencanakan bagaimana metoda operasional melaksanakannya, baik pada masing-masing sesi ajar, maupun pada beberapa pertemuan.
 - 4) Lakukan uji coba pada suatu kelas atau sekelompok anak. Lakukan pengamatan-pengamatan terhadap anak-anak agar kemudian kita bisa melihat antara sebelum dan sesudah dilakukan uji coba daapt menghasilkan perbedaan yang nyata. Jika para guru ingin mempraktekan suatu kaedah penelitian tindakan kelas, maka secara objektif mesti pula diukur seberapa berubah soft skills anak-anak dengan adanya salah satu perlakuan treatment yang diberikan.
 - 5) Review hasil uji coba untuk perbaikan. Sebuah proses penerapan metode menerapkan soft skills tidaklah semudah membalik telapak tangan. Kita perlu sabar, dan selalu memperbaiki bagaimana sebaiknya antara satu tahap ke tahap perbaikan pembelajaran.
 - 6) Finalisasi metoda pembelajaran. Setelah dilakukan cara berulang, maka kemudian dapat dituliskan dalam bentuk teaching manual sebuah pelajaran. Berisikan secara lengkap isi bahan ajar, metode mengajarkan, aspek soft skills dan metode mengajarkannya. (Elfindri dkk, 2011: 137).

Intinya, langkah-langkah persiapan yang harus dipersiapkan dalam mengintegrasikan soft skills pada pembelajaran di atas, dimulai dari menyusun tujuan dan rencana pencapaian pembelajaran, masukan pada masing-masing materi ajar jadi soft skills tidak hanya terdapat pada beberapa mata kuliah/pelajaran saja tetapi pada seluruh mata kuliah/pelajaran, rencanakan metode apa yang digunakan, lakukan uji coba terlebih dahulu pada suatu kelas, review hasil uji coba, dan finalisasi metoda pembela jarang digunakan misalnya; role play, diskusi dan sebagainya.

BAB VIII

Hasil Rekonstruksi Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan dan merekonstruksi pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengembangkan kecakapan hidup/soft skills dan karakter sumberdaya manusia industri kreatif. Jelas sekali bahwa rangkaian peran pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan Pendidikan Kecakapan Hidup/soft skills dan Pendidikan Karakter dalam mendorong pengembangan sumber daya manusia di bidang industri kreatif saling memengaruhi satu sama lain karena merupakan satu kesatuan yang holistik, karena tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas dan baik.

Rekonstruksi pemikiran ini tidak hanya terjadi pada proses rekonseptualisasi pendidikan kewarganegaraan namun juga dalam hal praktik pembelajaran. Ditemukan bahwa permasalahan utama selain materi pembelajaran dan kurikulum yang tidak memuat pengetahuan ekonomi kebangsaan dalam hal ini, ekonomi Pancasila yang seharusnya menjadi basic dalam pengembangan industri kreatif, juga terdapat permasalahan pada proses pembelajaran yang dilakukan pada institusi pendidikan yaitu cenderung masih *one way communication*, yang lebih mengedepankan akademik (*academic skills*), dan masih mengabaikan *soft skills (personal skills and social skills)*.

Secara ontologis, pendidikan kewarganegaraan merupakan ilmu terapan yang memiliki fungsi aplikatif. Pendidikan kewarganegaraan merupakan ilmu yang pre-paradigmatik yang berarti dapat dihubungkan dengan semua ranah keilmuan sebagai landasan berwarganegara. Aplikasi pendidikan kewarganegaraan dirangkum dalam idealisasi karakter kebangsaan. Dalam hal ini pendidikan karakter merupakan fondasi

dasar bagi pembentukan karakter bangsa, namun karakter saja belumlah cukup untuk mampu mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan membutuhkan pendekatan pendidikan kecakapan hidup (*life skills education approach*) dalam praktik pembelajarannya.

Kaitan pendidikan kewarganegaraan dengan pendidikan karakter dan pendidikan kecakapan hidup dapat dimunculkan dalam model pembelajaran yang interaktif. Model pembelajaran yang interaktif dapat dilakukan melalui pendekatan pendidikan kecakapan hidup guna meningkatkan beberapa kecakapan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari seperti kepemimpinan, tanggung jawab pribadi dan sosial. Kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dapat dimunculkan seperti dalam pembelajaran demokrasi. Bentuk pembelajaran tersebut antara lain dapat dilakukan melalui forum-forum diskusi dalam kelas membahas isu-isu aktual yang dipresentasikan di kelas atau dapat juga dalam bentuk bermain peran (*role play*) dan dievaluasi bersama dalam tanya jawab antara peserta didik dalam bimbingan pendidik (guru/dosen).

Negara merupakan sebuah sistem sosial besar yang merangkum semua aktivitas warga negara di dalamnya. Sebagai sistem sosial, negara memiliki nilai-nilai yang disepakati bersama dan berlaku mengikat setiap warganegara di dalamnya. Nilai-nilai tersebut bukan hanya nilai-nilai yang dibakukan dalam hukum positif namun juga norma-norma sosial dan perilaku yang menjadi landasan integrasi sosial. Warganegara merupakan anggota dalam sistem sosial tersebut yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan sistem sosial tersebut ke arah yang lebih baik atau sebaliknya. Sebagai anggota dalam sistem sosial, warganegara harus berintegrasi dengan sistem sosial dan memberikan kontribusi bagi sistem sosial menuju perbaikan dan kesejahteraan bersama. Posisi seorang warganegara dalam sistem sosial ditentukan oleh kontribusinya pada sistem sosial/negara tersebut. Sebaliknya, jika individu tersebut tidak terserap dalam sistem sosial dan tidak dapat memberikan kontribusi pada sistem sosialnya, muncullah penyimpangan sosial atau disintegrasi sosial.

Secara konseptual, pengembangan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting. Hal ini karena Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kemampuan terbatas dalam menyambut

dinamika globalisasi terutama dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang industri kreatif. Selama ini, karakter kreatif yang muncul di masyarakat belum mendapatkan sambutan baik dari Pendidikan Kewarganegaraan. Meskipun dalam konteks pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan telah mengadopsi beberapa perubahan terutama dengan menempatkan peserta didik sebagai elemen aktif dalam proses pembelajaran, Pendidikan Kewarganegaraan belum mengulas karakter kreatif dalam tataran aplikatif kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, meski dalam pendidikan karakter dan kecakapan hidup yang ada dalam Pendidikan Kewarganegaraan secara tidak langsung telah memfasilitasi pembentukan karakter yang baik, cerdas dan kreatif, Pendidikan Kewarganegaraan perlu melampirkan contoh aplikatif pada keseharian terutama di bidang ekonomi kreatif yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulumnya di perguruan tinggi yang masih mengadopsi konten ilmu politik yang padat, memerlukan penambahan bidang kajian terutama dalam konteks ekonomi.

Ada beberapa hal lain yang harus juga diperhatikan untuk mencapai keefektifan penerapan *merit system* di Indonesia, di antaranya adalah : 1) menetapkan pagu atau target prestasi kerja; 2) mengembangkan sistem penilaian karya pegawai yang berfokus pada kekhasan jabatan, berorientasi pada hasil kerja serta penilaian oleh lebih dari satu penilaian atau *multi raters*; 3) memberikan pelatihan penilaian prestasi kerja kepada para pimpinan unit kerja serta pegawai umumnya terampil menilai prestasi kerja pegawai serta menguasai seni penyampaian umpan balik tentang kondisi nyata prestasi kerja yang berhasil dicapai sehingga pada masa mendatang memungkinkan untuk dicapainya prestasi kerja pegawai yang lebih baik; membakukan pemberian penghargaan berdasarkan prestasi kerja yang berhasil dicapai oleh setiap pegawai; dan menggunakan skala kenaikan penghasilan yang besar dan bernilai signifikan. Pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan jika dilakukan dengan pendekatan pendidikan kecakapan hidup sangat berperan sekali untuk menunjang pengembangan sumber daya manusia di bidang industri kreatif, hal ini dikarenakan tujuan akhir pendidikan kewarganegaraan, yaitu: "*Smart and Good Citizenship*" atau menjadi warga negara yang cerdas dan baik sejalan dengan pendidikan karakter yang dikembangkan semua institusi pendidikan di Indonesia,

dengan pendekatan pendidikan kecakapan hidup pembelajaran menjadi sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan *soft skills* peserta didik yang memang sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan hidup sehari-hari, dimana hal ini sangat menunjang sekali pengembangan sumber daya manusia industri kreatif, karena industri kreatif adalah sebagai industri yang berfokus pada ide, kreasi dan eksploitasi karya kepemilikan intelektual.

Pendidikan kecakapan hidup (*soft skills*) dalam pendidikan kewarganegaraan yang merupakan fondasi dasar bagi pembentukan karakter bangsa yang cerdas, baik dan kreatif adalah, merupakan bagian yang sangat penting digunakan sebagai pendekatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan tuntutan perubahan di era ekonomi kreatif ini. Pendidikan kewarganegaraan sebagai medium pendidikan karakter perlu mengadaptasi berbagai strategi yang lebih dinamis dan dibutuhkan oleh masyarakat. Pendidikan dengan metode konservatif harus ditinggalkan agar pendidikan karakter tidak lagi dianggap sebagai pendidikan normatif yang tidak memiliki dampak langsung bagi pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai materi yang terdapat dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Penyampaian pembelajaran dengan pendekatan pendidikan kecakapan hidup tersebut didasarkan pada konsep pembelajaran "*learning to know, learning to do, learning to be dan learning to live together with others with others.*" Pengembangan pendidikan kecakapan hidup yang dilandasi keempat konsep pembelajaran tersebut akan memberi dampak positif terhadap penanggulangan pengangguran dan kemiskinan serta pengembangan sumber daya manusia.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai katalisator pendidikan karakter memiliki tugas penting untuk membentuk karakter yang cerdas dan baik sebagai manifestasi karakter bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi. Untuk itu sinergi kurikulum PKn, dengan pendidikan Kecakapan hidup dan Karakter harus senantiasa diupayakan agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkarakter dan kreatif Pendidikan kecakapan hidup sebagai suatu pendekatannya dapat meningkatkan kemampuan atau *soft skills* peserta didik yang dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan hidup sehari-hari, artinya

sinergi pendidikan kewarganegaraan dengan pendekatan pendidikan kecakapan hidup sangat berperan penting dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang industri kreatif. Pendidikan kewarganegaraan, pada dasarnya adalah ilmu yang isinya antara lain mempelajari hubungan antar warganegara dan hubungan antara warga negara dengan negara. Istilah *civics education* dan *citizenship education* cenderung digunakan pada pendidikan formal sedangkan penggunaan istilah citizenship education seringkali terbatas pada wacana ilmiah kalangan akademisi maupun pendidikan yang non formal. Dalam konteks disertasi ini, peneliti tidak memisahkan istilah civics education dan citizenship education karena dalam konteks bahasa Indonesia keduanya dapat diartikan sebagai pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan sifat formal dan non formal dari pendidikan kewarganegaraan yang berlaku pada wacana akademis dan praksis pembelajaran pendidikan kewarganegaraan secara kontekstual tidak terdapat perbedaan yang berarti. Konteks pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan pendekatan pendidikan kecakapan hidup sangat berperan sekali untuk menunjang pengembangan sumber daya manusia di bidang industri kreatif, hal ini dikarenakan menjadi warga negara yang cerdas dan baik adalah tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dan ini sejalan dengan pendidikan karakter yang dikembangkan semua institusi pendidikan di Indonesia.

BAB IX

Penutup

Dalam pengembangan kurikulum PKn, antara lain diperlukan kebijakan untuk memasukkan kajian ekonomi Pancasila dengan melibatkan peran serta seluruh elemen pendidikan, para pakar dari berbagai disiplin ilmu, dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Hal ini diperlukan sebagai upaya menjawab tantangan globalisasi yang senantiasa memerlukan pengembangan metode pembelajaran yang sesuai dengan konteks globalisasi. Metode pembelajaran lama dengan guru sebagai sentral ataupun dengan tema-tema umum yang kaku perlu dipertimbangkan kembali. Metode pembelajaran harus mulai melibatkan peserta didik secara aktif dan aplikatif. Pembahasan mengenai tema-tema kewarganegaraan perlu mengadopsi isu-isu kontemporer yang dinamis dalam bentuk simulasi-simulasi tematik untuk memacu kemampuan analitis peserta didik secara aplikatif melalui pengumpulan data, pembahasan intensif, dan tanya jawab. Simulasi-simulasi praktis tersebut sangat dibutuhkan dalam pendidikan kewarganegaraan sehingga keterampilan berwarganegara tidak lagi bersifat teoritis, normatif, dan doktriner namun menjadi keterampilan yang dapat diaplikasikan secara praktis, mendalam, dan kritis.

Dalam pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan, terutama pada kajian mengenai ekonomi yang sesuai dengan falsafah Pancasila, yaitu ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada sila kelima Pancasila yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kajian ini berisi tentang sistem ekonomi nasional, prinsip-prinsip ekonomi nasional, perkembangan ekonomi dunia, dan prinsip ekonomi nasional yang sesuai dengan falsafah Pancasila. Pengembangan kurikulum dengan memasukkan kajian ekonomi Pancasila ini diharapkan dapat memandu perkembangan gerak ekonomi nasional dan memberikan karakter kebangsaan pada industri

kreatif sehingga SDM yang dihasilkan oleh pendidikan menjadi SDM yang berkualitas, mampu bersaing dan memiliki karakter kebangsaan. Pentingnya pengembangan kurikulum ini memerlukan peran serta seluruh elemen pendidikan meliputi para pakar pendidikan kewarganegaraan, pakar pendidikan ekonomi dan ilmu ekonomi, pakar kewirausahaan, dan tentunya peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan.

Kajian mengenai Ekonomi Pancasila sebaiknya dapat dijadikan pertimbangan untuk mata pelajaran atau mata kuliah terpisah dari mata kuliah lainnya atau diintegrasikan ke dalam mata pelajaran atau mata kuliah yang sudah ada seperti Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, kajian Ekonomi Pancasila harus menjadi bagian dari pendidikan karakter Pendidikan Kewarganegaraan dengan menjadikannya sub kajian dalam kurikulum pendidikan tersebut.

Selain itu, berkaitan dengan rekonstruksi pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengembangkan soft skills ada beberapa simpulan yang dapat ditarik. Pertama, pembelajaran soft skills terintegrasi melalui pembelajaran mata pelajaran lain termasuk tema hard skills yang diimplementasikan pada pembelajaran di kelas maupun praktik di laboratorium, bengkel atau studio maupun melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Apabila hal ini dilakukan dengan perencanaan pembelajaran yang baik dapat meningkatkan dan menjaga perilaku soft skills bidang produksi maupun managerial. Hal ini bertambah baik jika soft skills yang ditargetkan melalui penguasaan pada saat pembelajaran yang diawali dengan penegasan konsep dan perilaku setiap soft skills, diikuti dengan motivasi dan bimbingan kerja. Adanya kinerja berbasis soft skills berdampak pada termotivasinya mahasiswa untuk bekerja yang terbaik dan berhasil. Kedua, pembelajaran soft skills terbukti efektif meningkatkan kinerja yang berdampak pada penguatan nilai-nilai karakter yang diperlukan pada pendidikan tinggi. Hal ini terjadi jika secara berkelanjutan dosen menerapkan pengembangan soft skills terintegrasi melalui tugas-tugas dan balikan ataupun pelatihan sehingga akan muncul kemampuan untuk mengelola dirinya sendiri secara lebih baik. Ketiga, pengembangan soft skills yang diimplementasikan melalui Pendidikan Kewarganegaraan akan efektif jika dosen secara efektif mampu memberi umpan balik secara berkelanjutan selama pembelajaran.

Selama dekade terakhir, masyarakat telah menganggap pentingnya soft skills. Hal ini terbukti dengan meningkatnya secara signifikan penerapan soft skill di lembaga pendidikan. Itu sangat penting bagi semua orang untuk memperoleh keterampilan yang memadai di luar pengetahuan akademis atau teknis. Hal ini bukan sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Soft skills mampu menutupi kekurangan di bidang keterampilan keras dan ada banyak cara untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Pendidik mempunyai tanggung jawab khusus mengenai soft skill karena waktu peserta didik di sekolah atau kampus berdampak besar pada perkembangan soft skills mereka. Selain meningkatkan kesadaran tentang pentingnya soft skill dan mendorong mahasiswa untuk meningkatkan keterampilannya, dosen juga harus aktif berlatih soft skill dengan mahasiswanya. Cara melakukannya yang sangat efektif dan efisien ialah dengan memasukkan materi soft skills ke dalam pengajaran antara lain melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Efek samping yang positif ialah pelajaran menjadi lebih menarik dan pada gilirannya akan meningkatkan tingkat keberhasilan peserta didik. Soft skill memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian seseorang melengkapi hard skill-nya.

Pengembangan soft skills melalui Pendidikan Kewarganegaraan akan sangat sejalan dengan tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri, yaitu untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas dan baik. *Smart and Good Citizenship*.

❖ DAFTAR PUSTAKA ❖

- Afifudin, H. (2013), Pengantar Buku: Basri, Hasan. *Landasan Pendidikan*. Pustaka Setia, Bandung.
- Alma, Buchari. (2009). *Kewirausahaan*. ALFABETA. Bandung.
- Alwasillah, Chaedar, (2002). *Pokoknya Kualitatif*, Pustaka Jaya, Bandung.
- Balfour, D.L. (2005). *Reforming the Public Service: The Search for a New Tradition*, Public Administration Review, Vol. 57, No. 5, pp 439-462.
- Basri, Hasan. (2013). *Landasan Pendidikan*. Pustaka Setia, Bandung.
- Berybe, H. (2001). *Dilema Pelembagaan Pendidikan*. Dalam Sindhunata, ed. *Pendidikan Kegelisahan Sepanjang Zaman*. Kanisius, Yogyakarta.
- Becker, Gary .S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical analysis, with special reference to Education, Third Edition*. The National Bureau of Economic Research, Chicago.
- Buchori, M. (2001). *Pendidikan Antisipatoris*. Kanisius, Yogyakarta.
- Bloom, Benjamin S. (1976). *Human Characteristics and School Learning*. Mc Grawhill Inc. New York.
- Bowo widodo. (2008). *Pengembangan Soft Skills di Perpendidikan Tinggi*. Bandung.
- Budiarjo. (1992). *Pengertian-Pengertian Masyarakat*. Rajawali Pers. Jakarta.

- Budimansyah, Dasim. (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa*. Widya Aksara Press. Bandung.
- Buzan. Tony. (2001). *The Power of Spiritual Intellegence*. Chichester Brisbane Toronto Singapore by John Wiley & Sons, Inc. New York.
- Brameld, Theodore. *Education as Power* (1965). Caddo Gap Press. San Francisco.
- Cassis, Youssef and Ioanna Pepelasis Minoglou. (2005). *Entrepreneurship in Theory and History*. Palgrave macmillian. New York.
- Checchi, Daniele. (2005). *The Economics of Education: Human Capital, Family Background and Inequality*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Cogan, J.J., (1999) *Developing the civic society the role of civic education*, CICED. Bandung.
- Coser, Rose Laub (1964), *The Family: Its Structure and Functions*, St. Martin's Press. HQ728 C6. New York.
- Creswell, John W, (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, Sage Publication. California,
- Creswell. John W. (1998). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Traditions*. SAGE Publications. London.
- Creswell, John W. (2010) Edisi ke-3. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta.
- Cuff, E C, W W Sharrock and D W Francis. (1984). *Perspectives in Sociology, Fourth Edition*. Routledge. London.

- Cuff, E. C., W. W. Sharrock and D. W. Francis, (1992). *Perspectives in Sociology, third edition*, Routledge. London.
- Davis, Kingsley and Wilbert E. Moore, (1966) "*Some Principles of Stratification*," in R. Bendix and S. M. Lipset, *Class, Status and Power, second edition*, Free Press. New York.
- Declaire.Gottman, John. (1997). *The heart of parenting: how to raise an emotionally intelligent child*. Simon & Schuster. New York.
- Delors, J. (1996). *Learning: The Treasure Within*. UNESCO. Paris.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2003). *Life Skill Education*, Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2007). *Pendidikan Kecakapan Hidup Untuk Pencegahan HIV dan Aids*, Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani, Jakarta.
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2008). *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025*. Studi Industri Kreatif Indonesia. Jakarta.
- Dimiyati. (2001). *Akulturasi Teknologi Pendidikan dalam Masyarakat Indonesia Transisional*. CV. Wineka Media. Malang.
- Dimiyati, M. (2000). *Demokratisasi belajar pada lembaga pendidikan dalam masyarakat Indonesia transisional: Suatu analisis epistemologi ke Indonesiaan*.
- Djojonegoro, Wardiman. (1995). *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.

- Drucker, Peter F. (1996). *Inovasi dan Kewiraswastaan: Praktek dan Dasar-dasar* (terjemahan). Erlangga. Jakarta.
- Dwipayana, Ari AAGN, (2003), *Membangun Good Governance di Desa*, Institut For Research and Empowerment (IRE) Press, Yogyakarta.
- Elfindri, dkk. (2011). *Soft Skills untuk Pendidik*. Jakarta.
- Eltis, David, Frank D. Lewis. Kenneth L. Sokoloff. (2009). *Human Capital and Institutions*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Emzir, (2010), *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*, Rajawali Pers (Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Fajar, Malik. (2005). *Holistika Pemikiran Pendidikan*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung.
- Fayolle, Alain (2010). *Handbook of Research in Entrepreneurship Education, Volume 2, Contextual Perspectives*. Edward Elgar Publishing Limited. Massachusets.
- Freire, Paulo. (1984) *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*, Gramedia, Jakarta
- Freire, Paulo. (1985). *Pendidikan kaum tertindas*, LP3S. Jakarta.
- Friedman, Milton. (1975). *A Theory of Consumption Function*. Oxford & IBH Publishing.co. New Delhi.
- Fukuyama, Francis. (1989). *The End of History*. The National Interest. Summer.

- Gottman John, (1997). *Kiat-Kiat Membesarkan Anak yang Memiliki Kecerdasan Emosional (Edisi terjemahan : T. Hermaya)*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Grabb, Edward G. (1990), *Theories of Social Inequality: Classical and Contemporary Perspectives, second edition*, Holt, Rinehart and Winston. Toronto.
- Hadi, Syamsul, dkk. (2012). *Kudeta Putih : Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia*. Indonesia Berdikari, Jakarta.
- Hatta, Meutia, S. (2012) “Prof. H.A.R. Tilaar: Pendidik Yang Budayawan dan Pemikir Masa Depan Bangsa”. dalam *10 Windu Prof. DR. H.A.R, TILAAK, M. SC.ED PENDIDIKAN NASIONAL: Arah Kemana?*”. Kompas Penerbit Buku, Jakarta.
- Hidayat, Komaruddin. (2012). “Pendidikan Sebagai Panglima”. dalam *10 Windu Prof. DR. H.A.R, M. SC.ED PENDIDIKAN NASIONAL: Arah Kemana?*”. Kompas Penerbit Buku, Jakarta
- Hidayat, N. Dedy, (2003), *Paradigma metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta.
- Henry, John. (2002), *Knowledge Is Power : Francis Bacon and the Method of Science*, Icon Books, Limited, Michigan.
- Hendarman, A. F. & Tjakraatmadja, J. H., 2012. Relationship among Soft Skills, Hard Skills, and Innovativeness of Knowledge Workers in the Knowledge Economy Era. *Social and Behavioral Sciences*, Volume 52, pp. 35-44.
- Howkins,John. (2001). *The Creative Economy, How People Make Money from Ideas*, Penguin Books.

- Husodo, S. Y., (2004). *Membangun Kemandirian Pangan : Suatu Kebutuhan Bagi Indonesia, Negara Berpenduduk Banyak Dengan Potensi Pangan yang Besar*, PT Tema Baru, Jakarta.
- Indrakusuma, Amir D. (1973), *Pengantar Ilmu Pendidikan, Usaha Nasional*, Jakarta.
- Isaacs, G. (1999). *Assessment Criteria, Standard and Marking Scheme. Teaching and Johnson, Miriam M., "Functionalism and Feminism: Is Estrangement Necessary?"* dalam Paul England, editor, *Theory on Gender / Feminism on Theory*, Aldine de Gruyter. New York.
- Kalidjernih, F.K. (2010). *Kamus Studi Kewarganegaraan : Perspektif Sosiologikal dan Politik*. Widya Aksara Press. Bandung.
- Kartini Kartono. (1997). *Tinjauan politik mengenai sistem pendidikan nasional: beberapa kritik dan sugesti*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Kasmir. (2006). *Kewirausahaan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kerlinger, Fred N. (2000). *Asas-asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Knapp, Peter, (1994). *One World – Many Worlds: Contemporary Sociological Theory*, New York, Harper-Collins.
- Koesoema A, Doni. (2007). *Pendidikan Karakter: Strategi mendidik anak di zaman global*. Jakarta. Grasindo.
- Kuhn, S Thomas. (1970). *The Structure of Scientific Revolutions*. The University of Chicago Press. Chicago.
- Latif, Yudi. (2011). *Negara Paripurna*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

- Latif, Yudi. (2020) Pendidikan yang Berkebudayaan, (Histori, Konsepsi, dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Levitsky, Steven & Ziblatt, Daniel (2019), Bagaimana Demokrasi Mati (*Apa yang Diungkapkan Sejarah Tentang Masa Depan Kita*), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Lickona, Thomas. (1992). *Educating for character: how our schools can teach respect and responsibility*. Bantam.
- Lin, Nan. (2001). *Structural Analysis in the Social Sciences, Social Capital A Theory of Social Structure and Action*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Lleras, Miguel Palacios. (2004). *Investing in Human Capital: A Capital Markets Approach to Student Funding*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Lutfi, Mustafa dan Halim, Fathani A. (2013). *Hitam Putih Pendidikan (Menyngkap Realitas, Merajut Solusi)*. Universitas Brawijaya Press (UB Press). Malang.
- Magolda, Marcia Baxter. (2001). *Making Their Own Way : Narratives for Transforming Higher Education to Promote Self-Development*. Stylus. Virginia
- Malik, Fajar A. (2012). “Sketsa Pendidikan Nasional (Perspektif Sejarah dan Politik), dalam *10 Windu Prof. DR. H.A.R, TILAAR, M. SC.ED PENDIDIKAN NASIONAL: Arah Kemana?*”. Kompas Penerbit Buku, Jakarta.

- Magnis-Suseno, F. (2012). "Perguruan Tinggi Tempat Pendidikan Manusia Indonesia yang Berkarakter, dalam *10 Windu Prof. DR. H.A.R, TILAAAR, M. SC.ED PENDIDIKAN NASIONAL: Arah Kemana?*". Kompas Penerbit Buku, Jakarta.
- Masykur, Ali. M. (2013). Kata Pengantar "*Kebangkitan Indonesia 1945 – 2045*" (Pokok-pokok Pikiran Sarjana Nahdatul Ulama), LP3ES. Jakarta.
- Matthew B. Miles & A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif* (translator: Tjetjep Rohendi Rohidi). UI-Press, Jakarta.
- Maunati, Yekti. (2004). *Identitas Dayak*. Lkis. Yogyakarta.
- Mayhew, Leon H. (1992). *Talcott Parsons On Institution and Social Evolution : Selected writings*. The University of Chicago Press. Chicago.
- Mercer, Justine, Bernard, and Richard, B. (2010). *Human Resource Management in Education: Contexts, Themes and Impact*. Routledge. London.
- Minnis, Hubert A. (2013), *Your Say: The New Bahamas Meritocracy*, Tribune 242. Bahamas.
- Morgan, D. H. J. (1975). *Social Theory and the Family*, London, Routledge and Kegan Paul. HQ728 M574
- Mubyarto. (2000). *Membangun Sistem Ekonomi*. BPF. Yogyakarta.
- Mukhtar, (2013) *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Referensi (GP Press Group), Jakarta.

- Mukhadis, Amat. 2013. Sosok Manusia Indonesia Unggul dan Berkarakter dalam Bidang Teknologi Sebagai Tuntutan Hidup di Era Globalisasi. (online), (<http://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/1434>), diakses tanggal 11 Mei 2016.
- Naisbitt, John and Patricia Aburdene (1991). *Mega Trend 2000 : Ten New Direction for the 1900's*, Avon Book, New York
- Nash, Robert J. (1997). *Answering Virtuecrats: A Moral Conversation On Character Education Advances in Contemporary Educational Thought Series*. Teachers College Press. New York.
- Nasution. (2003). *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Nasution. (2005). *Teknologi Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Nugroho, D. Riant, (2003). *Reinventing Pembangunan Menata Ulang Paradigma Pembangunan untuk Membangun Indonesia Baru dengan Keunggulan Global*. PT. elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Nugroho, Iwan. (2011). *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Oetama, J., & Widodo, J. (1990). *Menuju masyarakat baru Indonesia: Antisipasi terhadap tantangan abad XXI*. Jakarta: Gramedia.
- Oetama, Jakob. (2012) "Arah Pendidikan Indonesia Ke Mana?", dalam *10 Windu Prof. DR. H.A.R, TILAAAR, M. SC.ED. PENDIDIKAN NASIONAL: Arah Kemana?*. Kompas Penerbit Buku, Jakarta.
- Parsons, Talcott and Robert F. Bales, (1955). *Family, Socialization and Interaction Process*, Glencoe, Illinois, Free Press. HQ734 P3

- Parsons, Talcott, (1967). *Sociological Theory and Modern Society*, New York, Free Press. HM51P37
- Parsons, Talcott, (1951). *The Social System*, New York, Free Press. HM51 P35
- Parsons, Talcott. (2005). *The Social System: With a New Preface by Bryan S. Turner*. Routledge. Taylor & Francis e-Library.
- Patton, M. Quin, (2002), *Qualitative Research and Evaluation Methods*, 3rd Edition, Sage Publications, California.
- Phan, Philip H, Sankaran, V and S. Ramakrishna, V. (2005). *Entrepreneurship In Emerging Regions around the World : Theory, Evidence and Implications*. Edward Elgar Publishing.Co. Massachusets.
- Poerwandari. E. Kristi (1998). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ramli, Rizal. (2009). *Pembaharuan dan Pemberdayaan. Permasalahan, Kritik, dan Gagasan Menuju Indonesia Masa Depan*. Jakarta: UI Pers.
- Rachman, Maman (2001). *Reposisi, Reevaluasi, dan Redefinisi Pendidikan Nilai Bagi Generasi Muda Bangsa*. Balitbang Dikti. Jakarta.
- Rahman, Arif. (2013). *Golden Era Indonesia (Sekarang atau tidak sama sekali)*. Penerbit Narasi. Yogyakarta.
- Ritzer, George (1992), *Sociological Theory, third edition*, New York, McGraw-Hill, . HM24 R4938.
- Robertson, Roland. (1991). *Talcott Parsons : Theorist of Modernity Theory, Culture & Society*. Sage Publications. London.

- Robinson, Richard, (1986). *Indonesia, The Rice of Capital*, Allen and Unwin. Sydney.
- Sanjaya, Wina. (2009). *Strategi Pembelajaran Berorientasi pada Standar Proses Pendidikan*. Kencana Pranada Media Group. Jakarta.
- Sanusi, Ahmad (1999). *Model Pendidikan Kewarganegaraan Negara Menghadapi Perubahan dan Gejolak Sosial*. Makalah dipresentasikan pada Conference on Civic Education for Civil Society, di Bandung.
- Sassen, Saskia, (2007), *A Sociology Of Globalization*, Contemporary Societies Series, W.W. Norton & Company Ltd, Castle House, London.
- Schenker, Jason. (2020), Masa Depan Dunia Setelah Covid-19, (perubahan, tantangan dan peluang di Berbagai Sektor Kehidupan Pasca-Pandemi). Alvabet., Tangerang Selatan.
- Semiawan Conny R. Prof. (em). (1998) *Human Capacity Development Optimizing Excellence Through the Life-Span, Special Education Conference*, University of Brunei Darussalam.
- Soegito, A.T., dkk. (2011). *Pendidikan Pancasila*. Pusat Pengembangan MKU & MKDK LP3 Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Soetopo, Hendayat. (2013), *Pendidikan (Untuk) Indonesia*, dalam Pengantara Pakar buku Lutfi, Mustafa dan Halim, Fathani A. (2013). *Hitam Putih Pendidikan (Menyngkap Realitas, Merajut Solusi)*. Universitas Brawijaya Press (UB Press). Malang.
- Soemardjan, Selo. (2009). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Komunitas Bambu, Yogyakarta.

- Somantri, Nu'man. (1969), *Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah*, Bandung : Badan Penerbit IKIP Bandung.
- Somantri, Nu'man. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung : PT Remaja Rosda karya.
- Sugiyono, (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Cetakan Ke 8). Alfabeta, Bandung.
- Stanislav, Andreski (1989), *Max Weber: Kapitalisme, Birokrasi dan Agama*. PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Suyanto, (2001). *Formula Pendidikan Nasional Era Global*. Makalah. Disajikan dalam simposium pendidikan nasional dan munas I alumni PPS.UM. di Malang, 13 Oktober 2001.
- Suryadi, Ace. (2002). *Pendidikan, Investasi SDM, Dan Pembangunan: Isu, Teori, Dan Aplikasi*. Balai Pustaka. Jakarta
- Suryadi, Ace. (2012). *Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan : Isu Teori dan Aplikasi Untuk Pembangunan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Indonesia*. Widya Aksara Press. Bandung.
- Suryana, (2013), *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang*, Salemba Empat, Jakarta.
- Susanti, Dewi. (2012). "Inovasi dan Penelitian Bagi Pemerataan Pendidikan Berkualitas". dalam *10 Windu Prof. DR. H.A.R, TILAAAR, M. SC.ED PENDIDIKAN NASIONAL: Arah Kemana?*". Kompas Penerbit Buku, Jakarta.
- Sutarto, dkk. 2008. *Buku Sekolah Elektronik, IPS untuk SMP/MTs Kelas VIII*, Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta

- Sutjipto. (2012). “Manajemen Pendidikan: Beberapa Masalah Dalam Koordinasi Dalam Kebijakan dan Praksis Pendidikan Indonesia”. dalam *10 Windu Prof. DR. H.A.R, TILAAR, M. SC.ED PENDIDIKAN NASIONAL: Arah Kemana?*”. Kompas Penerbit Buku, Jakarta.
- Tilaar, H.A.R. (1990). *Pendidikan Dalam Pembangunan Nasional Abad XXI*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Tilaar, H.A.R. (1998). *Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan*, PT. Remaja Kosdakarya. Bandung.
- Tilaar, H.A.R. (2000). *Pendidikan, kebudayaan, dan masyarakat madani Indonesia: Strategi reformasi pendidikan nasional*. PT. Remaja Kosdakarya. Bandung.
- Tilaar, H.A.R. (2000). *Paradigma baru pendidikan nasional*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Tilaar, H.A.R. (2012). *Perubahan Sosial dan Pendidikan, (Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia)*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta
- Toffler, Alvin, (1992), *Gelombang Ketiga*, Bagian Kedua, Cetakan kedua, (Alihbahasa Sri Koesdiyantinah). PT. Pantja Simpati, Jakarta.
- Turner, Jonathan H. (1991), *The Structure of Sociological Theory, fifth edition*, Belmont, Ca., Wadsworth.
- Umar, Husein. (2010). *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan (Paradigma Positivistik dan Berbasis Pemecahan Masalah)*, Rajawali Pers, (Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada), Jakarta.

Wijayanti, W dan Ananto, P. (2002). *Pendidikan Keterampilan Hidup*, Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Winataputra, Udin S. (2010), *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Pendidikan Untuk mencerdaskan Kehidupan Bangsa: Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis*. Widya Aksara Press. Bandung.

Jurnal

Adman, (2005), *Manajemen Pendidikan Nasional (Strategi dan Upaya Menghadapi Tantangan Globalisasi Melalui Pendidikan)*, Jurnal Edukatif Vol -1 Nomor 1, 2005, Dinas Pendidikan Propinis Jawa Barat, Bandung.

Alam, Gazi Mahabubul. (2009). *The Role of Science and Technology Education at network age population for sustainable development of Bangladesh through human resources development*. Dalam Scientific Research and Essay Vol.4.

Anggraini, Nenny, 2008. *Industri Kreatif*, Jurnal ekonomi Desember 2008 Volume XIII No. 3 hal. 144-151.

Atmanti, Hastarini Dwi. (2005). *Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan*. Dalam Jurnal Dinamika Pembangunan Vol. 2 No 1. 30-39

Beach, D. P. (1982). *A Training Program to Improve Work Habits*. Journal of Epsilon PiTau 8/2, 69-74

Becker, Gary S. (1962). Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis. Dalam *The Journal of Political Economy*, Vol. 70, No. 5, Part 2.

- Ben-Porath, Yoram. (1967). *The Production of Human Capital and the Life Cycle of Earnings*. Dalam *The Journal of Political Economy*, Vol. 75. No 4. University of Chicago Press. Chicago.
- Chrisiana, Wanda (2005), *Upaya Penerapan Pendidikan Karakter Bagi Mahasiswa*, Jurnal Teknik Industri Vol 7. No. 1, Hal 83 – 90, Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Coleman, James S. (1988). “*Social Capital in the creation of Human Capital*”. Dalam *The American Journal of Sociology*, vol. 94, Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure.
- Dharyanto, Arif, (2009). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*. Badan Kepegawaian Negara, Jakarta.
- Pramudia, Joni Rahmat. (2006). “*Orientasi Pendidikan: Perlunya Reorientasi Posisi Pendidik dan Peserta didik*”. dalam *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* Vol.3 No.1.
- Quiggin, J. (1999), “Human capital theory and education policy in Australia”, dalam *Australian Economic Review* 32(2), 130-44
- Schultz, Theodore W. (1960). “*Capital Formation By Education*”. *The Journal of Political Economy* Vol LXVIII. No. 6. University of Chicago
- Schultz, Theodore W. (1961). “*Investment in Human Capital*”. dalam *The American Economic Review*. American Economic Association.
- Singh, D. dan Kaur, J. (2013). “*Life Skills among adolescents: A study of Sangrur district of Punjab*”. Dalam *International Journal of Education & Management Studies*, Volume 3, Issue 2. Indian Association of Health, Reseach & Welfare

Trilling, Bernie and Fadel, Charles. 2009. 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times, John Wiley & Sons, 978-0-47-055362-6.

Trilling, Bernie and Hood, Paul. 1999. Learning, Technology, and Education Reform In The Knowledge Age, (Online), (https://www.wested.org/online_pubs/learning_technology.pdf), diakses tanggal 11 Mei 2016

Untari, S. et al. (2010). “*Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Deep Dialogue/Critical Thinking Melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan Siswa SD di Jawa Timur*”, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Tahun 23 Nomor 2.

Disertasi

Samsuri. (2010). *Transformasi Gagasan Masyarakat Kewargaan (Civil Society) Melalui Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia*. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.

Sapriya, (2007), Disertasi Doktor Ilmu Kependidikan dalam Bidang IPS, dengan judul: “*Perspektif Pemikiran Pakar Tentang Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembangunan Karakter Bangsa*”, Sekolah Pasca Sarjana UPI, Bandung, 2007.

Winataputra, Udin S. (2001). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi*. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung

Dokumen

Badan Penelitian dan Pengembangan Kurikulum. Kementerian Pendidikan Nasional (2010). Bahan Pelatihan: *Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-nilai Budaya untuk membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa*.

Badan Penelitian Statistik. Keadaan Ketenagakerjaan (2011). Berita Resmi Statistik No. 74/11/Th. XIV, 7 November 2011

Badan Standar Nasional Pendidikan. 2010. *Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI* Versi 1.0

Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Konsep Pendidikan Kecakapan Hidup*. Direktorat pendidikan dasar dan menengah kejuruan.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2004). *Strategi Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 2003 – 2010*. Departemen Pendidikan Nasional, Republik Indonesia, Direktorat Jenderal PendidikanTinggi.

Laksono, Agung. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, (2012). Siaran Pers Nomor : 43/Humas Kesra/XI/2012.

Nan-Zhao, Z. 2006. *Revisiting 4 Pillars of Learning. Managing Curriculum Change: Seminar-Workshop 7-9 June 2006*, PSSC, Quezon City, Philippines.

Pangestu, Maria Elka. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, (2012). Siaran Pers Nomor : 43/Humas Kesra/XI/2012.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Artikel dan Internet

<http://www.antaraneews.com/berita/385688/kualitas-penduduk-indonesia-urutan-121-dunia>, (16 July 2013)

<http://ssr11.uchicago.edu/PRELIMS/Theory/parsons.html>. (20 Desember 2011)

<http://www.pnpm-pisew.org/admin/files/Artikel-PISEW/PENDIDIKAN%20SEBAGAI%20INVESTASI.pdf>. (30 Desember 2011)

<http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2011/04/INVESTASI-MODAL-MANUSIA-jurnal.2010.pdf>. (30 Desember 2011)

<http://id-id.facebook.com/pages/DUKUNG-PENDIDIKAN-ENTREPRENEUR-MASUK-KURIKULUM-SEKOLAH/252612228267>. (30 Desember 2011)

[http://www.kumoro,staff.ugm.go.ac.id](http://www.kumoro.staff.ugm.go.ac.id)) (11 November 2013)

<http://www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf>. (30 Desember 2011)

<http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2011/06/29/konsep-kewirausahaan-dan-pendidikan-kewirausahaan/>. (30 Desember 2011)

<http://www.radarlampung.co.id/read/opini/40085-pendidikan-kewirausahaan-membentuk-karakter-bangsa>. (30 Desember 2011)

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Michels (4 November 2013)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kewirausahaan/>. (30 Desember 2011)

- <http://en.wikipedia.org/wiki/Entrepreneurship/>. (30 Desember 2011)
- http://en.wikipedia.org/wiki/Entrepreneurship_education. (30 Desember 2011)
- <http://www.2020insight.net/Docs4/PeopleSkills.pdf> (15 Juli 2010)
- <http://kalbar.antaraneews.com/berita/311603/mendikbud-buku-kurikulum-2013-dikirim-ke-sekolah> (26 Juni 2013).
- https://www.excelsior.edu/Excelsior_College/Publications/Skills_Employers_Seek_16.pdf (15 Juli 2010)
- <http://www.nogaps.nl/pdf/2004Awareness.pdf> Wikipedia, 2010. Soft Skills. (30 Juli 2010)
- <http://finance.detik.com/read/2012/07/05/122510/1958279/4/kasihana-ada-493000-sarjana-menganggur-di-indonesia> (30 Juni 2012)
- <http://kamusbahasaindonesia.org/rekonstruksi>. (30 Desember 2011)
- <http://beritamometer.com/pertumbuhan-ekonomi-2014-meningkat/>
- Berita Resmi Statistik No. 16/02/Th. XVII, 5 Februari 2014. [http:// www.bps.go.id/brs_file/pdb_05feb14.pdf](http://www.bps.go.id/brs_file/pdb_05feb14.pdf) (15 Maret 2014)
- Coates, D.E. 2006. *People Skill Traning: Are You Getting a Return on Your Investmen*.
- Khoiruddin Bashori. (2010). *Menata Ulang Pendidikan Karakter Bangsa*. Media Indonesia.com, (3 Mei 2010)
- Nurohman, Taufik (2011). *Merit System Dalam Birokrasi Indonesia* taufiknurohman25.blogspot.com/.../merit-system-dalam-birokrasi-indon... 11 Feb 2011. (4 November 2013).

- Nurul Zuriah, 2009, *Kajian Teoritik Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis-Dialogis Mahasiswa Melalui Pendekatan Deep dialogue dan Critical Thinking (DDCT) Dalam Perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional.
- Rino, (2010) Pengajaran Ekonomi Pancasila sebuah inovasi kurikulum, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
- Rumate, F.A. (2005), *Pendekatan Konstruktivisme Dalam Pembelajaran*, P3AI-UNHAS, Makassar.
- Ruben, B.D. and DeAngelis, J. (1998). *Succeeding at work: Skills and competencies needed by college and university graduates in the work place*. Paper presented at the Total Quality Forum, VIII Transforming Our Organizations through University/Industry Collaboration, University of Wisconsin-Madison, October 21-22, 1998.
- Setyani, Turita Indah, (2009), *Bhinneka Tunggal Ika sebagai Pembentuk Jati Diri Bangsa*. Konferensi Nasional dan Pembentukan Organisasi Profesi Pengajar Bahasa, Sastra, Budaya, dan Seni Daerah se-Indonesia Di Yogyakarta 8 - 9 Agustus 2009
- Sharma, A. 2009. *Professional Development for Teachers*. (30 Juli 2013) dari <http://schoolofeducators.com/2009/02/importance-of-soft-skills-developmentin-education>
- Vogt, P. 2004. *Awareness to Action: Connecting Employee to the Bottom line*. Disitasi 15
- Zulaikha, Ellya, (2008). *Transformasi IKM Kerajinan Tradisional Menjadi Industri Kreatif*, Disampaikan pada Seminar Internasional Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Tradisi, di ISI Solo 17 Desember 2008.



Dr. Purnomo Ananto. Saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Jakarta (Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif) dan juga dosen yang mengampu Mata Kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan serta Entrepreneurship. Selain itu yang bersangkutan juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI) 2019 - 2023. Yang bersangkutan Lulus Doktor dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, sampai saat ini penulis cukup aktif sebagai penulis, baik untuk buku untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Pendidikan Tinggi, khususnya buku

dibidang Pancasila dan Kewarganegaraan, Life Skills Education serta Soft Skills. Salah satu buku yang ditulisnya adalah Rekonstruksi Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mengembangkan Soft Skills dan Karakter Sumber Daya Manusia Industri Kreatif.